



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



ANALISIS POTENSI DAN PERMINTAAN (DEMAND) PEKERJA LULUSAN SMK MENURUT BIDANG KEAHLIAN LULUSAN SMK DI TINGKAT PROVINSI

PROVINSI





ANALISIS POTENSI DAN DEMAND PEKERJA LULUSAN SMK MENURUT BIDANG KEAHLIAN LULUSAN DI TINGKAT PROVINSI

PENERBIT

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



ANALISIS POTENSI DAN DEMAND PEKERJA LULUSAN SMK MENURUT BIDANG KEAHLIAN

Pengarah:

Dr. Ir. M Bakrun, MM
Direktur Pembinaan SMK

Penanggung Jawab

Arie Wibowo Khurniawan, S.Si. M.Ak.
Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK

Ketua Tim

Chrismi Widjajanti, SE, MBA
Kasi Program, Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK

Tim Penyusun

Paksi C.K. Walandouw
Triasih Djutaharta
Asmanedi
Nurhadi Wiyono
Dewi Prihastuti
Ratna Indrayanti
Aisha Khurniasari
Arie Wibowo Khurniawan

Editor

Pipin Dwi Nugraheni
Muhammad Abdul Majid

Desain dan Tata Letak

Ari
Muhamad Raidinoor Pasha

Penerbit

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
*Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E, Lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270*

ISBN 978-602-5517-56-3



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas terselesainya Buku Pedoman Teknis yang bertemakan “Analisis Potensi dan Permintaan (*Demand*) Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian Lulusan SMK di Tingkat Provinsi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Visi 2045 yang menargetkan peningkatan pendidikan vokasi yang berorientasi pada *demand-driven*. Penyerapan pekerja lulusan SMK erat kaitannya dengan perkembangan dan peran kegiatan ekonomi sektoral. Struktur penyerapan pekerja lulusan SMK di tingkat provinsi akan sangat berbeda karena potensi ekonomi sektoral yang juga berbeda antar provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, guna mengetahui potensi dan permintaan lulusan SMK antar provinsi, kajian ini bertujuan untuk mengestimasi elastisitas penyerapan tenaga kerja lulusan SMK menurut lapangan usaha, memetakan sektor yang banyak menyerap pekerja lulusan SMK, mengkaji Program Keahlian SMK yang dibutuhkan di provinsi yang memiliki potensi dalam penyerapan pekerja lulusan SMK, dan permasalahan serta tantangan apa yang dihadapi untuk memenuhi permintaan pekerja lulusan SMK.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang telah memberikan kepercayaan kepada Lembaga Demografi, FEB UI, untuk melakukan penelitian tersebut. Tidak lupa, ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada narasumber yang telah membantu memberikan arahan kajian ini, Padang Wicaksono, selain itu tim peneliti yang telah melaksanakan penelitian ini, yaitu Paksi C.K. Walandouw, Triasih Djutaharta, Asmanedi, Nurhadi Wiyono, Dewi Prihastuti, Ratna Indrayanti, Aisha Khurniasari, serta pihak-pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini terimakasih atas kerjasamanya.

Terimakasih juga tim Direktorat Pembinaan SMK untuk penyempurnaan laporan penelitian ini. Semoga kajian ini bermanfaat dalam merancang perencanaan permintaan lulusan SMK di Indonesia.

Depok, September 2019

Turro S. Wongkaren, Ph.D
Kepala Lembaga Demografi

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	2
<i>DAFTAR ISI</i>	3
<i>BAB 1 PENGANTAR</i>	5
<i>BAB 2 KONDISI PEREKONOMIAN DAN TENAGA KERJA INDONESIA</i>	6
2.1. Kondisi Perekonomian Sektoral dan Tenaga Kerja di Indonesia.....	6
2.1.1 Kondisi Perekonomian Sektoral.....	6
2.1.2 Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia.....	8
2.2. Kondisi Perekonomian Sektoral dan Lulusan SMK di 34 Provinsi.....	23
2.2.1. Provinsi Aceh.....	23
2.2.2. Provinsi Sumatera Utara.....	29
2.2.3. Provinsi Sumatera Barat.....	36
2.2.4. Provinsi Riau.....	44
2.2.5. Provinsi Jambi.....	51
2.2.7. Provinsi Bengkulu.....	66
2.2.8. Provinsi Lampung.....	74
2.1.9. Provinsi Bangka Belitung (Babel).....	82
2.2.10 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).....	90
2.2.11. Provinsi DKI Jakarta.....	97
2.2.12. Provinsi Jawa Barat (Jabar).....	104
2.2.13. Provinsi Jawa Tengah.....	112
2.2.14. Provinsi DIY.....	120
2.2.15. Provinsi Jawa Timur.....	128
2.2.16. Provinsi Banten.....	135
2.1.17. Provinsi Bali.....	142
2.2.18. Provinsi NTB.....	150
2.2.19. Provinsi NTT.....	157
2.2.20. Provinsi Kalimantan Barat.....	164

2.2.21. Provinsi Kalimantan Tengah	171
2.2.22. Provinsi Kalimantan Selatan.....	178
2.2.23. Provinsi Kalimantan Timur.....	186
2.2.24. Provinsi Kalimantan Utara	193
2.2.25. Provinsi Sulawesi Utara.....	200
2.2.26. Provinsi Sulawesi Tengah.....	207
2.2.28. Provinsi Sulawesi Tenggara.....	223
2.2.29. Provinsi Gorontalo.....	230
2.2.30. Provinsi Sulawesi Barat	237
2.2.31. Provinsi Maluku	246
2.2.32. Provinsi Maluku Utara	254
2.2.33. Provinsi Papua Barat.....	262
2.2.34. Provinsi Papua	270

BAB 1 PENGANTAR

Dua dari empat Pilar Visi Indonesia 2045 adalah pembangunan Sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan yang keduanya harus saling bersinergi (Bappenas, 2017). Visi 2045 menargetkan proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah keatas mencapai 90% dan meningkatkan pendidikan vokasi yang berorientasi pada *demand-driven*. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu strategi pembangunan pendidikan menengah difokuskan pada peningkatan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja.

Pada tahun 2018, lulusan SMK yang bekerja sebanyak 13,68 juta orang, yang sebagian besar (57,4%) berada di Pulau Jawa. Penyerapan pekerja lulusan SMK erat kaitannya dengan perkembangan dan peran kegiatan ekonomi sektoral. Struktur penyerapan pekerja lulusan SMK di tingkat provinsi akan sangat berbeda karena potensi ekonomi sektoral yang juga berbeda antar provinsi di Indonesia.

Kajian ini bertujuan untuk mengestimasi elastisitas penyerapan tenaga kerja lulusan SMK menurut lapangan usaha, memetakan sektor yang banyak menyerap pekerja lulusan SMK, serta mengkaji bidang Keahlian SMK yang dibutuhkan di propinsi yang memiliki potensi dalam penyerapan pekerja lulusan SMK.

Outcome kajian ini adalah sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan SMK untuk menambah/mengembangkan bidang keahlian yang sesuai dengan keunggulan wilayah/provinsi dalam penyerapan pekerja dan mengurangi paket-paket keahlian yang kurang sesuai dengan potensi/keunggulan ekonomi di provinsi tersebut. Hasil studi ini juga diharapkan memberikan informasi kepada Direktorat Pembinaan SMK tentang lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMK dan bidang keahlian dimiliki pekerja yang terserap di provinsi-provinsi yang potensi menyerap tenaga kerja lulusan SMK.

BAB 2

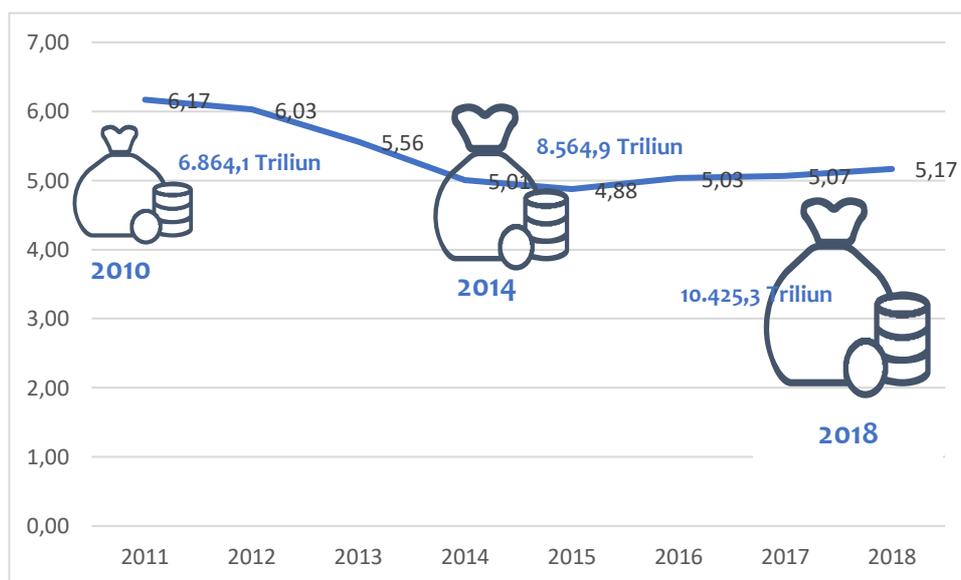
KONDISI PEREKONOMIAN DAN TENAGA KERJA INDONESIA

2.1. Kondisi Perekonomian Sektoral dan Tenaga Kerja di Indonesia

2.1.1 Kondisi Perekonomian Sektoral

Uraian pembahasan kondisi perekonomian sektoral diawali dengan penyajian perkembangan nilai PDB dan Pertumbuhan PDB di Indonesia selama kurun waktu sembilan tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 2.1.1 memperlihatkan bahwa nilai PDB Indonesia kian mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada tahun 2010 nilai PDB Indonesia (berdasarkan harga konstan) adalah sebesar 6.864,1 Triliun Rupiah dan meningkat menjadi 10.425,3 Triliun Rupiah di Tahun 2018. Meski demikian, tingkat pertumbuhan PDB relatif konstan yakni pada angka 5-6 persen. Selama kurun waktu 2011-2018, pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2011 yakni sebesar 6,17 persen, selanjutnya cenderung mengalami penurunan hingga Tahun 2015, dan sedikit mengalami peningkatan setelah tahun 2015.

Gambar 2.1.1
Perkembangan Nilai PDB dan Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2010-2018

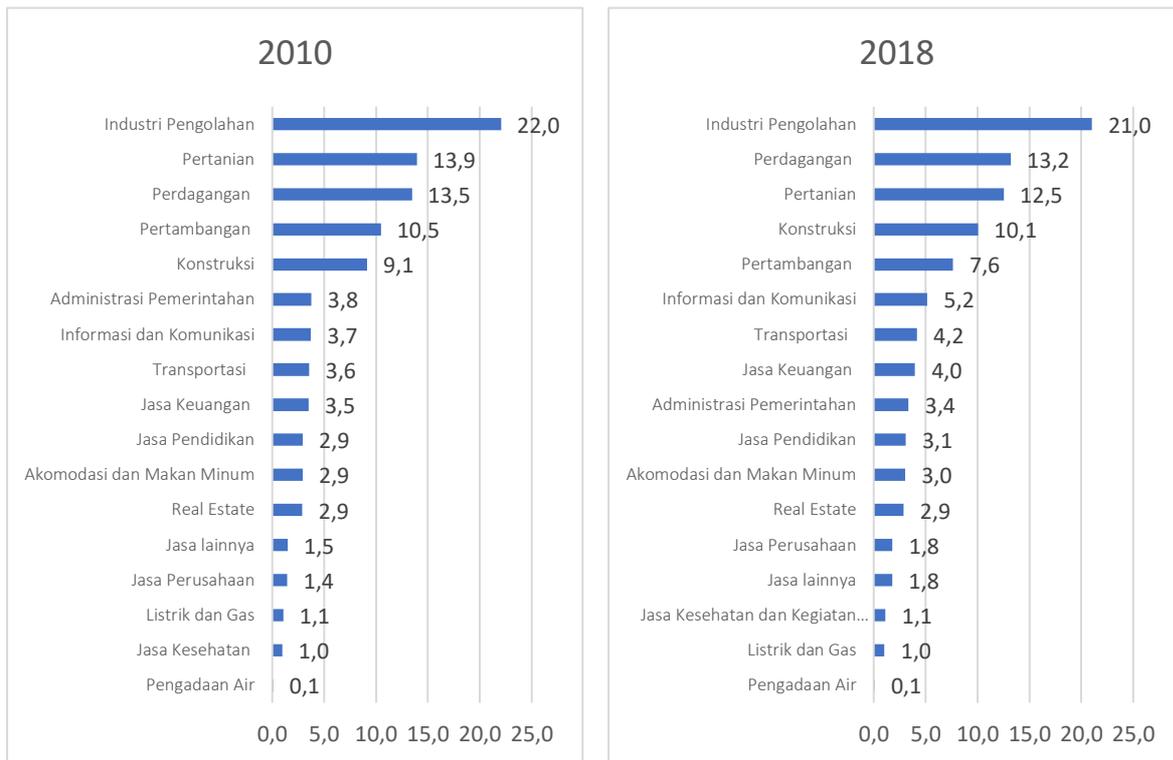


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, selama kurun waktu 2010-2018, terdapat perubahan struktur perekonomian di Indonesia yang ditunjukkan dengan perubahan kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDB, meskipun lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih sama yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi.

Gambar 2.1.2

Kontribusi PDB Menurut Lapangan Usaha di Indonesia Tahun 2010 dan 2018 (%)

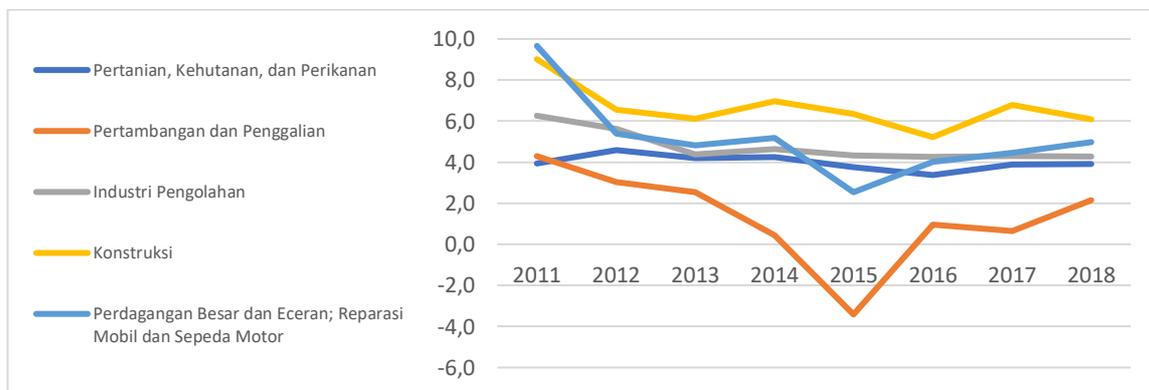


Sumber: BPS, 2010 & 2018

Apabila dilihat lebih rinci, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami penurunan, pertumbuhannya pun cenderung konstan selama kurun waktu 2011-2018. Pertumbuhan sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup tajam dan di Tahun 2015 bernilai negatif, pun kontribusi mengalami penurunan. Di sisi lain kontribusi sektor konstruksi mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhannya di atas empat sektor lainnya selama 2012-2018.

Gambar 2.1.3

Pertumbuhan 5 Sektor PDB Terbesar (dari 17 Sektor Ekonomi), 2011-2018

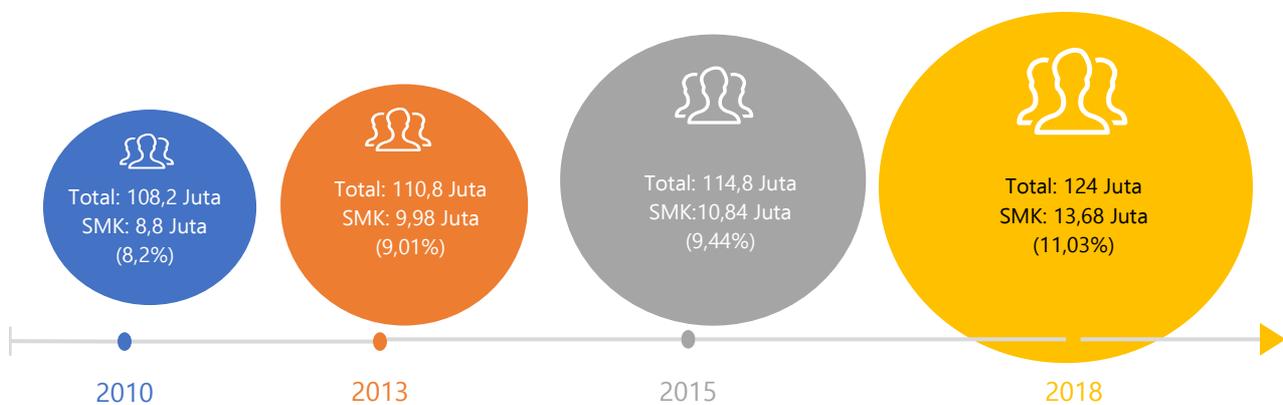


Sumber: BPS, 2010 & 2018

2.1.2 Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia

Setelah membahas struktur kondisi perekonomian di Indonesia, pada bagian ini akan membahas kondisi tenaga kerja di Indonesia yang diawali dengan perkembangan kondisi tenaga kerja secara umum dan dilanjutkan dengan kondisi tenaga kerja lulusan SMK. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah tenaga kerja secara total, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah sebesar 108,2 juta tenaga kerja dan meningkat menjadi 124 juta di tahun 2018. Demikian pula tenaga kerja lulusan SMK meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, proporsi tenaga kerja lulusan SMK adalah 8,2 persen dan meningkat menjadi 11,03 persen di tahun 2018. Secara total, pertumbuhan Tenaga Kerja dari Tahun 2010 ke 2018 sekitar 14%; sedangkan pertumbuhan tenaga kerja lulusan SMK jauh lebih tinggi yakni sekitar 55%.

Gambar 2.1.4
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia



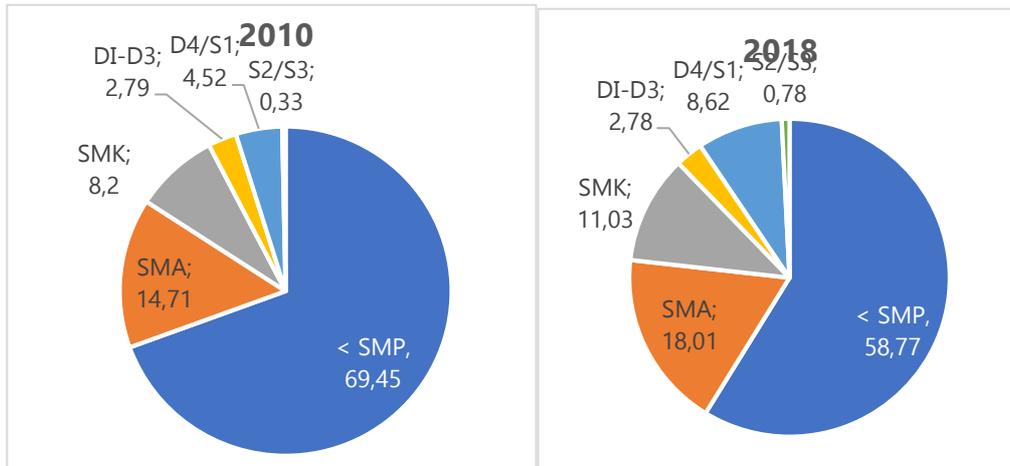
Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Masih menyoal perkembangan kondisi tenaga kerja di Indonesia, gambar di bawah ini menambahkan penjelasan di atas terkait kondisi tenaga kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan. Berdasarkan data Sakernas Tahun 2010 dan 2018 menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat serta tidak/belum tamat SD, meskipun persentasenya selama 2010-2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan lebih dari 10 persen dari 69,45 persen menjadi 58,77 persen.

Share tenaga kerja lulusan SMA lebih besar jika dibandingkan dengan tenaga kerja lulusan SMK, meski demikian, kenaikan *share* nya hampir sama yakni sekitar 3 persen. Di sisi lain, proporsi tenaga kerja lulusan diploma tidak mengalami perubahan yakni 2,79 persen di tahun 2010 menjadi 2,78 persen di tahun 2018.

Gambar 2.1.5

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010 dan 2018

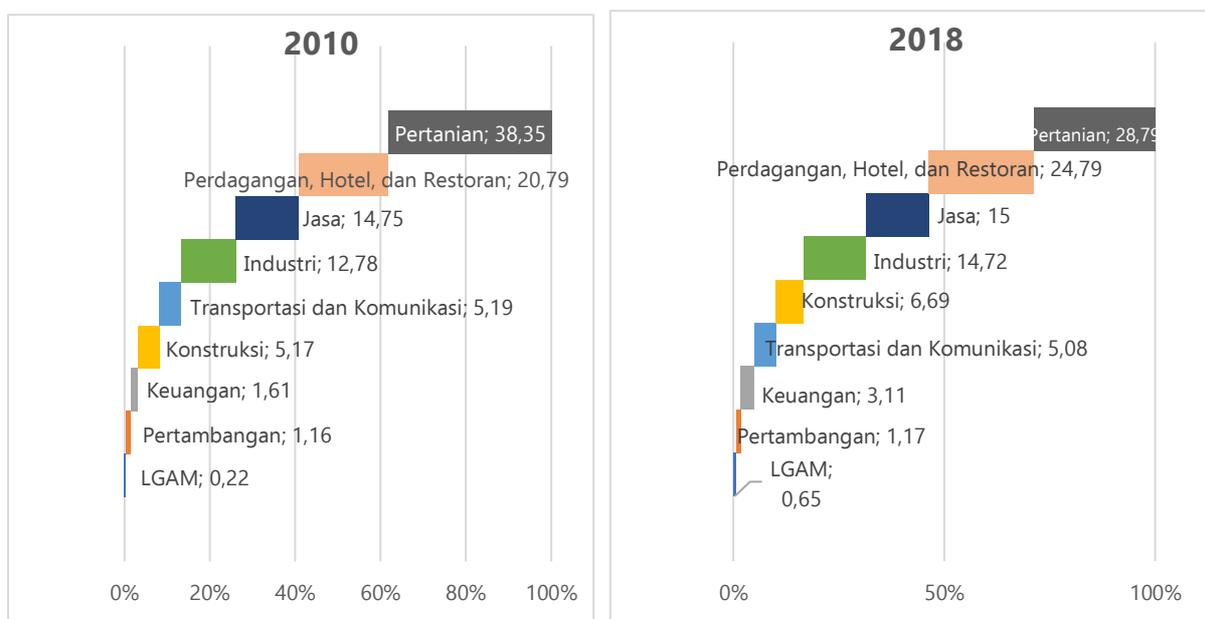


Sumber: Sakernas 2010 dan 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Pembahasan kondisi tenaga kerja selanjutnya adalah terkait dengan penyerapan tenaga kerja, yang mana diawali penyerapan tenaga kerja secara total, diikuti dengan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK. Gambar 2.1.5 memperlihatkan bahwa tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa yang proporsinya sekitar 70 persen. Meski demikian proporsi penyerapan sektor pertanian dalam kurun waktu 2010 ke 2018 mengalami penurunan yang signifikan yakni sekitar 10 persen, di tahun 2010, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian adalah sebesar 38,35 persen turun menjadi 28,79 persen di tahun 2018.

Gambar 2.1.5

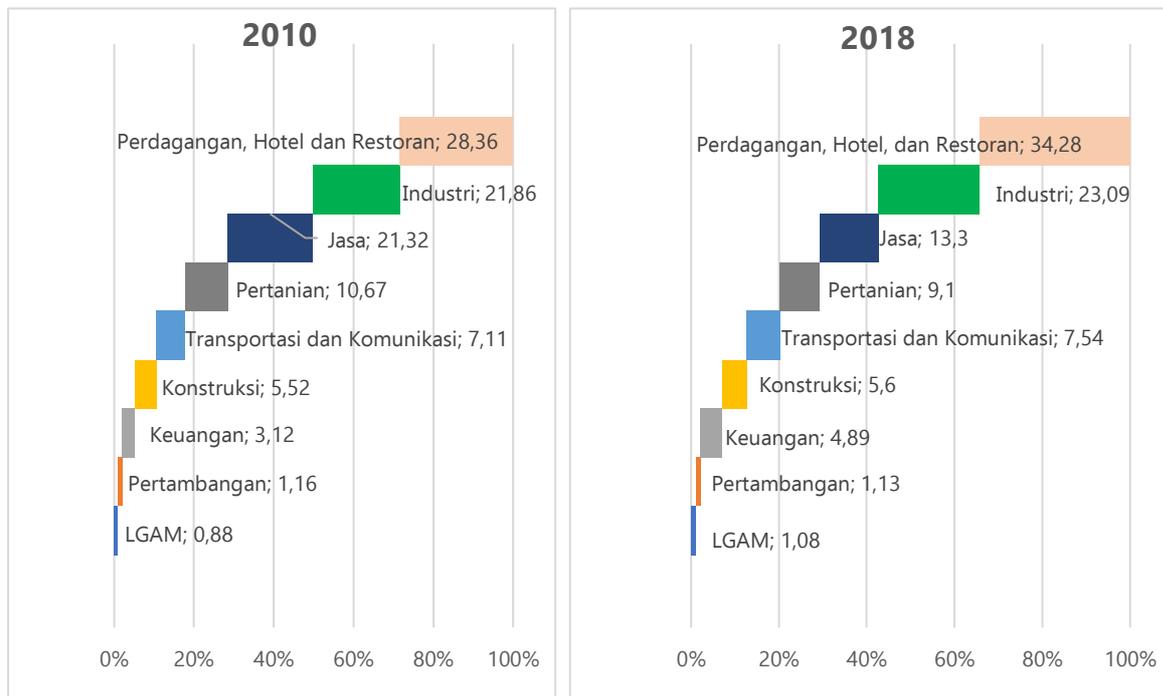
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 dan 2018



Sumber: Sakernas 2010 dan 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.1.5

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 dan 2018



Sumber: Sakernas 2010 dan 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, tiga dari sembilan sektor yang menyerap lulusan SMK paling besar adalah perdagangan, hotel dan restoran; industri; dan Jasa. Penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor perdagangan, hotel, dan restoran mengalami kenaikan yang cukup besar, di sisi lain penyerapan di sektor Jasa mengalami penurunan yang cukup tajam, sekitar 8 persen.

Pembahasan berikutnya terkait dengan kondisi tenaga kerja lulusan SMK adalah elastisitas permintaan tenaga kerja lulusan SMK. Elastisitas permintaan lulusan tenaga kerja SMK ini memperlihatkan bahwa bagaimana respon atau perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK terhadap adanya perubahan pertumbuhan sektor dalam perekonomian. Berdasarkan model elastisitas menunjukkan bahwa sektor yang memiliki elastisitas paling tinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa keuangan, yang memiliki elastisitas satu (1). Artinya, apabila kedua sektor tersebut bertumbuh satu persen, maka penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat satu persen; dan di sektor jasa keuangan meningkat 1,05 persen. Sektor yang memiliki elastisitas tertinggi lainnya adalah pertanian, industri, serta transportasi dan komunikasi, dengan nilai elastisitas berturut-turut sebesar 0,89; 0,88; dan 0,85.

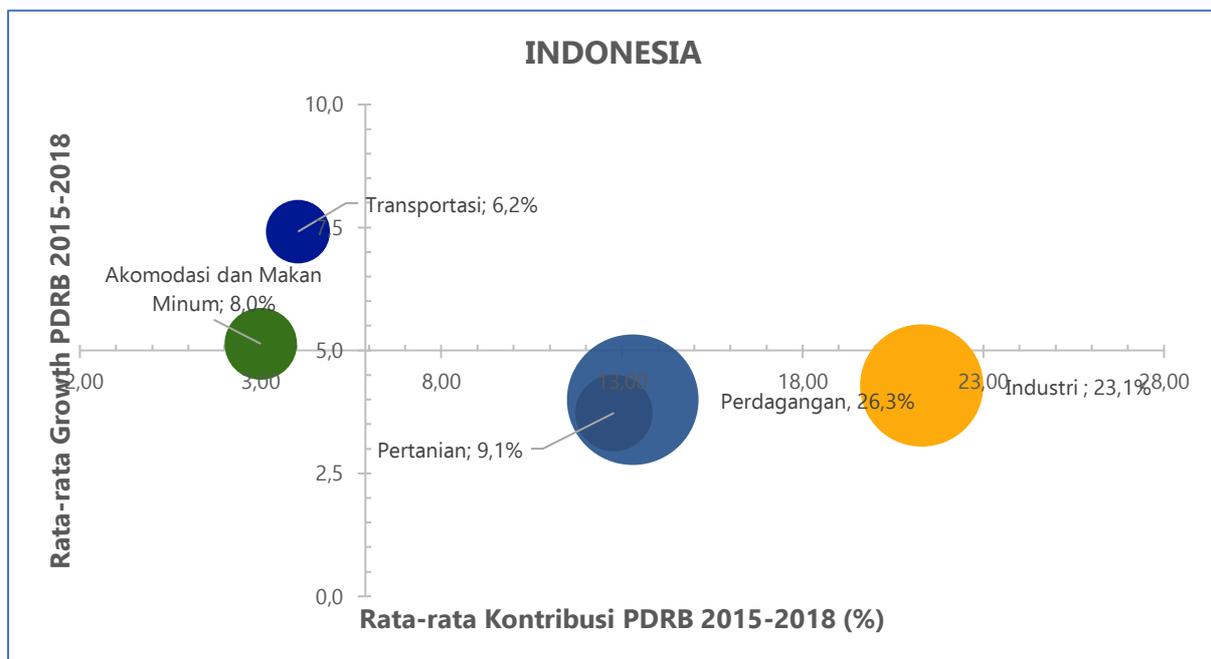
Tabel 2.1.1
Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK

Sektor	Elastisitas
Pertanian	0.89
Pertambangan	0.49
Industri	0.88
LGAM	0.66
Konstruksi	0.79
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.00
Transportasi dan Komunikasi	0.85
Jasa Keuangan	1.05
Jasa	0.52

Sumber: BPS, Sakernas 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Apabila dilihat menurut 17 sektor perekonomian, lima (dari 17 sektor) yang menyerap tenaga kerja lulusan SMK terbesar adalah sektor perdagangan (26,32 persen), industri pengolahan (23,09 persen), pertanian (9,10 persen), akomodasi makan dan minum (7,96 persen), dan transportasi (6,23 persen). Gambar 2.1.6 memperlihatkan peremetaan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK terbesar Tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi PDB Tahun 2015-2018. Adapun Titik tengah dari gambar di bawah merupakan rata-rata pertumbuhan dan kontribusi 17 sektor ekonomi dalam kurun waktu 2015-2018.

Gambar 2.1.6
Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018



Sumber: BPS, Sakernas 2015-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Apabila dilihat dari sisi kontribusi, sektor industri dan perdagangan kontribusi cukup jauh di atas rata-rata dengan nilai berturut-turut 21,3 persen dan 13,3 persen, namun tingkat pertumbuhannya di sekitar rata-rata yakni 4,8 persen dan 5,1 persen. Adapun sektor pertanian, memiliki kontribusi di atas rata-rata (12,8 persen), namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata pertumbuhan 17 sektor ekonomi (4,0 persen). Di sisi lain, sektor akomodasi, makan, dan minum serta transportasi memiliki kontribusi di bawah rata-rata 17 sektor ekonomi, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi untuk sektor transportasi (7,4 persen). Artinya, lima sektor terbesar yang menyerap lulusan SMK memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian dengan pertumbuhan yang masih positif meskipun tidak terlalu besar, kecuali sektor transportasi yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi (7,4 persen).

Lebih lanjut, masih terkait dengan lima dari sektor yang menyerap tenaga kerja lulusan SMK terbesar, yakni sektor industri; perdagangan; pertanian; akomodasi, makan dan minum; serta transportasi, pada bagian berikut akan menguraikan analisis LQ (*Location Quotient*) kelima sektor tersebut di 34 Provinsi. Adapun besaran nilai LQ menunjukkan keunggulan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK sektoral di satu provinsi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Gambar 2.1.7 memperlihatkan pemetaan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor industri. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa provinsi Kepulauan Riau, DIY, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Utara memiliki nilai LQ di atas satu (1) atau unggul dalam menyerap tenaga kerja di sektor industri dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 2.1.7

Pemetaan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Sektor Industri di 34 Provinsi: Analisis LQ

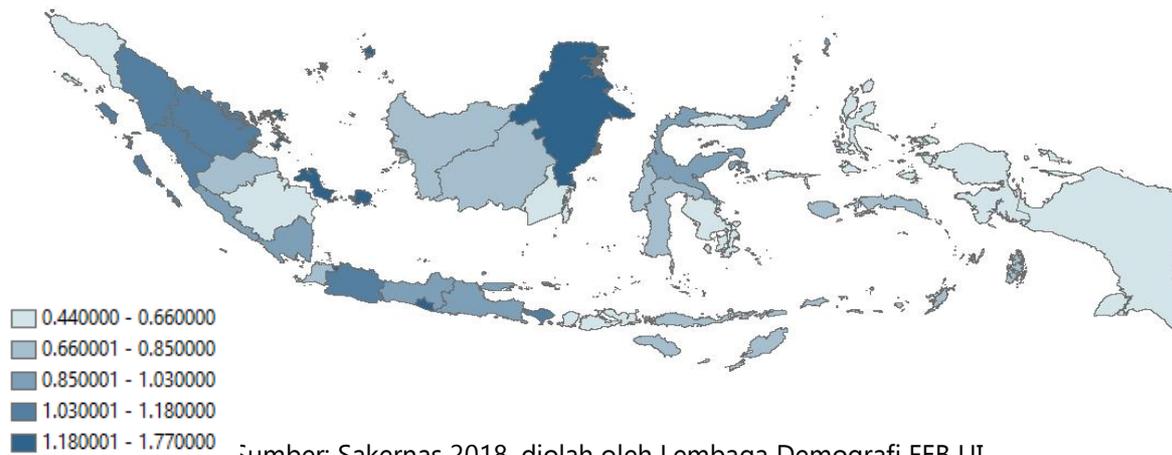


Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Sektor terbesar kedua yang menyerap lulusan SMK adalah sektor perdagangan. Gambar 2.1.8 memperlihatkan pemetaan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di sektor perdagangan. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa provinsi DIY, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Lampung memiliki nilai LQ di atas satu (1) atau unggul dalam menyerap tenaga kerja lulusan SMK di sektor perdagangan dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 2.1.8

Pemetaan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Sektor Perdagangan di 34 Provinsi:
Analisis LQ

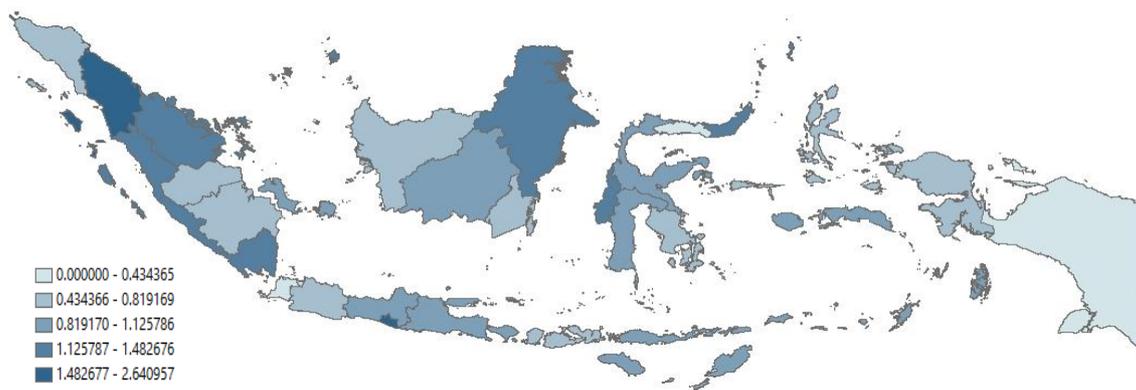


Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Selanjutnya, sektor pertanian merupakan sektor ketiga yang banyak menyerap lulusan SMK. Berdasarkan analisis LQ di dapatkan bahwa provinsi DIY, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riu, Bengkulu, Sulawesi Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Tengah unggul dalam menyerap tenaga kerja lulusan SMK di sektor pertanian dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 2.1.9

Pemetaan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Sektor Pertanian di 34 Provinsi:
Analisis LQ



Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.1.10

Pemetaan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Sektor Akomodasi, Makan dan Minum di 34 Provinsi: Analisis LQ



Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Sektor akomodasi, makan dan minum merupakan sektor keempat yang banyak menyerap lulusan SMK. Berdasarkan analisis LQ di dapatkan bahwa provinsi Kepulauan Riau, DIY, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Banten unggul dalam menyerap tenaga kerja lulusan SMK di sektor akomodasi, makan dan minum dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 2.1.11

Pemetaan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Sektor Transportasi di 34 Provinsi: Analisis LQ



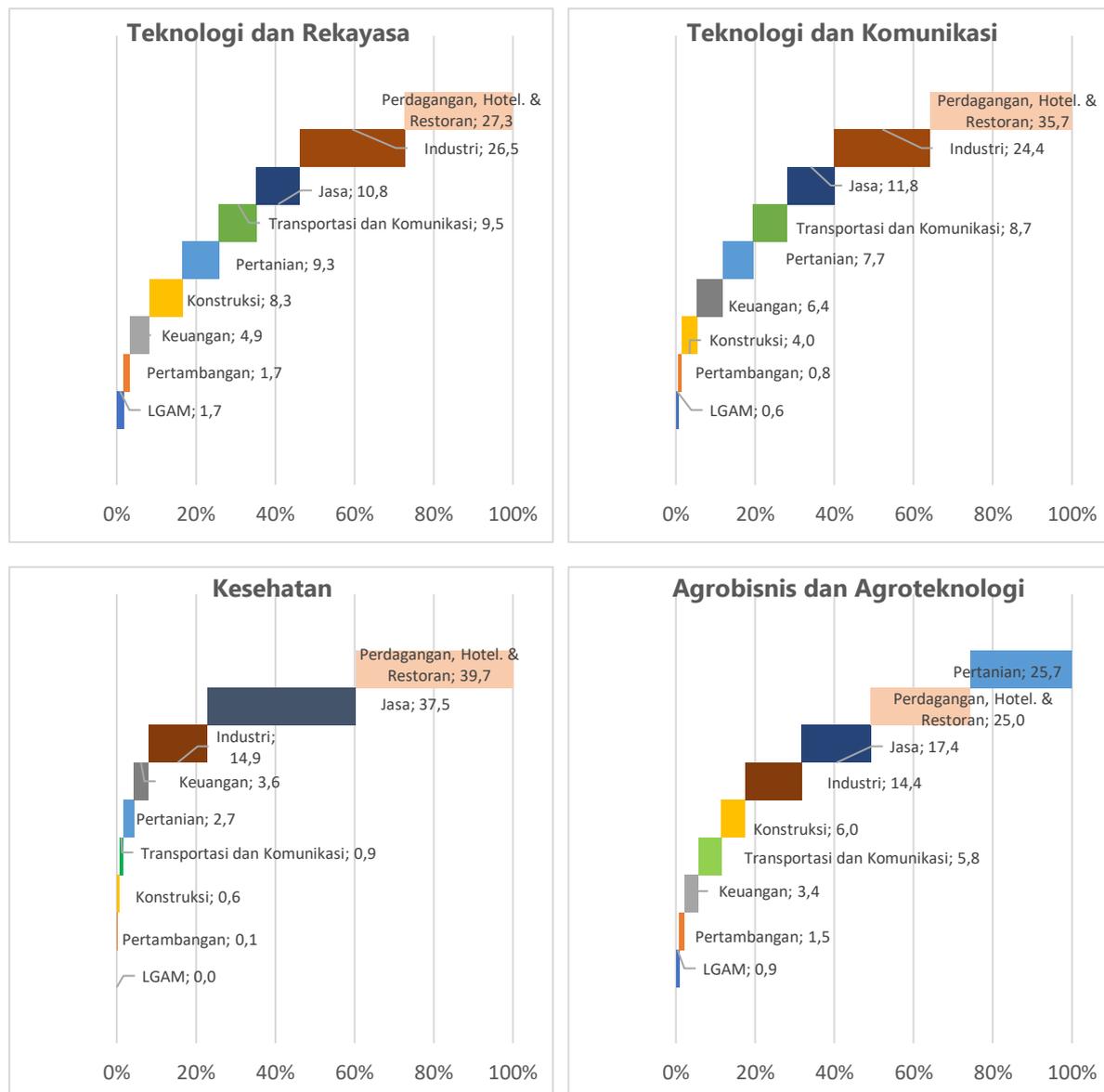
Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

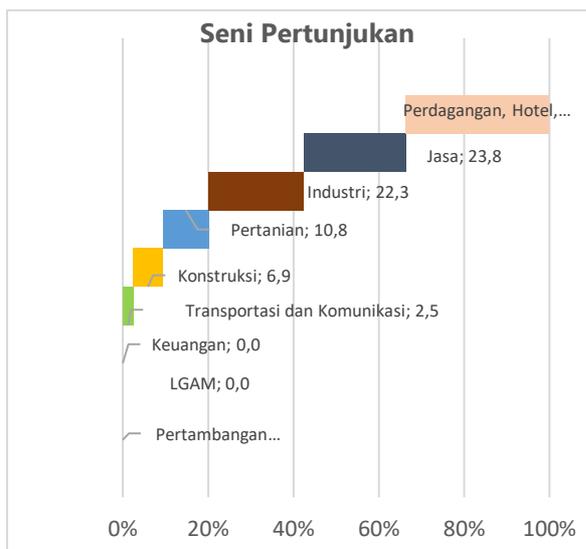
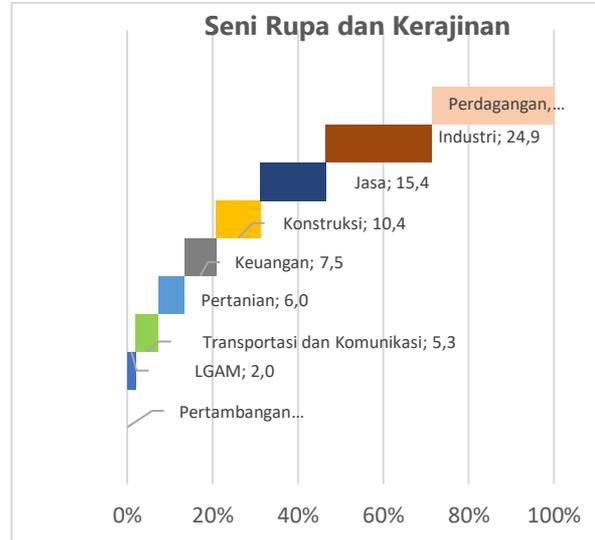
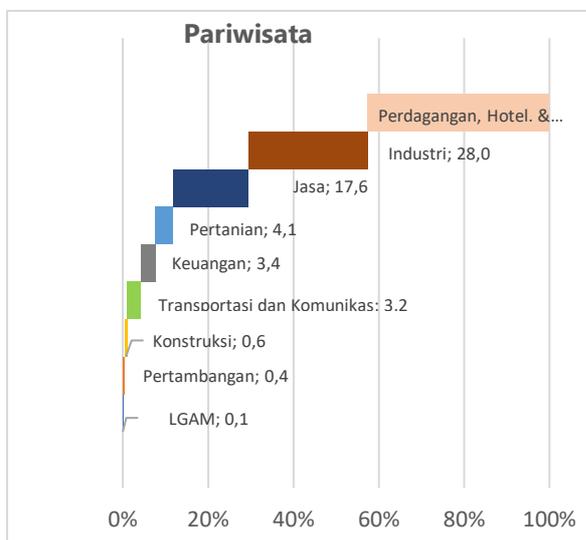
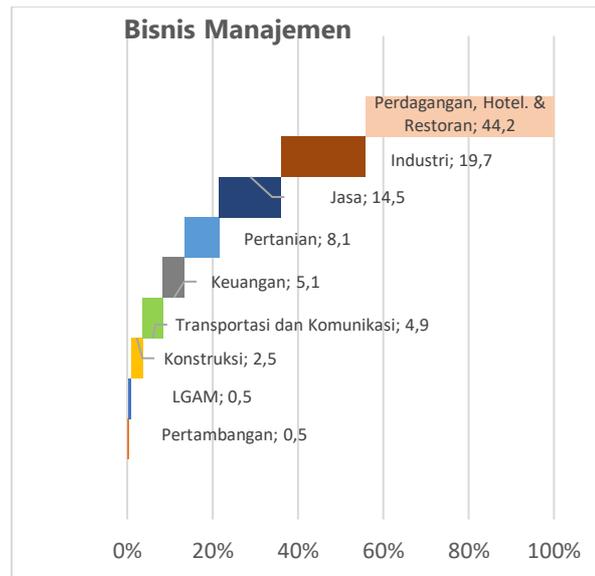
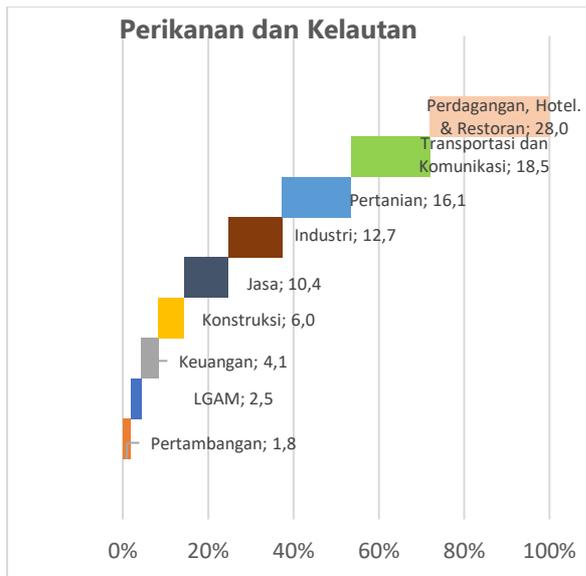
Terakhir, lapangan usaha yang banyak menyerap lulusan SMK adalah sektor transportasi. Gambar 2.1.11 memperlihatkan pemetaan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK sektor transportasi di 34 Provinsi. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa provinsi DIY, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, Bangka-Belitung, Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki nilai LQ di atas satu (1)

atau unggul dalam menyerap tenaga kerja lulusan SMK di sektor transportasi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Analisis lebih lanjut terkait dengan kondisi tenaga kerja di Indonesia adalah penyerapan tenaga kerja lulusan SMK menurut bidang keahlian dan lapangan usaha. Berdasarkan Gambar 2.1.12 memperlihatkan bahwa lapangan usaha yang paling banyak menyerap lulusan SMK adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada hampir semua bidang keahlian, kecuali bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi.

Gambar 2.1.12
Penyerapan Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian dan Lapangan Usaha di Indonesia, Tahun 2018





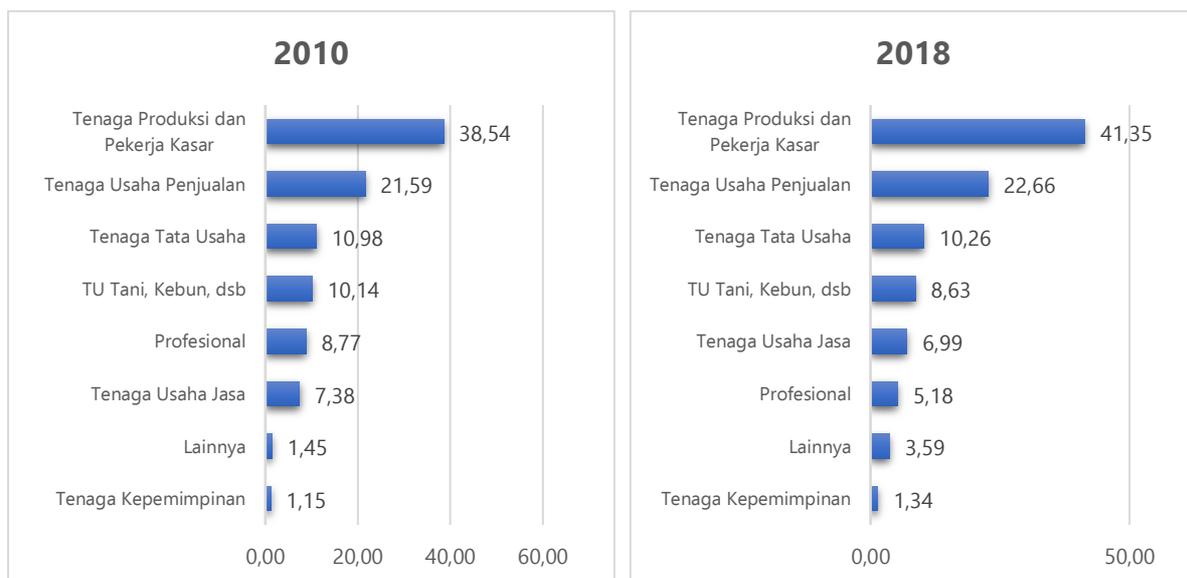
Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Dua sektor lainnya yang paling banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMK adalah sektor industri dan jasa pada hampir semua bidang keahlian, kecuali untuk lulusan bidang agrobisnis dan agroteknologi. Untuk lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi, lapangan usaha yang paling banyak menyerap adalah sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan jasa. Sedangkan untuk lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian perikanan dan kelautan, tiga sektor yang memiliki penyerapan paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, dan sektor pertanian. Di sisi lain, lapangan usaha yang penyerapan tenaga kerja lulusan SMK paling kecil adalah sektor pertambangan dan LGAM.

Pembahasan selanjutnya terkait penyerapan tenaga kerja adalah penyerapan tenaga kerja lulusan SMK menurut jabatan atau jenis pekerjaan. Berdasarkan Gambar 2.1.13 memperlihatkan bahwa mayoritas lulusan SMK terserap sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Jika dibandingkan antara Tahun 2010 dan 2018, persentase lulusan SMK yang memiliki jabatan tersebut persentasenya cenderung mengalami kenaikan, yakni 38,54 persen di tahun 2010 meningkat menjadi 41,35 persen di tahun 2018. Adapun tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki jabatan profesional cenderung mengalami penurunan, yakni 8,77 persen di tahun 2010 menjadi 5,18 persen di tahun 2018. Di sisi lain, hanya sebagian kecil sekitar satu persen lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan.

Gambar 2.1.13

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Jabatan Tahun 2010 dan 2018



Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Apabila dilihat menurut bidang keahlian, tenaga kerja produksi dan pekerja kasar masih mendominasi, kecuali lulusan SMK bidang kesehatan. Satu dari tiga lulusan SMK yang memiliki bidang kesehatan bekerja sebagai profesional, dan persentase terbesar kedua adalah sebagai tenaga usaha penjualan. Tenaga kerja SMK yang bekerja sebagai tenaga profesional yang persentasenya relatif tinggi juga terjadi pada lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian seni rupa dan kerajinan serta seni pertunjukan dengan persentase masing-masing 11,14 persen dan 17,95 persen.

Tabel 2.1.2

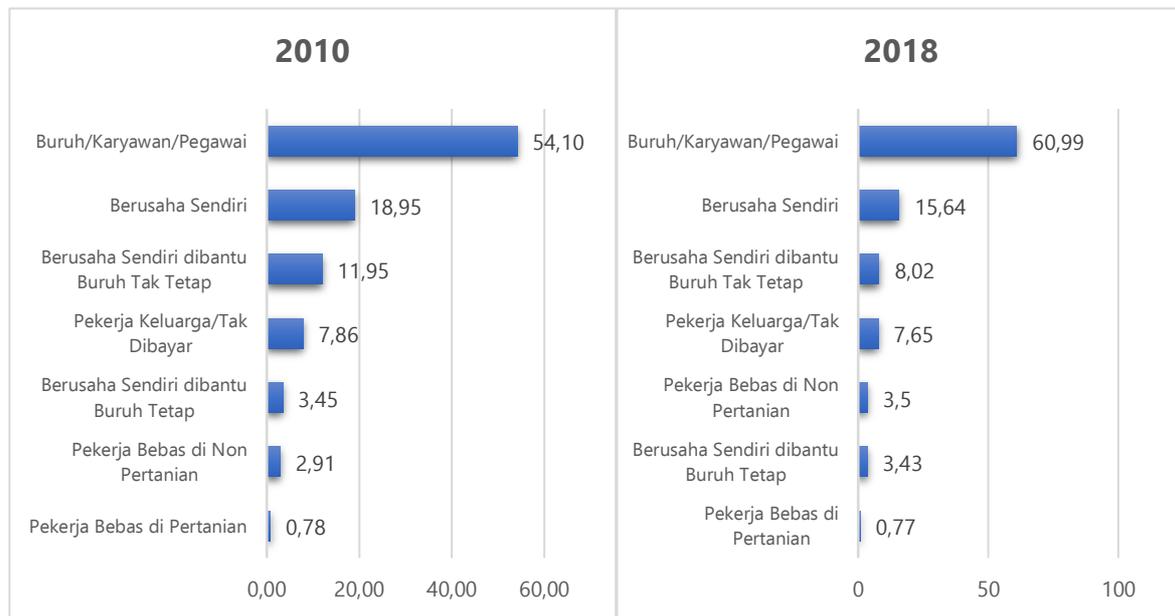
Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian dan Jabatan Tahun 2018 (%)

Bidang Keahlian	Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Tenaga Tata Usaha	Tenaga Usaha Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	TU Tani, Kebun, dsb	Tenaga Produksi dan Pekerja Kasar	Lainnya	Total
Teknologi & Rekayasa	4.84	1.64	6.44	15.93	5.28	8.75	51.94	5.19	100
Teknologi Informasi & Komunikasi	5.08	0.64	16.13	25.96	5.12	7.14	37.24	2.69	100
Kesehatan	31.31	3.04	9.81	25.74	10.26	2.74	15.36	1.73	100
Agrobisnis dan Agroteknologi	5.74	1.38	10.97	18.46	4.57	24.28	32.41	2.2	100
Perikanan dan Kelautan	8.69	1.86	10.35	15.68	6.11	16.06	38.35	2.91	100
Bisnis Manajemen	4.00	0.91	15.11	32.64	8.42	7.77	29.28	1.86	100
Pariwisata	4.37	0.65	8.2	23.9	15.78	3.88	41.8	1.42	100
Seni Rupa dan Kerajinan	11.14	4.26	7.47	20.55	7.68	6.02	40.04	2.84	100
Seni Pertunjukan	17.95	0.00	4.1	30.79	8.71	10.82	27.63	0	100
Lainnya/Missing	6.48	1.47	12.8	26.15	9.29	10.18	30.86	2.77	100
Total	5.18	1.34	10.26	22.66	6.99	8.63	41.35	3.59	100

Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, analisis perkembangan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK berikutnya adalah menurut status pekerjaan. Berdasarkan Gambar 2.1.14 menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari separuh) lulusan SMK bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan angka tersebut memiliki kecenderungan meningkat, yakni 54,10 persen di tahun 2010 menjadi 60,99 persen di tahun 2018. Adapun lulusan SMK yang berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap cenderung mengalami penurunan. Penurunan proporsi lulusan SMK yang berstatus wirausaha ini menunjukkan perlu adanya peningkatan *skill* kewirausahaan yang diajarkan di sekolah, sehingga mereka mampu untuk mandiri membuka usaha.

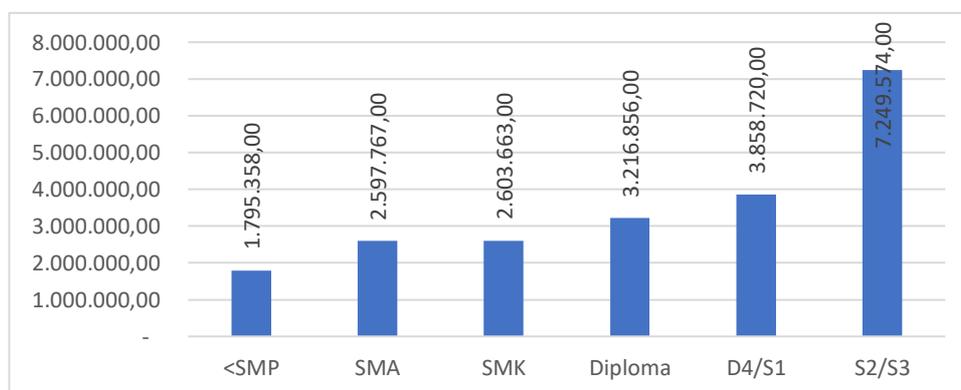
Gambar 2.1.14
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2010 dan 2018



Sumber: Sakernas 2010 dan 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Bahasan terakhir terkait dengan kondisi tenaga kerja di Indonesia adalah gambaran upah tenaga kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan. Gambar 2.1.15 menunjukkan rerata upah tenaga kerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai menurut tingkat pendidikan untuk pekerja 15 Tahun ke atas. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, rerata upah yang diterima kian meningkat. Pada Tahun 2018, rerata upah tenaga kerja lulusan SMK dan SMA untuk pekerja usia 15 tahun ke atas sama besarnya, yakni 2,6 juta rupiah.

Gambar 2.1.15
Rerata Upah Tenaga Kerja yang Berstatus sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Pekerja Usia 15 Tahun ke Atas) Tahun 2018



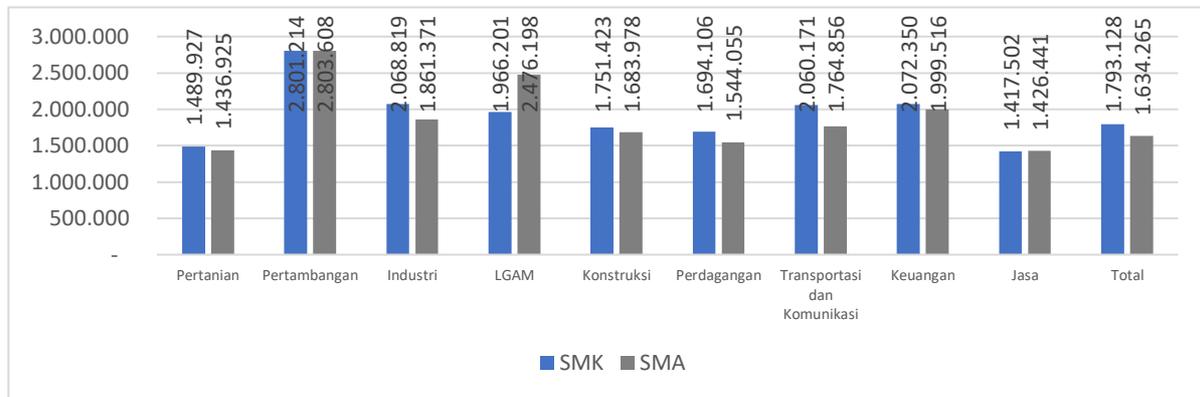
Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Namun, apabila rerata upah buruh/karyawan/pegawai lulusan SMK-SMA yang berusia 18-21 Tahun atau yang baru lulus (*fresh graduate*) menunjukkan bahwa upah lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan

dengan tenaga kerja lulusan SMA. Salah satu isu lulusan SMK tidak memiliki jenjang karir sehingga upahnya tidak mengalami peningkatan pada usia tertentu

Gambar 2.1.16

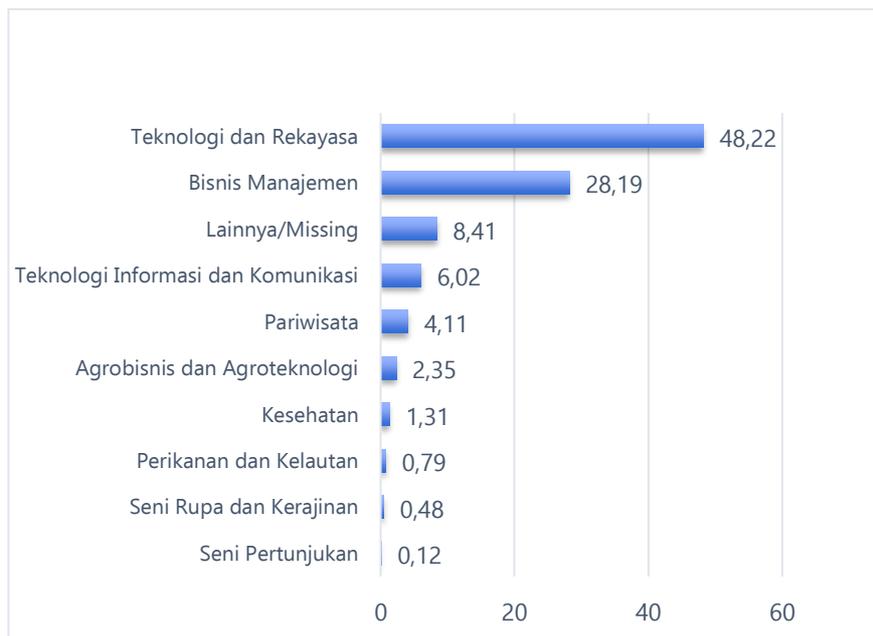
Rerata Upah Tenaga Kerja yang Berstatus sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai Lulusan SMA-SMK Menurut Lapangan Usaha (Pekerja Usia 18-21 Tahun), 2018



Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.1.17

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Indonesia Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Indonesia, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 42,1 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 28,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia di sektor industri, perdagangan, dan pertanian, kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi Indonesia, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 2,4 persen.

Tabel 2.1.3
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	1,286,853	1,330,705	1,376,313	1,423,757	1,473,126	1,524,512
Pertambangan	156,477	159,131	161,885	164,743	167,712	170,796
Industri	3,303,711	3,455,982	3,615,824	3,783,674	3,960,001	4,145,317
LGAM	151,283	155,481	159,842	164,374	169,084	173,980
Konstruksi	807,057	850,930	897,310	946,346	998,201	1,053,046
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,987,228	5,304,287	5,642,026	6,001,841	6,385,227	6,793,787
Transportasi dan Komunikasi	1,110,329	1,194,464	1,285,134	1,382,857	1,488,194	1,601,752
Lembaga Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	717,743	769,463	825,027	884,725	948,871	1,017,801
Jasa Kemasyarakatan	1,880,227	1,942,358	2,006,616	2,073,076	2,141,817	2,212,922
Jumlah Tenaga Kerja SMK	14,400,907	15,162,801	15,969,975	16,825,393	17,732,234	18,693,914
Total Tenaga Kerja	126,051,257	128,387,515	130,839,829	133,402,300	136,060,483	138,830,192
Share Tenaga Kerja	11.4	11.8	12.2	12.6	13.0	13.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



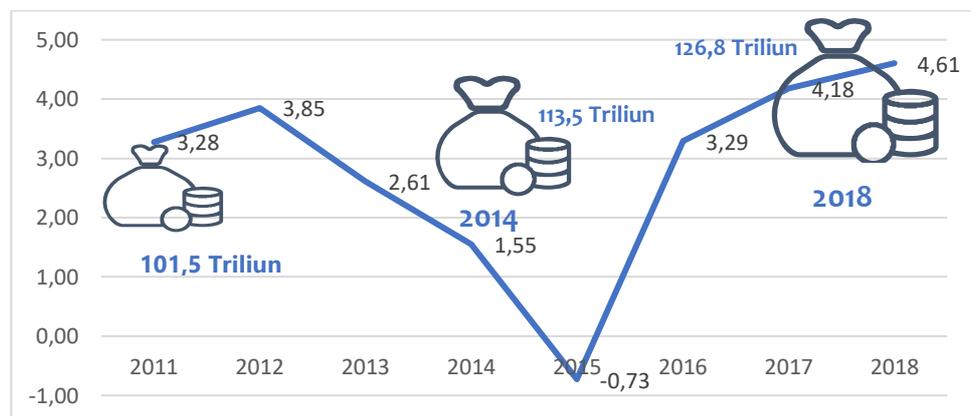
ACEH

2.2. Kondisi Perekonomian Sektoral dan Lulusan SMK di 34 Provinsi

2.2.1. Provinsi Aceh

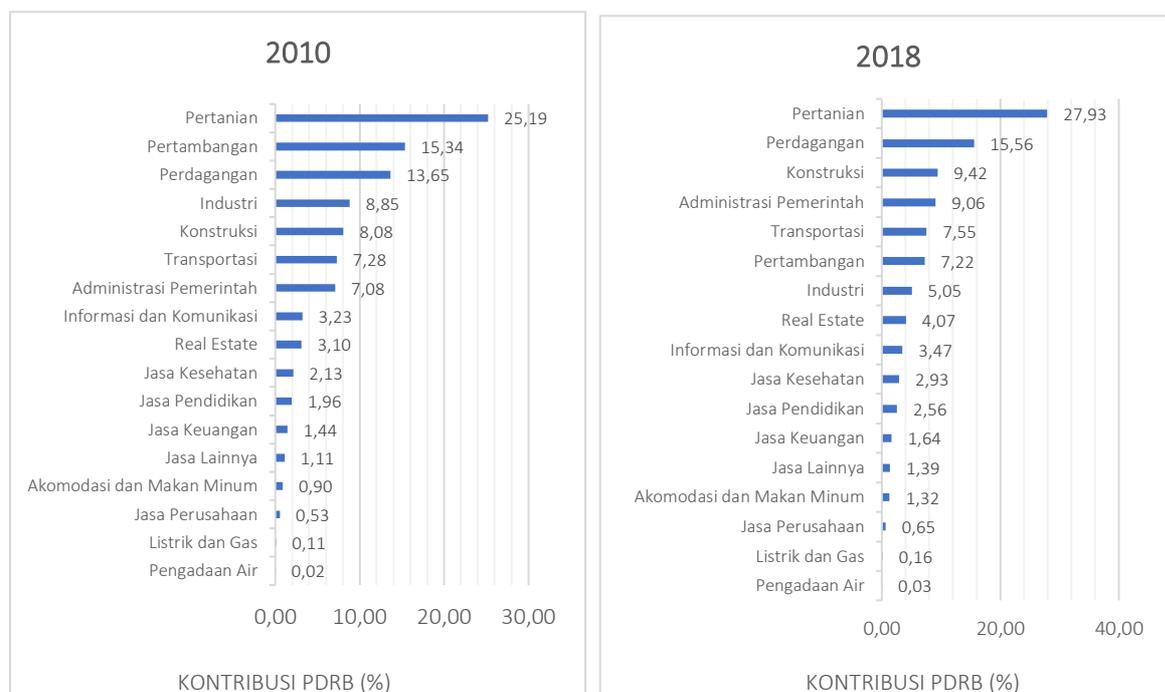
Total PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 101,5 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 126,8 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 dengan pertumbuhan yang relatif fluktuatif. Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Aceh di Tahun 2010 adalah sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan konstruksi.

Gambar 2.2.1
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

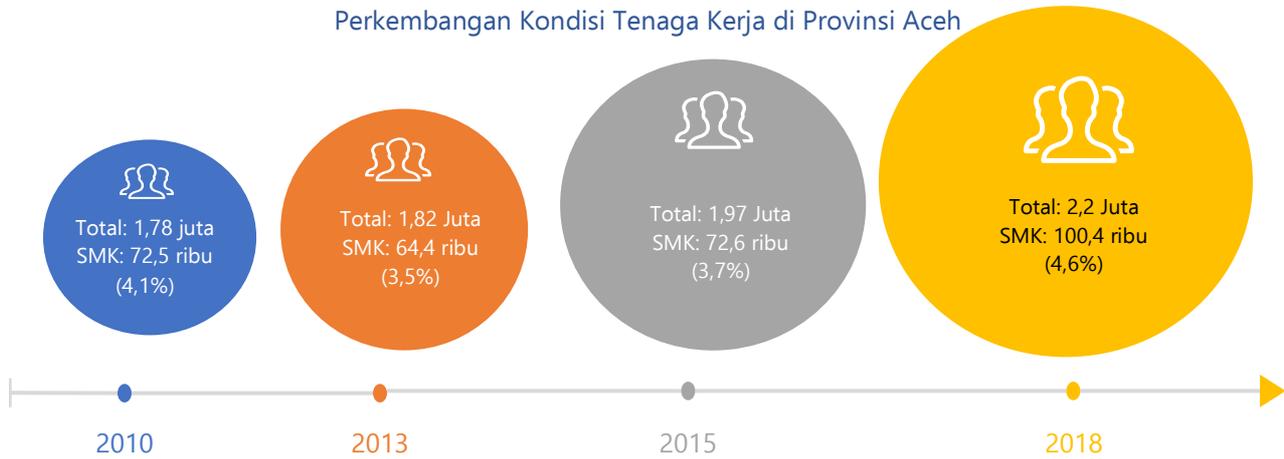
Gambar 2.2.2
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Aceh

Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, kontribusi sektor pertambangan dan industri mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, sektor pertambangan menyumbang PDRB sebesar 15,34 persen, dan turun menjadi 7,22 persen di Tahun 2018, kondisi yang serupa terjadi di sektor industri, di tahun 2010 menyumbang 8,85 persen, namun pada tahun 2018, kontribusinya turun menjadi 5,05 persen. Di sisi lain, perkembangan sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan kian meningkat, yang ditunjukkan sumbangan terhadap PDRB kedua sektor tersebut semakin besar.

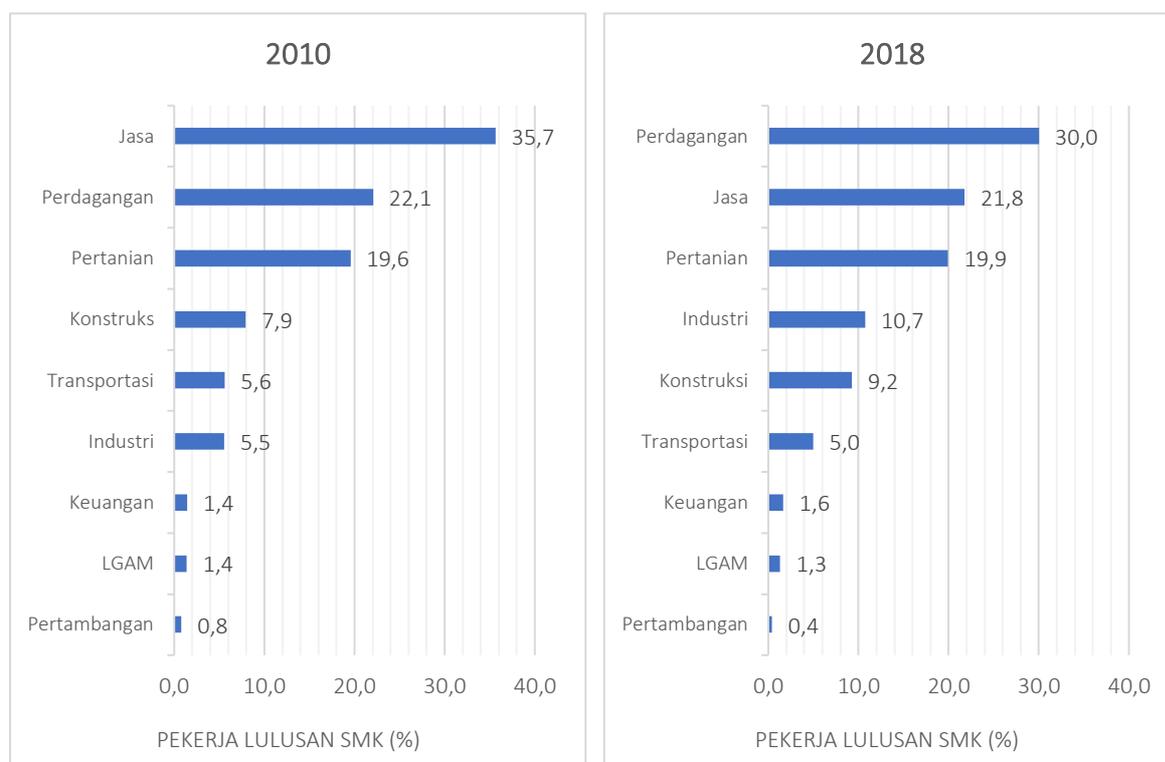
Gambar 2.2.3
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Aceh



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Aceh pada Tahun 2010 adalah sebanyak 72.515 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 100.407 orang pada Tahun 2018. Pada Tahun 2010, sebagian besar (35,7 persen) lulusan SMK di Provinsi Aceh terserap di sektor jasa, namun di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam (menjadi 21,8 persen). Adapun sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Aceh pada Tahun 2018 adalah perdagangan. Di sisi lain, penyerapan lulusan SMK sektor pertanian di Tahun 2010 dan 2018 tergolong tiga tertinggi, dan persentasenya mengalami sedikit peningkatan, yakni dari 19,6 persen menjadi 19,9 persen.

Gambar 2.2.4
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Aceh
Tahun 2010 dan 2018 (%)

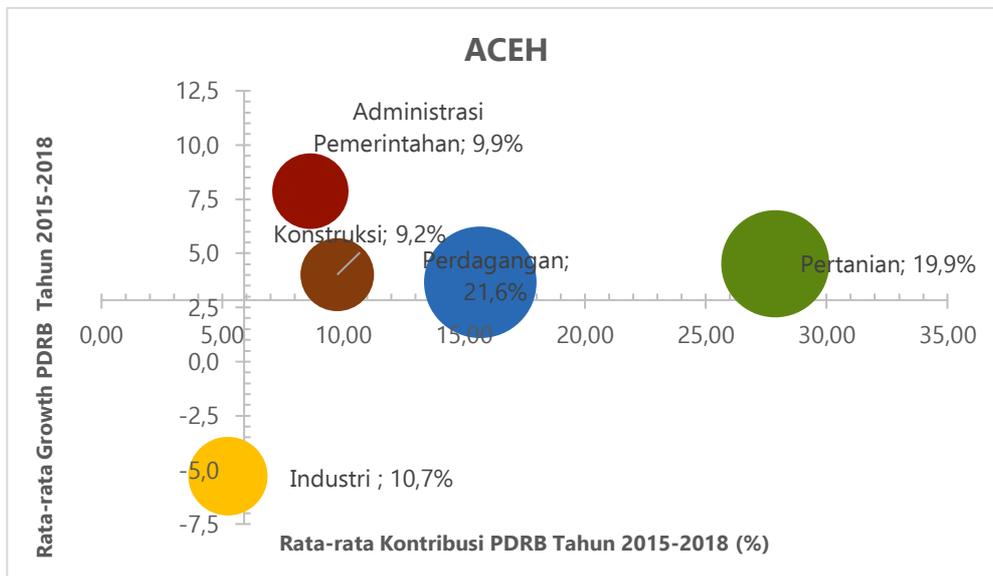


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Aceh, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (21,6 persen), pertanian (19,9 persen), industri (10,7 persen), administrasi pemerintah (9,9 persen), dan konstruksi (10,7 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Untuk sektor perdagangan, kontribusi dalam perekonomian cukup tinggi namun jika dilihat dari pertumbuhannya relatif rendah. Di sisi lain, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi dalam PDRB Aceh hanya 5,05 persen, namun pertumbuhannya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya yakni 10,7 persen.

Gambar 2.2.5

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Aceh



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK menurut jabatan menunjukkan lebih dari separuh lulusan SMK di Provinsi Aceh bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar; dan tenaga usaha penjualan. Dalam perkembangannya, lulusan SMK yang menjadi tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami peningkatan, dari 27,28 persen di Tahun 2010, menjadi 31,14 persen pada Tahun 2018. Di sisi lain, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan, dan hanya sebagian kecil lulusan SMK yang memiliki jabatan tenaga kepemimpinan.

Gambar 2.2.6

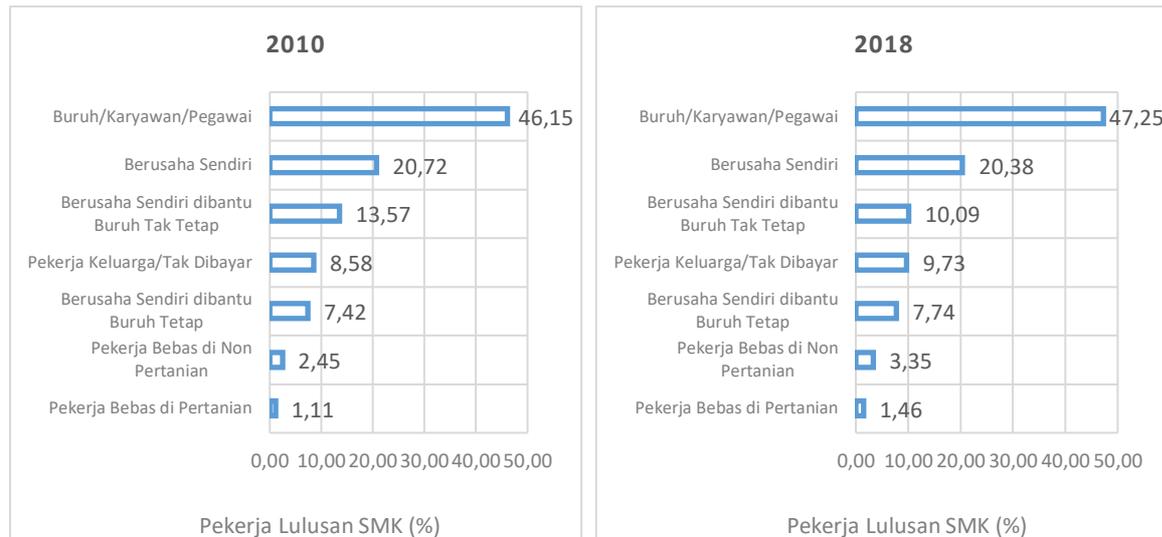
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Aceh Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Status pekerjaan lulusan SMK di Provinsi Aceh mayoritas sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan persentasenya sedikit mengalami peningkatan yakni 46,15 persen di Tahun 2010 menjadi 47,25 persen di tahun 2018. Artinya, 1 dari 2 lulusan SMK di Provinsi Aceh sebagai buruh/karyawan/pegawai. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri baik yang tidak dibantu maupun dibantu buruh tidak tetap mengalami penurunan.

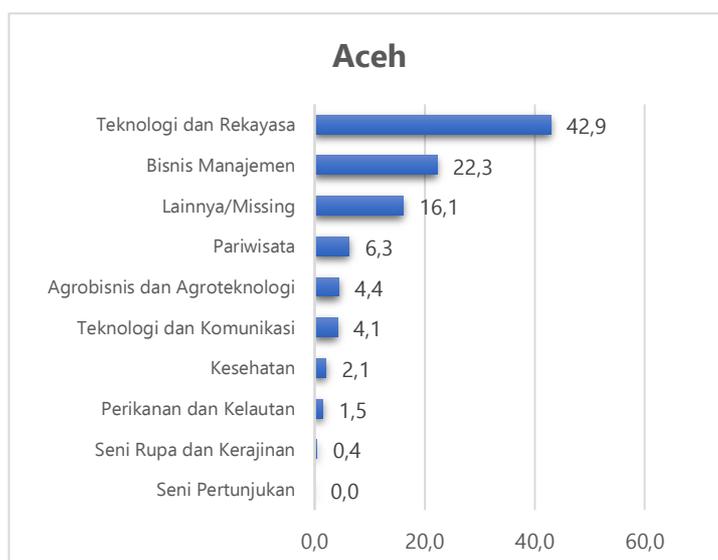
Gambar 2.2.7
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Aceh
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Aceh, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 42,9 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 22,3 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Aceh di sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 4,4 persen.

Gambar 4.2.8
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Aceh
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.1
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	20,759	21,522	22,314	23,135	23,986	24,869
Pertambangan	393	382	371	361	350	340
Industri	10,417	10,072	9,738	9,416	9,104	8,802
LGAM	1,354	1,419	1,486	1,557	1,631	1,708
Konstruksi	9,632	9,999	10,380	10,775	11,186	11,612
Perdagangan, Hotel dan Restoran	31,566	33,059	34,623	36,261	37,976	39,773
Transportasi dan Komunikasi	5,131	5,280	5,435	5,593	5,757	5,925
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,742	1,847	1,959	2,078	2,204	2,337
Jasa Kemasyarakatan	22,577	23,309	24,065	24,846	25,651	26,483
Jumlah Tenaga Kerja SMK	103,570	106,890	110,371	114,021	117,845	121,849
Total Tenaga Kerja	2,246,446	2,301,832	2,360,538	2,422,606	2,487,248	2,555,490
<i>Share</i> Tenaga Kerja	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

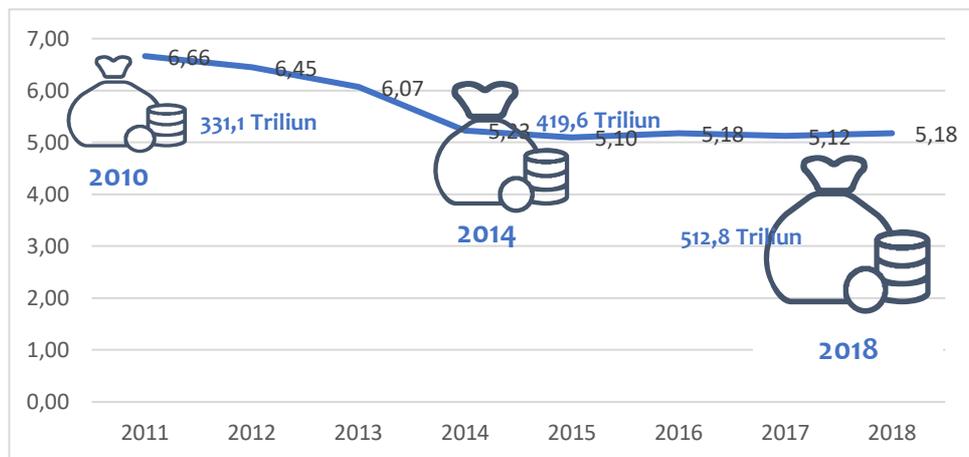


SUMATERA UTARA

2.2.2. Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.2.9

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara

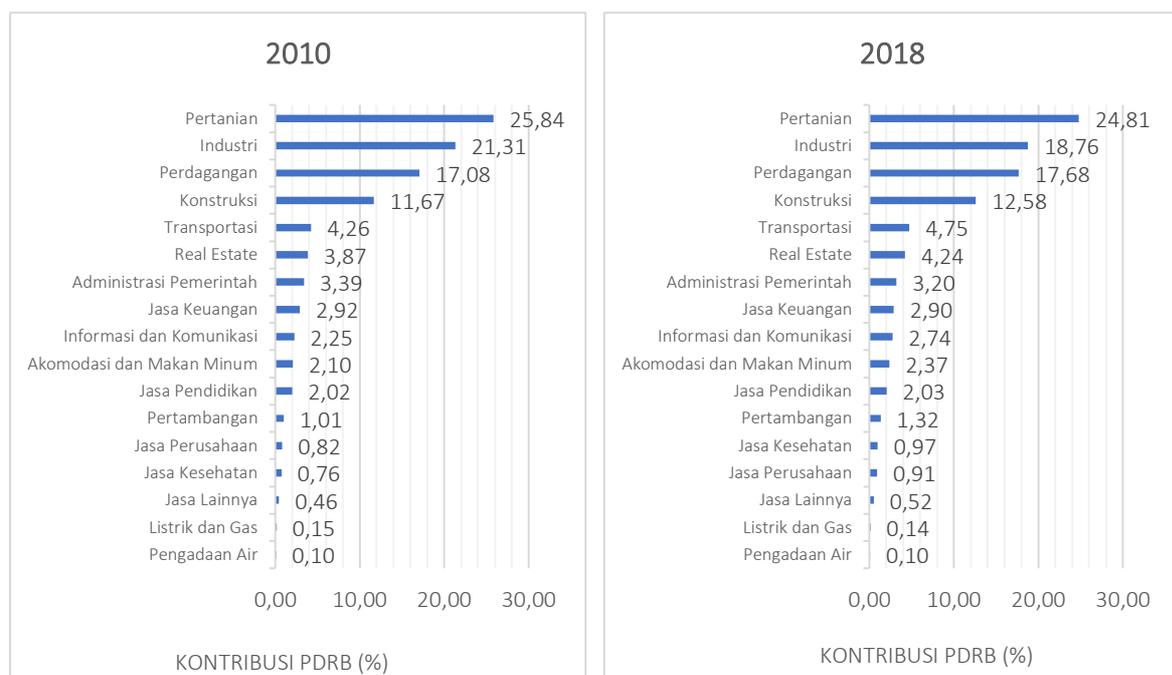


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Tahun 2010 total PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 333,1 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 512,8 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5-6 persen. Lima dari 17 sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2010 adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan transportasi.

Gambar 2.2.10

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)

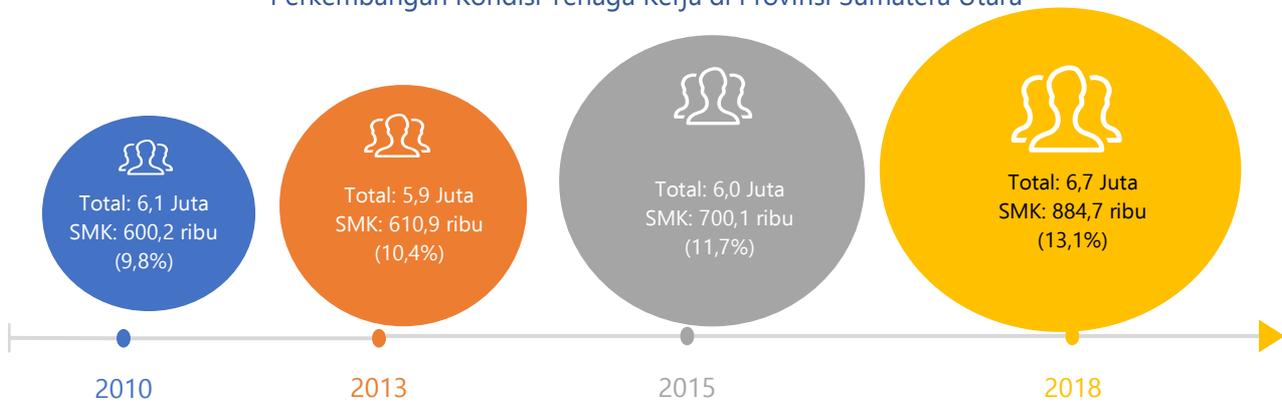


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Apabila dilihat dari kontribusinya, hampir separuh perekonomian di Provinsi Sumatera Utara ditopang oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Namun, jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, kontribusi sektor pertanian dan industri mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 25,84 persen, dan turun menjadi 24,81 persen di tahun 2018, kondisi yang serupa terjadi di sektor industri, di tahun 2010 menyumbang 21,31 persen, namun pada tahun 2018, kontribusinya turun menjadi 18,76 persen (Gambar 4.2.10). Di sisi lain, perkembangan sektor perdagangan konstruksi dan transportasi kian meningkat, yang ditunjukkan sumbangan terhadap PDRB kedua sektor tersebut semakin besar.

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2010 adalah sebanyak 600,2 ribu tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 884,7 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share terhadap tenaga kerja sebesar 13,1 persen.

Gambar 2.2.11
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, seperempat (25,78 persen) lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara terserap di sektor pertanian, namun di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami penurunan yang (menjadi 21,57 persen). Adapun sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2018 adalah perdagangan. Di sisi lain, penyerapan lulusan SMK sektor jasa di 2010 tergolong tiga tertinggi, namun di tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam dari 21,77 persen di tahun 2010 menjadi 12,22 persen pada tahun 2018.

Gambar 2.2.12

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)

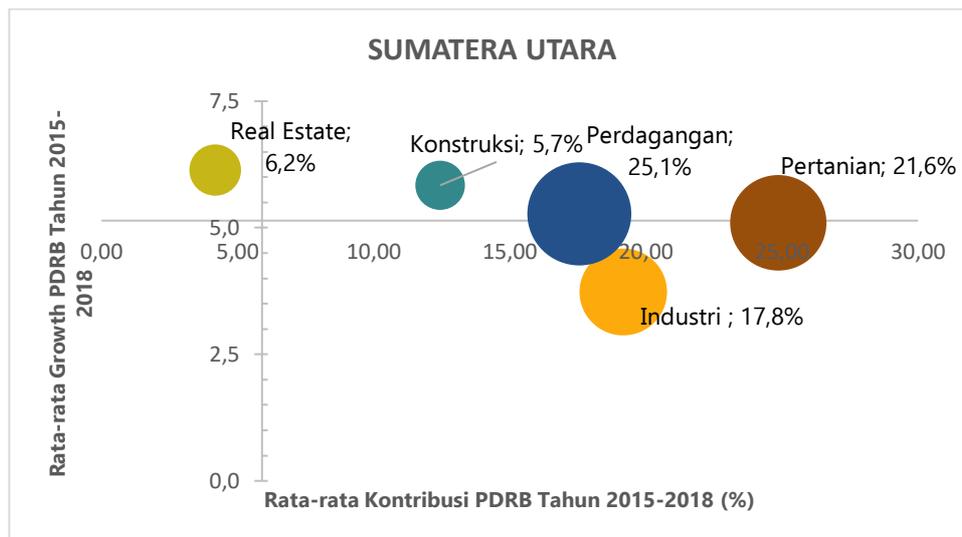


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara, 5 dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (25,1 persen), pertanian (21,6 persen), industri (17,8 persen), real estate (6,1 persen), dan konstruksi (5,7 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut relatif sama, namun jika dilihat dari kontribusinya, sektor pertanian, perdagangan, dan industri yang memiliki kontribusi paling besar, dan jika dijumlahkan lebih dari 60 persen.

Gambar 2.2.13

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, sepertiga lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang menjadi tenaga produksi dan pekerja

kasar mengalami peningkatan, dari 32,18 persen menjadi 35,83 persen. Dua jabatan lain mayoritas pekerja lulusan SMK adalah sebagai Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb dan Tenaga Usaha Penjualan. Di sisi lain, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan, dan hanya sebagian kecil lulusan SMK yang memiliki jabatan tenaga kepemimpinan.

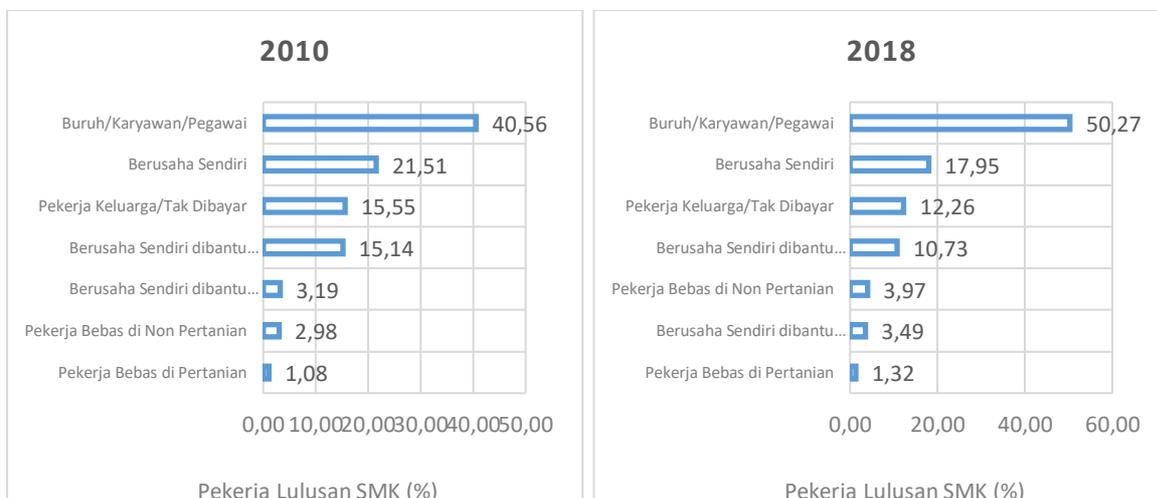
Gambar 2.2.14
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat menurut status pekerjaan, mayoritas lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara sebagai buruh/karyawan/pegawai. Persentasenya mengalami peningkatan yang cukup besar yakni dari 40,56 persen di Tahun 2010 menjadi 50,27 persen di tahun 2018. Artinya, 1 dari 2 lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara sebagai buruh/karyawan/pegawai. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri baik yang tidak dibantu maupun dibantu buruh tidak tetap mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan ada peningkatan lulusan SMK yang bekerja di sektor formal (sebagai karyawan) dibandingkan dengan sektor informal (berusaha sendiri).

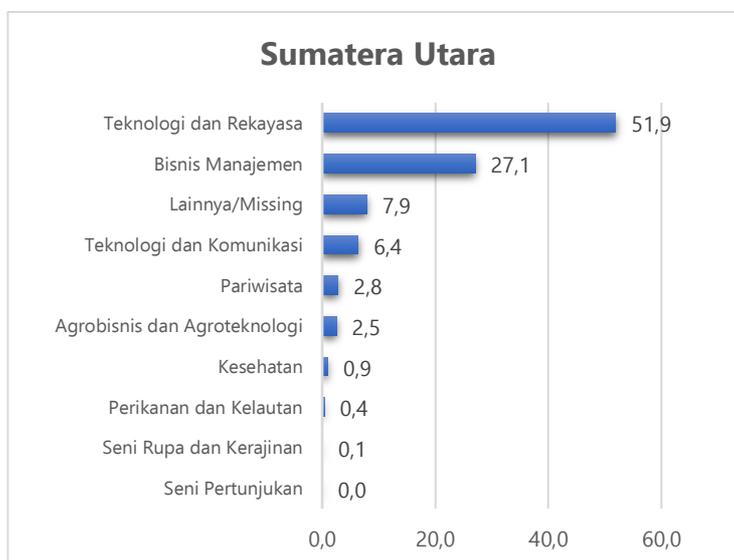
Gambar 2.2.15
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.2.16

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya (lebih dari separuh) yakni 51,9 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 27,1 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara di sektor pertanian, industri, dan perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 2,5 persen.

Tabel 2.2.2

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	199,425	208,389	217,756	227,545	237,773	248,461
Pertambangan	4,676	4,892	5,117	5,353	5,600	5,858
Industri	163,099	168,771	174,639	180,712	186,996	193,499
LGAM	11,607	11,970	12,344	12,730	13,128	13,538
Konstruksi	53,155	55,919	58,826	61,884	65,102	68,487
Perdagangan, Hotel dan Restoran	294,679	313,096	332,663	353,453	375,543	399,013
Transportasi dan Komunikasi	62,180	66,134	70,340	74,814	79,572	84,632
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	27,804	29,670	31,661	33,786	36,053	38,472
Jasa Kemasyarakatan	111,438	114,849	118,366	121,990	125,725	129,574
Jumlah Tenaga Kerja SMK	928,063	973,689	1,021,713	1,072,267	1,125,491	1,181,534
Total Tenaga Kerja	6,827,965	6,950,799	7,081,125	7,217,555	7,359,346	7,509,445
Share Tenaga Kerja	13.6	14.0	14.4	14.9	15.3	15.7

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

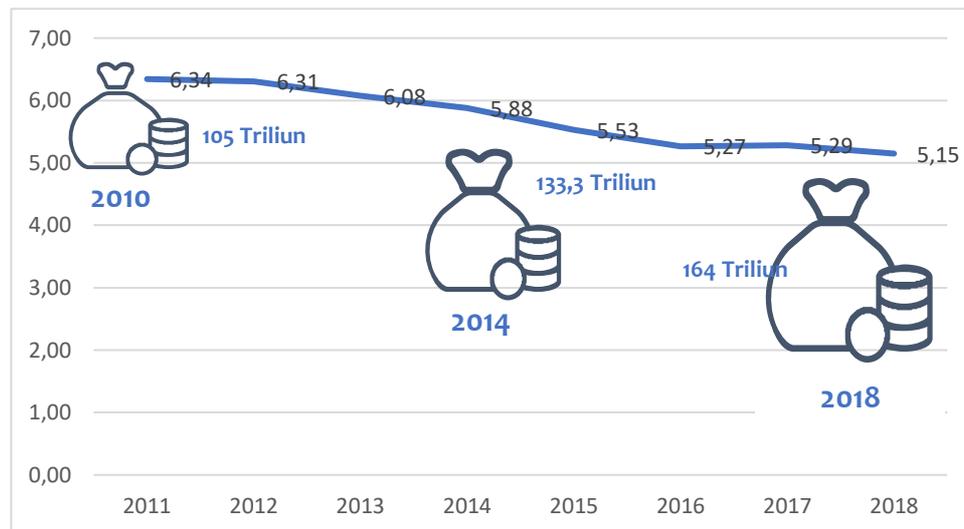


SUMATERA BARAT

2.2.3. Provinsi Sumatera Barat

Perekonomian Sumatera Barat, dilihat dari total PDRB, mengalami peningkatan. Tahun 2010 total PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 105,0 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 164,0 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5-6 persen.

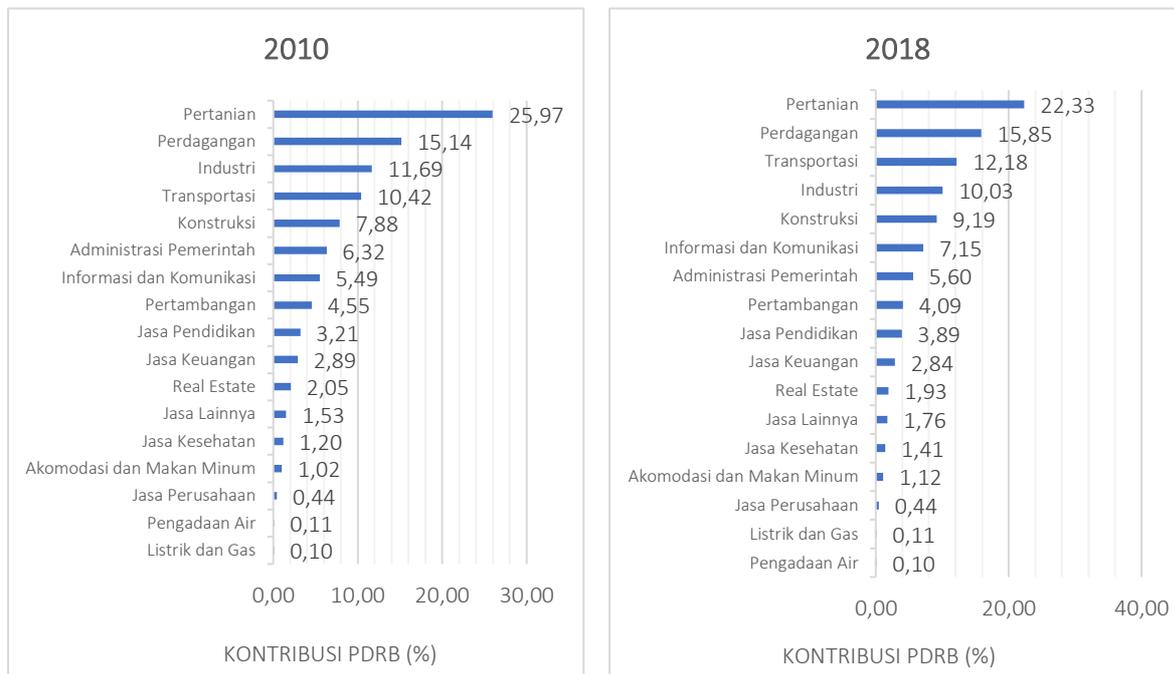
Gambar 2.2.17
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Dari 17 sektor perekonomian, ada 5 sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2010 adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan konstruksi. Apabila dilihat dari kontribusinya, lebih dari sepertiga perekonomian di Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertanian turun, namun sektor perdagangan mengalami sedikit peningkatan. Pada Tahun 2010, sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 25,97 persen lalu turun menjadi 22,33 persen di tahun 2018, sebaliknya sektor perdagangan pada tahun 2010 menyumbang 15,14 persen kontribusinya meningkat menjadi 15,85 persen. Sektor industri yang diharapkan menyerap tenaga kerja mengalami penurunan kontribusinya pada PDRB dari 11,69 persen tahun 2010 menjadi 10,03 persen tahun 2018. Sementara sektor lain seperti transportasi konstruksi, transportasi dan informasi dan komunikasi makin meningkat yang ditunjukkan sumbangannya terhadap PDRB yang semakin besar.

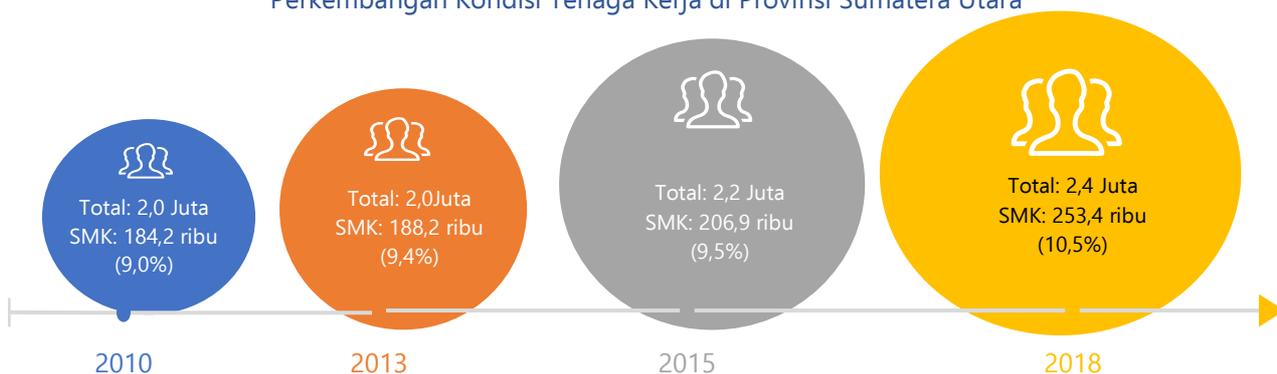
Gambar 2.2.18
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2010 adalah sebanyak 184,2 ribu tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 253,3 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share terhadap tenaga kerja sebesar 10,5 persen.

Gambar 2.2.19
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara



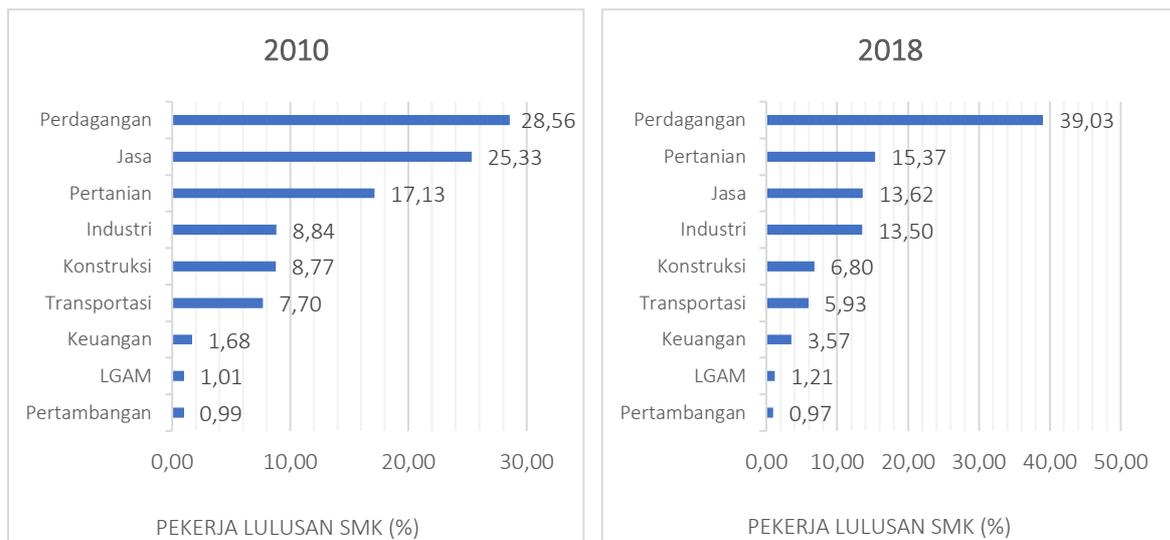
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sektor perdagangan menjadi penyerap pekerja lulusan SMK di Sumatera Barat paling banyak baik tahun 2010 dan 2018 yang ditandai dengan banyaknya lulusan SMK yang bekerja di sektor tersebut. Pada tahun 2010, hampir sepertiga (28,56 persen) lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat terserap di sektor perdagangan dan pada tahun 2018 penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami kenaikan

menjadi 39,03 persen. Di sisi lain, penyerapan lulusan SMK di sektor jasa mengalami penurunan dari 25,33 persen di 2010 menjadi 15,37 persen pada tahun 2018. Yang menarik sektor industri makin besar perannya dalam peningkatan penyerapan lulusan SMK dari 8,84 persen tahun 2010 menjadi 13,50 persen. Meningkatnya penyerapan SMK di sektor industri akan meningkatkan kesejahteraan karena upah di industri lebih tinggi, terutama untuk industri menengah dan besar. Namun jika terserap dalam industri mikro dan kecil maka tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan makin besar karena banyak industri mikro dan kecil tidak mampu membayar buruh sesuai dengan UMP.

Gambar 2.2.20

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

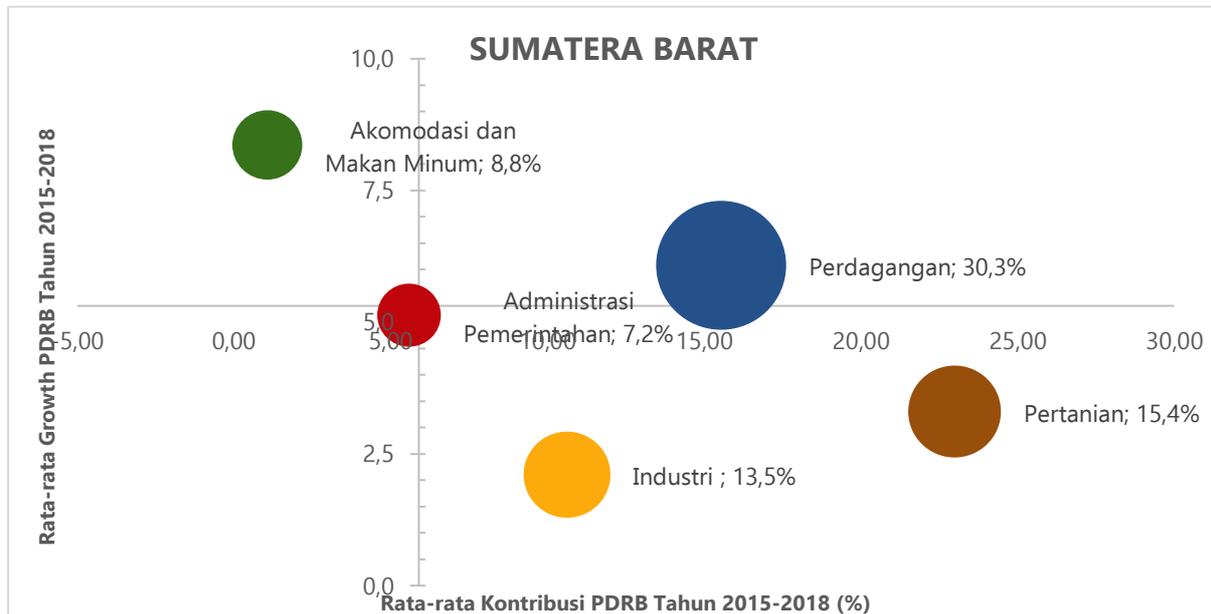


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat, 5 dari 17 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi adalah perdagangan (30,3 persen), pertanian (15,4 persen), industri pengolahan (13,5 persen), akomodasi dan makan minum (8,8 persen), dan administrasi pemerintahan (7,2 persen).

Gambar. 2.2.20

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sumatera Barat

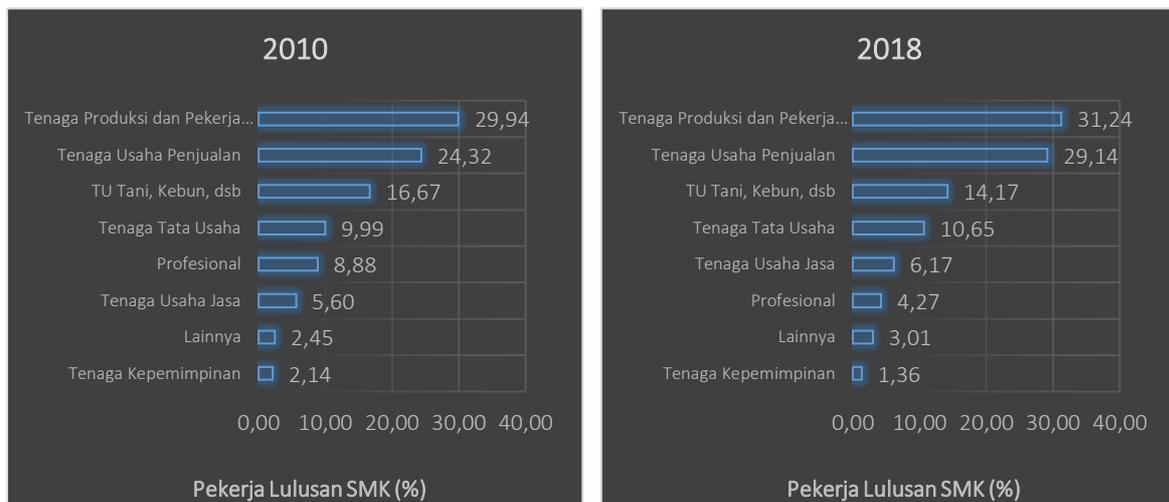


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tingginya penyerapan di sektor perdagangan dan pertanian mengindikasikan lulusan SMK banyak yang bekerja di sektor informal. Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut positif, kecuali sektor industri pengolahan pada tahun 2018 pertumbuhannya minus 0,57 persen. Jika dilihat dari kontribusinya, sektor pertanian, perdagangan, transportasi dan industri yang memiliki kontribusi paling besar, dan jika dijumlahkan mencapai 60 persen.

Dilihat dari jenis pekerjaan, sepertiga lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Selama delapan tahun antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami peningkatan dari 29,94 persen menjadi 31,24 persen. Jabatan lain yang banyak ditempati oleh pekerja lulusan SMK adalah sebagai Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb dan Tenaga Usaha Penjualan. Untuk jabatan kerah putih, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan dari 8,88 persen tahun 2010 menjadi 4,27 persen tahun 2018.

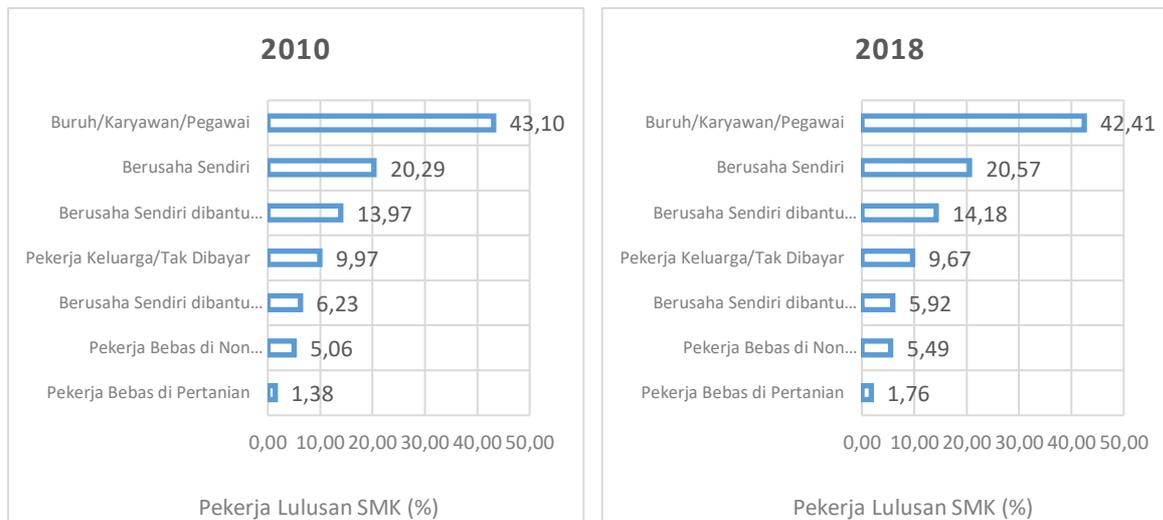
Gambar 2.2.21
 Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

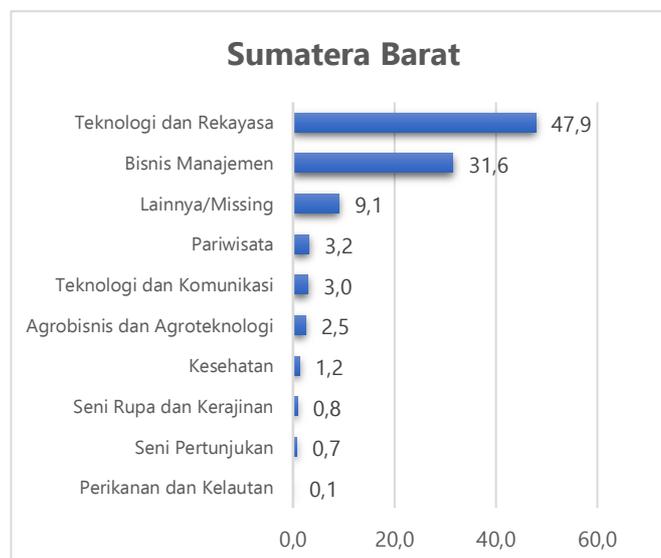
Jika dilihat menurut status pekerjaan, sebagian besar lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Namun, persentasenya mengalami sedikit penurunan dari 43,10 persen di tahun 2010 menjadi 42,10 persen di tahun 2018. Hal ini diduga berkaitan dengan penurunan pertumbuhan industri pengolahan. Pada status pekerjaan yang lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap mengalami sedikit kenaikan. Hal ini menunjukkan ada peningkatan lulusan SMK yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri) dibandingkan dengan sektor formal (buruh/karyawan).

Gambar 2.2.22
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.2.23
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 47,9 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 31,6 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat di sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 2,5 persen.

Tabel 2.2.3

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	40,245	41,583	42,965	44,392	45,867	47,392
Pertambangan	2,516	2,569	2,624	2,680	2,736	2,794
Industri	35,310	36,451	37,629	38,845	40,101	41,396
LGAM	3,180	3,297	3,419	3,545	3,675	3,811
Konstruksi	18,281	19,405	20,599	21,867	23,212	24,640
Perdagangan, Hotel dan Restoran	105,166	111,852	118,963	126,525	134,569	143,124
Transportasi dan Komunikasi	16,093	17,237	18,462	19,774	21,180	22,685
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	8,986	8,939	8,893	8,847	8,801	8,755
Jasa Kemasyarakatan	35,612	36,760	37,944	39,166	40,428	41,730
Jumlah Tenaga Kerja SMK	265,390	278,094	291,497	305,641	320,569	336,328
Total Tenaga Kerja	2,446,196	2,490,524	2,537,535	2,586,746	2,638,057	2,691,864
Share Tenaga Kerja	10.8	11.2	11.5	11.8	12.2	12.5

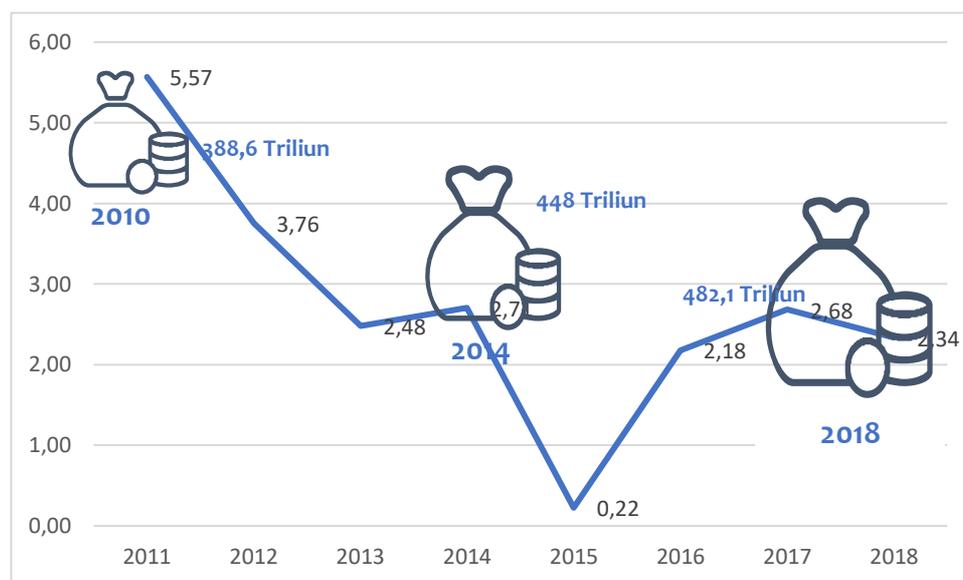


RIAU

2.2.4. Provinsi Riau

Perekonomian Riau, dilihat dari total PDRB, mengalami penurunan dengan pertumbuhan dari 5,57% tahun 2010 menjadi 2,34 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan ekonomi Riau adalah turunnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mulai dari tahun 2012 hingga 2018. Jika dilihat total PDRB, tahun 2010 total PDRB Provinsi Riau atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 388,6 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 482,1 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 24 persen.

Gambar 2.2.24
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau

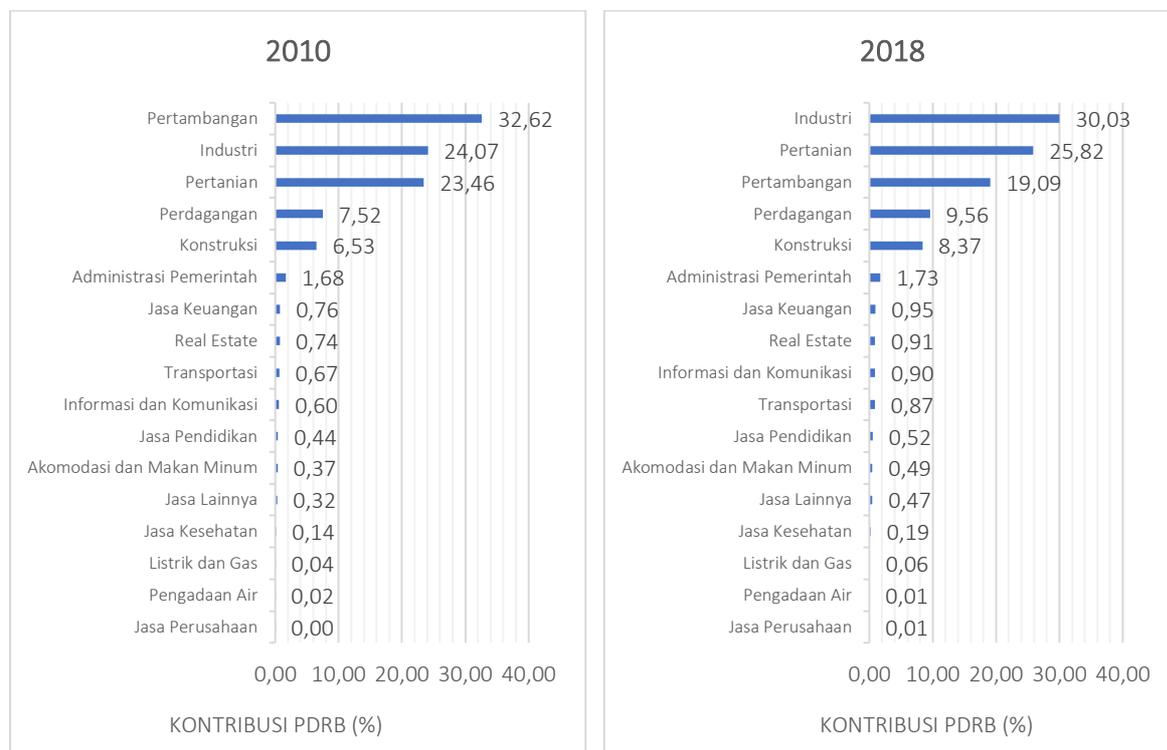


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Dari 17 sektor perekonomian, ada 5 sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Riau di Tahun 2010 adalah **sektor pertambangan, industri, pertanian, perdagangan, dan konstruksi**. Jika dilihat dari kontribusinya, sekitar 80 persen perekonomian di Provinsi Riau disumbang oleh sektor pertanian, pertambangan dan industri. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, sebaliknya sektor industri mengalami peningkatan. Menurunnya permintaan batu bara dunia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan sektor pertambangan. Riau juga menjadi salah satu produsen minyak bumi, selain batu bara. Pada Tahun 2010, sektor pertambangan menyumbang PDRB sebesar 32,62 persen, namun tahun 2018 turun menjadi 19,09 persen di tahun 2018. Namun sektor industri yang pada tahun 2010 menyumbang 24,07 persen kontribusinya meningkat menjadi 30,03 persen tahun 2018. Berkembangnya sektor industri diharapkan menyerap tenaga kerja SMK terutama industri pengolahan minyak sawit dan industri lainnya. Sementara sektor lain seperti transportasi pertanian/perkebunan, perdagangan dan konstruksi makin meningkat kontribusinya pada PDRB antara tahun 2010 dan 2018

Gambar 2.2.25

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Riau Tahun 2010 dan 2018 (%)

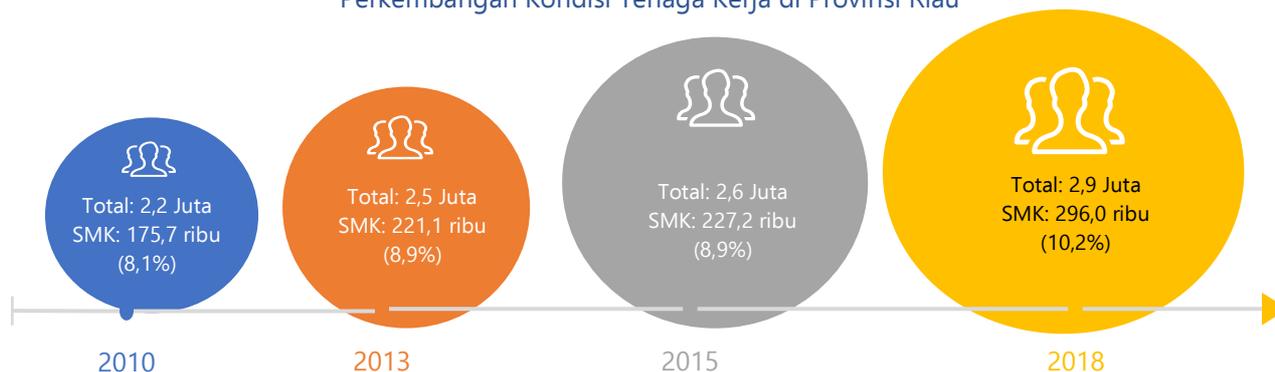


Sumber: BPS Provinsi Riau

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Riau pada Tahun 2010 adalah sebanyak 175,7 ribu tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 296,0 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share terhadap tenaga kerja sebesar 10,2 persen.

Gambar 2.2.26

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Riau

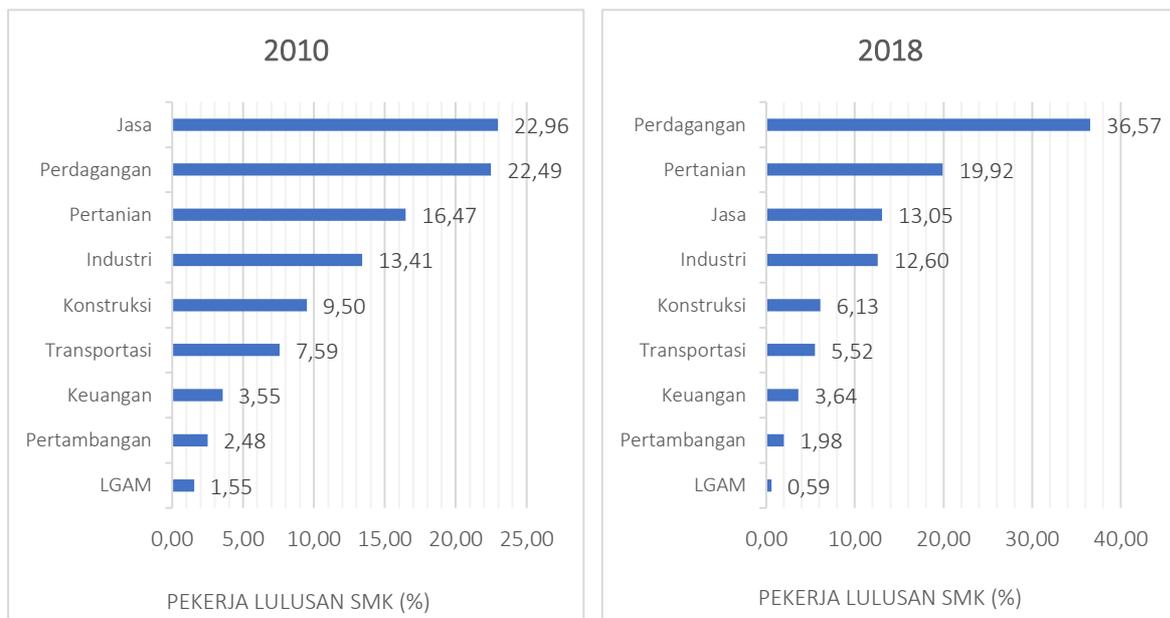


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sektor non-pertanian menjadi penyerap pekerja lulusan SMK di Riau paling banyak baik tahun 2010 dan 2018. Pada tahun 2010, hampir seperempat (22,96 persen) lulusan SMK di Provinsi Riau terserap di sektor jasa dan pada tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami penurunan tajam menjadi 13,05 persen. Di sisi lain, penyerapan lulusan SMK di sektor perdagangan meningkat dari

22,49 persen di 2010 menjadi 36,57 persen pada tahun 2018. Begitu pula, sektor pertanian/perkebunan juga meningkat dalam menyerap lulusan SMK dari 16,47 persen tahun 2010 menjadi 19,92 persen tahun 2018. Di Riau sektor pertanian/perkebunan terutama kelapa sawit masih memberikan harapan bagi lulusan SMK untuk bekerja di sektor tersebut.

Gambar 2.2.27
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Tahun 2010 dan 2018 (%)

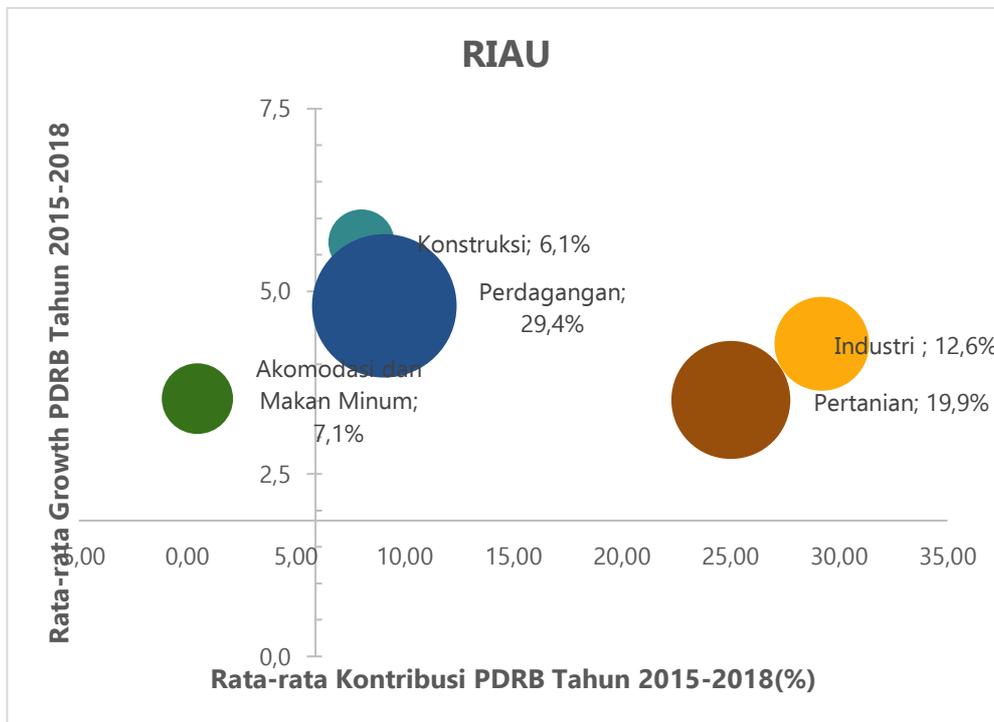


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Riau, 5 dari 17 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (30,3 persen), pertanian (19,9 persen), industri pengolahan (12,26 persen), akomodasi dan makan minum (7,1 persen), dan konstruksi (6,1 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut positif, kecuali sektor industri pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah pertumbuhannya turun. Jika dilihat dari kontribusinya, sektor pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri yang memiliki kontribusi paling besar, dan jika dijumlahkan mencapai 75 persen.

Gambar 2.2.28

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Riau



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari jenis pekerjaan, sepertiga lulusan SMK di Provinsi Riau bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Selama delapan tahun antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami penurunan dari 36,39 persen menjadi 31,49 persen. Jabatan lainnya yang masuk dalam tiga besar yang ditempati oleh pekerja lulusan SMK adalah sebagai Tenaga Usaha Penjualan dan Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb. Tenaga penjualan meningkat tajam dari 18,51 persen menjadi 31,49 persen pada periode tahun yang sama. Meningkatnya pekerja lulusan SMK sebagai tenaga penjualan mengindikasikan bahwa sektor perdagangan fleksibel dalam menyerap lulusan SMK. Untuk jabatan kerah putih, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan dari 10,65 persen tahun 2010 menjadi 3,87 persen tahun 2018. Persaingan dengan lulusan diploma menjadi salah satu alasan turunnya jabatan profesional.

Gambar 2.2.29

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Riau Tahun 2010 dan 2018 (%)

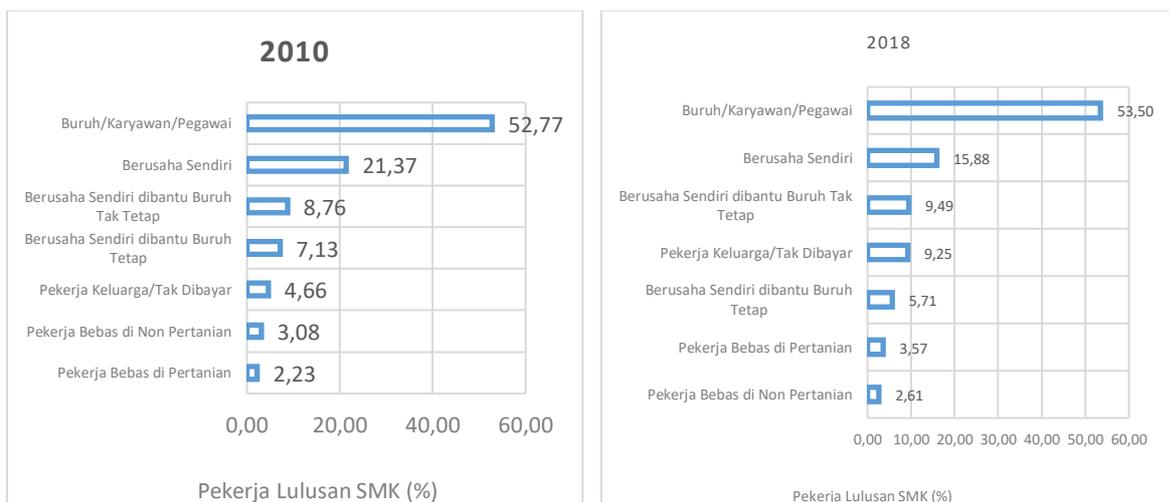


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika diamati menurut status pekerjaan, sebagian besar lulusan SMK di Provinsi Riau bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selama periode 2010-2018, persentasenya cenderung stagnan pada angka 53 persen. Pada status pekerjaan yang lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri mengalami penurunan dari 21,37 persen menjadi 15,88 persen pada periode 2010-2018. Kondisi ini mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) di Riau relatif lebih besar dalam menyerap lulusan SMK dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri).

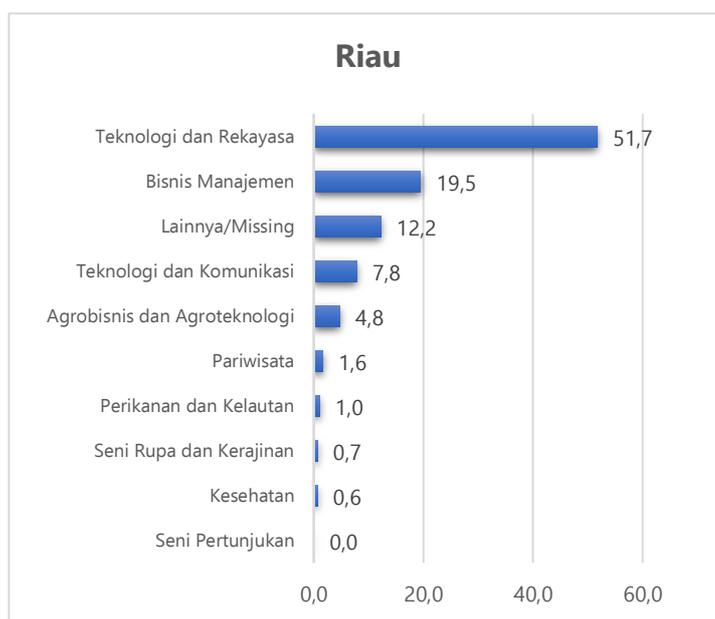
Gambar 2.2.30

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Riau Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.2.31
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Riau
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Riau, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 51,7 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 19,5 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Riau di sektor industri, pertanian, dan pertambangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 4,8 persen.

Tabel 2.2.4
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	61,025	63,154	65,357	67,638	69,997	72,439
Pertambangan	5,760	5,651	5,544	5,438	5,335	5,233
Industri	39,155	41,095	43,131	45,267	47,510	49,863
LGAM	1,814	1,878	1,944	2,012	2,083	2,156
Konstruksi	18,991	19,889	20,829	21,813	22,844	23,924
Perdagangan, Hotel dan Restoran	114,643	121,404	128,564	136,146	144,176	152,679
Transportasi dan Komunikasi	17,318	18,359	19,464	20,635	21,876	23,192
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	11,410	12,078	12,786	13,535	14,329	15,168
Jasa Kemasyarakatan	39,524	40,427	41,350	42,294	43,260	44,248
Jumlah Tenaga Kerja SMK	309,640	323,935	338,968	354,779	371,409	388,903
Total Tenaga Kerja	2,995,062	3,090,869	3,189,947	3,291,816	3,397,179	3,506,480
Share Tenaga Kerja	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	11.1

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

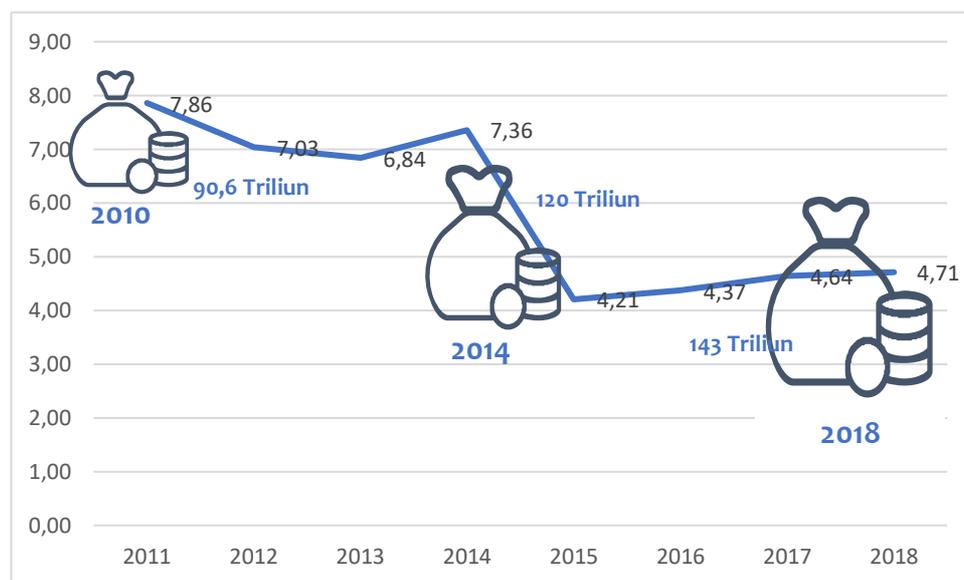


JAMBI

2.2.5. Provinsi Jambi

Perekonomian provinsi Jambi, dilihat berdasarkan total PDRB, mengalami penurunan cukup tajam dengan pertumbuhan dari 7,86 persen tahun 2010 menjadi 4,71 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan di Jambi karena turunnya pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan dan pertambangan. Ketiga sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian Jambi. Jika dilihat total PDRB, tahun 2010 total PDRB Provinsi Jambi atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 90,6 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 143,0 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 58 persen.

Gambar 2.2.32
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi



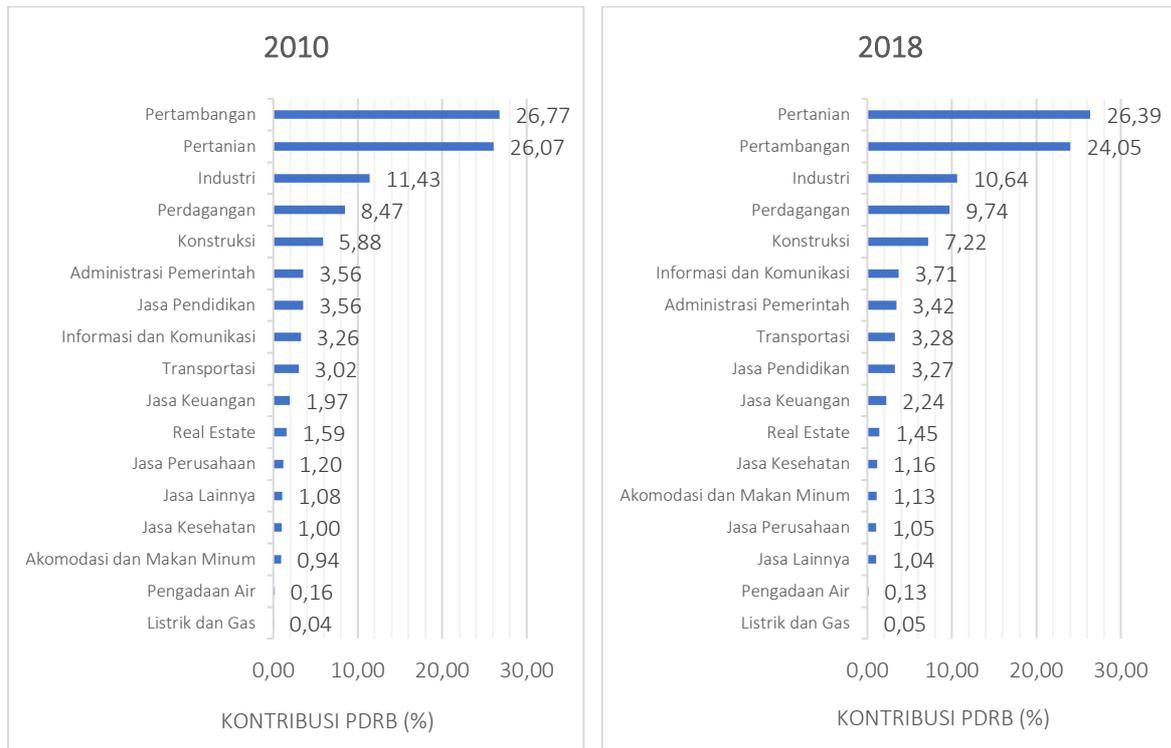
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Dari 17 sektor perekonomian, ada 5 sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Riau di Tahun 2010 adalah **sektor pertambangan, pertanian, industri, perdagangan, dan konstruksi**. Jika dilihat dari kontribusinya, lebih separo (53 persen) perekonomian di Provinsi Riau disumbang oleh dua sektor pertambangan dan pertanian/perkebunan. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, sebaliknya sektor pertanian mengalami peningkatan. Jambi merupakan salah satu penghasil tambang logam dan batu bara.

Menurunnya permintaan batu bara di pasar dunia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan sektor pertambangan. Pada Tahun 2010, sektor pertambangan menyumbang PDRB sebesar 26,77 persen, namun tahun 2018 turun menjadi 24,05 persen di tahun 2018. Namun sektor industri yang pada tahun 2010 menyumbang 11,43 persen kontribusinya turun sedikit menjadi 10,64 persen tahun 2018. Menurunnya kontribusi sektor industri berimplikasi pada menurunnya penyerapan tenaga kerja SMK. Sementara sektor lain seperti perdagangan dan konstruksi meningkat kontribusinya pada PDRB antara tahun 2010 dan 2018.

Gambar 2.2.33

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi Tahun 2010 dan 2018 (%)

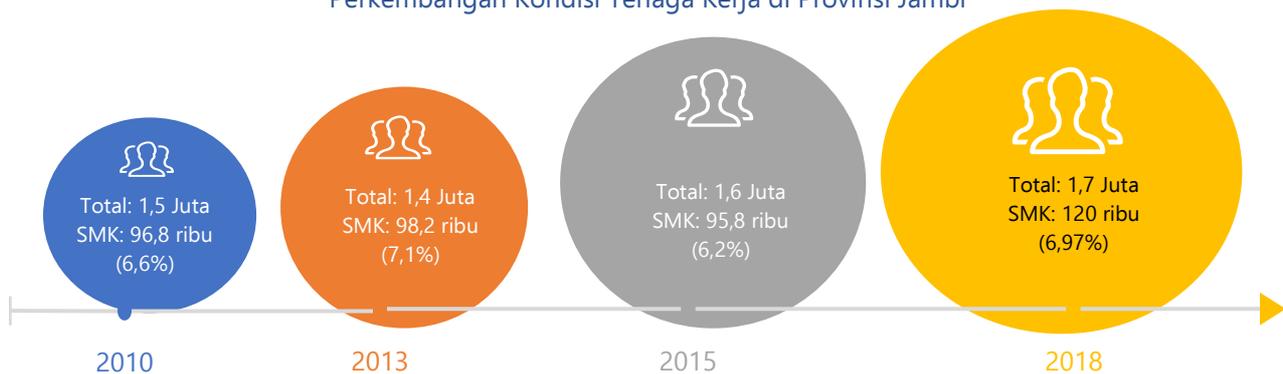


Sumber: BPS Provinsi Jambi

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Jambi pada Tahun 2010 adalah sebanyak 96,8 ribu tenaga kerja dan mengalami peningkatan menjadi 120 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share terhadap tenaga kerja sebesar 6,97 persen.

Gambar 2.2.34

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Jambi

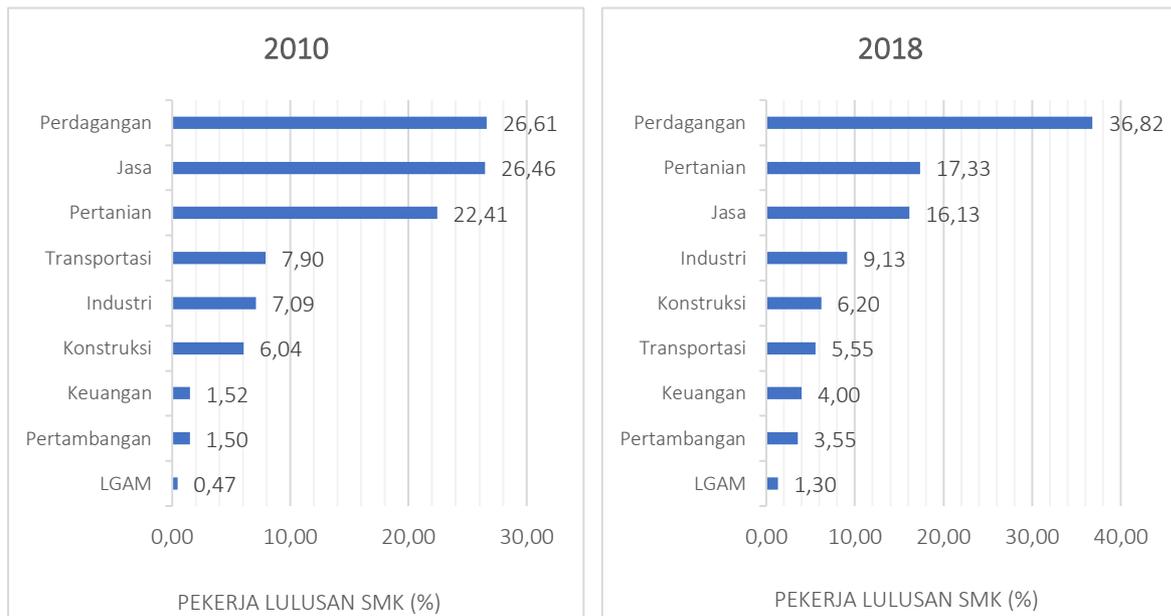


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sektor non pertanian yaitu perdagangan menjadi penyerap pekerja lulusan SMK paling banyak di Provinsi Jambi, baik tahun 2010 dan 2018. Pada tahun 2010, lebih dari seperempat (26,61 persen) lulusan SMK di Provinsi Jambi terserap di sektor perdagangan dan pada tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut meningkat drastis menjadi 36,82 persen. Di sisi lain, penyerapan lulusan

SMK di sektor pertanian turun dari 22,41 persen di 2010 menjadi 7,33 persen pada tahun 2018. Begitu pula, sektor jasa juga turun tajam dalam menyerap lulusan SMK dari 26,46 persen tahun 2010 menjadi 16,13 persen tahun 2018. Yang menarik sektor industri meningkat dalam penyerapan lulusan SMK dari 7,09 persen menjadi 9,13 persen pada periode yang sama. Meningkatkan sektor non pertanian yaitu perdagangan dan industri diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi lulusan SMK untuk bekerja di kedua sektor tersebut sehingga mengurangi pengangguran di Jambi.

Gambar 2.2.35
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi
Tahun 2010 dan 2018 (%)

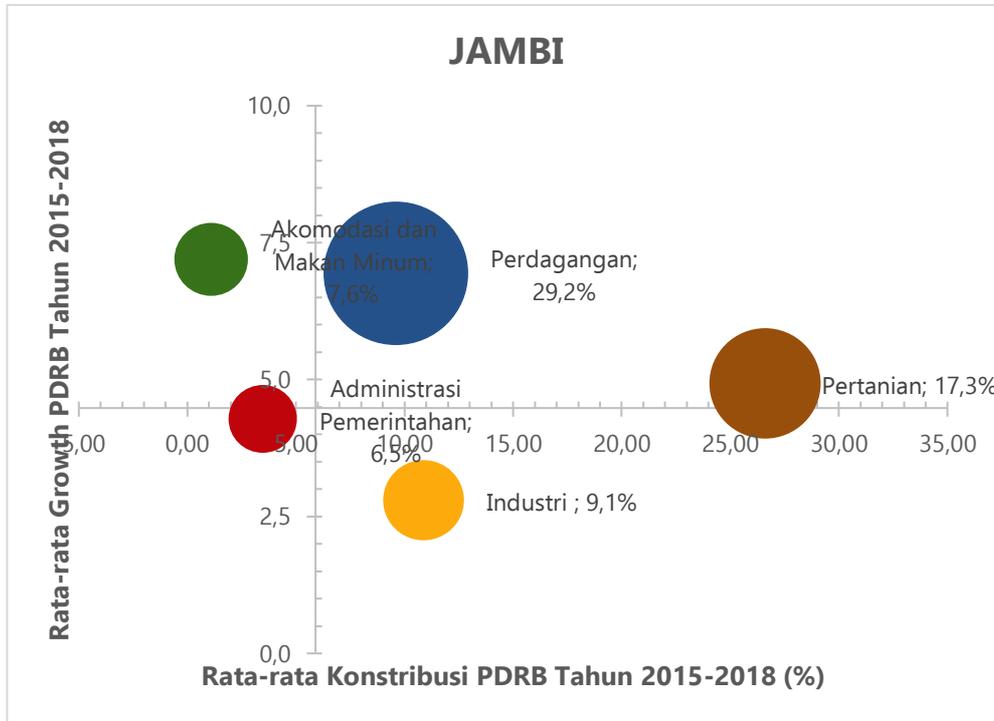


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Jambi, 5 dari 17 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (29,2 persen), pertanian (17,3 persen), industri pengolahan (9,1 persen), akomodasi dan makan minum (7,16 persen), dan administrasi pemerintahan (6,5 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut positif selama periode 2010-2018. Jika dilihat dari kontribusinya, tiga sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri memiliki kontribusi paling besar pada PDRB Jambi (61 persen)

Gambar 2.2.36

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Jambi



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Berdasarkan dari jenis pekerjaan yang dijalani oleh lulusan SMK di Riau, sekitar sepertiganya bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami peningkatan dari 27,83 persen menjadi 35,55 persen. Jabatan lainnya yang masuk dalam tiga besar yang ditempati oleh pekerja lulusan SMK adalah sebagai Tenaga Usaha Penjualan dan Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb. Tenaga penjualan meningkat sedikit dari 21,37 persen menjadi 22,19 persen pada tahun yang sama, namun Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb mengalami penurunan.

Untuk jabatan kerah putih, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan dari 10,43 persen tahun 2010 menjadi 5,10 persen tahun 2018. Salah satu penyebabnya adalah persaingan dengan lulusan diploma yang masuk pada jenis pekerjaan professional.

Gambar 2.2.37

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jenis Pekerjaan (Jabatan) di Provinsi Jambi Tahun 2010 dan 2018 (%)

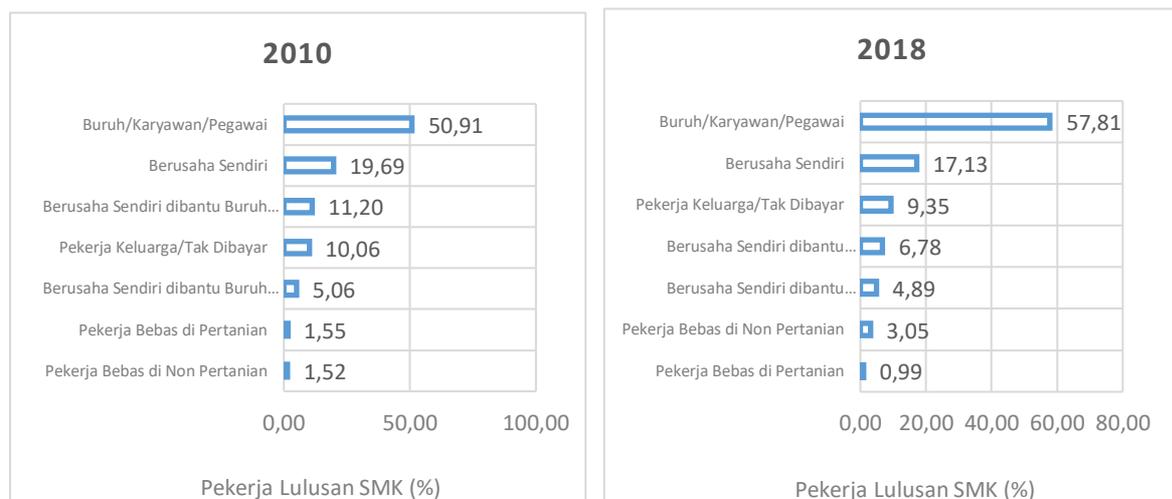


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Menurut status pekerjaan, sebagian lulusan SMK di Provinsi Jambi bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selama periode 2010-2018, persentasenya cenderung meningkat dari 50,91 persen menjadi 57,81 persen. Pada status pekerjaan yang lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja keluarga mengalami penurunan. Dari sisi ketenagakerjaan di Jambi, kondisi ini mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) relatif lebih tinggi dalam menyerap lulusan SMK dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri).

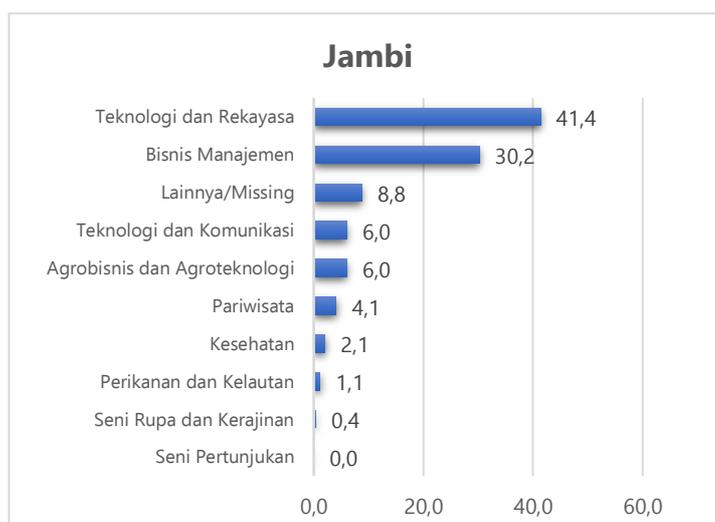
Gambar 2.2.38

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Jambi Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.2.39
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Jambi
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jambi, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 41,4 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 30,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jambi di sektor pertanian, pertambangan, dan industri, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 6 persen.

Tabel 2.2.5
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Jambi Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	21,915	23,094	24,337	25,646	27,026	28,480
Pertambangan	4,349	4,445	4,542	4,642	4,744	4,848
Industri	11,424	11,913	12,424	12,956	13,511	14,089
LGAM	1,602	1,652	1,703	1,755	1,810	1,866
Konstruksi	7,946	8,492	9,077	9,701	10,369	11,083
Perdagangan, Hotel dan Restoran	47,654	51,404	55,449	59,812	64,518	69,595
Transportasi dan Komunikasi	7,079	7,519	7,987	8,485	9,013	9,574
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,093	5,404	5,734	6,084	6,456	6,850
Jasa Kemasyarakatan	19,901	20,464	21,043	21,639	22,251	22,880
Jumlah Tenaga Kerja SMK	126,964	134,388	142,296	150,720	159,696	169,264
Total Tenaga Kerja	1,757,257	1,800,604	1,845,097	1,890,927	1,937,264	1,983,763
Share Tenaga Kerja	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

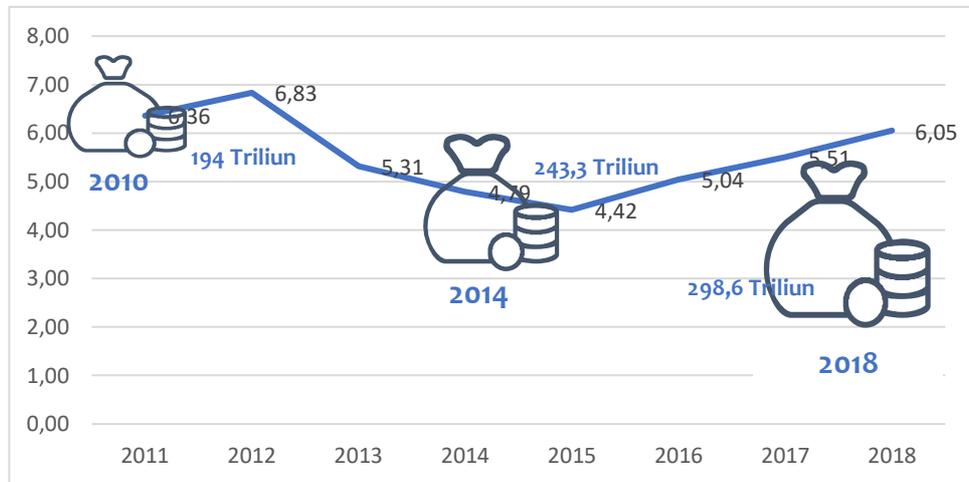


SUMATERA SELATAN

2.2.6. Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 2.2.40

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Selatan

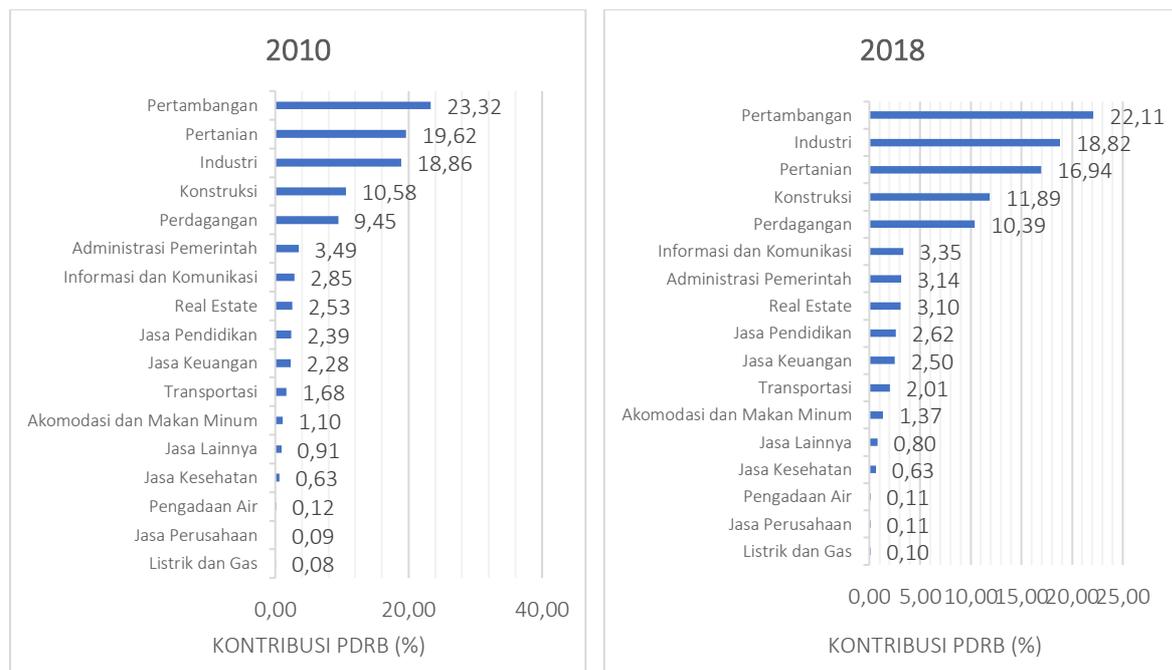


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Pertumbuhan PDRB sebagai indikator pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami penurunan dari 6,36 persen tahun 2010 menjadi 6,05 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan ekonomi Sumsel adalah turunnya pertumbuhan sektor pertanian dan jasa keuangan dan asuransi mulai dari tahun 2010 hingga 2018. Total PDRB Sumsel tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 194,0 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 298,6 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 54 persen.

Gambar 2.2.41

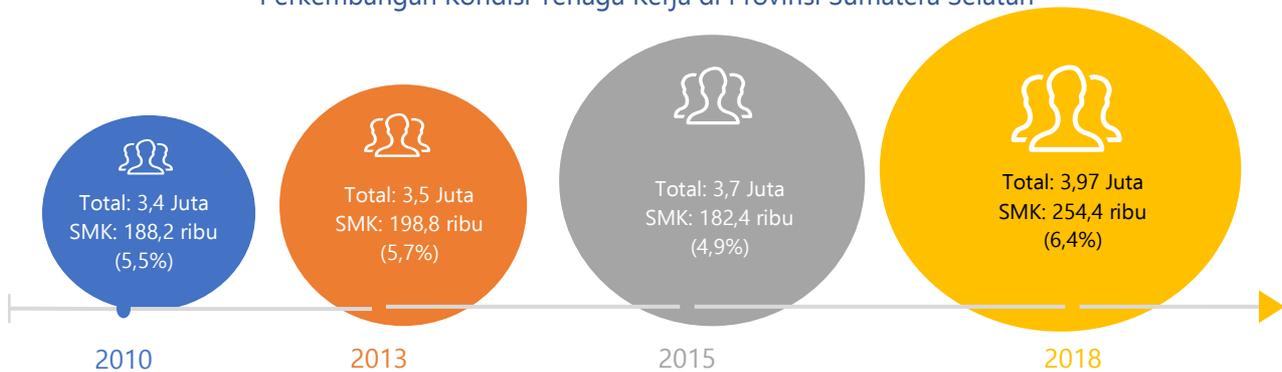
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dari 17 sektor perekonomian, ada 5 sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Sumsel di Tahun 2010 adalah **sektor pertambangan, pertanian, industri, konstruksi dan perdagangan**. Jika dilihat dari kontribusinya, sekitar 62 persen perekonomian di Provinsi Sumsel disumbang oleh sektor pertambangan, pertanian dan industri. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan, sebaliknya sektor industri mengalami peningkatan. Salah satu hasil tambang di Sumsel adalah batu bara dan minyak bumi. Menurunnya permintaan batu bara di tingkat internasional menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan. Pada Tahun 2010, sektor pertambangan menyumbang PDRB sebesar 23,32 persen, namun tahun 2018 turun menjadi 22,11 persen di tahun 2018. Sedangkan sektor industri selama 2010-2018 cenderung stagnan pada angka sekitar 19 persen. Industri pengolahan di Sumsel terutama ditopang oleh industri besar seperti industri bubur kertas (pulp), semen dan pupuk, selain industri kecil dan menengah. Berkembangnya sektor industri ini diharapkan menyerap tenaga kerja SMK.

Gambar 2.2.42
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan

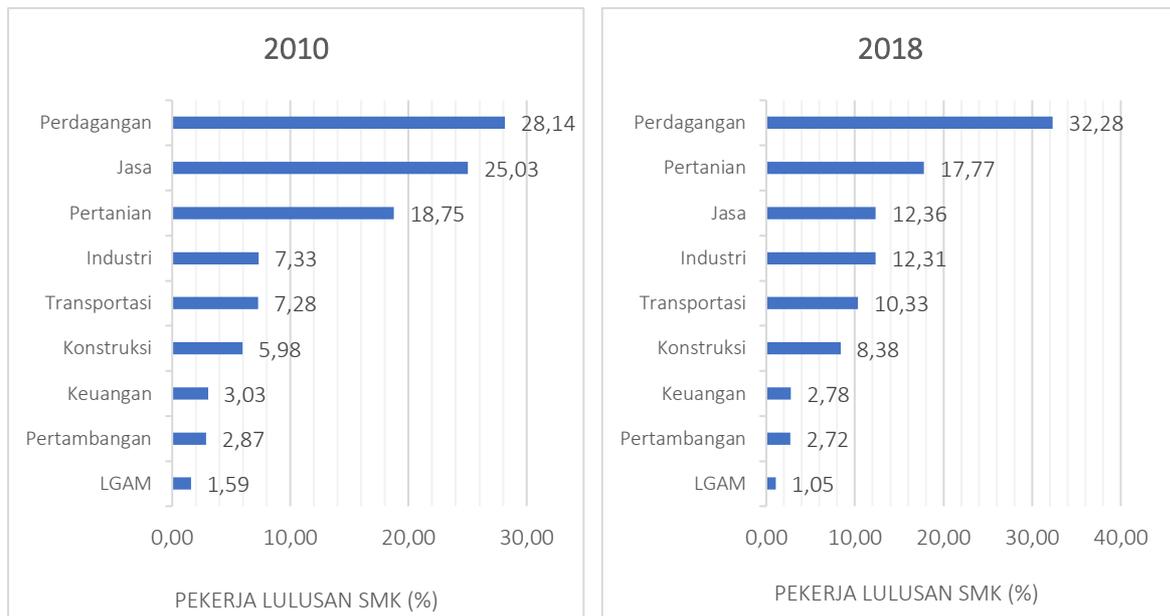


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2010 adalah sebanyak 188,2 ribu tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 254,4 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018, meski hingga tahun 2018, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja hanya sebesar 6,4 persen.

Gambar 2.2.43

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)

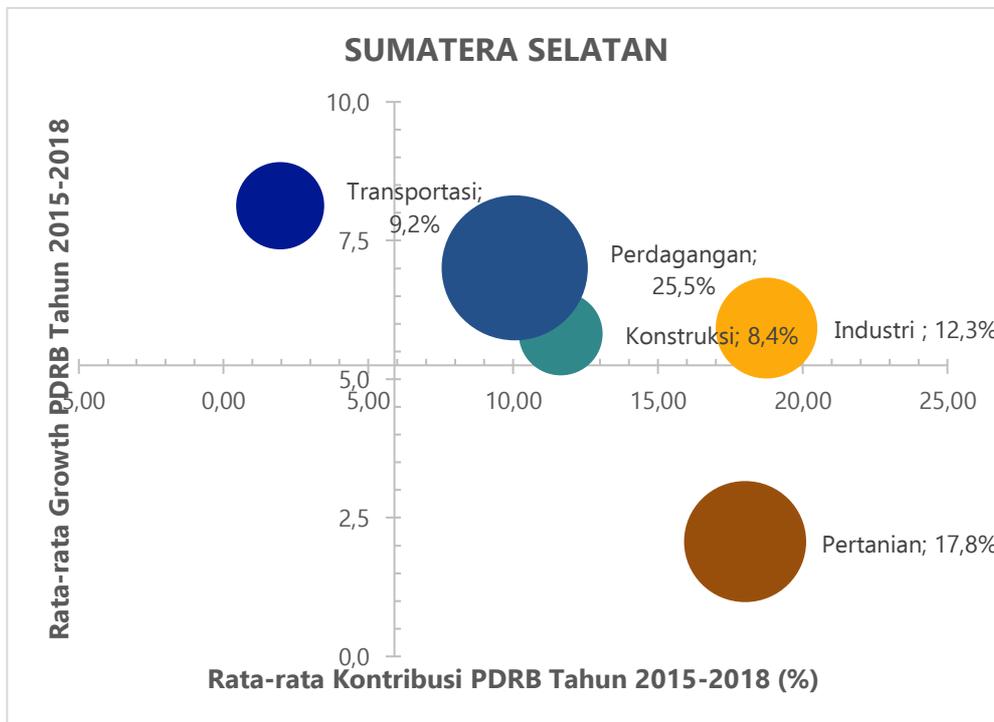


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lapangan usaha atau sektor non pertanian yaitu perdagangan menjadi penyerap pekerja lulusan SMK paling banyak di Provinsi Sumsel pada tahun 2010 dan tahun 2018. Pada tahun 2010, hampir sepertiga (28,14 persen) lulusan SMK di Provinsi Sumsel bekerja di sektor perdagangan dan pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja di sektor tersebut meningkat menjadi 32,28 persen. Penyerapan lulusan SMK di sektor jasa mengalami penurunan cukup besar dari 25,03 persen di 2010 menjadi 12,36 persen pada tahun 2018. Begitu pula, sektor pertanian juga turun dalam menyerap lulusan SMK. Namun, yang menarik sektor industri dan transportasi mengalami kenaikan dalam penyerapan lulusan SMK. Penyerapan sektor industri meningkat dari 7,33 persen menjadi 12,31 persen antara tahun 2010 dan 2018. Begitu pula, sektor transportasi meningkat dari 7,28 persen menjadi 10,33 persen pada periode yang sama. Meningkatkan sektor non pertanian yaitu industri dalam menyerap lulusan SMK diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja. Namun untuk sektor transportasi, ada dugaan kenaikan ini disumbang oleh maraknya transportasi online (baik ojek atau roda empat).

Gambar 2.2.44

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sumatera Selatan



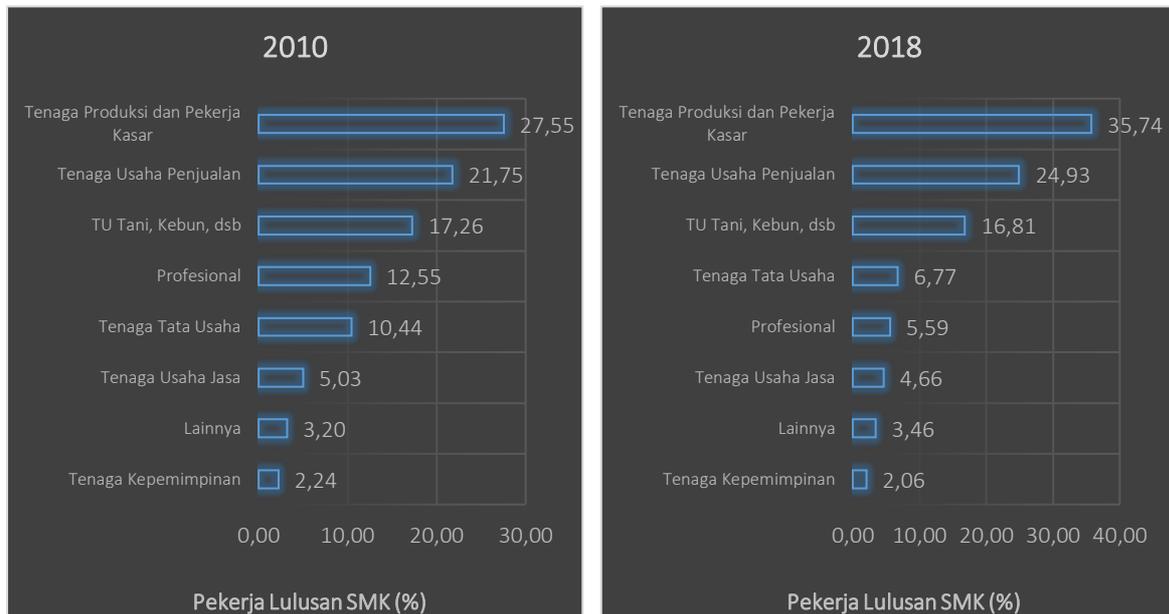
Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di provinsi Sumsel, 5 dari 17 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (25,5 persen), pertanian (17,8 persen), industri pengolahan (12,3 persen), transportasi (9,2 persen), dan konstruksi (8,4 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut positif selama periode 2010-2018, meskipun sektor pertanian pertumbuhannya cenderung turun. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, tiga sektor yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri memiliki kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi Sumsel (58 persen).

Berdasarkan dari jenis pekerjaan atau jabatan, sekitar sepertiga dari lulusan SMK di Sumsel bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar meningkat dari 27,55 persen menjadi 35,74 persen. Yang termasuk tenaga produksi dan pekerja kasar adalah pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi misalnya operator, pemeliharaan, pengolahan, perakitan, pengepakan, penggudangan, laboratorium, pesuruh di bagian produksi, dsb. Masih banyak lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja kasar yang tidak sesuai dengan program studi seperti pesuruh, pengangkut barang dsb.

Gambar 2.2.45

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jabatan lainnya yang masuk dalam tiga besar yang ditempati oleh pekerja lulusan SMK adalah sebagai Tenaga Usaha Penjualan dan Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb. Tenaga penjualan meningkat sedikit dari 21,75 persen menjadi 24,93 persen pada tahun yang sama, sedangkan Tenaga Usaha Tani, Kebun, dsb mengalami sedikit penurunan dari 17,26 persen menjadi 16,81 persen. Untuk jabatan kerah putih, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional, teknisi dan sejenisnya mengalami penurunan dari 12,55 persen tahun 2010 menjadi 5,59 persen tahun 2018. Ini perlu menjadi perhatian karena lulusan yang menempati jabatan tenaga produksi dan pekerja kasar namun yang menempati jabatan profesional, teknisi dan sejenisnya cenderung turun. Apakah ini faktor kompetensi yang kurang dari lulusan SMK sehingga kalah bersaing dengan lulusan selain SMK?

Menurut status pekerjaan, sekitar separo lulusan SMK di Provinsi Sumsel bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Selama periode 2010-2018, persentasenya cenderung meningkat dari 47,53 persen menjadi 55,67 persen. Pada status pekerjaan yang lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap kenaikan penurunan. Namun, lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar justru meningkat. Dari sisi ketenagakerjaan di Sumsel, dengan meningkatnya mereka yang bekerja sebagai buruh mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri). Namun, perlu diperhatikan mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga

Gambar 2.2.46

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)

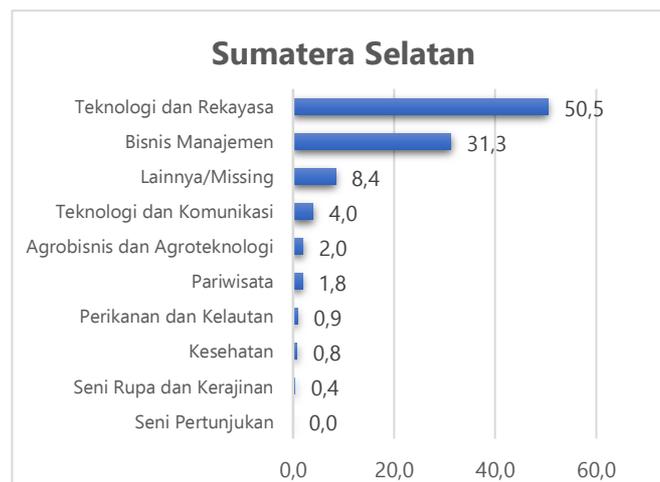


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sumatera Selatan, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 50,5 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 31,3 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan di sektor pertambangan, industri, dan pertanian, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 2,0 persen.

Gambar 2.2.47

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.6

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	46,681	48,185	49,738	51,341	52,996	54,704
Pertambangan	7,081	7,249	7,421	7,597	7,777	7,961
Industri	32,846	34,433	36,097	37,841	39,670	41,587
LGAM	2,794	2,922	3,056	3,196	3,342	3,495
Konstruksi	22,533	23,805	25,148	26,567	28,067	29,651
Perdagangan, Hotel dan Restoran	87,868	94,003	100,567	107,589	115,101	123,138
Transportasi dan Komunikasi	28,029	29,883	31,859	33,966	36,212	38,606
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,644	8,251	8,905	9,612	10,375	11,198
Jasa Kemasyarakatan	32,302	33,176	34,073	34,995	35,942	36,914
Jumlah Tenaga Kerja SMK	267,778	281,906	296,864	312,704	329,481	347,254
Total Tenaga Kerja	4,027,382	4,104,125	4,184,704	4,268,073	4,354,772	4,444,773
Share Tenaga Kerja	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.8

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

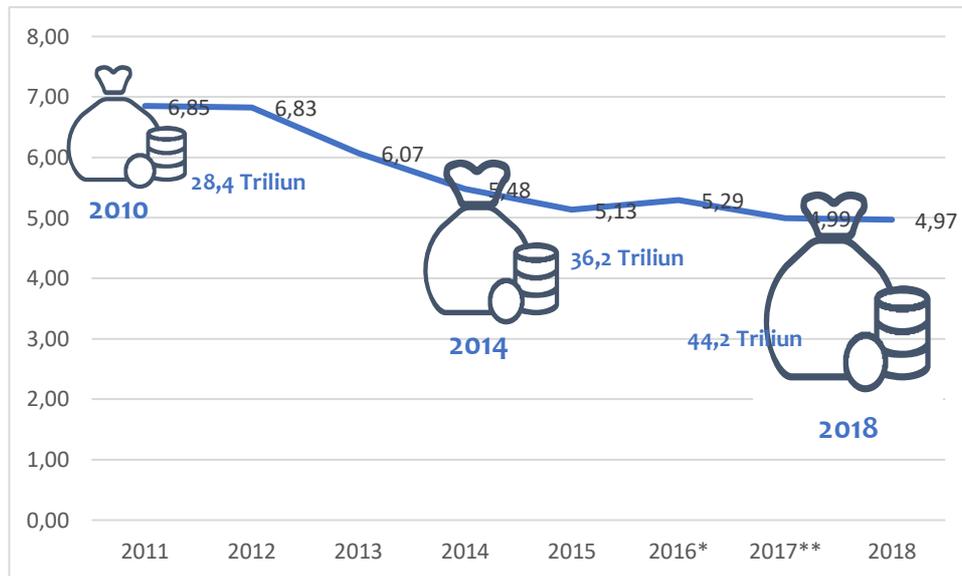


BENGGKULU

2.2.7. Provinsi Bengkulu

Gambar 2.2.48

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu

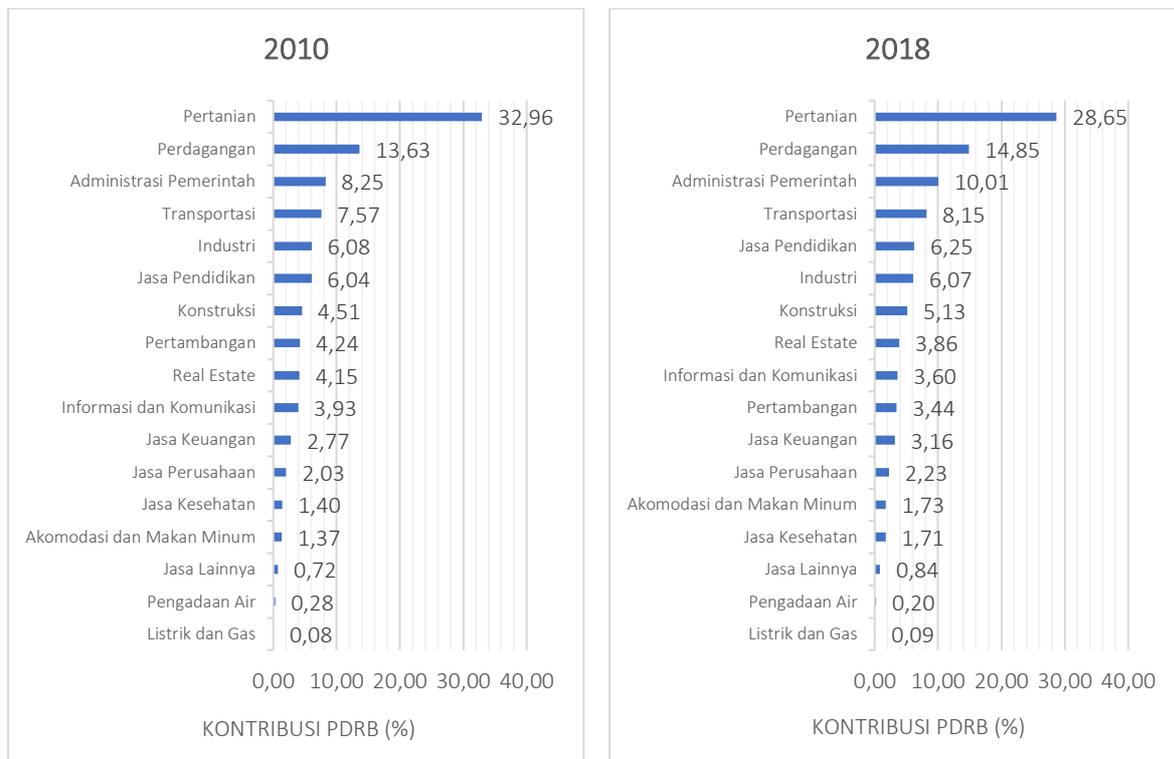


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Pertumbuhan perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu mengalami penurunan dari 6,85 persen tahun 2010 menjadi 4,97 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan ekonomi Bengkulu adalah turunnya pertumbuhan tiga sektor yaitu pertanian, pertambangan dan industri, terutama setelah tahun 2015 hingga hingga 2018. Total PDRB Bengkulu tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 28,35 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 44,17 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 56 persen.

Di Provinsi Bengkulu terdapat 5 sektor (dari 17 sektor perekonomian) yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB di Tahun 2010 adalah **sektor pertanian, perdagangan, administrasi pemerintahan, transportasi, dan industri**. Jika dilihat dari kontribusinya, hampir separo perekonomian di Provinsi Bengkulu disumbang oleh **sektor pertanian dan perdagangan**. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, sedangkan sektor perdagangan dan administrasi pemerintahan mengalami kenaikan. Ada tiga unggulan di sektor pertanian/perkebunan di Bengkulu yaitu kelapa sawit, kopi dan karet. Menurunnya harga komoditas pertanian baik di tingkat nasional dan internasional menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan sektor pertanian di Bengkulu. Pada Tahun 2010, sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 32,92 persen, namun tahun 2018 turun menjadi 28,65 persen di tahun 2018. Sedangkan sektor administrasi pemerintah selama 2010-2018 meningkat 8,25 persen menjadi 10,1 persen. Besarnya jumlah sektor administrasi pemerintah karena jumlah ASN yang relatif banyak mendorong meningkatkan PDRB Bengkulu.

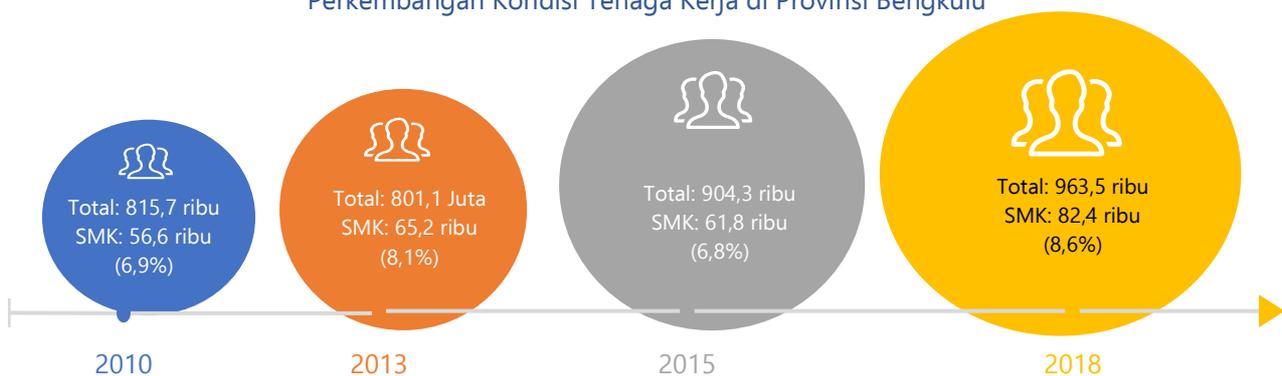
Gambar 2.2.49
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bengkulu
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2010 adalah sebanyak 56,6 ribu tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 82,4 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja sebesar 8,6 persen.

Gambar 2.2.50
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Bengkulu

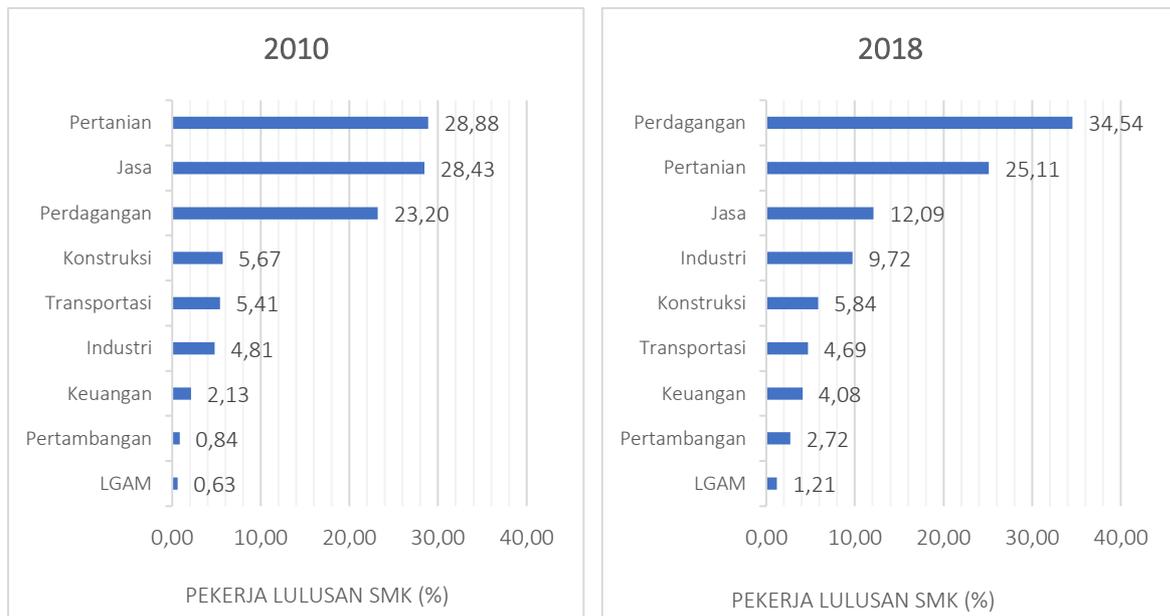


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi Bengkulu, lapangan usaha sektor pertanian masih menjadi penyerap pekerja lulusan SMK terbanyak pada tahun 2010. Hampir sepertiga (28,88 persen) lulusan SMK di Bengkulu bekerja di sektor pertanian tahun 2010. Namun pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja di sektor pertanian turun dan yang menjadi penyerap terbesar lulusan SMK adalah sektor perdagangan. Penyerapan lulusan SMK di

sektor jasa di Bengkulu mengalami penurunan drastis dari 28,43 persen di 2010 menjadi 12,09 persen pada tahun 2018. Di sisi lain, sektor industri mengalami kenaikan dalam penyerapan lulusan SMK. Penyerapan lulusan SMK sektor industri meningkat dari 4,81 persen menjadi 9,72 persen antara tahun 2010 dan 2018. Namun untuk sektor transportasi mengalami sedikit penurunan dalam menyerap lulusan SMK dari 5,41 persen menjadi 4,69 persen pada periode yang sama. Sektor konstruksi cenderung stabil dalam menyerap lulusan SMK. Berkembangnya industri di Bengkulu terutama ditopang oleh industri pengolahan kopi, cangkang sawit dan perikanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja lulusan SMK.

Gambar 2.2.51
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bengkulu
Tahun 2010 dan 2018 (%)

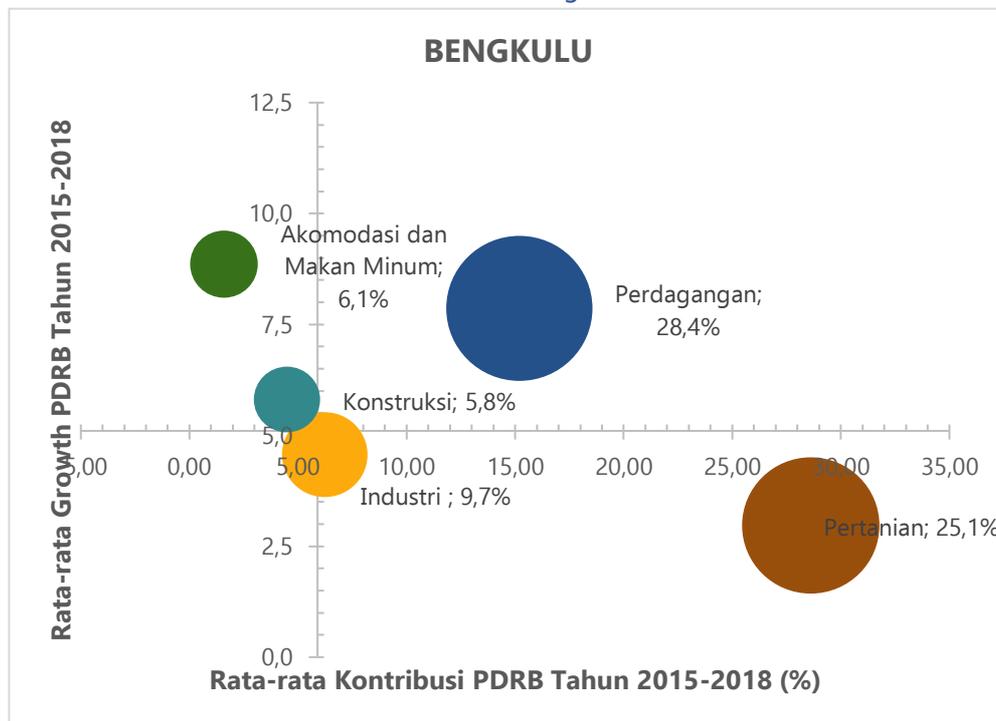


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Bengkulu, ada 5 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (28,4 persen), pertanian (25,1 persen), industri pengolahan (9,7 persen), akomodasi, makanan dan minum (6,1 persen), dan konstruksi (5,8 persen). Pertumbuhan PDRB pada lima sektor di Bengkulu positif selama periode 2010-2018, meskipun beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan pertumbuhannya cenderung turun. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, tiga sektor yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan industri memiliki kontribusi sebesar 50 persen.

Gambar 2.2.52

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Bengkulu

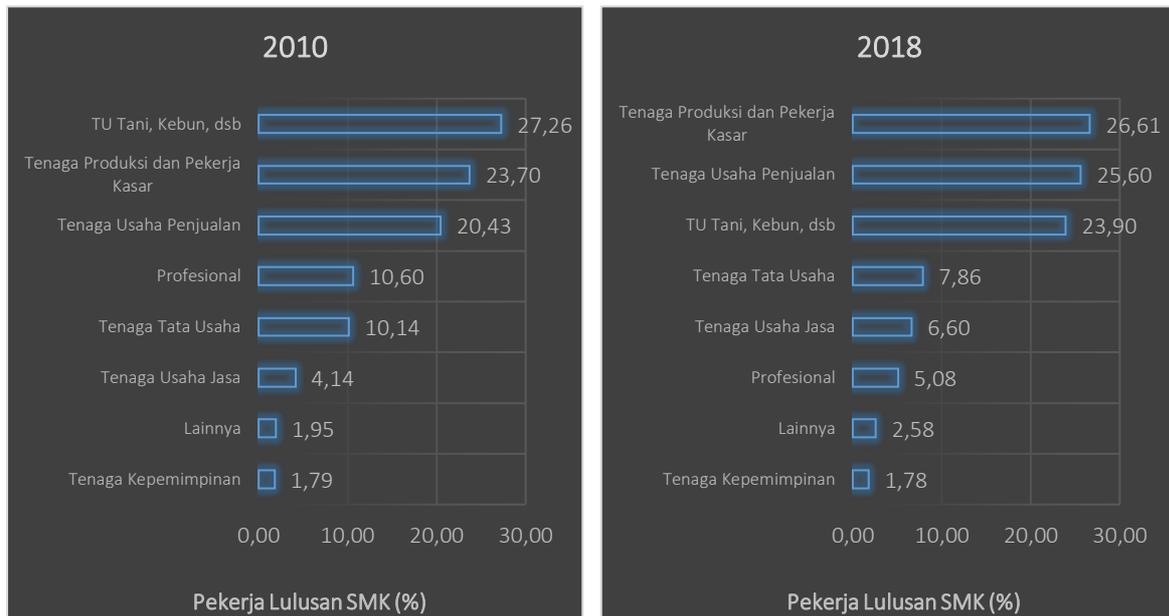


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sekitar sepertiga dari lulusan SMK di Provinsi Bengkulu bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, perkebunan dsb diikuti tenaga produksi dan pekerja kasar pada tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, perkebunan dsb turun dari 27,26 persen menjadi 23,90 persen. Tahun 2018 jenis pekerjaan tenaga produksi dan pekerja kasar mendominasi lulusan SMK di Bengkulu. Tenaga usaha penjualan juga mengalami kenaikan antara tahun 2010 dan 2018.

Ada perubahan jenis pekerjaan lulusan SMK, dari pertanian menjadi tenaga produksi dan pekerja kasar dan tenaga penjualan. Perubahan ini disebabkan oleh upah di sektor pertanian yang lebih rendah sehingga kurang diminati lulusan SMK. Namun, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional, teknisi dan sejenisnya mengalami penurunan dari 10,60 persen tahun 2010 menjadi 6,60 persen tahun 2018. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena lulusan yang menempati jabatan tenaga produksi dan pekerja kasar naik, namun yang menempati jabatan profesional, teknisi dan sejenisnya cenderung turun. Kompetensi lulusan SMK perlu ditingkatkan sehingga dapat menduduki posisi profesional, teknisi dan sejenisnya melalui berbagai pelatihan tambahan.

Gambar 2.2.53
 Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Bengkulu
 Tahun 2010 dan 2018 (%)

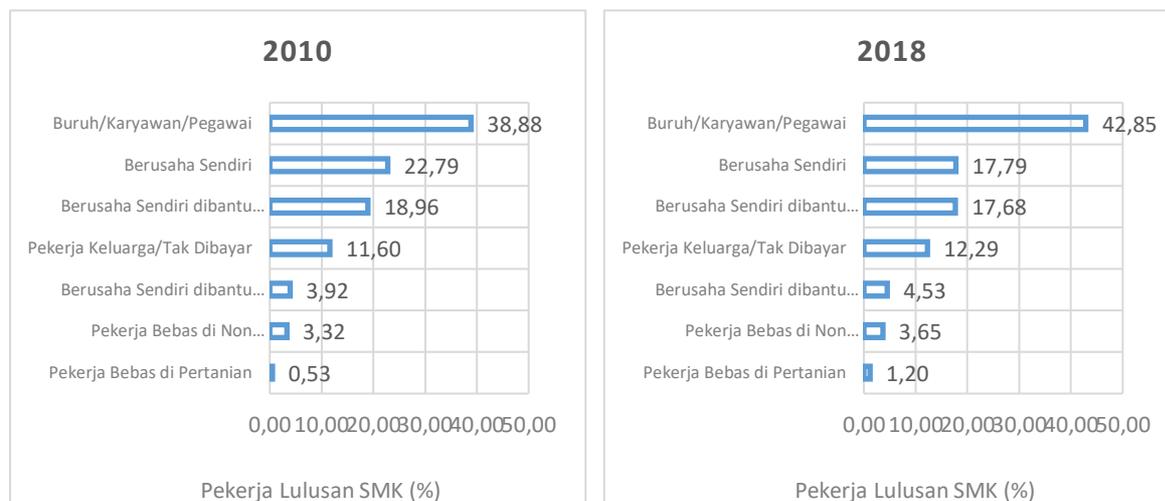


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari status pekerjaan, hampir separuh lulusan SMK di Bengkulu bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase yang bekerja sebagai buruh/karyawan cenderung meningkat dari 38,88 persen menjadi 42,85 persen. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap turun.

Namun, lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar justru meningkat. Meningkatnya lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) dalam menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri). Namun, perlu diperhatikan mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Bekerja di sektor formal lebih menjanjikan karena lebih terlindungi dari jaminan sosial dibandingkan sektor formal. Namun, sayangnya untuk sektor formal usaha mikro dan kecil seringkali mengabaikan jaminan sosial bagi pekerjanya.

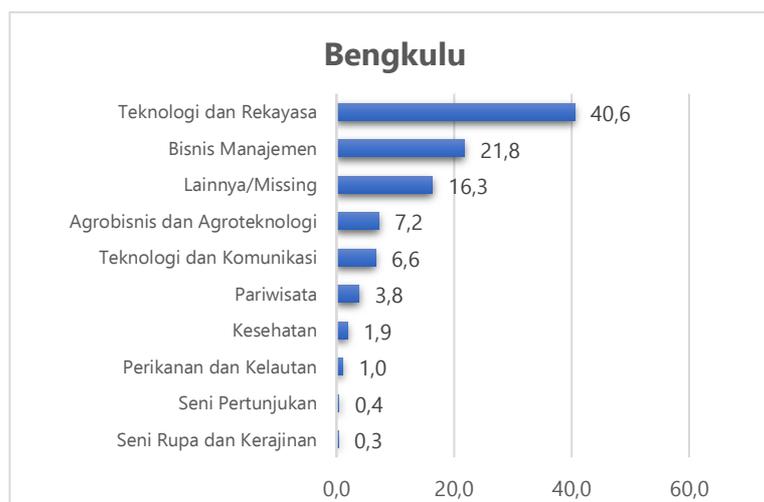
Gambar 2.2.54
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Bengkulu
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Bengkulu, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 40,6 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajen yakni sebesar 21,8 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu di sektor pertanian, perdagangan, dan administrasi pemerintah maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 7,2 persen.

Gambar 2.2.55
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Bengkulu
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.7**Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024**

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	22,636	24,758	27,079	29,618	32,394	35,431
Pertambangan	2,347	2,456	2,570	2,689	2,814	2,944
Industri	8,869	9,813	10,857	12,012	13,290	14,705
LGAM	1,057	1,120	1,186	1,257	1,331	1,410
Konstruksi	5,382	6,022	6,737	7,537	8,433	9,435
Perdagangan, Hotel dan Restoran	32,308	36,665	41,610	47,221	53,589	60,816
Transportasi dan Komunikasi	4,270	4,718	5,213	5,760	6,364	7,032
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	3,799	4,291	4,847	5,475	6,185	6,986
Jasa Kemasyarakatan	10,730	11,551	12,434	13,385	14,409	15,511
Jumlah Tenaga Kerja SMK	91,400	101,394	112,534	124,955	138,809	154,269
Total Tenaga Kerja	981,790	1,003,694	1,026,314	1,049,788	1,073,800	1,098,399
Share Tenaga Kerja	9.3	10.1	11.0	11.9	12.9	14.0

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



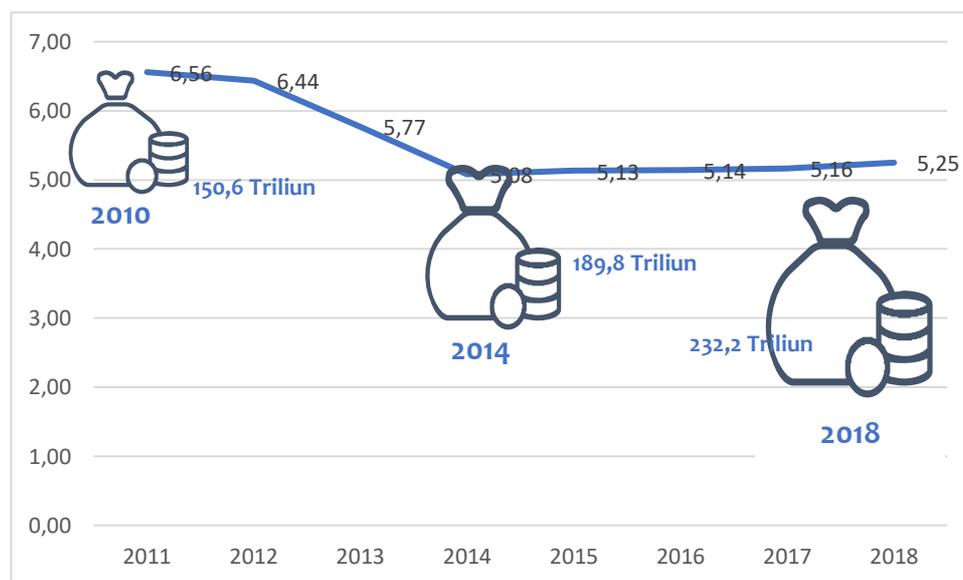
LAMPUNG

2.2.8. Provinsi Lampung

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung yang dilihat pertumbuhan PDRB mengalami penurunan dari 6,56 persen tahun 2010 menjadi 5,25 persen tahun 2018. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Lampung salah satu faktornya disebabkan oleh turunnya pertumbuhan sektor pertanian dan pertambangan, terutama setelah tahun 2014 hingga hingga 2018. Tahun 2013 sektor pertambangan di Lampung pernah tumbuh hingga 11,47 persen. Total PDRB Provinsi Lampung tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 150,6 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 232,2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 54 persen.

Gambar 2.2.56

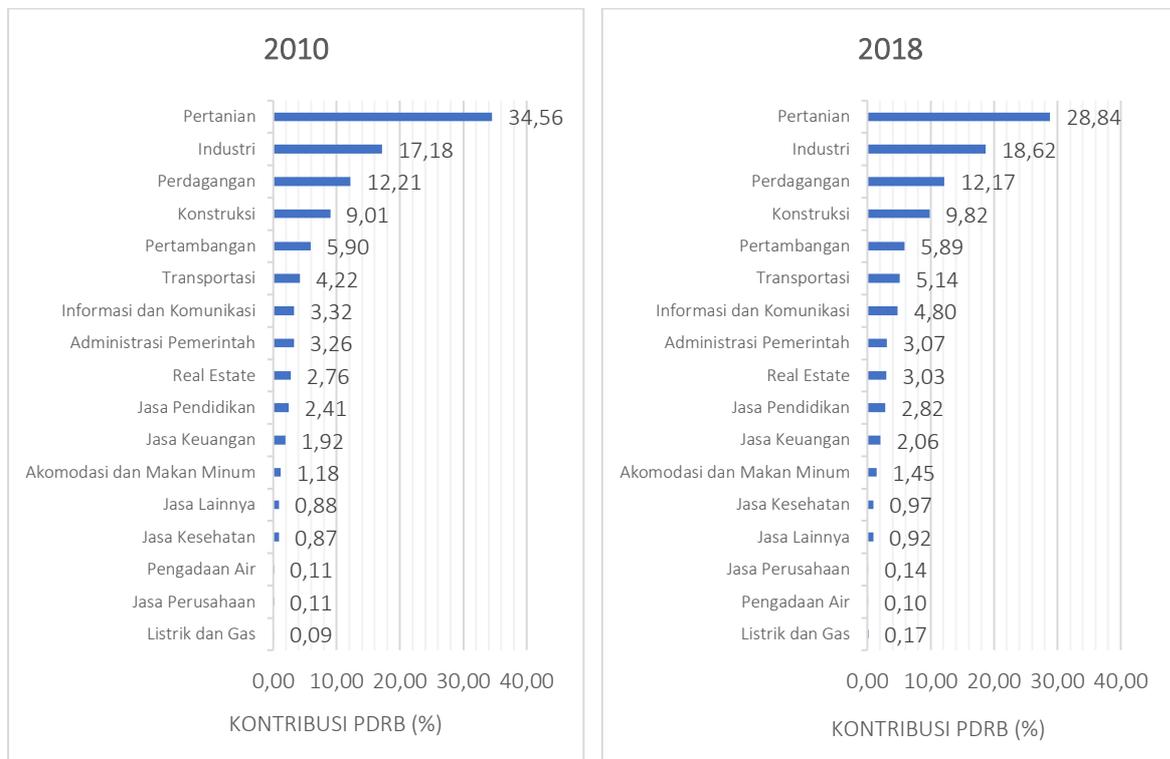
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

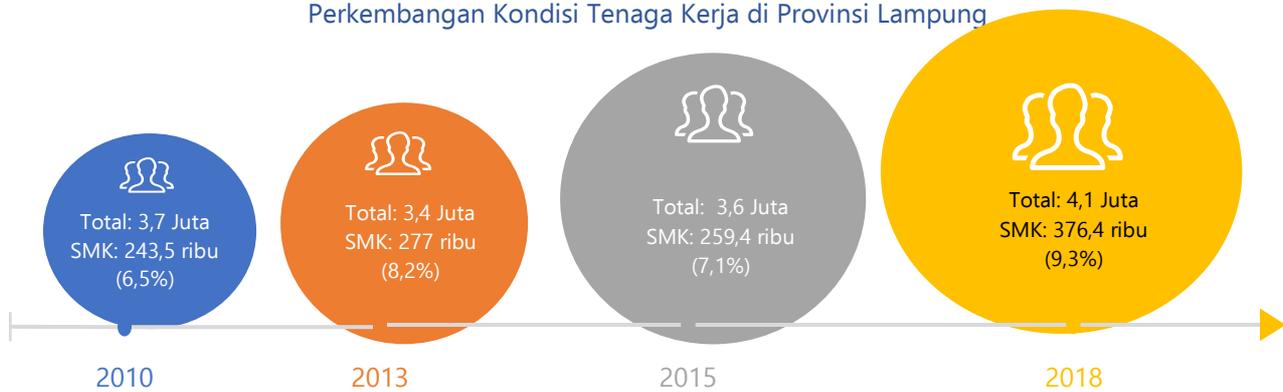
Ada lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2010 yaitu **sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan**. Jika dilihat dari kontribusinya, hampir separo perekonomian di Provinsi Lampung disumbang oleh tiga sektor yaitu **sektor pertanian, industri dan perdagangan**. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertanian dan industri mengalami penurunan menjadi 47,46 persen. Sektor pertanian terutama tanaman pangan di Lampung diharapkan dapat mendukung swasembada pangan nasional. Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pada tiga program peningkatan padi, jagung dan kedelai (pajale) dan bawang merah dan cabe (babe) melalui program upaya khusus (upsus). Sedangkan, industri andalan di Lampung adalah industri pangan dan industri karet, barang dari karet dan plastik.

Gambar 2.2.57
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Gambar 2.2.58
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Lampung



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

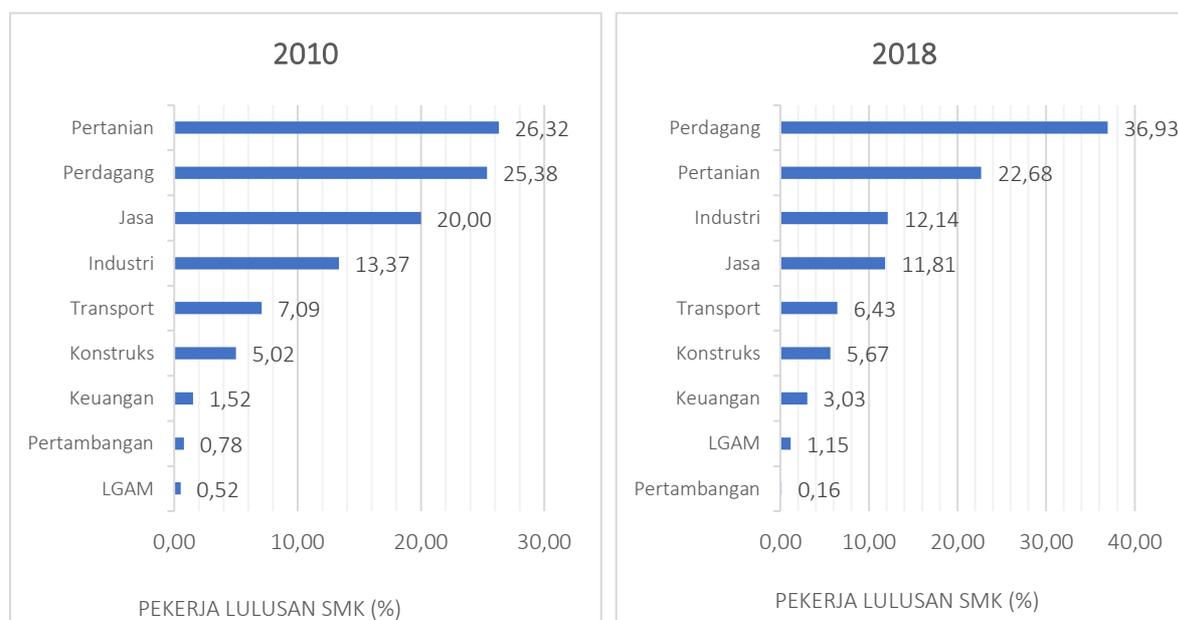
Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Lampung pada Tahun 2010 adalah sebanyak 243,5 ribu tenaga kerja dan mengalami peningkatan hingga menjadi 376,4 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni sebesar 9,3 persen.

Di Provinsi Lampung, lapangan usaha sektor pertanian masih menjadi penyerap pekerja lulusan SMK terbanyak pada tahun 2010 disusul sektor perdagangan. Lulusan SMK di Provinsi Lampung yang

bekerja di sektor pertanian tahun 2010 sebanyak 26,32 persen. Namun pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 22,68 persen. Sektor perdagangan menjadi penyerap lulusan SMK terbanyak tahun 2018 sebesar 36,93 persen. Penyerapan lulusan SMK di sektor jasa di Lampung mengalami penurunan drastis dari 20,0 persen di 2010 menjadi 11,81 persen pada tahun 2018. Begitu pula penyerapan lulusan SMK di sektor industri juga mengalami penurunan dari 13,37 menjadi 12,14 persen pada periode yang sama.

Untuk sektor transportasi juga mengalami penurunan dalam menyerap lulusan SMK. Menurunnya penyerapan lulusan SMK di sektor industri, jasa dan transportasi turun, tapi di sisi lain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor kenaikan tajam. Berkembangnya perdagangan terutama perdagangan eceran termasuk *online shop* menjadi salah satu penyerap lulusan SMK. Makin banyaknya mobil dan motor juga mendorong berkembangnya bengkel yang menyerap lulusan SMK. Jika sektor industri pengolahan yang menjadi unggulan provinsi Lampung ditingkatkan akan lebih banyak lagi lulusan SMK yang terserap di pasar kerja.

Gambar 2.2.59
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung
Tahun 2010 dan 2018 (%)

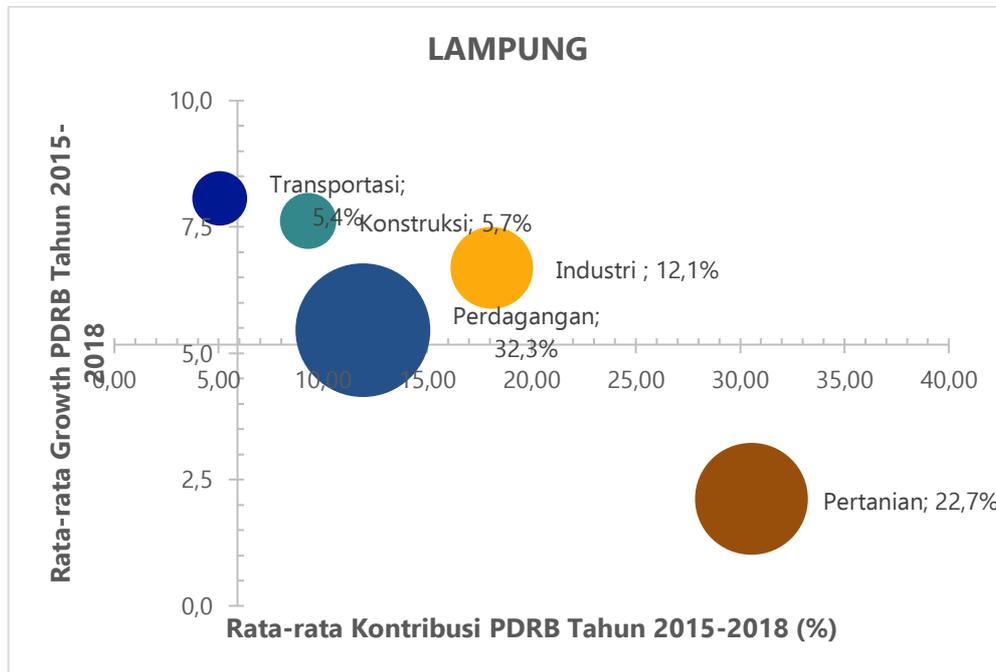


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Lampung, ada 5 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (32,3 persen), pertanian (22,7 persen), industri pengolahan (12,1 persen), konstruksi (5,7 persen) dan transportasi (5,4 persen). Pertumbuhan PDRB pada lima sektor di Provinsi Lampung positif selama periode 2010-2018, meskipun beberapa sektor seperti pertanian, dan pertambangan pertumbuhannya cenderung turun. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, tiga sektor yaitu sektor pertanian, perdagangan dan industri memiliki kontribusi sebesar 60 persen.

Gambar 2.2.60

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Lampung

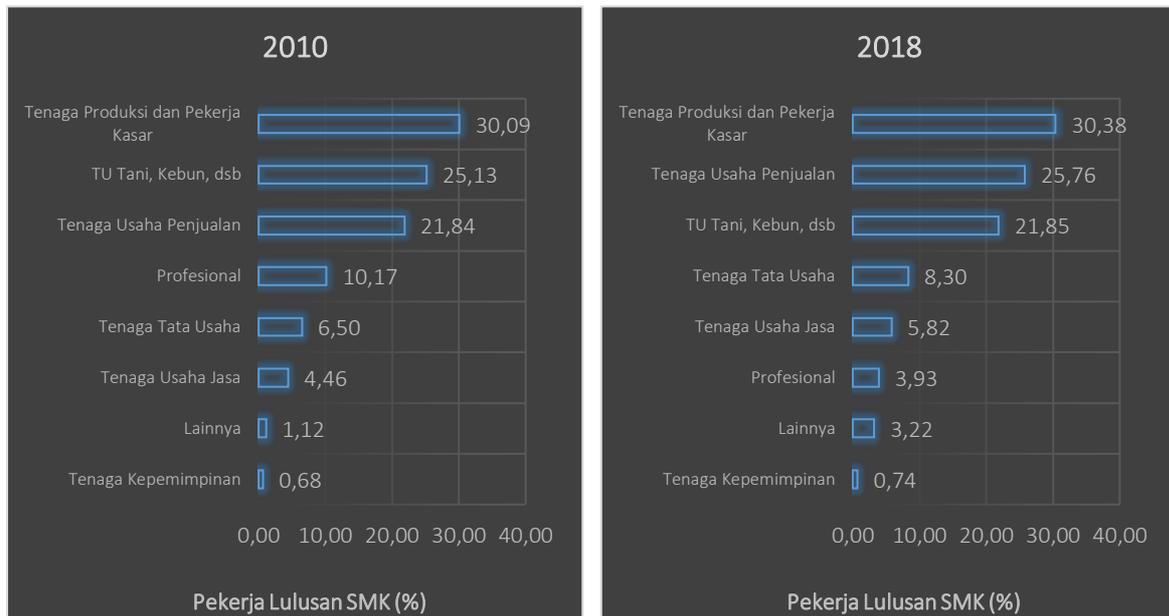


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sepertiga dari lulusan SMK di Provinsi Lampung bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar pada tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung stagnan pada angka 30 persen. Namun, tenaga usaha penjualan mengalami kenaikan dari 21,84 persen tahun 2010 menjadi 25,76 persen tahun 2018. Antara tahun 2010 dan 2018 tenaga usaha pertanian dan perkebunan mengalami penurunan dalam menyerap lulusan SMK. Tampaknya usaha pertanian mulai kurang diminati oleh lulusan SMK; mereka beralih dari pertanian menjadi tenaga produksi dan pekerja kasar dan tenaga penjualan. Salah satu penyebabnya adalah upah di sektor pertanian yang lebih rendah sehingga kurang diminati lulusan SMK. Sektor pertanian memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Di sisi lain, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional, teknisi dan sejenisnya mengalami penurunan drastis dari 10,17 persen tahun 2010 menjadi 3,39 persen tahun 2018.

Banyaknya lulusan SMK yang bekerja pada jabatan pekerja kasar mengindikasikan kompetensi mereka masih kurang untuk bekerja sebagai profesional atau teknisi. Mereka kalah bersaing dengan lulusan dari Diploma sehingga terpaksa bekerja pada tingkat pekerjaan yang rendah.

Gambar 2.2.61
 Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Lampung
 Tahun 2010 dan 2018 (%)

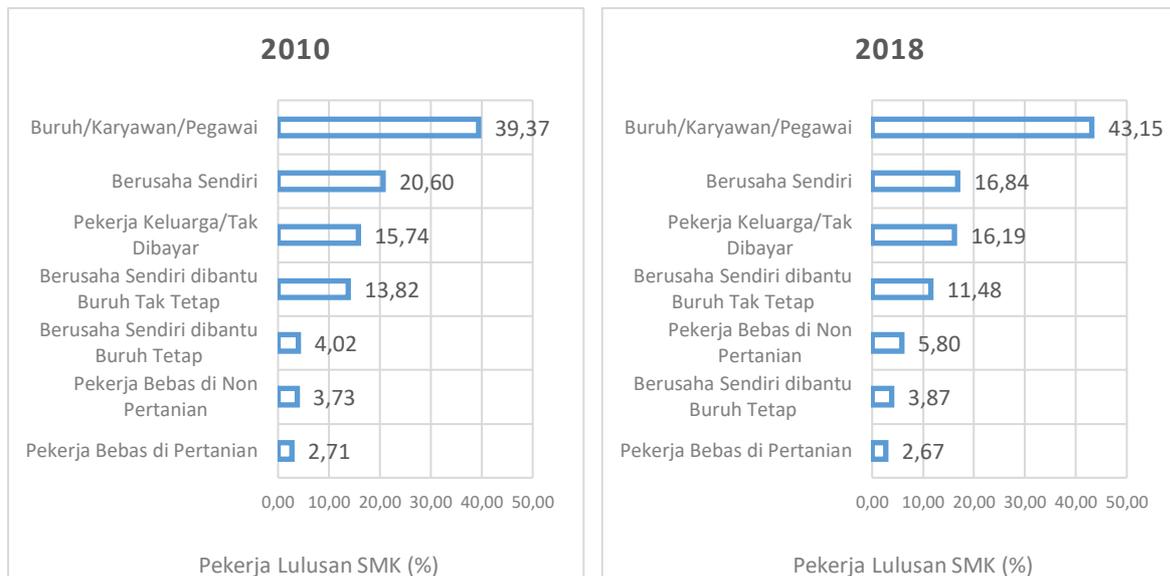


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari status pekerjaan, sekitar 40 persen lulusan SMK di Provinsi Lampung bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase yang bekerja sebagai buruh/karyawan cenderung meningkat dari 39,37 persen menjadi 43,15 persen. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap mengalami penurunan. Namun, lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar justru sedikit meningkat. Meningkatnya lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri).

Bekerja di sektor formal lebih terlindungi karena mendapat jaminan sosial dibandingkan sektor informal, selain gaji tetap. Namun, beberapa usaha mikro dan kecil masih belum mampu membayar upah sesuai dengan UMP dan tidak memberikan jaminan sosial. Ini tantangan dalam peningkatan kesejahteraan pekerja.

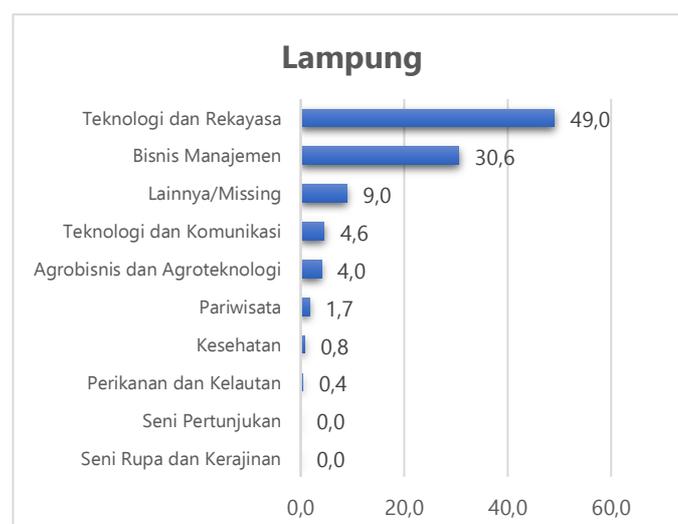
Gambar 2.2.62
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Lampung
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Lampung, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 49,0 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 30,6 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah di sektor pertanian, industri, dan perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 4 persen.

Gambar 2.2.63
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Lampung
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.8

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	87,830	90,352	92,945	95,614	98,359	101,182
Pertambangan	629	646	664	682	700	719
Industri	48,338	51,146	54,117	57,260	60,586	64,106
LGAM	4,595	4,897	5,220	5,563	5,929	6,320
Konstruksi	22,467	23,653	24,903	26,218	27,602	29,060
Perdagangan, Hotel dan Restoran	147,028	155,525	164,512	174,019	184,075	194,713
Transportasi dan Komunikasi	26,132	28,216	30,467	32,898	35,522	38,356
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	12,232	13,109	14,049	15,057	16,136	17,294
Jasa Kemasyarakatan	45,914	47,402	48,938	50,525	52,162	53,853
Jumlah Tenaga Kerja SMK	395,163	414,945	435,814	457,834	481,073	505,603
Total Tenaga Kerja	4,112,638	4,177,918	4,247,101	4,320,987	4,397,645	4,478,989
Share Tenaga Kerja	9.6	9.9	10.3	10.6	10.9	11.3

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



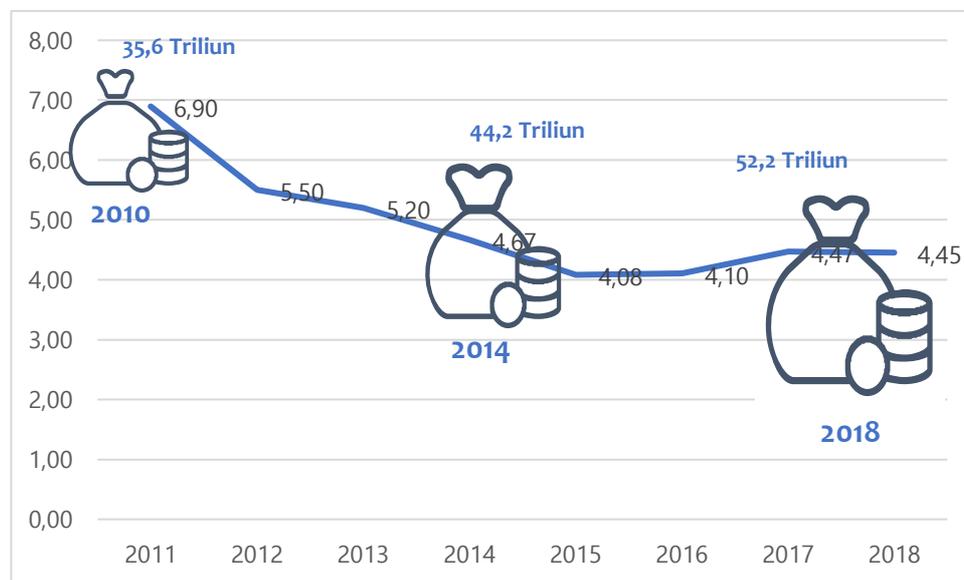
BANGKA BELITUNG

2.1.9. Provinsi Bangka Belitung (Babel)

Pertumbuhan perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Babel mengalami penurunan dari 6,90 persen tahun 2010 menjadi 4,45 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan ekonomi Babel adalah turunnya pertumbuhan tiga sektor yaitu pertanian dan pertambangan. Tahun 2018 pertumbuhan sektor pertambangan bahkan mencapai minus 1,08 persen. Makin berkurangnya timah di Babel diiringi harga timah yang turun menjadi salah satu faktor melemahnya pertumbuhan sektor pertambangan. Total PDRB Bengkulu tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 35,6 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 52,2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 47 persen.

Gambar 2.2.64

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Bangka Belitung

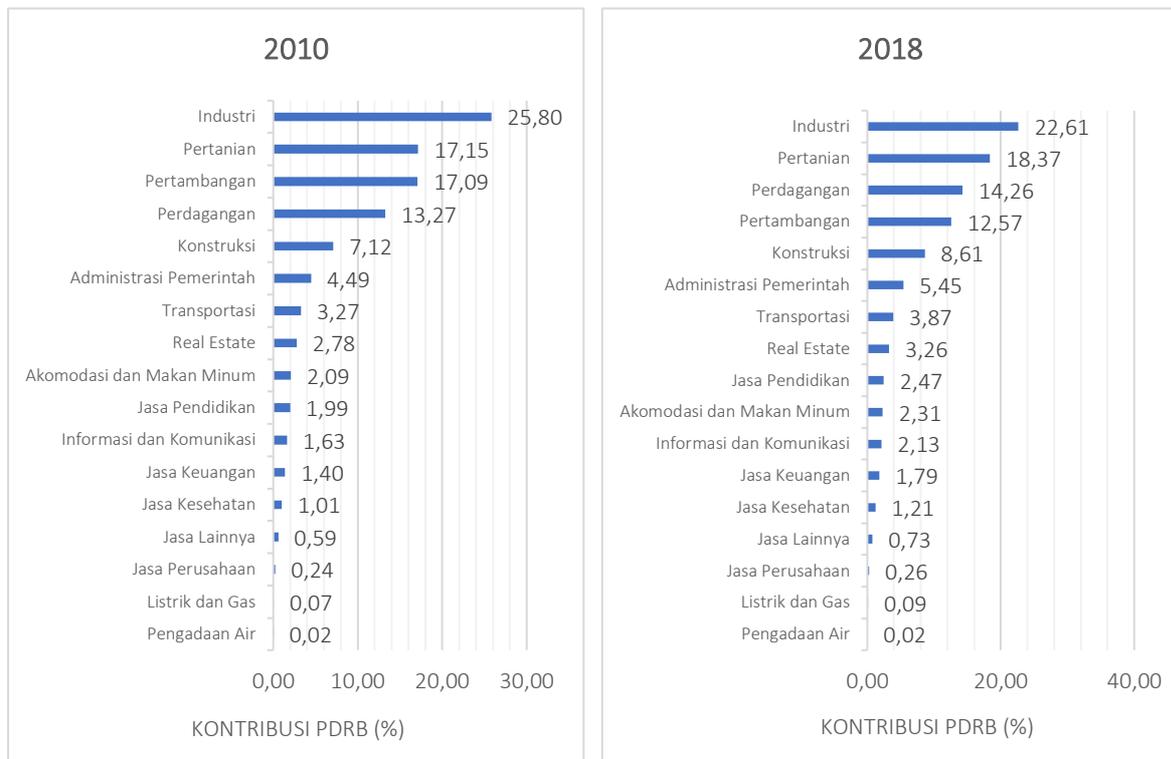


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi Babel terdapat 5 sektor (dari 17 sektor perekonomian) yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB di Tahun 2010 yaitu **sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan konstruksi**. Jika dilihat dari kontribusinya, lebih dari separo perekonomian di Provinsi Babel disumbang oleh tiga sektor yaitu **sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan**. Industri pengolahan di Babel memberikan kontribusi paling besar baik tahun 2010 dan 2018, meskipun ada trend penurunan. Industri yang berkembang di Babel meliputi industri kecil (kerajinan) pengolahan hasil laut dan agro industri. Industri menengah meliputi industri tepung kaolin, batu granit, pembuatan batu bata, industri pengolahan karet, kelapa sawit, pengolahan kayu dan pendukung usaha perikanan (pabrik es). Dibandingkan dengan kondisi tahun 2018, kontribusi sektor pertanian mengalami kenaikan sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, sektor industri pengolahan menyumbang PDRB sebesar 25,80 persen, namun tahun 2018 turun menjadi 22,61 persen di tahun 2018. Sedangkan sektor perdagangan selama 2010-2018 meningkat dari 13,27 persen menjadi 14,26 persen.

Gambar 2.2.65

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2018 (%)

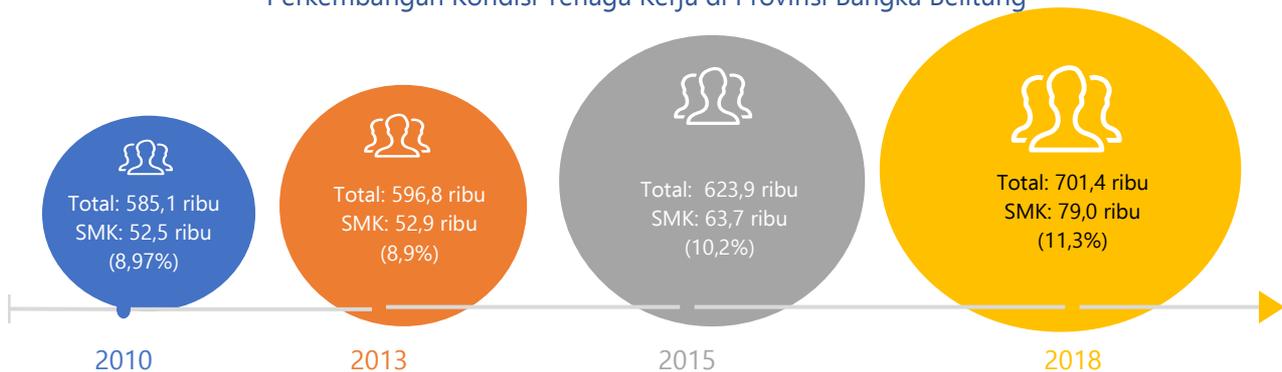


Sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2010 adalah sebanyak 52,5 ribu tenaga kerja dan mengalami peningkatan hingga menjadi 79 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni sebesar 11,3 persen.

Gambar 2.2.66

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Bangka Belitung

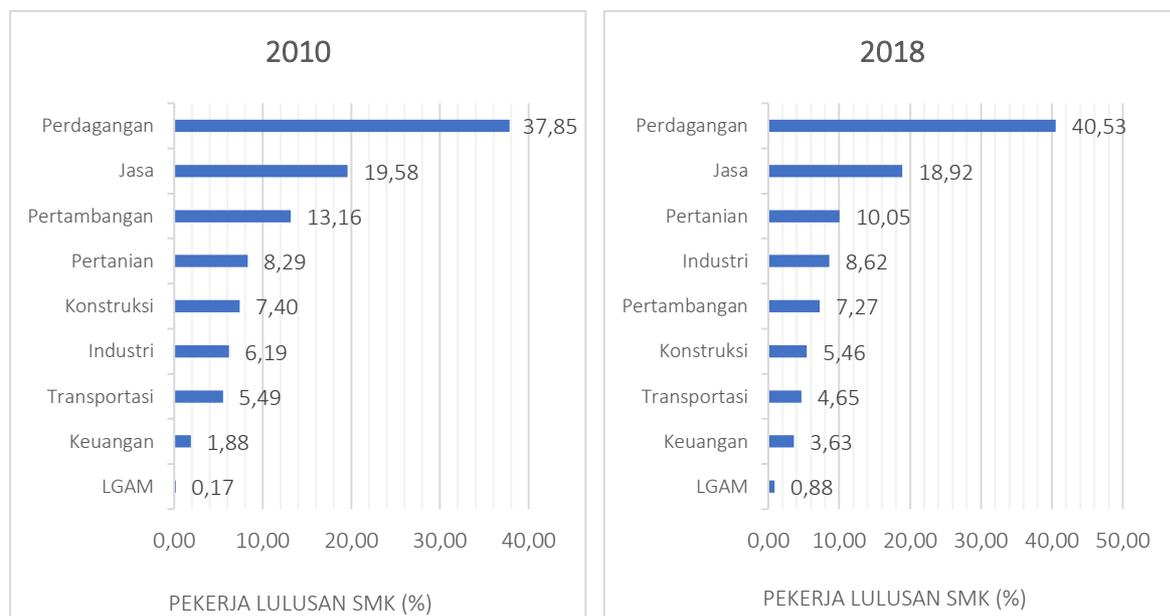


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi Babel, lapangan usaha (sektor) perdagangan masih menjadi penyerap pekerja lulusan SMK terbanyak pada tahun 2010 disusul sektor jasa. Lulusan SMK di Provinsi Babel yang bekerja di sektor pertanian tahun 2010 sebanyak 26,32 persen. Namun pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja di sektor perdagangan mengalami kenaikan menjadi 40,53 persen dari sebelumnya 37,85 persen tahun

2010. Sektor perdagangan menjadi penyerap lulusan SMK terbanyak baik tahun 2010 maupun tahun 2018. Penyerapan lulusan SMK di sektor jasa di Babel mengalami penurunan dari 19,58 persen di 2010 menjadi 18,92 persen pada tahun 2018. Namun, penyerapan lulusan SMK di sektor pertambangan mengalami penurunan drastis 13,16 persen menjadi 7,27 persen pada periode yang sama. Makin berkurangnya area tambang timah dibarengi dengan turunnya harga timah menyebabkan permintaan tenaga kerja lulusan SMK di sektor pertambangan turun. Yang menarik penyerapan lulusan SMK di sektor industri justru mengalami kenaikan, begitu pula penyerapan di sektor pertanian (termasuk perikanan) juga meningkat.

Gambar 2.2.67
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bangka Belitung
Tahun 2010 dan 2018 (%)

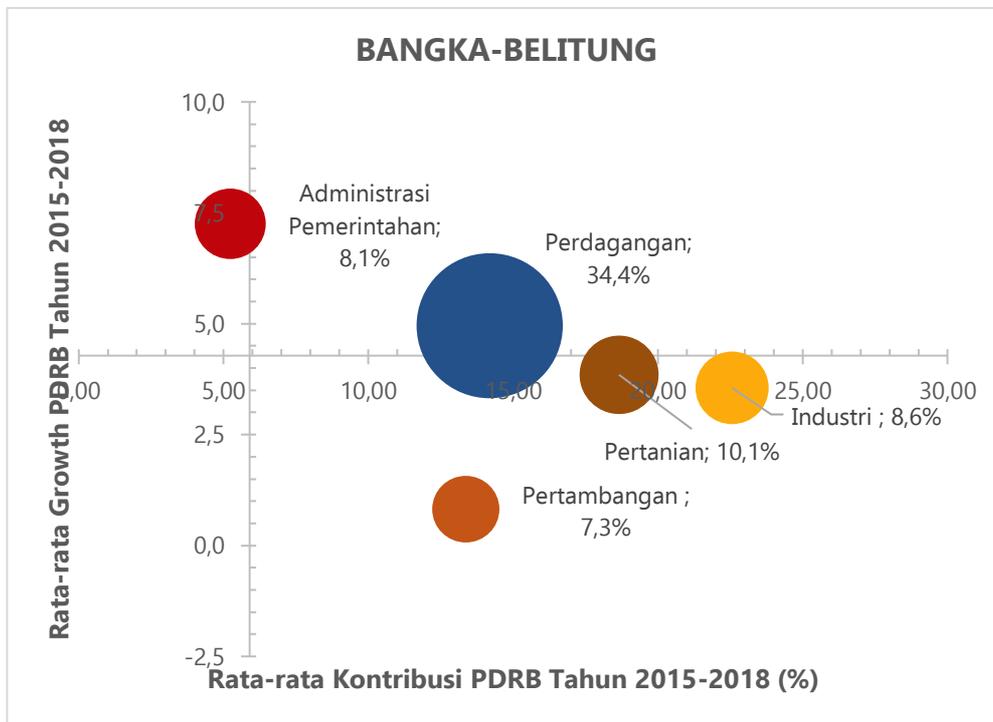


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Babel, ada 5 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (34,4 persen), pertanian (10,1 persen), industri pengolahan (8,6 persen), administrasi pemerintahan (8,1 persen). Pertumbuhan PDRB pada lima sektor di Provinsi Babel positif selama periode 2010-2018, meskipun beberapa sektor seperti pertanian, perdagangan dan pertambangan pertumbuhannya cenderung turun. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah pertumbuhannya turun lebih besar yaitu minus 5,60 persen tahun 2018. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB tahun 2018, tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan memiliki kontribusi sebesar 55 persen.

Gambar 2.2.68

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Bangka Belitung



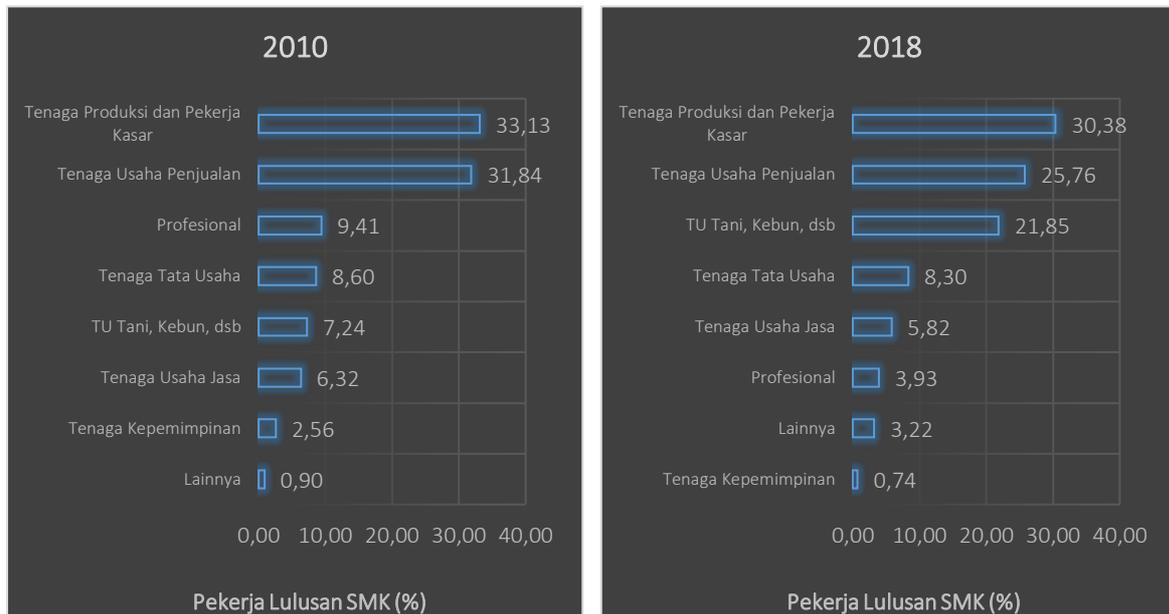
Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sepertiga dari lulusan SMK di Provinsi Babel bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar pada tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung turun dari 33,13 persen menjadi 30,38 persen. Antara tahun 2010 dan 2018 tenaga usaha pertanian dan perkebunan mengalami kenaikan tajam dalam menyerap lulusan SMK dari 7,24 persen menjadi 21,85 persen.

Tampaknya kenaikan usaha pertanian/perikanan karena mulai berkurangnya penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan. Namun, tenaga usaha penjualan mengalami penurunan dari 31,85 persen tahun 2010 menjadi 25,76 persen tahun 2018. Begitu pula, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional, teknisi dan sejenisnya mengalami penurunan drastis dari 9,41 persen tahun 2010 menjadi 3,93 persen tahun 2018. Banyaknya lulusan SMK yang bekerja pada jabatan pekerja kasar menunjukkan kompetensi mereka masih kurang untuk bekerja sebagai profesional atau teknisi.

Gambar 2.2.69

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2018 (%)



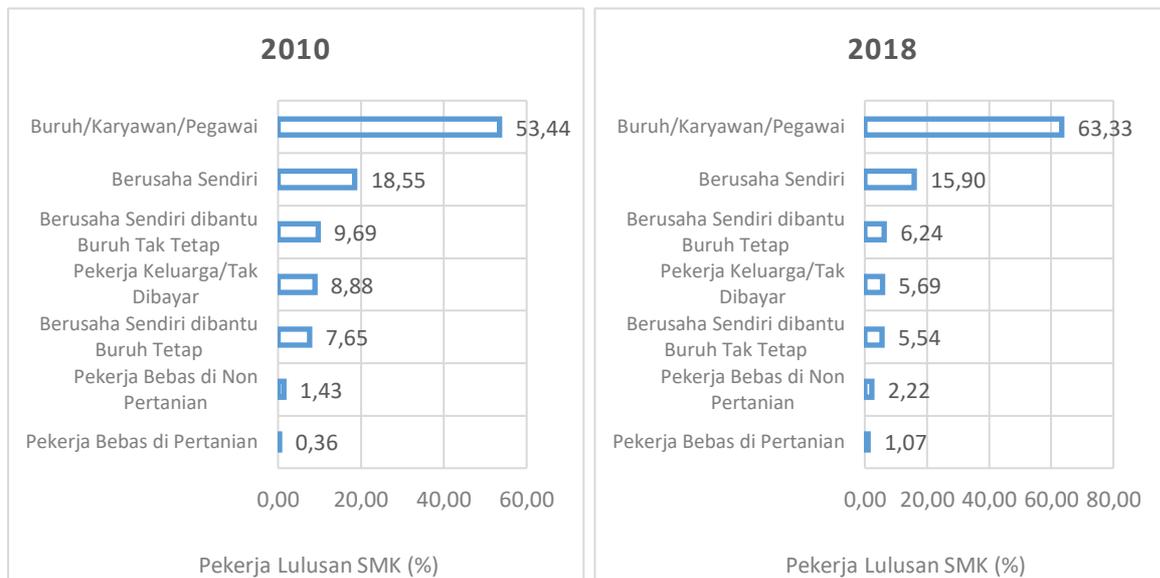
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari status pekerjaan, lebih dari separo lulusan SMK di Provinsi Babel bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase yang bekerja sebagai buruh/karyawan cenderung meningkat dari 53,44 persen menjadi 63,33 persen. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap mengalami penurunan. Lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar juga menurun.

Meningkatnya lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri). Bekerja di sektor formal lebih terlindungi karena mendapat jaminan sosial dibandingkan sektor formal, selain gaji tetap. Namun, banyak kasus usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak mampu membayar upah buruhnya sesuai dengan UMP dan tidak memberi jaminan perlindungan sosial (BPJS kesehatan/ketenagakerjaan).

Gambar 2.2.70

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2018 (%)

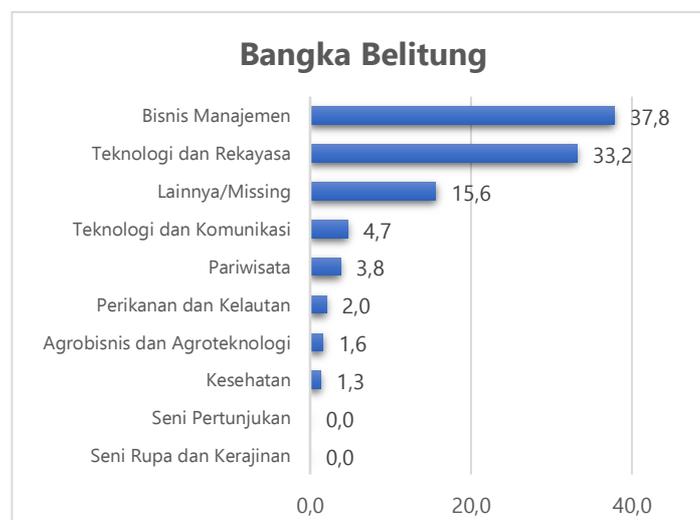


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Bangka Belitung, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Bisnis Manajemen paling besar proporsinya yakni 37,8 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa yakni sebesar 33,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung di sektor industri, pertanian, dan perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 1,6 persen.

Gambar 2.2.71

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.9

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	8,361	8,796	9,254	9,736	10,242	10,775
Pertambangan	5,770	5,797	5,824	5,852	5,879	5,907
Industri	7,004	7,201	7,404	7,612	7,827	8,047
LGAM	731	772	815	861	909	961
Konstruksi	4,568	4,837	5,121	5,423	5,742	6,080
Perdagangan, Hotel dan Restoran	33,939	35,958	38,097	40,363	42,764	45,308
Transportasi dan Komunikasi	3,914	4,168	4,438	4,726	5,033	5,360
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	3,094	3,335	3,594	3,874	4,175	4,500
Jasa Kemasyarakatan	15,550	16,167	16,809	17,476	18,170	18,891
Jumlah Tenaga Kerja SMK	82,930	87,031	91,357	95,923	100,742	105,829
Total Tenaga Kerja	717,022	736,523	756,817	777,888	799,573	821,847
Share Tenaga Kerja	11.6	11.8	12.1	12.3	12.6	12.9

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



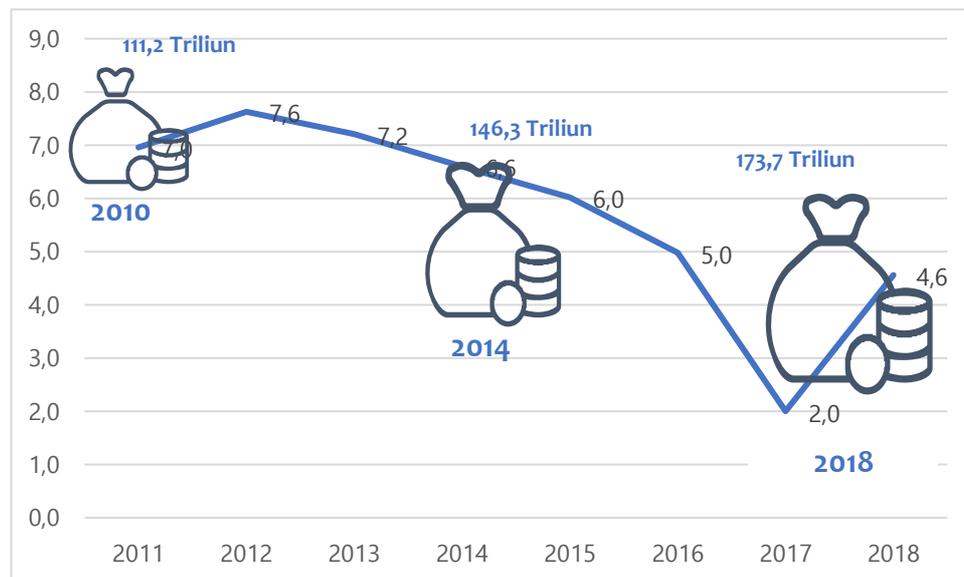
KEPULAUAN RIAU

2.2.10 Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)

Pertumbuhan perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Kepri mengalami penurunan dari 6,96 persen tahun 2010 menjadi 4,56 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan ekonomi Kepri adalah turunnya pertumbuhan tiga sektor yaitu pertanian, pengadaan listrik dan gas yang pada tahun 2018 pertumbuhannya negatif. Industri pengolahan dengan Batam sebagai motor penggerak, tren pertumbuhannya mengalami penurunan. Total PDRB Kepri tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 111,2 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 173,7 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 74 persen.

Gambar 2.2.72

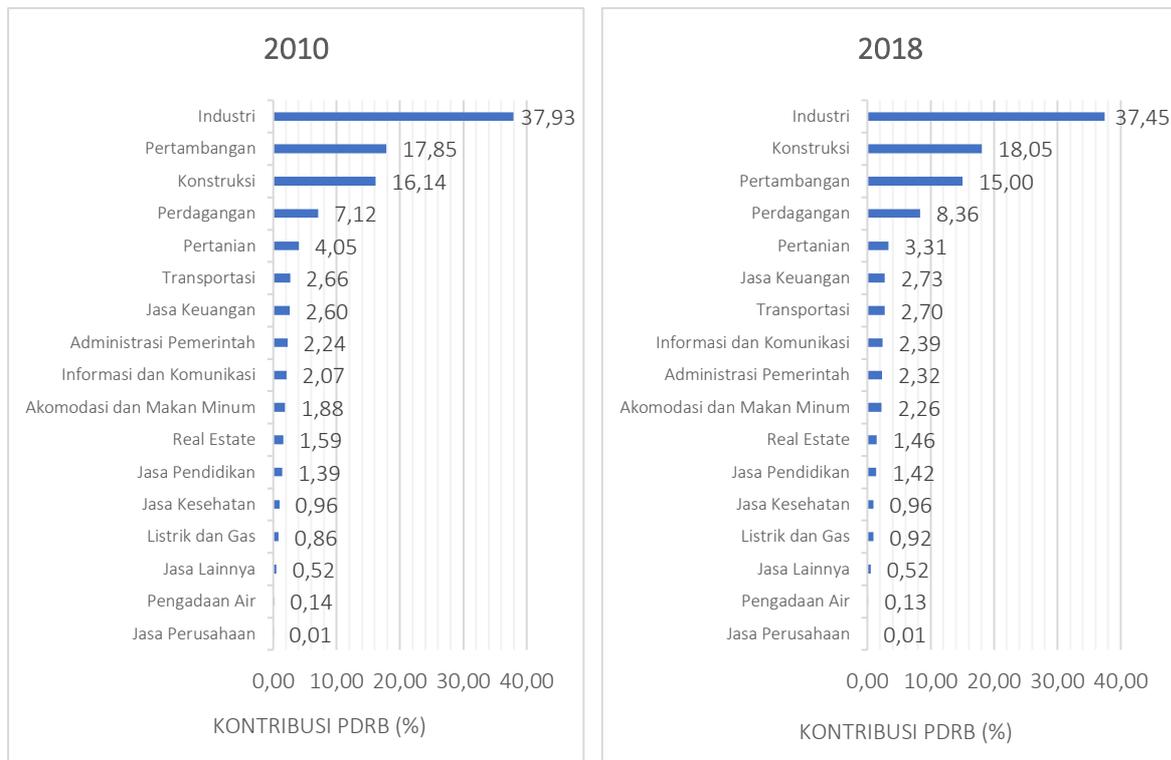
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi Kepri terdapat 5 sektor (dari 17 sektor perekonomian) yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB di Tahun 2010 adalah **sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, administrasi pemerintahan, transportasi, dan industri**. Jika dilihat dari kontribusinya, lebih dari separo perekonomian di Provinsi Kepri disumbang oleh dua sektor yaitu **sektor industri dan pertambangan**. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 dan 2018, kontribusi sektor industri cenderung stagnan, sedangkan sektor pertambangan dan pertanian mengalami penurunan. Sektor konstruksi mengalami kenaikan selama 2010-2108 yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan properti terutama di Batam. Industri pengolahan yang berkembang di Batam adalah elektronik, galangan kapal, dan perawatan pesawat. Namun, pertumbuhan sektor industri di Batam mengalami menurun karena investor yang masuk tidak banyak sementara beberapa industri mulai tutup atau mengurangi produksi yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

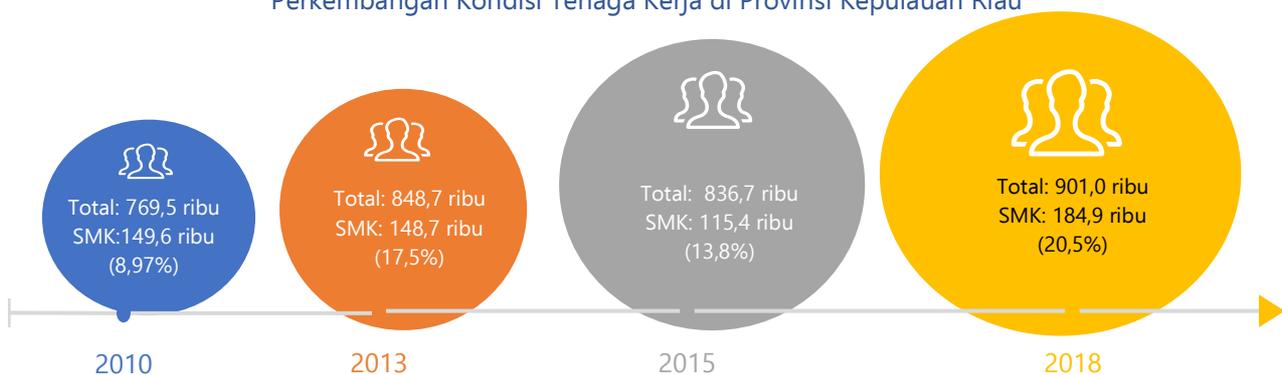
Gambar 2.2.73
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2010 adalah sebanyak 149,6 ribu tenaga kerja dan mengalami peningkatan hingga menjadi 184,9 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni sebesar 20,5 persen.

Gambar 2.2.74
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Riau



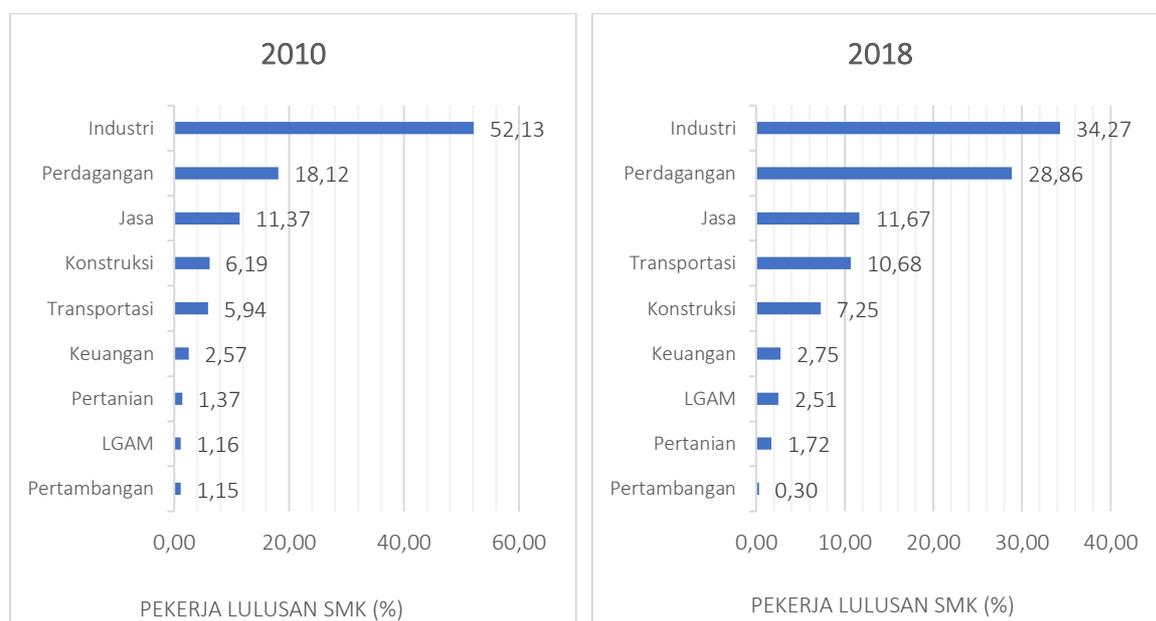
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi Kepri, lapangan usaha (sektor) industri masih menjadi penyerap pekerja lulusan SMK terbanyak pada tahun 2010 disusul sektor perdagangan. Lulusan SMK di Provinsi Babel yang bekerja di sektor industri tahun 2010 sebanyak 52,13 persen, namun pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja

di sektor tersebut mengalami tajam menjadi 34,27 persen. Penyebab turunnya penyerapan lulusan SMK karena pertumbuhan sektor industri yang turun selama 2010-2018, banyak pabrik yang tutup karena tidak permintaan (order) atau karena relokasi ke luar negeri. Sebagai implikasinya, sektor perdagangan meningkat drastis dalam menyerap lulusan SMK dari 18,12 persen tahun 2010 menjadi 28,86 persen tahun 2018. Penyerapan lulusan SMK di sektor transportasi meningkat dua kali lipat 5,94 persen tahun 2010 menjadi 10,68 persen tahun 2018. Diduga kenaikan penyerapan di sektor transportasi karena berkembangnya transportasi online (motor dan mobil) yang membutuhkan banyak driver termasuk lulusan SMK. Berkembangnya proporsi di Batam menjadi salah satu penyumbang meningkatnya penyerapan lulusan SMK di sektor konstruksi.

Gambar 2.2.75

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dan 2018 (%)

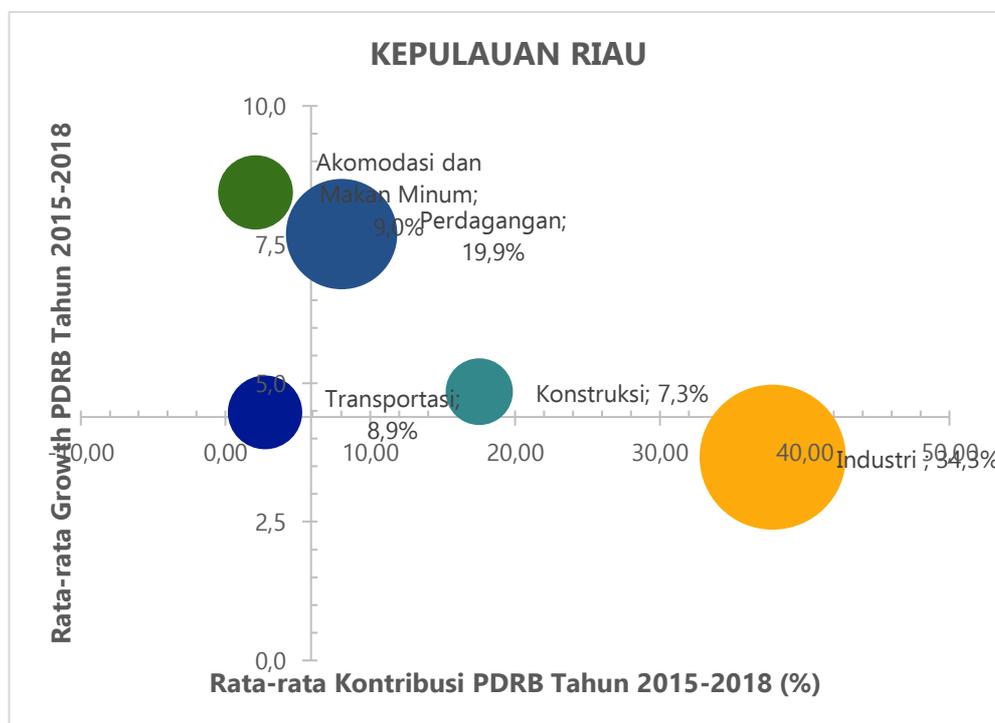


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kepri, ada 5 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor industri (34,3 persen), perdagangan (19,9 persen), akomodasi makanan dan minuman (9,0 persen), konstruksi (8,9 persen) dan konstruksi (7,3 persen). Pertumbuhan PDRB pada lima sektor di Provinsi Kepri positif selama periode 2010-2018, meskipun beberapa sektor seperti industri, pertanian, pertambangan pertumbuhannya cenderung turun, bahkan tahun 2018 pertumbuhan sektor pertanian minus 3,3 persen. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah pertumbuhannya turun menjadi 1,6 persen tahun 2018 dari 8,2 persen tahun 2010. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB tahun 2018, tiga sektor yaitu sektor pertambangan, industri pengolahan dan konstruksi memiliki kontribusi sebesar 70 persen.

Gambar 2.2.76

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari separo dari lulusan SMK di Provinsi Kepri bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar pada tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung turun dari 59,25 persen menjadi 49,29 persen. Antara tahun 2010 dan 2018 tenaga usaha penjualan mengalami kenaikan dalam menyerap lulusan SMK dari 11,37 persen menjadi 16,08 persen. Tenaga tata usaha juga meningkat 2 kali lipat dari 7,13 persen tahun 2010 menjadi 14,84 persen tahun 2018.

Tampaknya mulai dari perubahan penyerapan dari tenaga produksi dan pekerja kasar menjadi tenaga tata usaha. Tenaga usaha penjualan mengalami juga mengalami kenaikan dari 11,37 persen tahun 2010 menjadi 16,08 persen tahun 2018. Namun, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional, teknisi dan sejenisnya mengalami penurunan dari 10,85 persen tahun 2010 menjadi 6,89 persen tahun 2018.

Gambar 2.2.77

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dan 2018 (%)

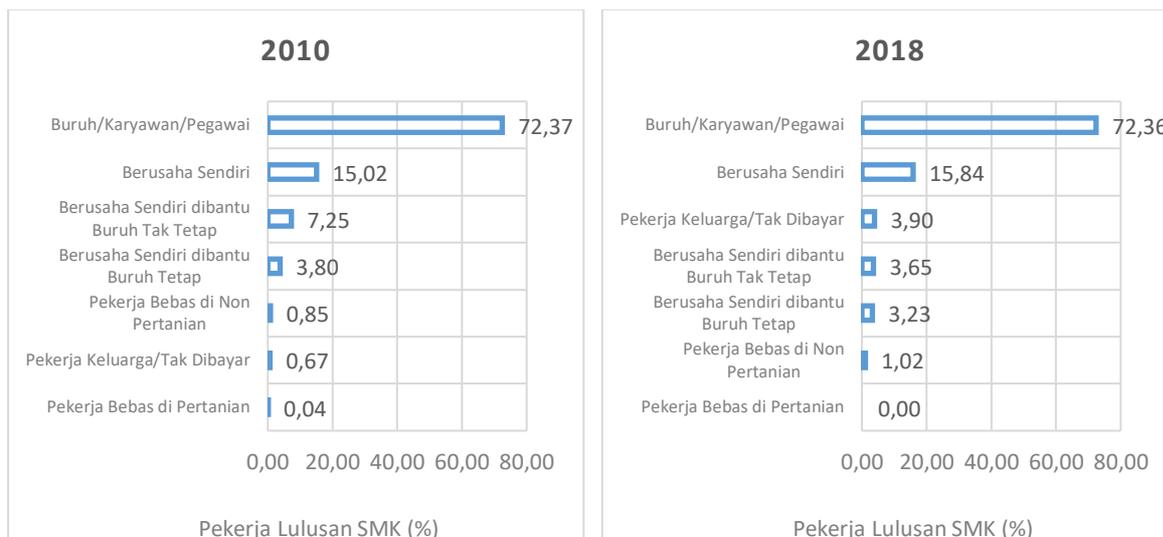


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari status pekerjaan, tiga perempat lulusan SMK di Provinsi Kepri bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase yang bekerja sebagai buruh/karyawan cenderung stagnan pada angka 72 persen. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri cenderung stagnan juga namun dan yang berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap turun.

Gambar 2.2.78

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 dan 2018 (%)



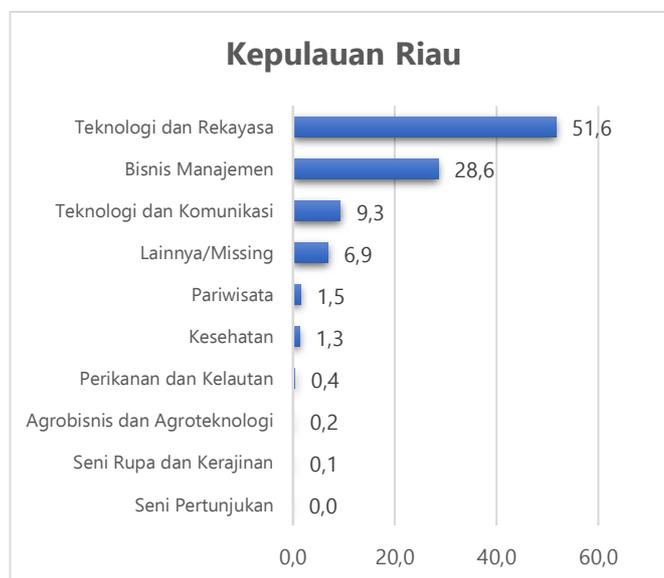
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Banyaknya lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di

sektor informal (berusaha sendiri). Bekerja di sektor formal terutama di industri lebih terlindungi karena mendapat jaminan sosial dibandingkan sektor formal, selain gaji tetap.

Gambar 2.2.79

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Kepulauan Riau, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 51,6 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 28,6 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau di sektor industri, konstruksi, dan pertambangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah.

Tabel 2.2.10

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	3,270	3,361	3,455	3,552	3,651	3,753
Pertambangan	570	579	589	599	610	620
Industri	66,481	69,730	73,137	76,712	80,461	84,393
LGAM	4,838	5,045	5,261	5,486	5,720	5,965
Konstruksi	14,174	14,978	15,828	16,726	17,675	18,678
Perdagangan, Hotel dan Restoran	57,609	62,183	67,120	72,449	78,201	84,410
Transportasi dan Komunikasi	20,882	22,083	23,354	24,697	26,118	27,620
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,384	5,710	6,055	6,421	6,810	7,222
Jasa Kemasyarakatan	22,260	22,964	23,691	24,440	25,213	26,011
Jumlah Tenaga Kerja SMK	195,467	206,633	218,490	231,082	244,459	258,672
Total Tenaga Kerja	933,567	969,012	1,005,994	1,044,480	1,084,493	1,126,673
Share Tenaga Kerja	20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	23.0

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

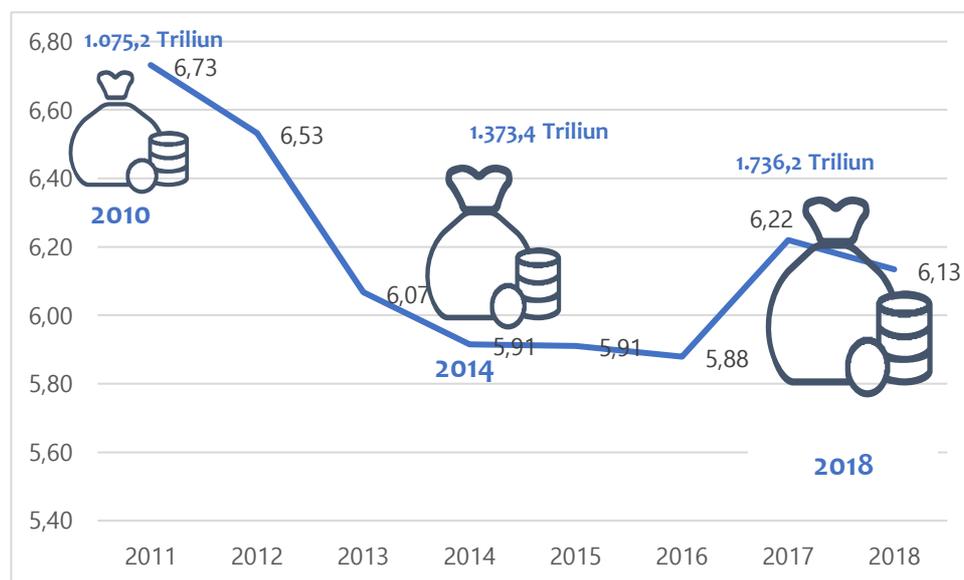


DKI JAKARTA

2.2.11. Provinsi DKI Jakarta

Pertumbuhan perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami sedikit penurunan dari 6,73 persen tahun 2010 menjadi 6,13 persen tahun 2018. Berbeda dengan provinsi lain di Sumatera yang pertumbuhan ekonominya turun karena turunnya pertumbuhan sektor pertanian/perkebunan dan pertambangan, perekonomian DKI Jakarta lebih stabil karena ditopang oleh sektor perdagangan, industri dan jasa perusahaan. Total PDRB DKI Jakarta tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 1.075,2 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 1.736,2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 62 persen.

Gambar 2.2.80
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta

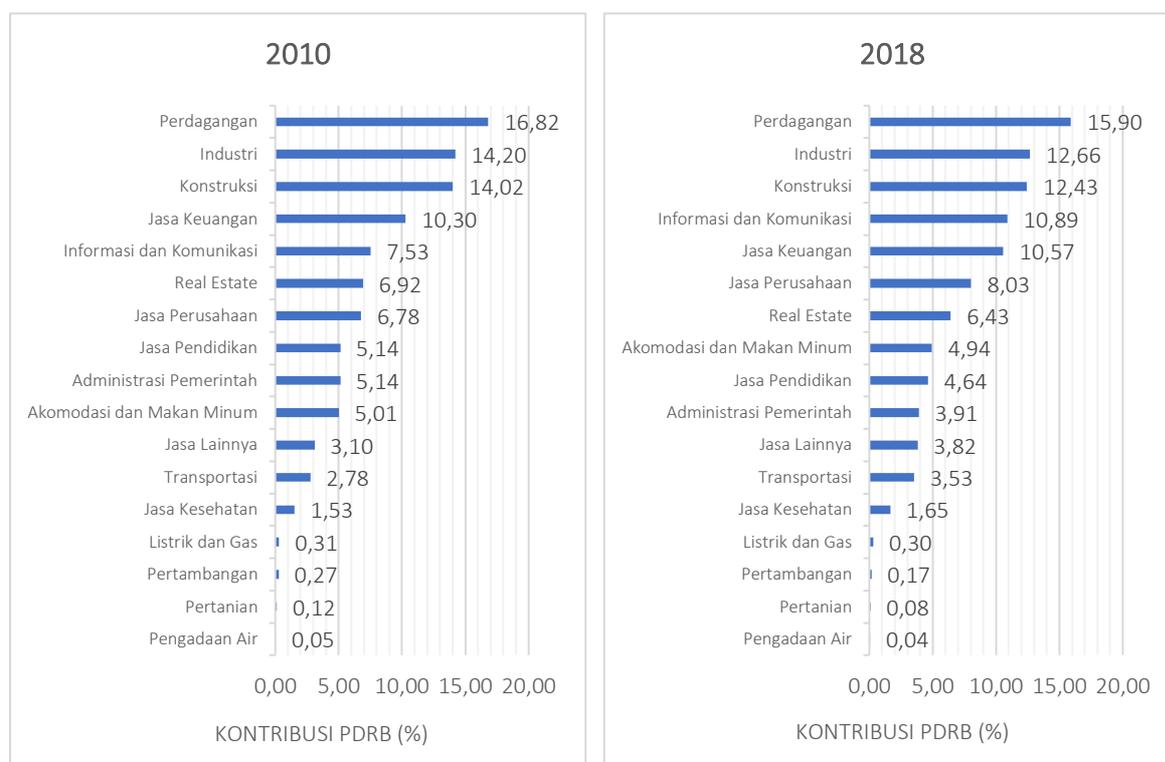


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor (dari 17 sektor perekonomian) yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB DKI Jakarta di Tahun 2010 adalah **perdagangan, industri, konstruksi, jasa keuangan dan informasi dan keuangan**. Jika dilihat dari kontribusinya, sekitar 45 persen perekonomian di Provinsi DKI Jakarta disumbang oleh tiga sektor yaitu **sektor perdagangan, industri, konstruksi**. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 dan 2018, kontribusi sektor perdagangan, industri, dan konstruksi sedikit mengalami penurunan sedangkan sektor informasi dan komunikasi mengalami kenaikan dari 7,53 persen tahun 2010 menjadi 10,89 persen tahun 2018. Sektor transportasi juga mengalami kenaikan selama 2010-2018 dari 2,78 persen menjadi 3,53 persen.

Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, kontribusi sektor informasi dan komunikasi di DKI Jakarta memiliki kontribusi dalam mendorong perekonomian. Banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dan informasi sebagai meningkatnya pelayanan kepada konsumen. Meningkatnya kontribusi sektor transportasi tidak terlepas dari berkembangnya transportasi online dalam melayani transportasi warga Jakarta dan sekitarnya.

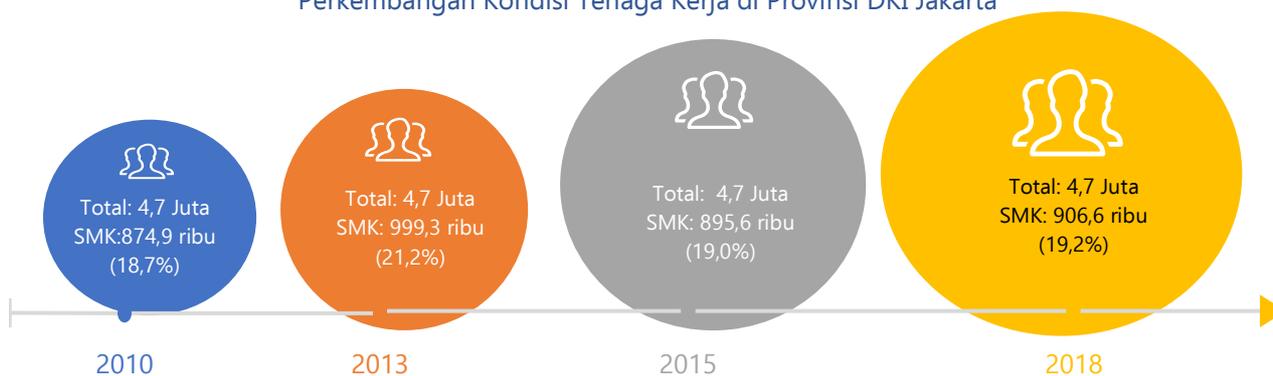
Gambar 2.2.81
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2010 adalah sebanyak 874,9 ribu tenaga kerja dan mengalami peningkatan hingga menjadi 906,6 ribu tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni sebesar 19,2 persen.

Gambar 2.2.82
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta



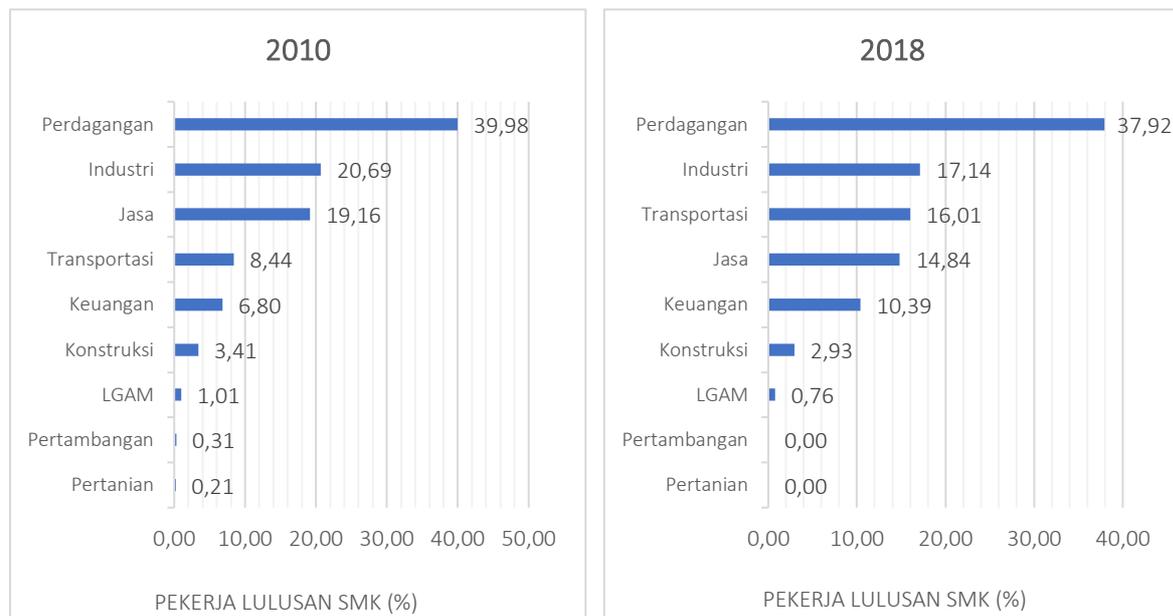
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi DKI Jakarta, lapangan usaha (sektor) perdagangan masih menjadi penyerap pekerja lulusan SMK terbanyak pada tahun 2010 disusul sektor industri. Lulusan SMK yang bekerja di sektor perdagangan tahun 2010 sebanyak 39,98 persen, namun pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja di sektor tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 37,92 persen. Begitu pula, penyerapan lulusan

SMK yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 20,69 persen tahun 2010 menjadi 17,14 persen tahun 2018. Adapun, sektor transportasi meningkat drastis dalam menyerap lulusan SMK dari 8,44 persen tahun 2010 menjadi 16,01 persen tahun 2018. Penyerapan lulusan SMK di sektor transportasi meningkat hampir dua kali lipat. Penyerapan lulusan SMK pada sektor transportasi karena berkembangnya transportasi online (motor dan mobil) yang membutuhkan banyak driver termasuk lulusan SMK. Mudah-mudahan untuk menjadi driver transportasi online mendorong lulusan SMK apapun bidang keahliannya dapat melamar menjadi driver, asal memiliki motor atau mobil.

Gambar 2.2.83

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 dan 2018 (%)

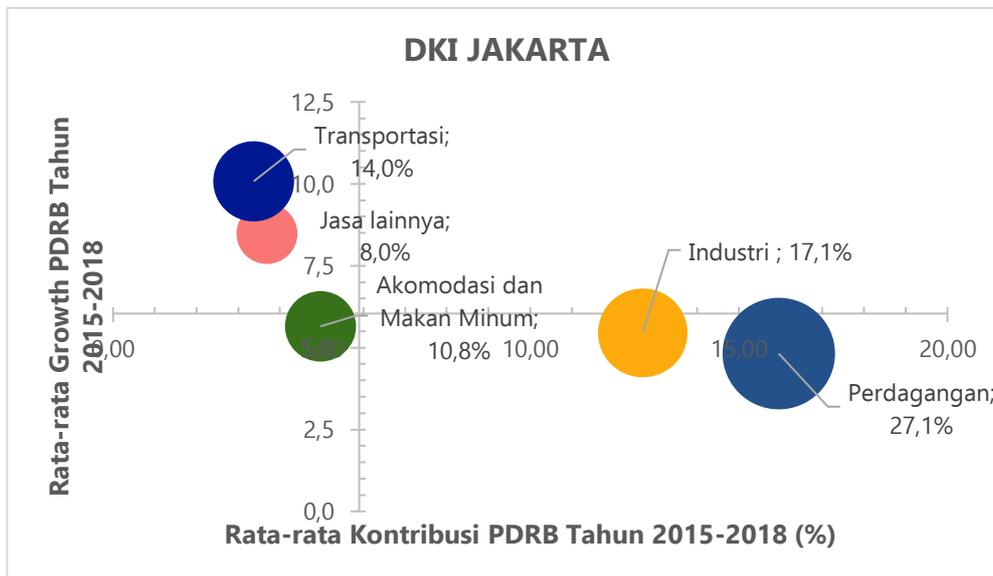


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi DKI Jakarta, ada 5 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor perdagangan (27,1 persen), industri (17,1 persen), transportasi (14,0 persen), akomodasi makanan dan minuman (10,8 persen), dan jasa lainnya (8,0 persen). Pertumbuhan PDRB pada sektor perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan penyediaan makanan dan minuman di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2010-2018 cenderung turun. Namun, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah pertumbuhannya meningkat tajam dari 2,93 persen menjadi 9,49 persen antara tahun 2010-2018. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB tahun 2018, tiga sektor yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi memiliki kontribusi sebesar 41 persen.

Gambar 2.2.84

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari sepertiga lulusan SMK di Provinsi DKI Jakarta bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar pada tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung meningkat dari 33,80 persen menjadi 39,58 persen.

Gambar 2.2.85

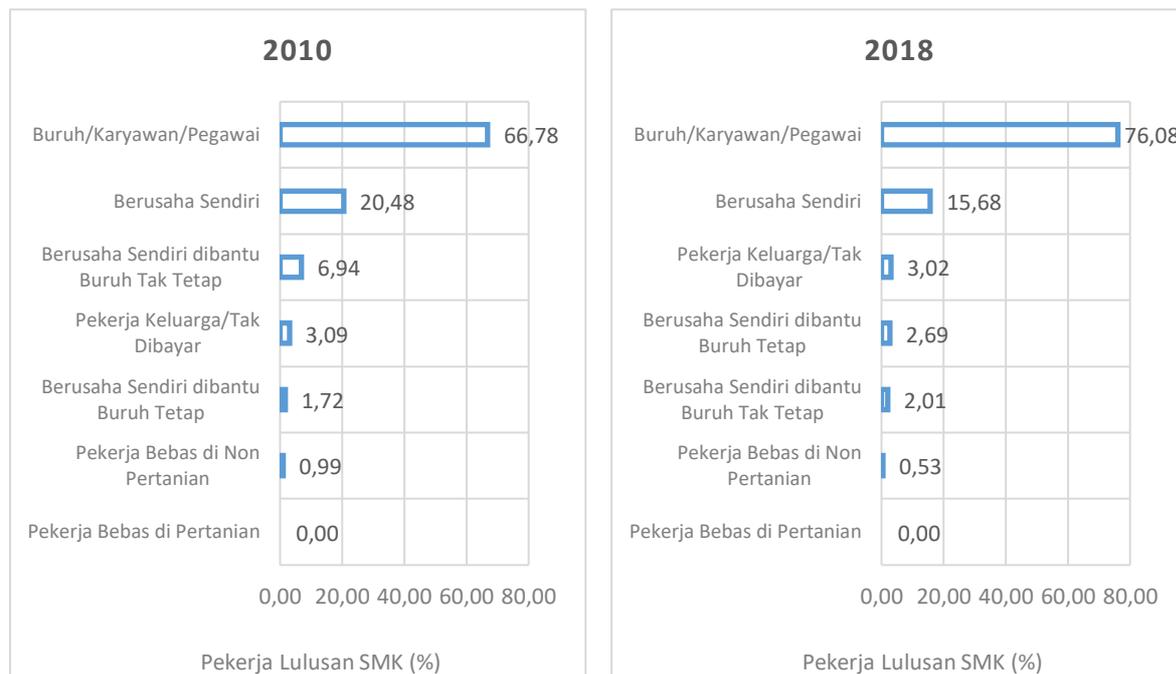
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Antara tahun 2010 dan 2018 tenaga usaha penjualan cenderung stabil dalam menyerap lulusan SMK pada angka 23 persen. Lulusan SMK sebagai tenaga tata usaha mengalami penurunan 18,15 persen tahun 2010 menjadi 13,76 persen tahun 2018. Meningkatnya lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi menunjukkan sektor industri masih mampu menampung lulusan SMK. Begitu pula usaha tenaga penjualan masih banyak menyerap lulusan SMK termasuk berkembangnya penjualan online. Tenaga tata usaha menunjukkan penurunan karena makin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan pekerjaan yang sifatnya repetitif.

Gambar 2.2.86
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2010 dan 2018 (%)

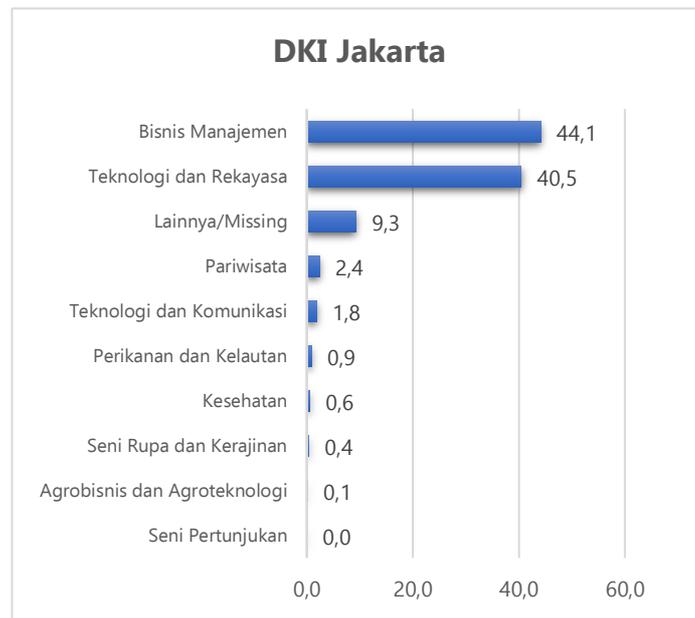


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari status pekerjaan, hampir tiga perempat lulusan SMK di Provinsi DKI Jakarta bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase yang bekerja sebagai buruh/karyawan cenderung meningkat dari 66,78 persen menjadi 76,08 persen. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap turun cenderung turun. Banyaknya lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri). Banyak lulusan SMK yang bekerja di sektor formal terutama di perdagangan dan industri lebih terlindungi karena mendapat jaminan sosial dibandingkan sektor informal, selain mendapat gaji tetap.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi DKI Jakarta, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Bisnis Manajemen paling besar proporsinya yakni 44,1 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa yakni sebesar 40,5 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta di sektor perdagangan, industri, dan konstruksi maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah.

Gambar 2.2.87
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.11
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	-	-	-	-	-	-
Industri	161,771	168,378	175,256	182,415	189,866	197,621
LGAM	7,199	7,476	7,763	8,062	8,372	8,693
Konstruksi	27,508	28,503	29,533	30,601	31,708	32,854
Perdagangan, Hotel dan Restoran	362,886	383,087	404,412	426,924	450,689	475,777
Transportasi dan Komunikasi	158,371	172,791	188,524	205,689	224,418	244,852
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	100,925	108,087	115,757	123,972	132,770	142,192
Jasa Kemasyarakatan	138,343	142,237	146,241	150,357	154,590	158,941
Jumlah Tenaga Kerja SMK	957,002	1,010,558	1,067,486	1,128,020	1,192,411	1,260,931
Total Tenaga Kerja	4,773,648	4,835,976	4,904,855	4,981,801	5,066,364	5,159,920
Share Tenaga Kerja	20.0	20.9	21.8	22.6	23.5	24.4

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

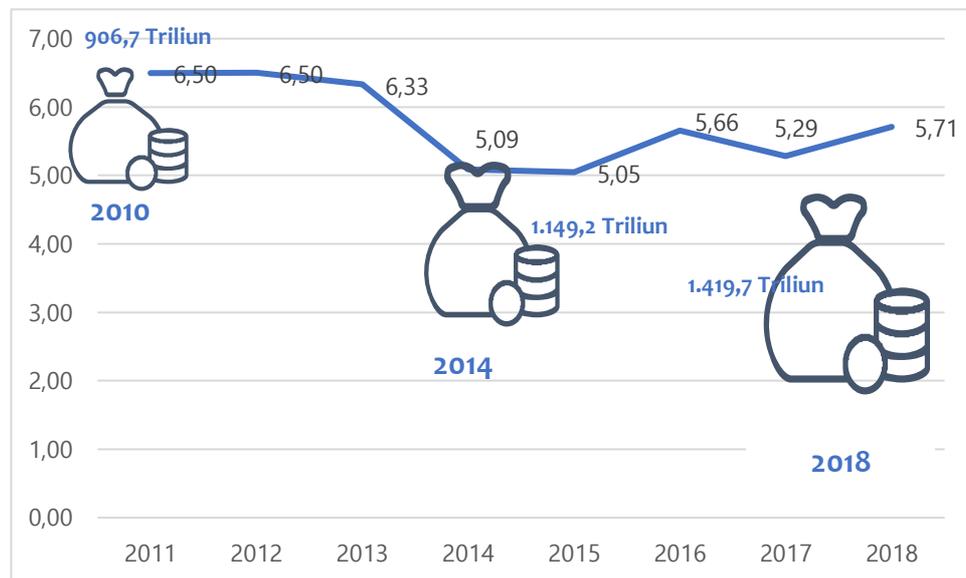


JAWA BARAT

2.2.12. Provinsi Jawa Barat (Jabar)

Gambar 2.2.88

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat

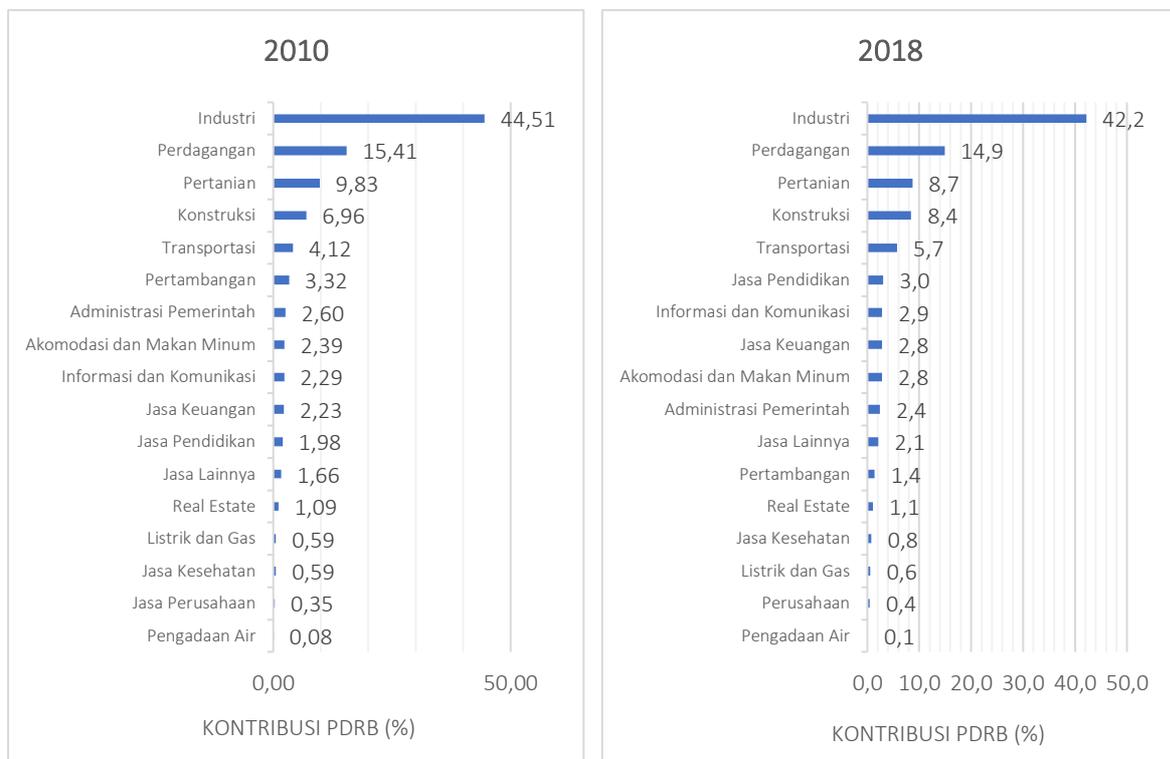


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Pertumbuhan perekonomian yang dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jabar mengalami penurunan dari 6,50 persen tahun 2010 menjadi 5,71 persen tahun 2018. Salah satu faktornya adalah turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar adalah turunnya pertumbuhan tiga sektor yaitu pertambangan, perdagangan dan konstruksi dimana sektor pertambangan pada tahun 2018 pertumbuhannya negatif 4,11 persen. Antara tahun 2010 dan 2018, pertumbuhan industri pengolahan mengalami kenaikan dari 5,6 persen menjadi 6,49 persen. Total PDRB Jabar tahun 2010 atas dasar harga konstan mencapai 906,7 Triliun Rupiah di Tahun 2010 meningkat menjadi 1.419,7 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan 57 persen.

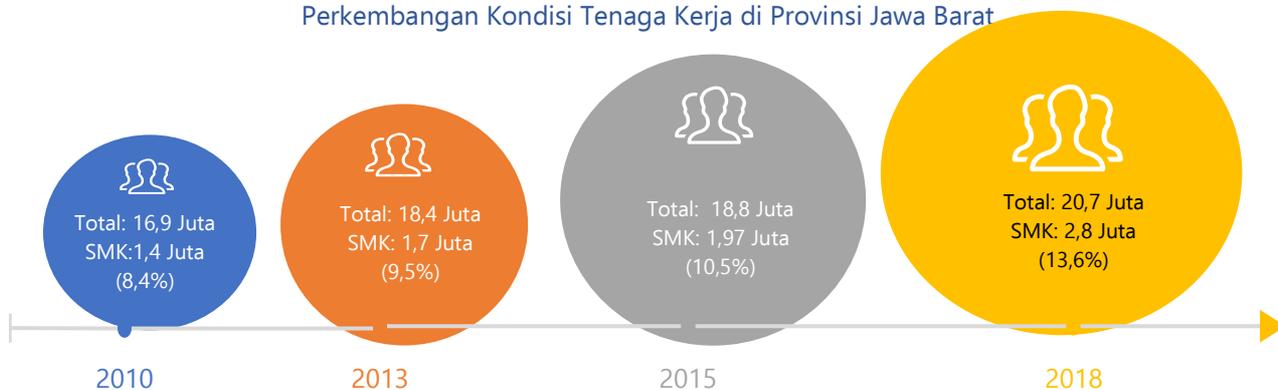
Di Provinsi Jabar terdapat 5 sektor (dari 17 sektor perekonomian) yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB di Tahun 2010 adalah **sektor industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan transportasi**. Jika dilihat dari kontribusinya, lebih dari separo perekonomian di Provinsi Jabar disumbang oleh dua sektor yaitu **sektor industri dan perdagangan**. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 dan 2018, kontribusi sektor industri sedikit turun dari 44,51 persen menjadi 42,2 persen, begitu pula sektor perdagangan dan pertanian mengalami penurunan. Sektor konstruksi mengalami kenaikan selama 2010-2108 yang disebabkan oleh meningkatnya pembangunan perumahan, apartemen di wilayah sekitar Bodetabek dan Bandung. Adanya relokasi beberapa industri padat karya ke provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur karena faktor tingginya upah di beberapa kabupaten di Jabar juga menjadi penyebab kontribusi sektor industri mengalami penurunan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

Gambar 2.2.89
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.2.90
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat

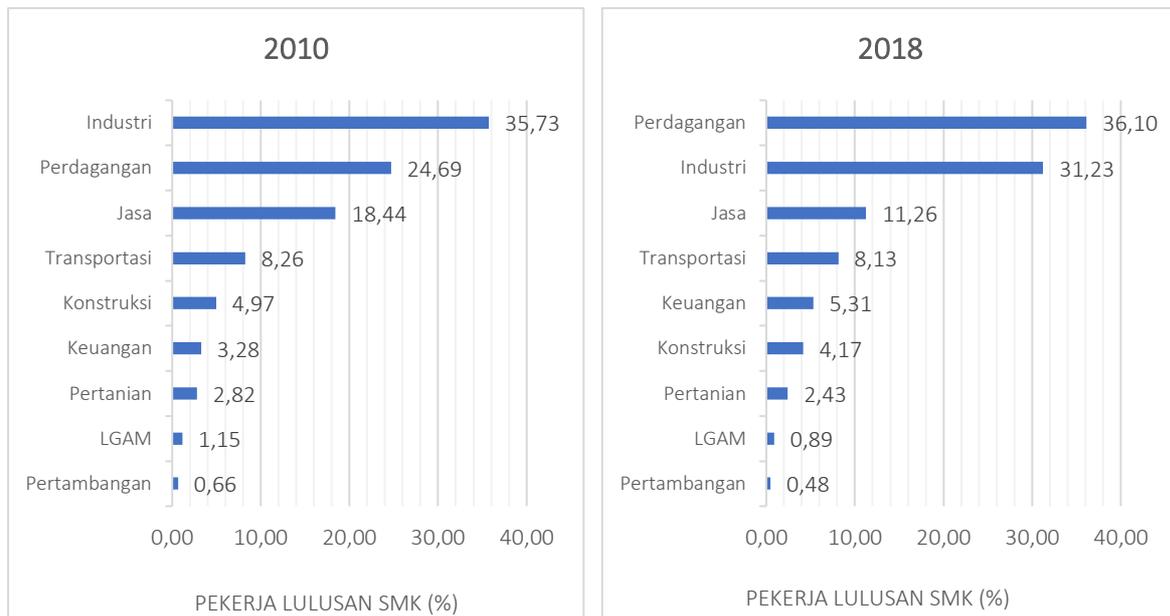


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2010 adalah sebanyak 1,4 Juta tenaga kerja dan mengalami peningkatan 100 persen menjadi 2,8 Juta tenaga kerja pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni sebesar 13,6 persen. Di Provinsi Jabar, lapangan usaha (sektor) industri masih menjadi penyerap pekerja lulusan SMK terbanyak pada tahun 2010 disusul sektor perdagangan. Lulusan SMK di yang bekerja di sektor industri tahun 2010 sebanyak 35,73 persen, namun pada tahun 2018 lulusan SMK yang bekerja di sektor tersebut mengalami penurunan menjadi 31,23 persen.

Gambar 2.2.91

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



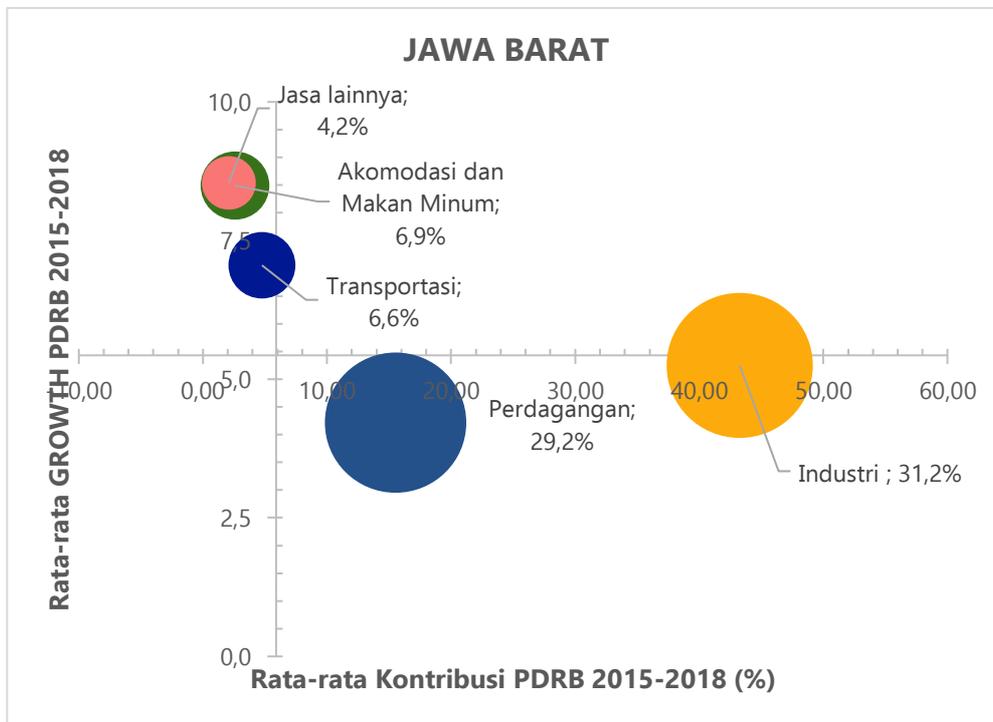
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Penyebab turunnya penyerapan lulusan SMK karena pertumbuhan sektor industri yang turun selama 2010-2018, adanya pabrik yang relokasi ke provinsi lain terutama pabrik tekstil dan garmen yang menyerap banyak tenaga kerja. Faktor upah minimum yang tinggi di Jabar menjadi salah satu pemicunya. Tahun 2018, sektor perdagangan meningkat drastis dalam menyerap lulusan SMK dari 24,69 persen tahun 2010 menjadi 36,10 persen tahun 2018. Berkurangnya penyerapan lulusan SMK di sektor industri, diimbangi dengan meningkatnya penyerapan di sektor perdagangan, termasuk perdagangan online yang sekarang sedang marak.

Jika dilihat dari pertumbuhan sektor (lapangan usaha) dan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2018, maka dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Jabar, ada 5 sektor yang menyerap lulusan SMK tertinggi yaitu sektor industri (31,2 persen), perdagangan (29,2 persen), akomodasi makanan dan minuman (6,9 persen), transportasi (6,6 persen) dan jasa lainnya (4,2 persen). Pertumbuhan PDRB pada lima sektor di Provinsi Kepri positif selama periode 2010-2018, meskipun beberapa sektor seperti pertanian, pertambangan dan perdagangan pertumbuhannya cenderung turun, bahkan tahun 2018 pertumbuhan sektor pertambangan minus 4,11 persen. Namun, sektor industri masih meningkat pertumbuhannya dari 5,60 persen (2010) menjadi 6,49 persen. Jika dilihat dari kontribusi terhadap PDRB tahun 2018, tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan perdagangan dan konstruksi memiliki kontribusi sebesar 67 persen.

Gambar 2.2.92

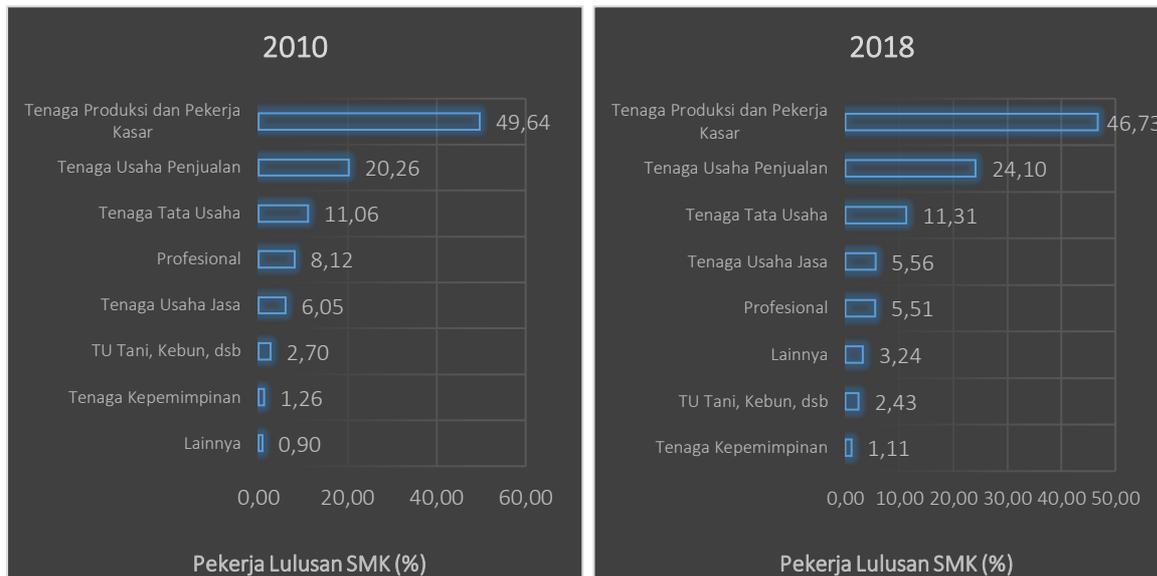
Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Hampir separo dari lulusan SMK di Provinsi Jabar bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar pada tahun 2010. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dan 2018, lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung turun dari 49,64 persen menjadi 46,73 persen. Antara tahun 2010 dan 2018 tenaga usaha penjualan mengalami kenaikan dalam menyerap lulusan SMK dari 20,26 persen menjadi 14,10 persen. Tenaga tata usaha juga cenderung stagna selama tahun 2010 dan tahun 2018 pada angka 11 persen. Selama tahun 2010 dan 2018, mulai dari perubahan penyerapan dari tenaga produksi dan pekerja kasar menjadi tenaga tata usaha. Namun, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai professional, teknisi dan sejenisnya mengalami penurunan dari 8,12 persen tahun 2010 menjadi 5,51 persen tahun 2018.

Gambar 2.2.93
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dilihat dari status pekerjaan, lebih dari separo lulusan SMK di Provinsi Jabar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Antara tahun 2010 dan 2018, persentase yang bekerja sebagai buruh/karyawan cenderung meningkat dari 59,55 persen menjadi 70,04 persen. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri cenderung dan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap cenderung turun. Banyaknya lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan mengindikasikan pekerjaan sektor formal (buruh/karyawan) menyerap lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri).

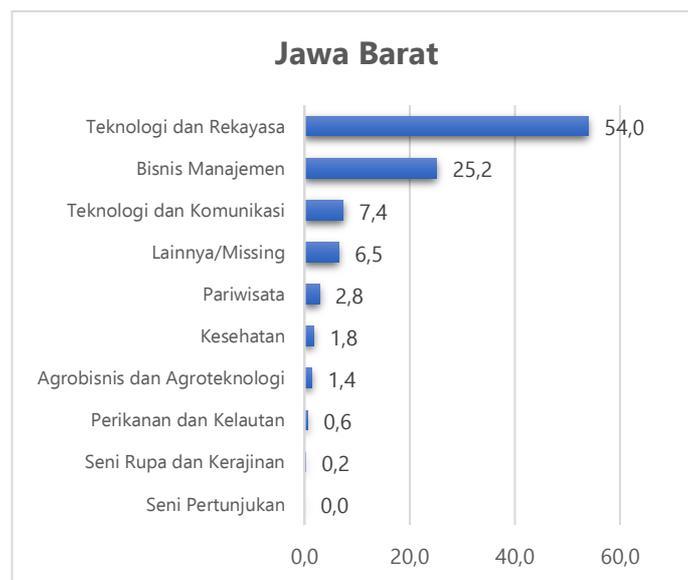
Gambar 2.2.94
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Bekerja di sektor formal terutama di industri lebih terlindungi karena mendapat jaminan sosial dibandingkan sektor formal, selain gaji tetap. Namun, masih banyak industri mikro dan kecil masih tidak mampu membayar upah sesuai dengan upah minimum dan memberikan jaminan sosial, sehingga meskipun bekerja di sektor formal tapi kesejahteraannya masih rendah.

Gambar 2.2.95
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 54,0 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 25,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat di sektor industri, pertanian, dan perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 1,4 persen.

Tabel 2.2.12

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	69,570	70,638	71,723	72,824	73,942	75,077
Pertambangan	13,491	13,358	13,226	13,096	12,967	12,840
Industri	922,348	966,174	1,012,083	1,060,174	1,110,549	1,163,319
LGAM	25,282	25,487	25,694	25,903	26,113	26,326
Konstruksi	125,229	133,416	142,137	151,429	161,329	171,875
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,078,568	1,142,808	1,210,874	1,282,994	1,359,410	1,440,377
Transportasi dan Komunikasi	249,070	270,704	294,217	319,772	347,546	377,734
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	161,776	174,674	188,601	203,638	219,874	237,405
Jasa Kemasyarakatan	329,688	342,511	355,834	369,675	384,054	398,992
Jumlah Tenaga Kerja SMK	2,975,021	3,139,770	3,314,390	3,499,505	3,695,785	3,903,944
Total Tenaga Kerja	21,153,944	21,596,024	22,054,733	22,528,516	23,016,349	23,523,201
Share Tenaga Kerja	14.1	14.5	15.0	15.5	16.1	16.6

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

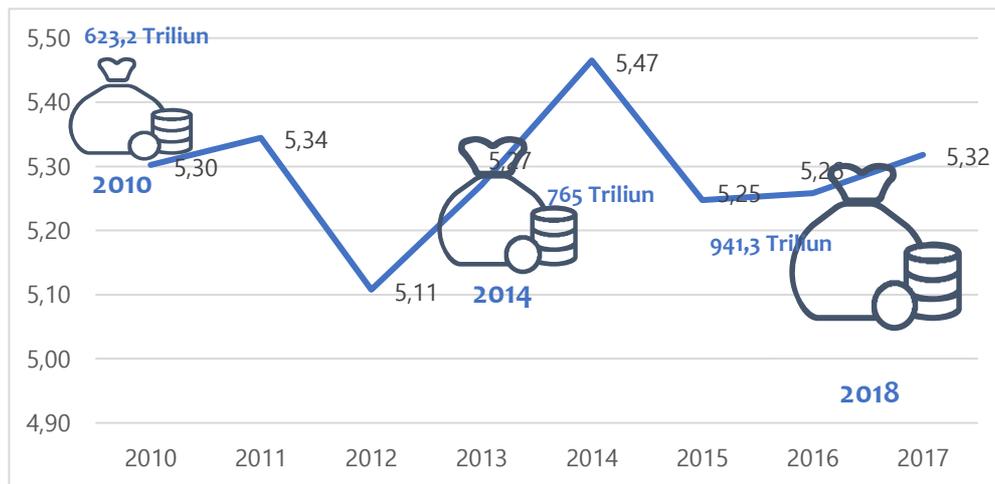


JAWA TENGAH

2.2.13. Provinsi Jawa Tengah

Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah terhadap PDB nasional sebesar 9,0 persen. Total PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 623,2 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 941,3 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5 persen selama kurun waktu 2011-2018.

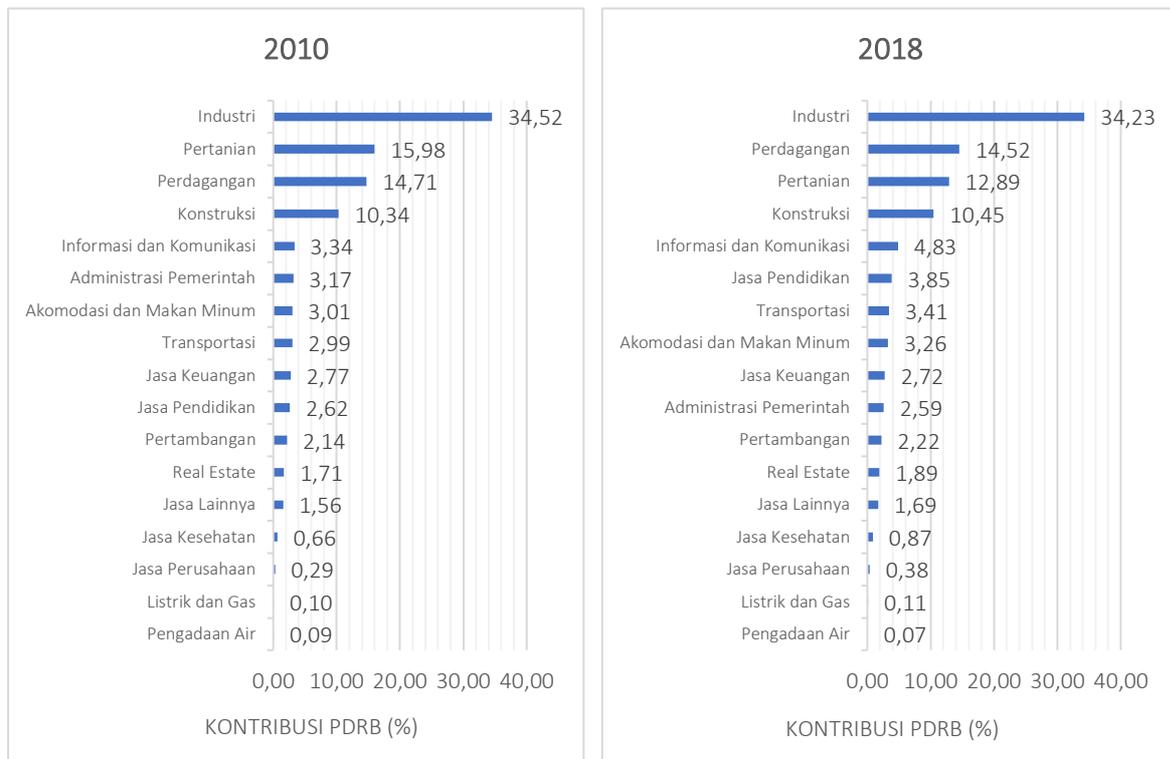
Gambar 2.2.96
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

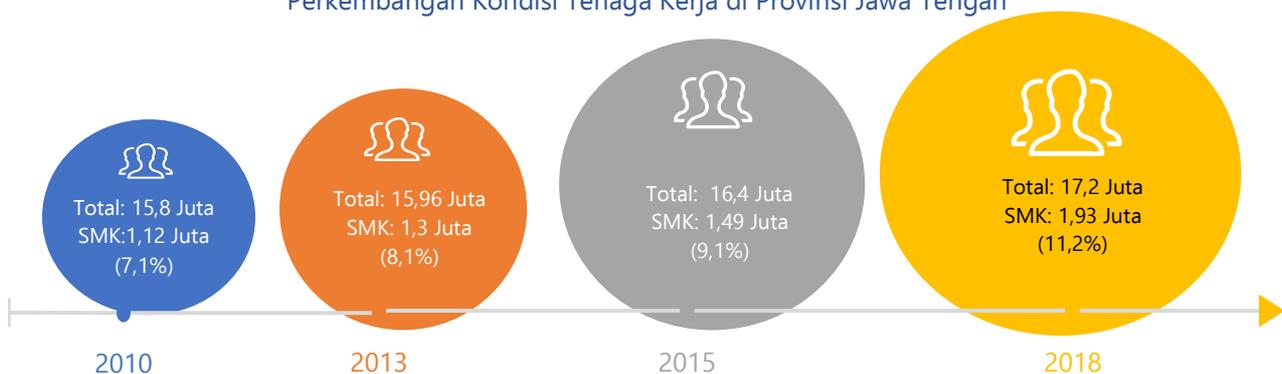
Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2010 adalah sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi dan informasi dan komunikasi. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap sama, namun tiga sektor mengalami penurunan yaitu sektor industri, perdagangan dan pertanian. Dari ketiga sektor yang mengalami penurunan, sektor pertanian yang terbesar penurunannya dari 15,98 persen (2010) menjadi 12,89 persen (2018). Selain itu, sektor pertanian yang awalnya berada di urutan kedua mulai bergeser ke urutan ketiga, dan sektor perdagangan bergeser ke urutan kedua. Sebaliknya, kontribusi dua sektor yang mengalami peningkatan adalah konstruksi dari 10,34 persen (2010) menjadi 10,45 persen (2018), dan sektor informasi dan komunikasi yaitu dari 3,34 persen (2010) naik menjadi 4,83 persen (2018). Perkembangan sektor konstruksi dan informasi dan komunikasi kian meningkat, yang ditunjukkan sumbangan terhadap PDRB kedua sektor tersebut semakin besar.

Gambar 2.2.97
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.2.98
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah

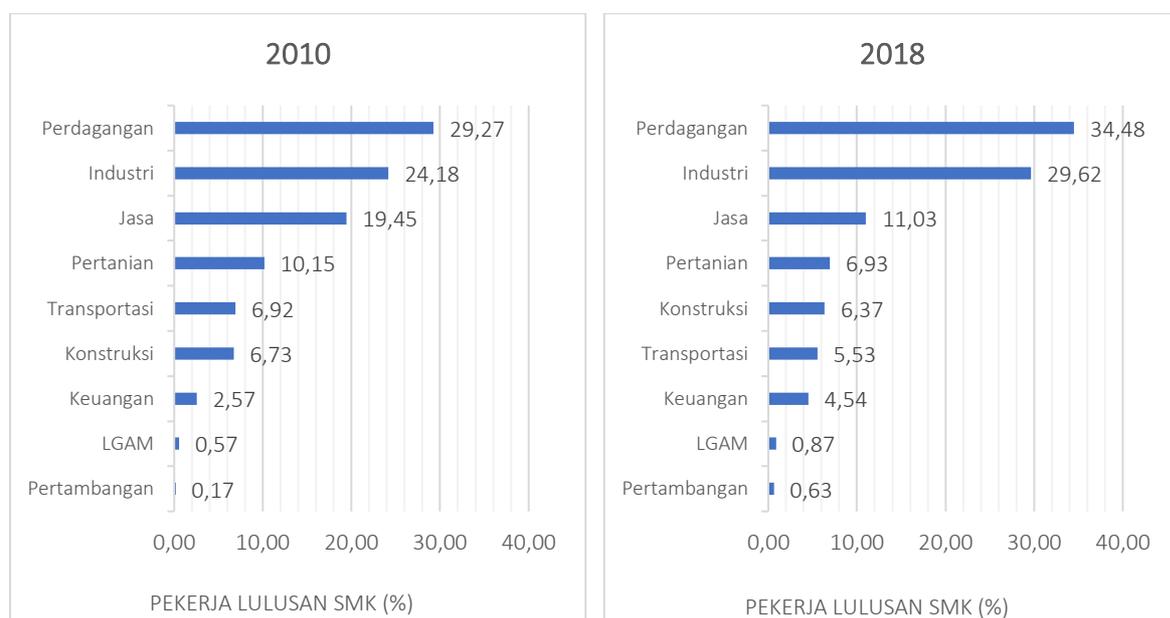


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2010 adalah 1.122.262 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 1.930.968 orang pada Tahun 2018 dengan proporsi tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja sebesar 11,2 persen. Pada Tahun 2010, hampir sepertiga (29,3 persen) lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah terserap di sektor perdagangan. Di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut meningkat lima poin persen menjadi 34,5 persen. Sektor perdagangan adalah sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah. Selain perdagangan, peningkatan persentase lulusan SMK di provinsi ini yang

terserap di sektor industri juga meningkat dari 24,2 persen (2010) naik menjadi 29,6 persen (2018). Selain itu, dua sektor yang termasuk empat persentase terbesar penyerapan lulusan SMK di Jawa Tengah yaitu sektor jasa dan pertanian, namun dalam kurun waktu 2010-2018 mengalami penurunan. Penyerapan lulusan SMK di sektor jasa turun delapan poin persen dari 19,4 persen (2010) menjadi 11,0 persen (2018). Di sektor pertanian turun tiga poin persen dari 10,2 persen (2010) menjadi 6,9 persen (2018). Selain perdagangan dan industri, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan lulusan SMK di Jawa Tengah antara lain sektor keuangan, listrik, gas dan air minum serta sektor pertambangan. Sebaliknya, sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Jawa Tengah selain sektor pertanian adalah sektor jasa, transportasi dan konstruksi.

Gambar 2.2.99
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 dan 2018 (%)

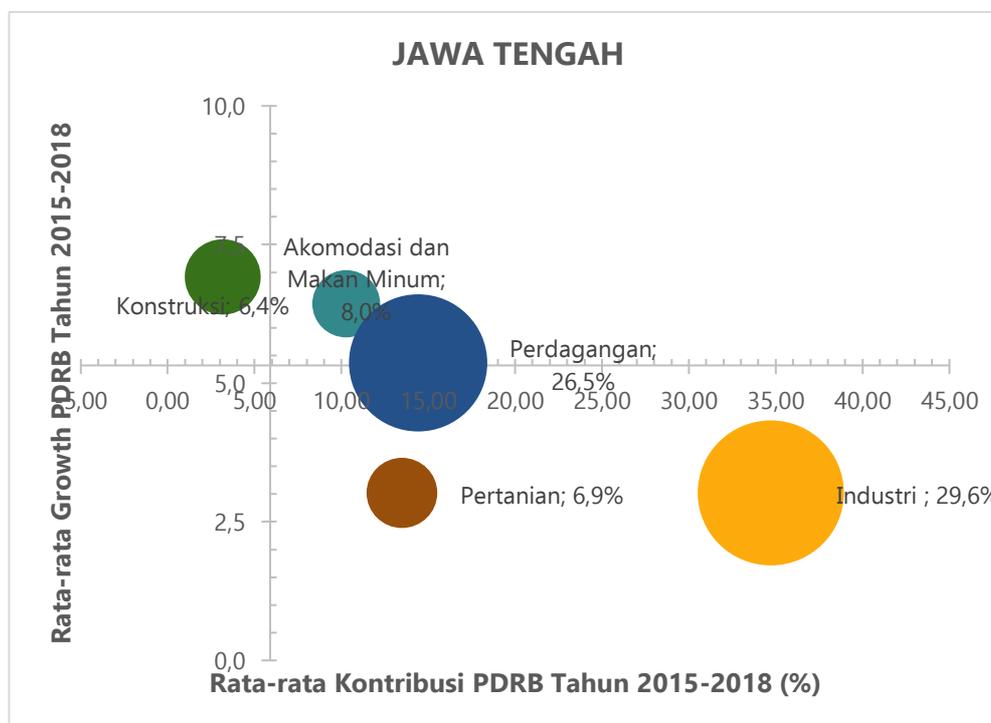


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah sektor industri yaitu 29,6 persen, perdagangan yaitu 26,5 persen, akomodasi dan makan minum 8,0 persen, pertanian 6,9 persen dan konstruksi 6,4 persen. Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Sektor industri adalah sektor yang paling tinggi penyerapannya, sektor ini juga memiliki kontribusi PDRB tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya. Pertumbuhan PDRB sektor industri relatif sama dengan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Di sisi lain, sektor akomodasi dan makan minum yang pertumbuhan PDRBnya tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya, namun hanya mampu menyerap 8,0 persen pekerja lulusan SMK di Jawa Tengah ada tahun 2018.

Gambar 2.2.100

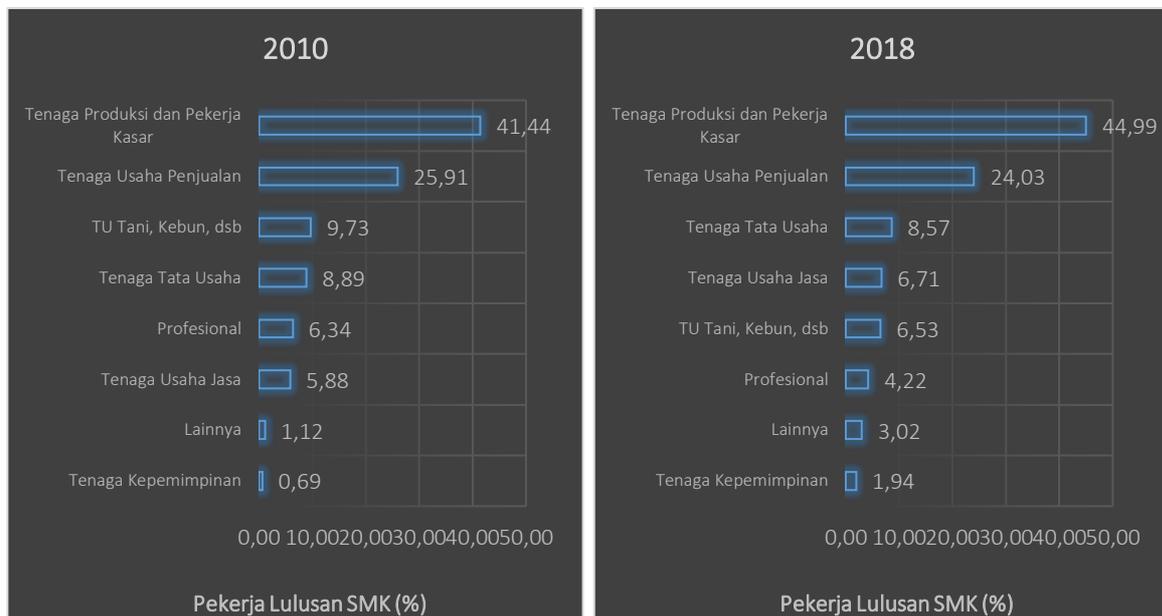
Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Berdasarkan data tahun 2010 dan 2018, posisi persentase tertinggi dan terendah pekerja lulusan SMK menurut jabatan di provinsi Jawa Tengah, adalah tetap atau tidak berubah. Pada tahun 2010 persentase tertinggi jabatan pekerja lulusan SMK (41,44 persen) adalah jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Sedangkan persentase terendah adalah jabatan sebagai tenaga kepemimpinan. Pada tahun 2018 posisi persentase tertinggi dan terendah adalah tetap atau tidak berubah. Persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar sedikit meningkat menjadi 44,99 persen, sedangkan jabatan tenaga kepemimpinan, tetap berada di posisi persentase terendah. Walaupun persentasenya terendah, namun pekerja lulusan SMK di provinsi Jawa Tengah yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan, persentasenya meningkat dari 0,69 persen (2010) menjadi 1,94 persen (2018).

Gambar 2.2.101
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 dan 2018 (%)



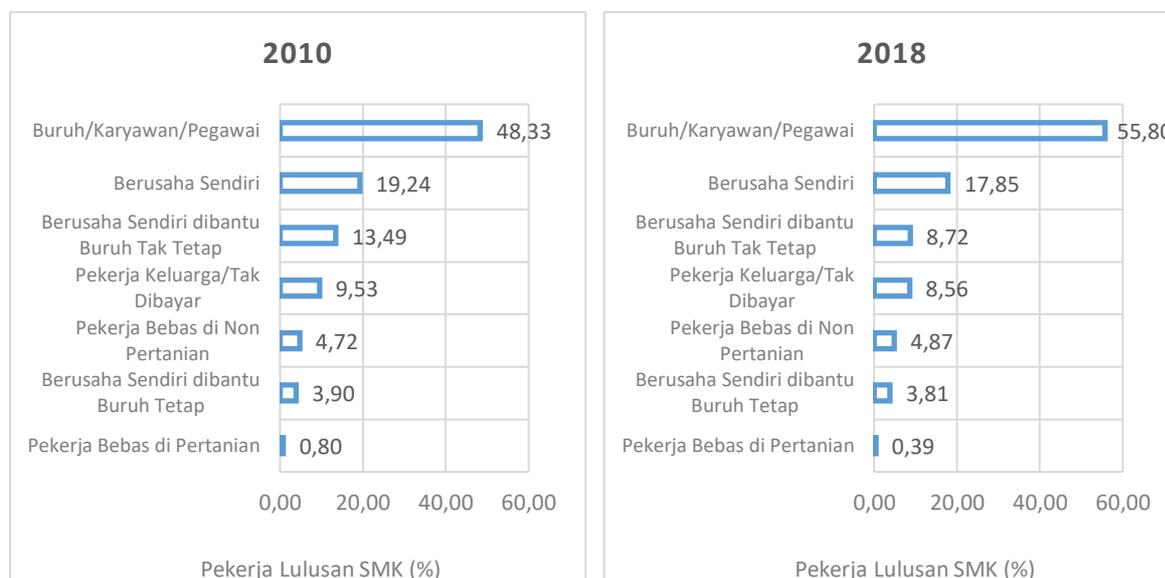
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada tahun 2010, persentase tertinggi pekerja lulusan SMK adalah berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 48,33 persen. Sedangkan persentase terendah adalah berstatus kerja sebagai pekerja bebas di pertanian. Pada tahun 2018, posisi dan urutan persentase dari tertinggi sampai terendah tetap tidak berubah, namun terdapat peningkatan persentase pekerja formal yaitu yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap. Persentase pekerja lulusan SMK di Jawa Tengah yang berstatus kerja formal meningkat dari 52,23 persen (2010) menjadi 59,61 persen (2018). Ini berarti, lebih dari separuh atau hampir enam puluh persen pekerja lulusan SMK di provinsi Jawa Tengah berstatus kerja sebagai pekerja di sektor formal.

Sebaliknya yang berstatus kerja sebagai pekerja di sektor informal, persentasenya lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Walaupun persentase pekerja sektor informal relatif lebih rendah, namun persentase pekerja keluarga tidak dibayar cukup tinggi yaitu sekitar 9,5 persen pada tahun 2010, dan sedikit turun di tahun 2018 yaitu menjadi 8,5 persen.

Gambar 2.2.102

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)

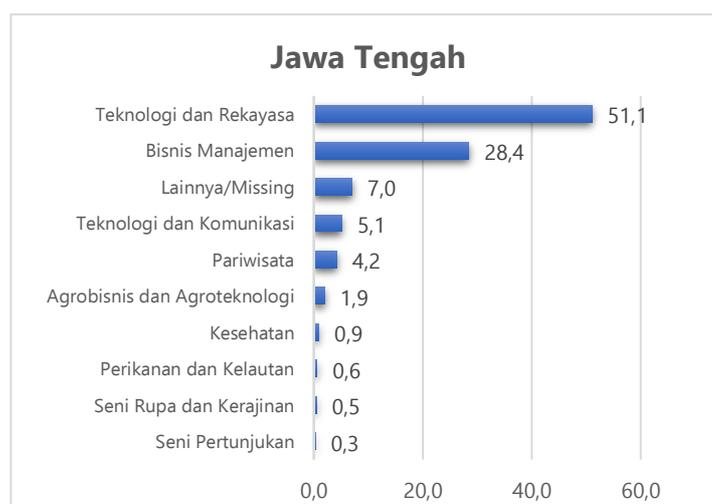


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 51,1 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 28,4 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah di sektor industri, pertanian, dan perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 1,9 persen.

Gambar 2.2.103

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.13

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	136,851	139,866	142,947	146,097	149,315	152,605
Pertambangan	12,454	12,815	13,186	13,568	13,961	14,366
Industri	597,931	625,114	653,533	683,245	714,306	746,780
LGAM	17,294	17,817	18,356	18,911	19,483	20,073
Konstruksi	128,247	133,756	139,502	145,495	151,746	158,265
Perdagangan, Hotel dan Restoran	701,650	739,396	779,173	821,089	865,261	911,809
Transportasi dan Komunikasi	114,818	123,446	132,722	142,695	153,418	164,947
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	93,176	98,967	105,117	111,649	118,587	125,957
Jasa Kemasyarakatan	220,552	228,442	236,614	245,079	253,846	262,927
Jumlah Tenaga Kerja SMK	2,022,973	2,119,619	2,221,151	2,327,829	2,439,925	2,557,728
Total Tenaga Kerja	17,433,672	17,669,310	17,920,254	18,186,266	18,463,794	18,752,617
Share Tenaga Kerja	11.6	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

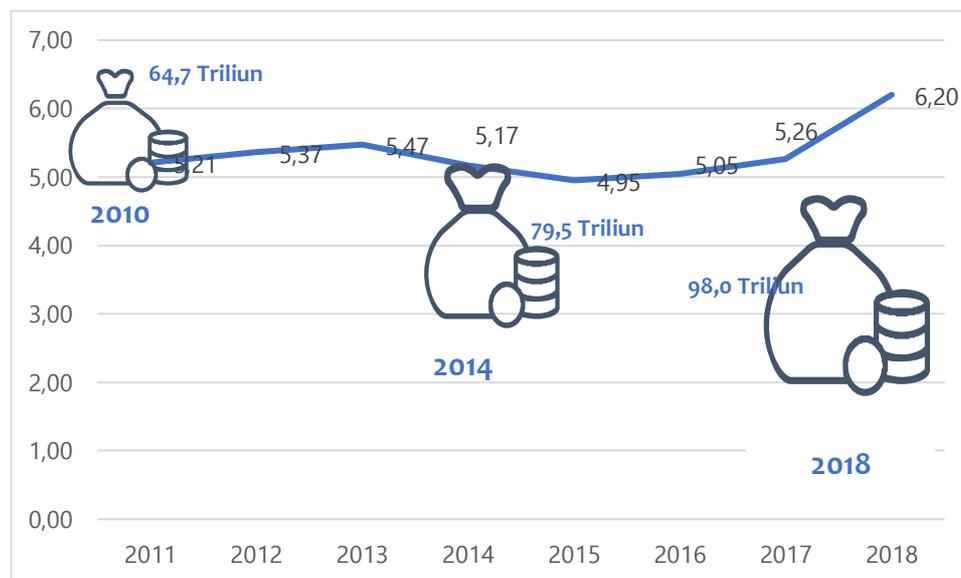


DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.2.14. Provinsi DIY

Total PDRB Provinsi DI Yogyakarta atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 64,7 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 98,0 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni 6,2 persen. Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi DI Yogyakarta di Tahun 2010 adalah sektor industri, pertanian, informasi dan komunikasi, konstruksi dan akomodasi dan makan minum.

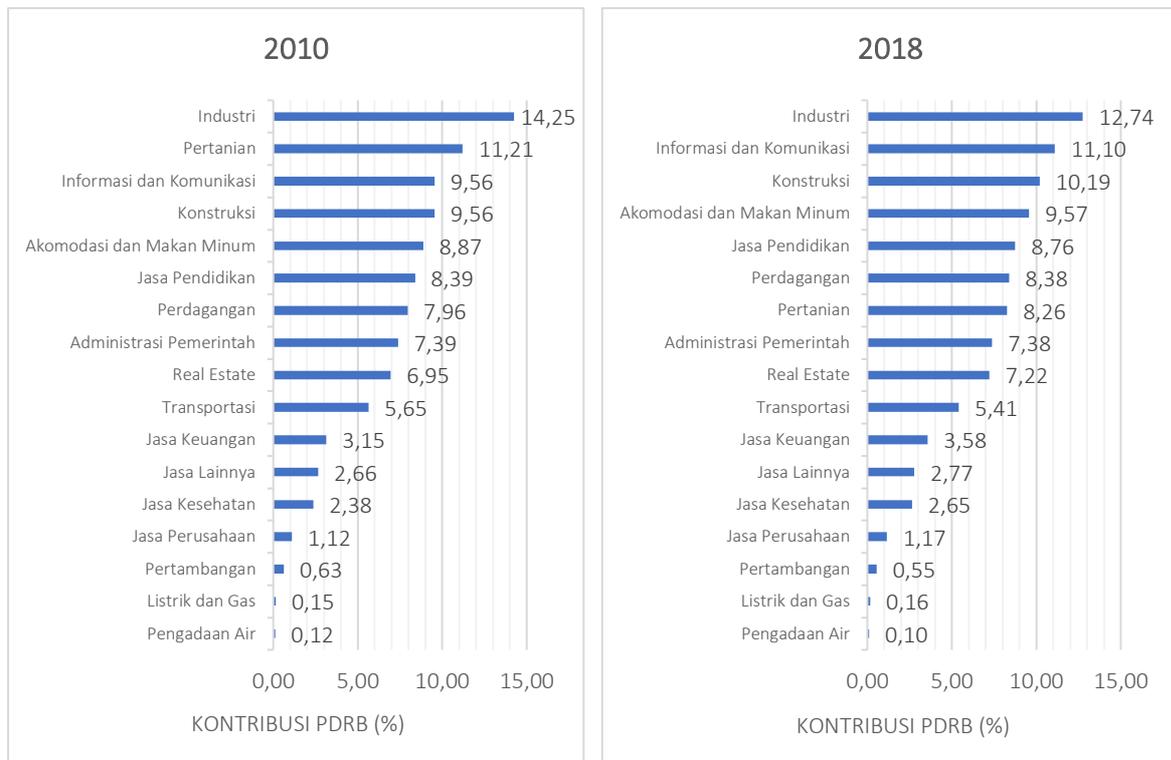
Gambar 2.2.104
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar mengalami perubahan. Sektor pertanian bukan lagi termasuk lima besar sektor yang kontribusi PDRBnya terbesar di DIY. Pada tahun 2018, jasa pendidikan menggeser posisi sektor pertanian dan menjadi salah satu dari lima besar sektor yang kontribusi PDRBnya terbesar. Walaupun mengalami penurunan yaitu dari 14,25 persen (2010) turun menjadi 12,74 persen (2018), namun kontribusi PDRB sektor industri tetap yang tertinggi dibandingkan sektor lain. Empat sektor lainnya yang termasuk lima besar kontribusi PDRB di Jawa Tengah pada tahun 2018, semuanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010.

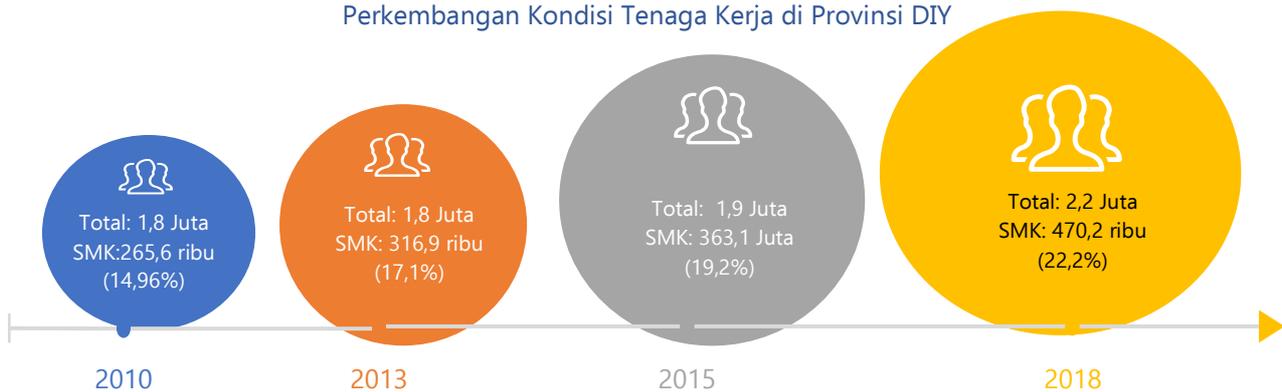
Gambar 2.2.105
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi DIY
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi DI Yogyakarta pada Tahun 2010 adalah 265.617 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 470.190 orang pada Tahun 2018 dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni 22,2 persen.

Gambar 2.2.106
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi DIY

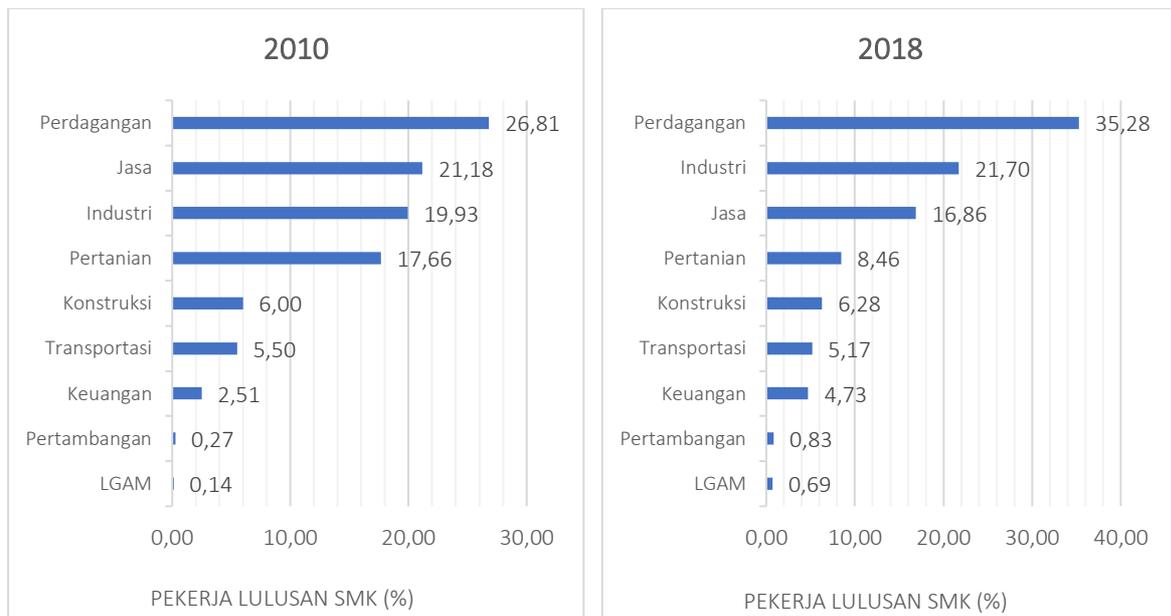


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari seperempat (26,81 persen) lulusan SMK di Provinsi DI Yogyakarta terserap di sektor perdagangan. Di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut meningkat delapan poin persen menjadi 35,28 persen. Sektor perdagangan adalah sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi DI Yogyakarta. Selain perdagangan, peningkatan persentase lulusan SMK juga

terjadi di sektor industri, sektor tersebut bahkan menggeser posisi sektor jasa yang mengalami penurunan persentase. Persentase pekerja lulusan SMK yang terserap di sektor industri meningkat dari 19,93 persen (2010) menjadi 21,70 persen (2018). Selain itu, peningkatan persentase juga terjadi di sektor keuangan, yaitu dari 2,51 persen (2010) naik menjadi 4,73 persen (2018). Sebaliknya penyerapan pekerja lulusan SMK yang mengalami penurunan persentase cukup besar adalah di sektor pertanian, yang turun sebesar sembilan poin persen, yaitu dari 17,66 persen (2010) turun menjadi 8,46 persen (2018).

Gambar 2.2.107
 istribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi DIY
 Tahun 2010 dan 2018 (%)

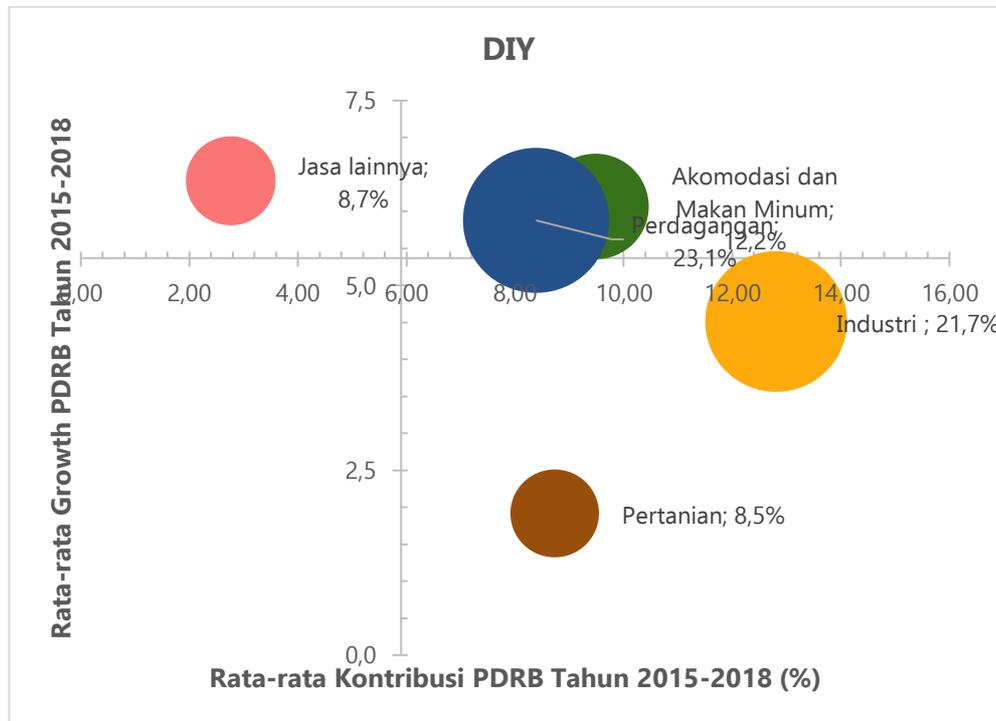


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Di Yogyakarta, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (23,1 persen), industri (21,7 persen), akomodasi dan makan minum (12,2 persen), jasa (8,7 persen), pertanian (8,5 persen). Pertumbuhan PDRB ketiga sektor tersebut relatif sama, namun jika dilihat dari kontribusinya, sektor industri yang memiliki kontribusi paling besar.

Gambar 2.2.108

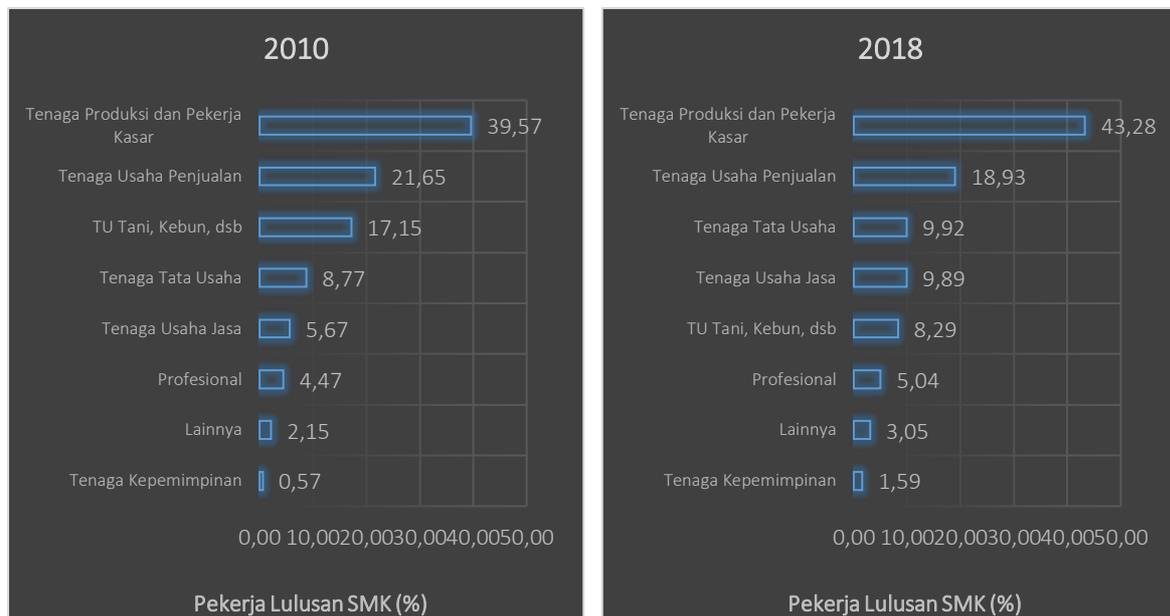
Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi DIY



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada tahun 2010, persentase tertinggi jenis pekerjaan pekerja lulusan SMK di provinsi DIY adalah tenaga produksi dan pekerja kasar yaitu sebesar 39,57 persen, dan persentase terendah adalah jabatan tenaga kepemimpinan sebesar 0,57 persen. Pada tahun 2018, posisi persentase tertinggi dan terendah adalah tetap atau tidak berubah. Kedua jabatan tersebut juga sama-sama mengalami peningkatan persentase yaitu untuk jenis pekerjaan tenaga produksi dan pekerja kasar naik menjadi 43,28 persen, dan tenaga kepemimpinan naik menjadi 1,59 persen. Selain tenaga kepemimpinan, jabatan tinggi yang juga mengalami kenaikan persentase adalah jenis pekerjaan professional, dari 4,47 persen (2010) menjadi 5,04 persen (2018). Jenis pekerjaan pekerja lulusan SMK di provinsi DIY yang mengalami penurunan persentase cukup besar adalah TU, tani, kebun dsb, yang pada tahun 2010 persentasenya sebesar 17,15 persen, turun menjadi 8,29 persen pada tahun 2018.

Gambar 2.2.109
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi DIY
Tahun 2010 dan 2018 (%)

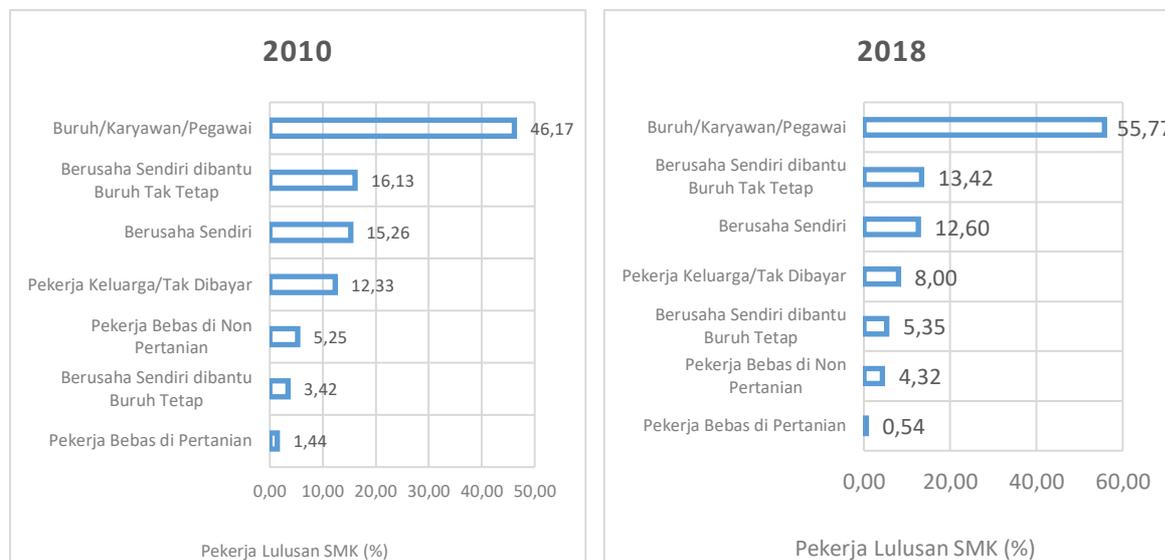


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tahun 2010, pekerja lulusan SMK di provinsi DI Yogyakarta terbanyak berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai yaitu sebesar 46,17 persen. Pada tahun 2018, persentasenya meningkat menjadi 55,77 persen atau meningkat sebesar 9,6 poin persen, dan merupakan persentase tertinggi, dengan kata lain lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di DI Yogyakarta pada tahun 2018 berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai. Dengan tingginya persentase yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai, mengindikasikan bahwa pekerja lulusan SMK di provinsi ini lebih banyak berstatus kerja sebagai pekerja formal yaitu hampir dua pertiga atau sebesar 61 persen.

Peningkatan pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor formal bukan hanya dipengaruhi oleh peningkatan pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/ pegawai, namun yang berstatus kerja berusaha sendiri dibantu buruh tetap juga cenderung meningkat yaitu dari 3,42 persen (2010) menjadi 5,35 persen (2018). Sebaliknya, persentase terendah yaitu yang berstatus kerja sebagai pekerja bebas di pertanian pada tahun 2010 hanya 1,44 persen, dan di tahun 2018, persentasenya semakin turun hingga kurang dari satu persen yaitu 0,54 persen. Di sisi lain, pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja informal semakin berkurang, salah satunya ditunjukkan dengan persentase pekerja keluarga tak dibayar yang cenderung semakin turun persentasenya, dari 12,33 persen (2010) menjadi 8,00 persen (2018).

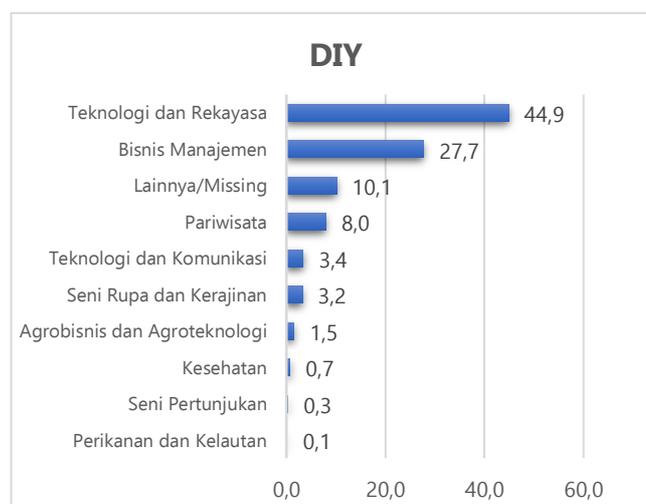
Gambar 2.2.110
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi DIY
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi DIY, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 44,9 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 27,7 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi DIY di sektor industri, informasi dan komunikasi dan konstruksi, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi serta agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya berturut-turut hanya 3,4 persen dan 1,5 persen.

Gambar 2.2.111
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi DIY
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.14
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi DIY Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	40,281	40,789	41,303	41,824	42,352	42,886
Pertambangan	3,980	4,051	4,124	4,198	4,273	4,349
Industri	105,519	109,146	112,897	116,778	120,792	124,944
LGAM	3,371	3,482	3,596	3,714	3,836	3,962
Konstruksi	30,986	32,505	34,099	35,770	37,524	39,363
Perdagangan, Hotel dan Restoran	176,130	187,028	198,600	210,888	223,936	237,792
Transportasi dan Komunikasi	25,618	27,023	28,506	30,069	31,719	33,458
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	23,702	25,235	26,866	28,603	30,453	32,422
Jasa Kemasyarakatan	81,652	84,105	86,631	89,233	91,914	94,674
Jumlah Tenaga Kerja SMK	491,239	513,363	536,622	561,078	586,797	613,851
Total Tenaga Kerja	2,142,494	2,173,471	2,205,922	2,240,101	2,275,853	2,313,797
Share Tenaga Kerja	22.9	23.6	24.3	25.0	25.8	26.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

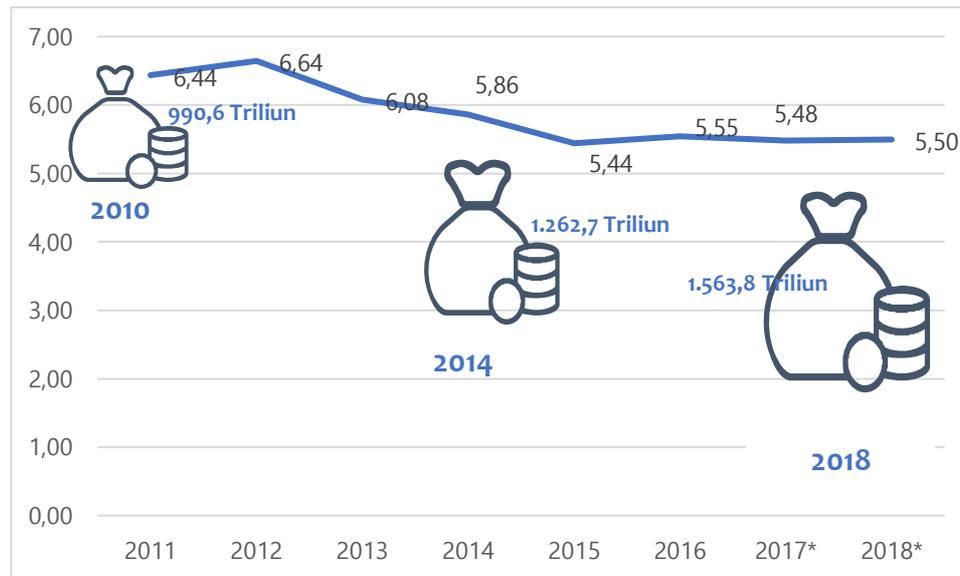


JAWA TIMUR

2.2.15. Provinsi Jawa Timur

Total PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 990,6 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 1.568,8 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Kontribusi PDRB Provinsi Jawa Timur terhadap PDB nasional, cukup tinggi yaitu sebesar 15,0 persen. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur relatif konstan yakni di angka 5-6 persen sepanjang Tahun 2011-2018.

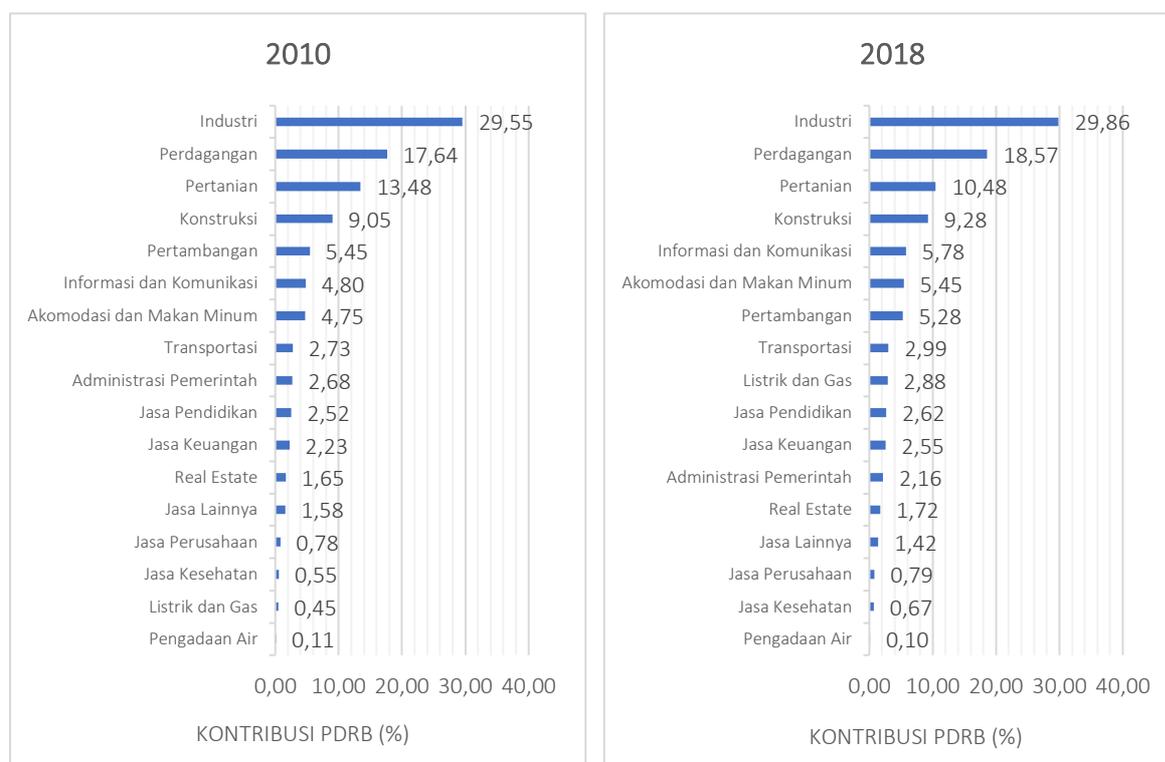
Gambar 2.2.112
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur di Tahun 2010 adalah sektor industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap sama, namun sektor pertambangan mengalami penurunan dan posisinya tergeser oleh sektor informasi dan komunikasi. Selain pertambangan, sektor pertanian juga mengalami penurunan sebesar 3 poin persen yaitu dari 13,48 persen (2010) menjadi 10,48 persen (2018), namun tetap berada di posisi ketiga dari lima besar. Sebaliknya, perkembangan sektor informasi dan komunikasi kian meningkat, yang ditunjukkan sumbangan terhadap PDRB sektor tersebut semakin besar yaitu dari 4,80 persen (2010) naik menjadi 5,78 persen (2018).

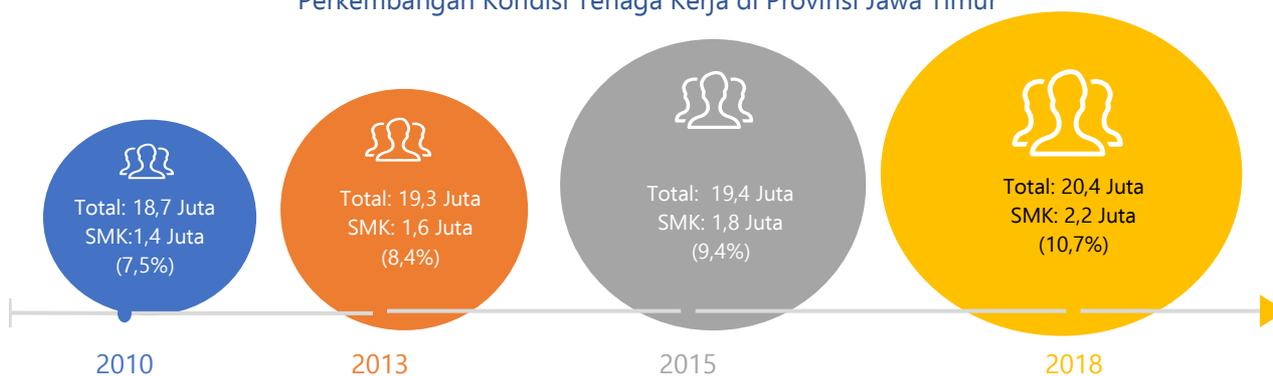
Gambar 2.2.113
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010 adalah 1.411.146 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 2.197.954 orang pada Tahun 2018, dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni 10,7 persen.

Gambar 2.2.114
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur



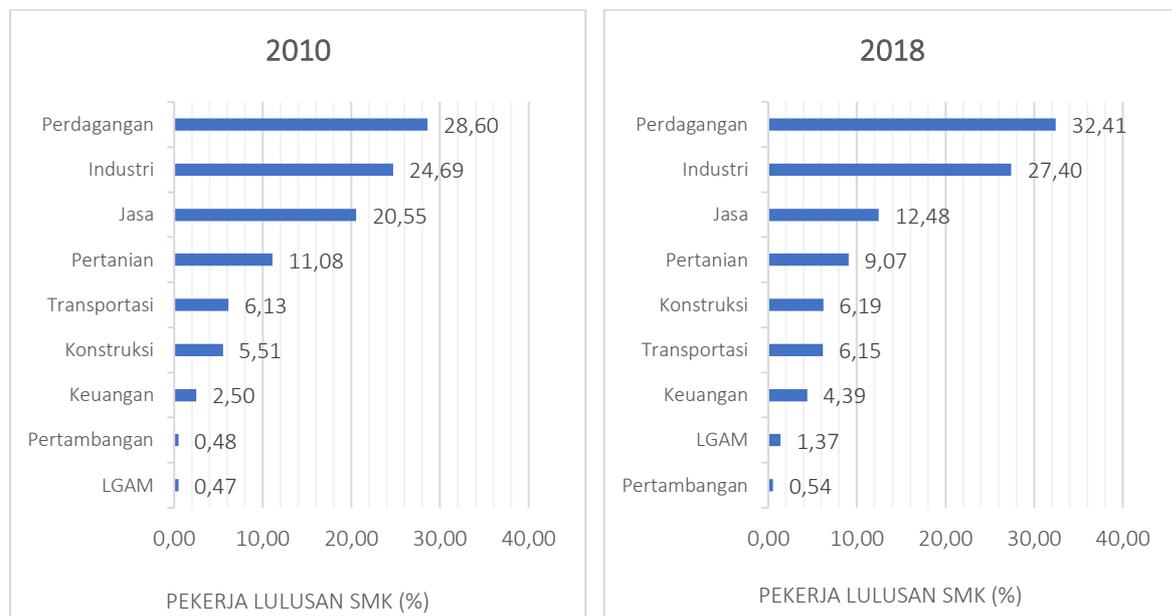
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari seperempat (28,6 persen) lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur terserap di sektor perdagangan. Di Tahun 2018, persentase lulusan SMK yang terserap di sektor tersebut meningkat 3,8 poin persen dan persentasenya menjadi 32,4 persen. Sektor perdagangan adalah sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur. Selain perdagangan, peningkatan persentase

lulusan SMK di provinsi ini juga terjadi di sektor industri, meningkat dari 24,69 persen (2010) menjadi 27,40 persen (2018). Dan, sektor konstruksi meningkat dari 5,51 persen (2010) menjadi 6,19 persen (2018). Sektor konstruksi berhasil menggeser posisi sektor informasi dan komunikasi berada di urutan kelima. Persentase pekerja lulusan SMK di sembilan lapangan usaha di provinsi Jawa Timur selama 2010-2018 sebagian besar mengalami peningkatan kecuali dua sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor jasa dan pertanian. Persentase pekerja lulusan SMK di sektor jasa turun cukup besar yaitu lebih dari 8 poin persen, dari 20,55 persen (2010) menjadi 12,48 persen (2018). Di sektor pertanian persentase pekerja lulusan SMK turun 2 poin persen yaitu dari 11,08 persen (2010) menjadi 9,07 persen (2018).

Gambar 2.2.115

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)

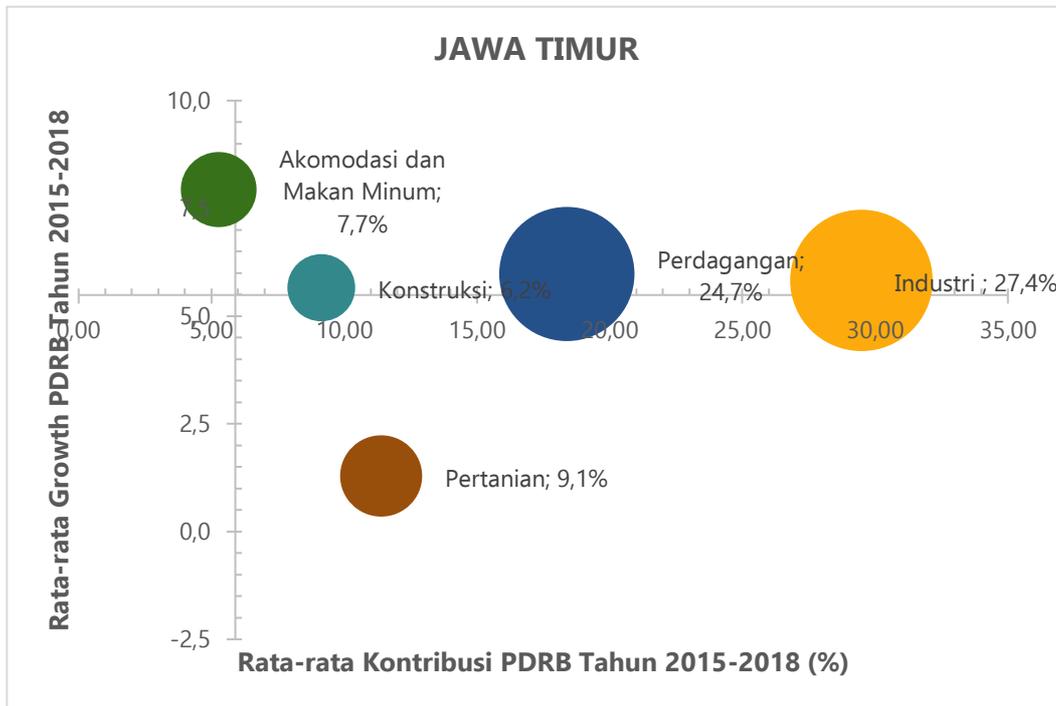


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah industri (27,4 persen), perdagangan (24,7 persen), pertanian, (9,1 persen), industri (7,7 persen), dan konstruksi (6,2 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang dapat menyerap banyak pekerja SMK, tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Untuk sektor konstruksi dan akomodasi dan makan minum, pertumbuhan PDRB cukup tinggi namun jika dilihat dari kontribusinya dalam perekonomian relatif rendah. Di sisi lain, sektor perdagangan memiliki pertumbuhan PDRB yang relatif hampir sama dengan sektor konstruksi namun kontribusi dalam PDRB Jawa Timur lebih besar dibandingkan sektor konstruksi. Sektor yang memiliki keunggulan dalam penyerapan pekerja SMK dan juga memiliki pertumbuhan dan kontribusi tinggi terhadap PDRB Jawa Timur adalah sektor industri. Sebaliknya, sektor pertanian yang termasuk lima besar sektor dalam penyerapan pekerja lulusan SMK di Jawa Timur, namun pertumbuhan dan kontribusi PDRB nya negatif.

Gambar 2.2.116

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Jawa Timur

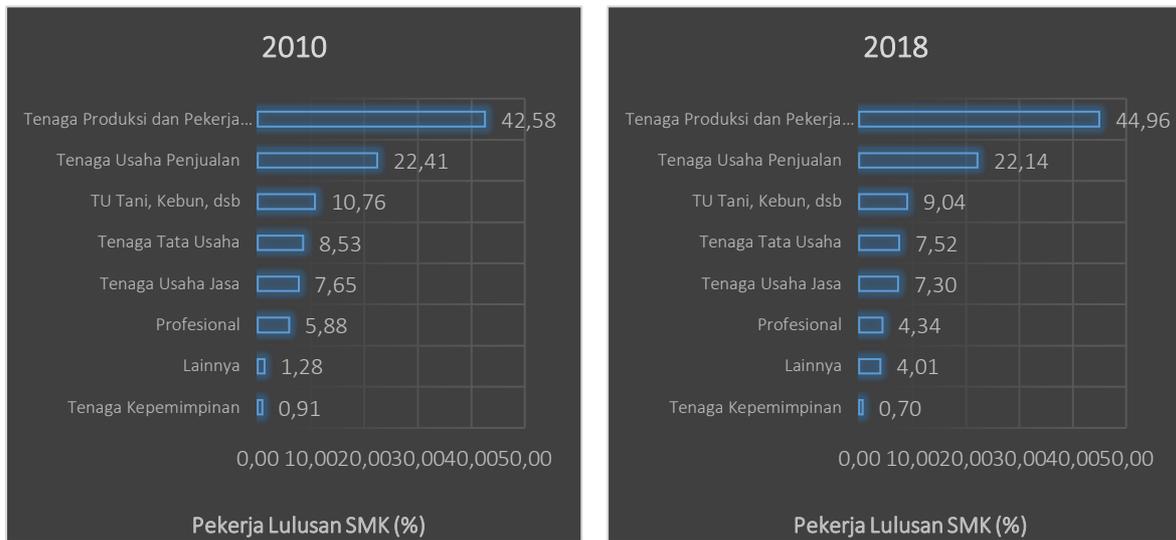


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di provinsi Jawa Timur sebagian besar bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar dan hanya sebagian kecil yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan. Dari delapan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh pekerja lulusan SMK di provinsi Jawa Timur, dalam rentang waktu 2010 dan 2018, hanya jenis pekerjaan tenaga produksi dan pekerja kasar yang persentasenya meningkat dari 42,58 persen (2010) menjadi 44,96 persen (2018). Selain itu jenis pekerjaan lainnya adalah jenis pekerjaan yang bervariasi yang masing-masing jenis pekerjaan jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak dapat dikelompokkan dalam satu kategori jenis pekerjaan. Semakin meningkatnya persentase jenis pekerjaan lainnya mengindikasikan semakin banyak pekerja lulusan SMK yang melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang semakin beragam. Pekerja lulusan SMK yang bekerja termasuk dalam jenis pekerjaan lainnya, persentasenya meningkat dari 1,28 persen (2010) menjadi 4,01 persen (2018).

Pekerja lulusan SMK di provinsi Jawa Timur sebagian besar berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dari tahun 2010 sampai 2018, pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai persentasenya meningkat dari 52,48 persen (2010) menjadi 59,38 persen (2018). Selain itu, pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, persentasenya juga meningkat dari 3,26 persen (2010) menjadi 3,53 persen (2018).

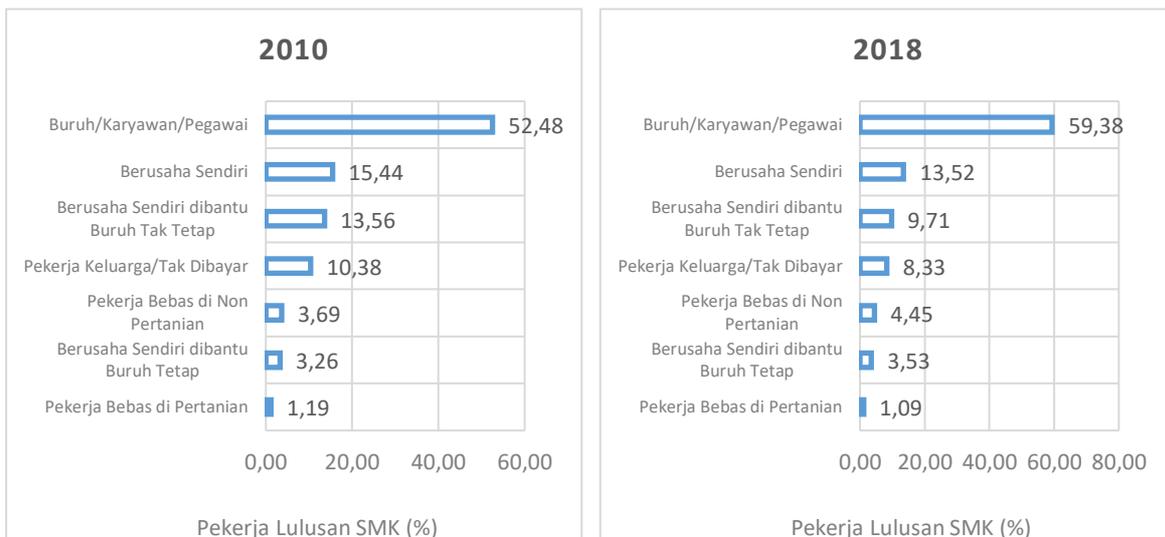
Gambar 2.2.117
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

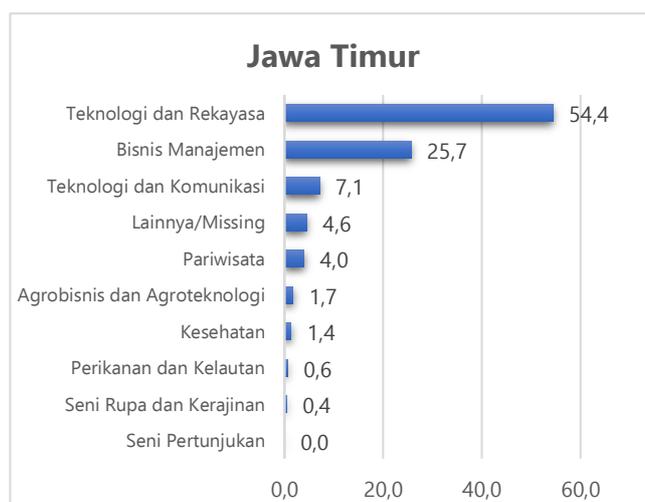
Hal tersebut berarti pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja formal di provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2010 dan 2018 cenderung meningkat. Sebaliknya yang berstatus kerja informal cenderung turun, namun yang berstatus kerja sebagai pekerja bebas di non pertanian persentasenya meningkat dari 3,69 persen (2010) menjadi 4,45 persen (2018).

Gambar 2.2.118
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.2.119
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 54,4 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 25,7 persen. Jika dijumlahkan kedua bidang keahlian tersebut adalah sekitar 81 persen, artinya 8 dari 10 tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur memiliki bidang keahlian Teknologi Rekayasa dan Bisnis Manajemen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur di sektor industri, perdagangan, dan pertanian, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 1,7 persen.

Tabel 2.2.15
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	203,876	208,546	213,323	218,209	223,208	228,320
Pertambangan	12,160	12,488	12,825	13,171	13,527	13,892
Industri	633,870	667,259	702,406	739,405	778,352	819,352
LGAM	30,403	30,645	30,889	31,135	31,382	31,632
Konstruksi	142,725	149,691	156,996	164,657	172,693	181,121
Perdagangan, Hotel dan Restoran	761,057	813,011	868,512	927,801	991,138	1,058,799
Transportasi dan Komunikasi	144,248	153,968	164,344	175,419	187,240	199,858
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	103,569	111,140	119,264	127,982	137,337	147,377
Jasa Kemasyarakatan	281,659	289,189	296,920	304,857	313,007	321,374
Jumlah Tenaga Kerja SMK	2,313,567	2,435,936	2,565,478	2,702,637	2,847,884	3,001,724
Total Tenaga Kerja	20,635,015	20,866,177	21,111,643	21,370,302	21,638,569	21,915,337
Share Tenaga Kerja	11.2	11.7	12.2	12.6	13.2	13.7

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

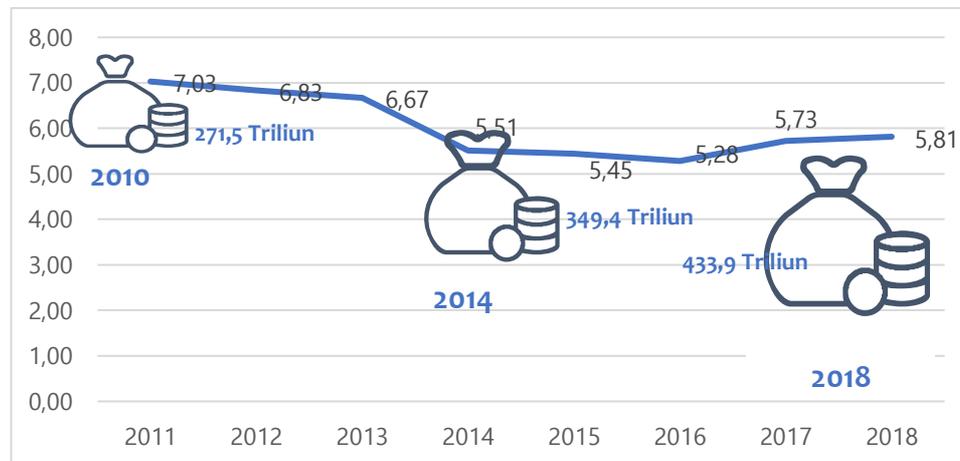


BANTEN

2.2.16. Provinsi Banten

Gambar 2.2.130

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten

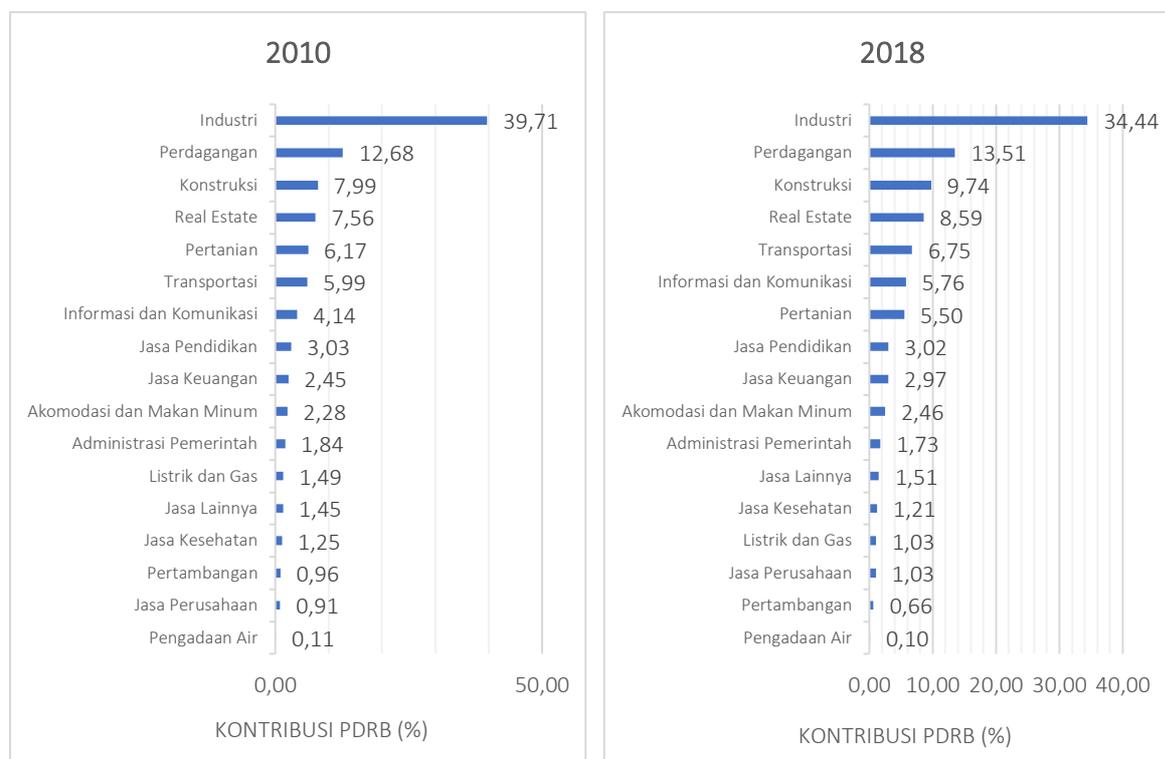


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Total PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 271,5 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 433,9 Triliun Rupiah pada Tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan PDRB di atas pertumbuhan nasional yakni 5,81 persen di tahun 2018. Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Banten di Tahun 2010 adalah sektor industri, perdagangan, konstruksi, real estate dan pertanian.

Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap sama, namun sektor pertanian mengalami penurunan persentase dan posisinya tergeser oleh sektor transportasi. Selain pertanian, sektor industri sebagai sektor yang persentasenya tertinggi namun dalam rentang waktu 2010-2018 kontribusi PDRB di sektor ini menurun yaitu dari 39,71 persen (2010) menjadi 34,44 persen (2018). Sebaliknya, sektor transportasi yang mampu menggeser posisi sektor pertanian mengalami peningkatan yaitu dari 5,99 persen (2010) menjadi 6,75 persen (2018). Selain transportasi, tiga sektor yang termasuk lima besar penyumbang PDRB Provinsi Banten, yang persentasenya meningkat adalah sektor perdagangan, konstruksi dan real estate.

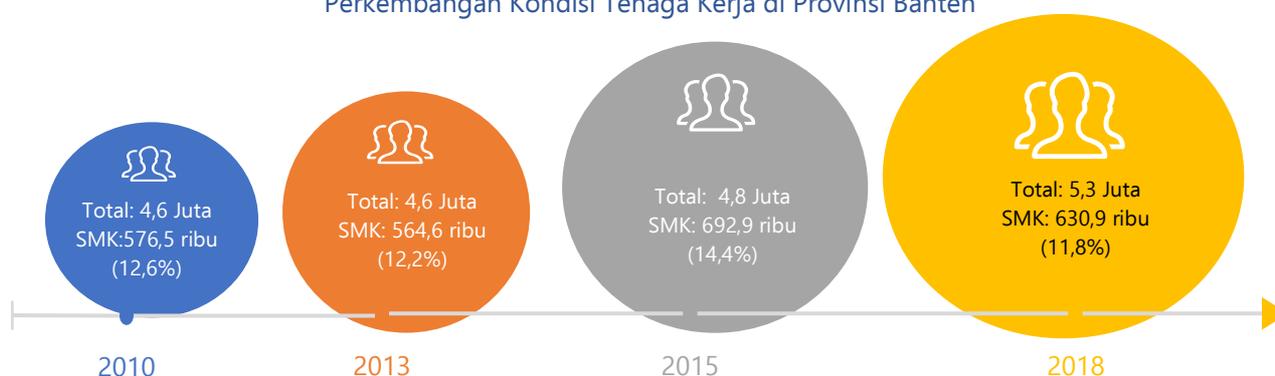
Gambar 2.2.131
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Banten

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Banten pada Tahun 2010 adalah 576.532 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 630.934 orang pada Tahun 2018, dengan share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni 11,8 persen di tahun 2018. Namun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, share tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Banten terhadap total tenaga kerja mengalami penurunan.

Gambar 2.2.132
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Banten

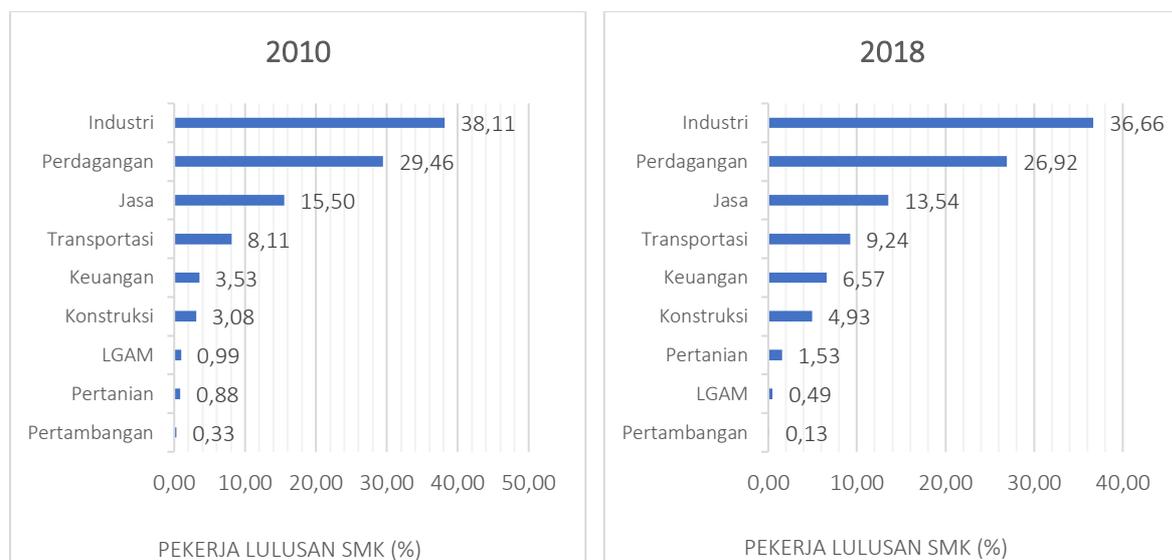


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari sepertiga (38,11 persen) lulusan SMK di Provinsi Banten terserap di sektor industri. Di Tahun 2018, persentase lulusan SMK yang terserap di sektor tersebut mengalami penurunan

menjadi 36,66 persen. Meskipun demikian, sektor ini adalah sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Banten. Selain industri, urutan kedua persentase terbesar penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Banten adalah sektor perdagangan. Sebagaimana halnya sektor industri, selama kurun waktu 2010-2018, sektor ini juga mengalami penurunan persentase penyerapan pekerja lulusan SMK yaitu dari 29,46 persen (2010) menjadi 26,92 persen (2018). Dari lima sektor terbesar penyerapan pekerja lulusan SMK di provinsi ini, dua sektor mengalami peningkatan persentase yaitu sektor transportasi dan keuangan.

Gambar 2.2.133
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten
Tahun 2010 dan 2018 (%)

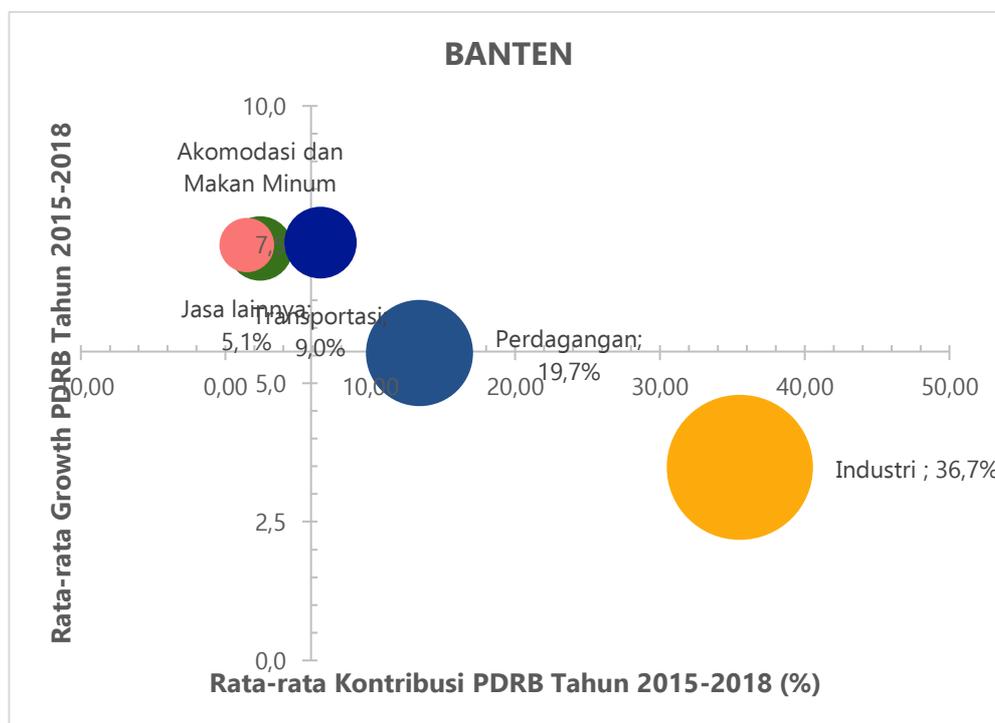


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Banten pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah industri (36,7 persen), perdagangan (19,7 persen), transportasi (9,0 persen), jasa lainnya (5,1 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang mampu menyerap banyak pekerja lulusan SMK, tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi. Sektor industri adalah sektor yang paling banyak menyerap pekerja lulusan SMK di Banten, kontribusi dalam perekonomian cukup tinggi namun jika dilihat dari pertumbuhannya relatif terendah dibandingkan empat sektor lainnya. Di sisi lain, sektor perdagangan yang penyerapan pekerja lulusan SMK dan kontribusi PDRB lebih rendah dibandingkan sektor industri namun pertumbuhannya relatif sama dengan sektor transportasi, jasa lainnya dan akomodasi dan makan minum .

Gambar 2.2.134

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Banten

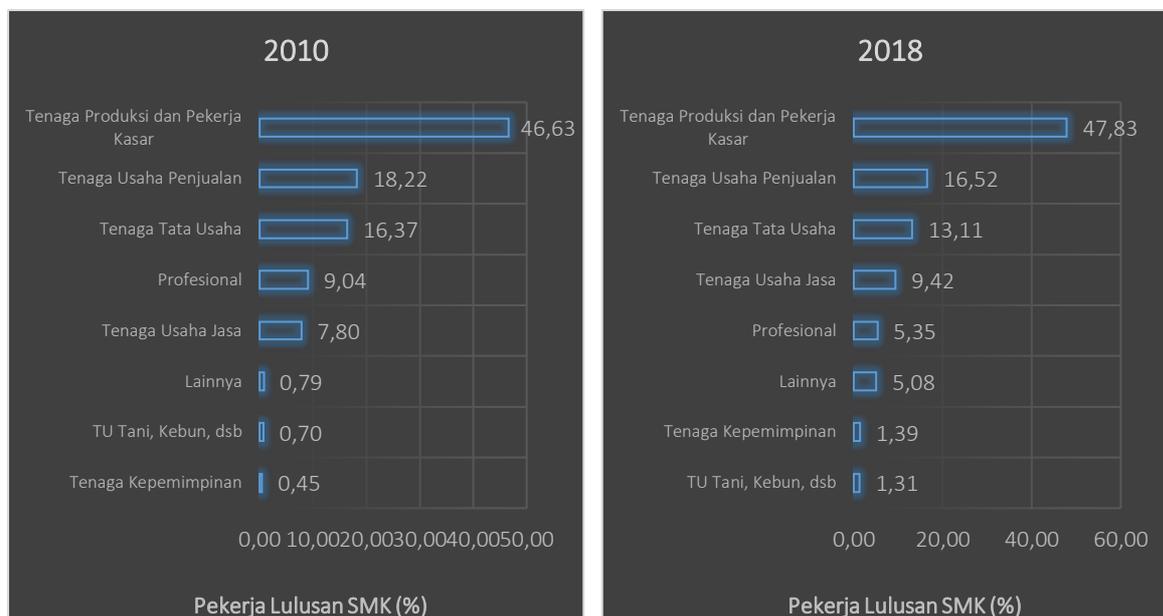


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Banten pada tahun 2010, sebagian besar atau 46,63 persen bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Selain jenis pekerjaan tersebut, lima besar jabatan pekerja lulusan SMK di provinsi ini pada tahun 2010 antara lain tenaga usaha penjualan, tenaga tata usaha, profesional dan tenaga usaha jasa. Pada tahun 2018, posisi lima besar jabatan pekerja lulusan SMK di provinsi ini tetap sama atau tidak berubah, namun tiga jenis pekerjaan mengalami penurunan persentase, dan hanya dua jenis pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase yaitu tenaga produksi dan pekerja kasar, dan tenaga usaha jasa. Sedangkan jabatan professional, persentasenya menurun dari 9,04 persen (2010) menjadi 5,35 persen (2018).

Gambar 2.2.135

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Banten
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Banten pada tahun 2010, lebih dari separuh (63,61 persen) berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dan hanya sebagian kecil atau persentase terendah (0,06 persen) adalah yang berstatus kerja sebagai pekerja bebas di pertanian. Selain berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, pekerja lulusan SMK yang termasuk pekerja formal yaitu yang berstatus kerja berusaha sendiri dibantu buruh tetap sebesar 2,33 persen. Ini berarti hampir dua pertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Banten pada tahun 2010 bekerja di sektor formal.

Pada tahun 2018, persentase tertinggi dan terendah pekerja lulusan SMK menurut status kerja adalah tetap atau tidak berubah, namun urutan di posisi kedua hingga urutan keenam mengalami perubahan. Selain itu, persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan hampir 14 poin persen yaitu menjadi 77,55 persen pada tahun 2018. Peningkatan persentase pekerja lulusan SMK di provinsi ini selama rentang waktu 2010-2018 memengaruhi peningkatan pekerja sektor formal lulusan SMK di provinsi ini yaitu dari 65,94 persen (2010) menjadi 79,72 persen (2018). Sebaliknya pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor informal semakin turun, dua diantaranya adalah yang berstatus kerja berusaha sendiri mengalami penurunan persentase cukup besar yaitu dari 21,43 persen (2010) menjadi 10,84 persen (2018), demikian pula yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, persentasenya turun dari 9,35 persen (2010) menjadi 2,91 persen (2018). Sedangkan yang berstatus kerja sebagai pekerja bebas di non pertanian dan pekerja bebas di pertanian, persentasenya sedikit meningkat dalam kurun waktu 2010-2018.

Gambar 2.2.136

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Banten Tahun 2010 dan 2018 (%)

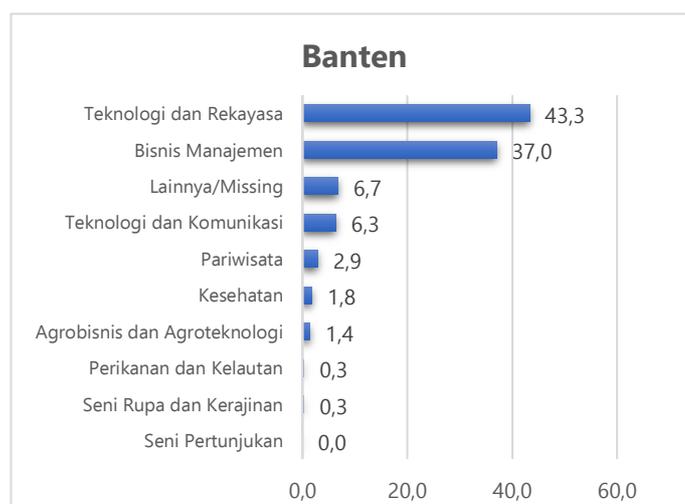


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Banten, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 43,3 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 37,0 persen. Jika dijumlahkan kedua bidang keahlian tersebut adalah sekitar 80 persen, artinya 8 dari 10 tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Banten memiliki bidang keahlian Teknologi Rekayasa dan Bisnis Manajemen. Dengan potensi yang dimiliki Banten yakni di sektor industri, perdagangan, dan konstruksi, maka kedua bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah provinsi Banten.

Gambar 2.2.137

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Banten Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.16

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Banten Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	10,046	10,457	10,884	11,328	11,791	12,273
Pertambangan	798	803	808	813	818	823
Industri	239,682	248,338	257,307	266,599	276,227	286,203
LGAM	3,154	3,188	3,222	3,256	3,291	3,327
Konstruksi	33,201	35,473	37,899	40,492	43,263	46,223
Perdagangan, Hotel dan Restoran	181,636	194,259	207,759	222,197	237,638	254,152
Transportasi dan Komunikasi	62,692	67,444	72,555	78,053	83,968	90,332
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	44,917	48,673	52,744	57,154	61,934	67,113
Jasa Kemasyarakatan	88,040	90,757	93,557	96,443	99,419	102,487
Jumlah Tenaga Kerja SMK	664,167	699,390	736,733	776,336	818,349	862,931
Total Tenaga Kerja	5,450,309	5,597,202	5,751,357	5,913,284	6,083,042	6,260,502
Share Tenaga Kerja	12.2	12.5	12.8	13.1	13.5	13.8

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

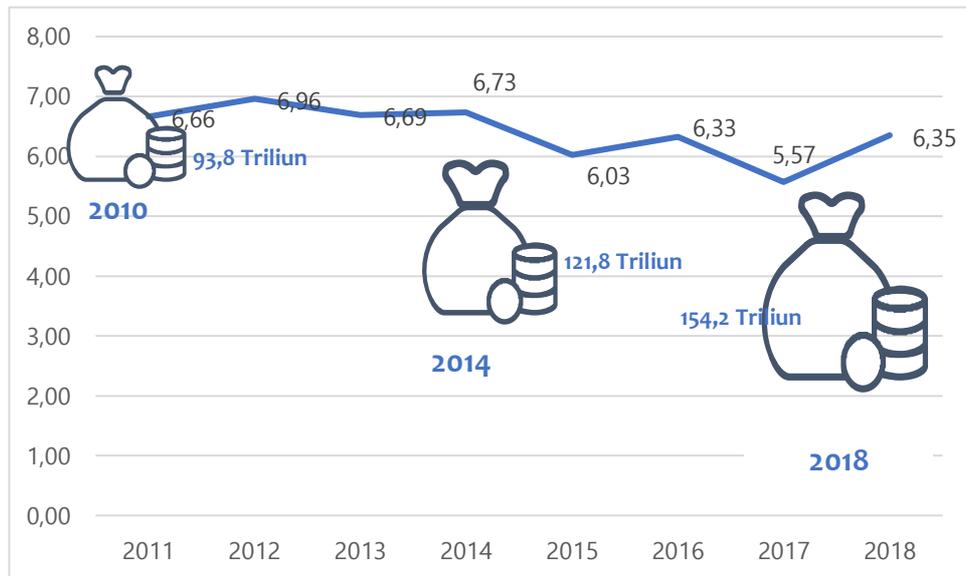


BALI

2.1.17. Provinsi Bali

Total PDRB Provinsi Bali atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 93,8 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 154,2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018, dengan tingkat pertumbuhan PDRB di atas pertumbuhan nasional yakni 6,35 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.138
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali

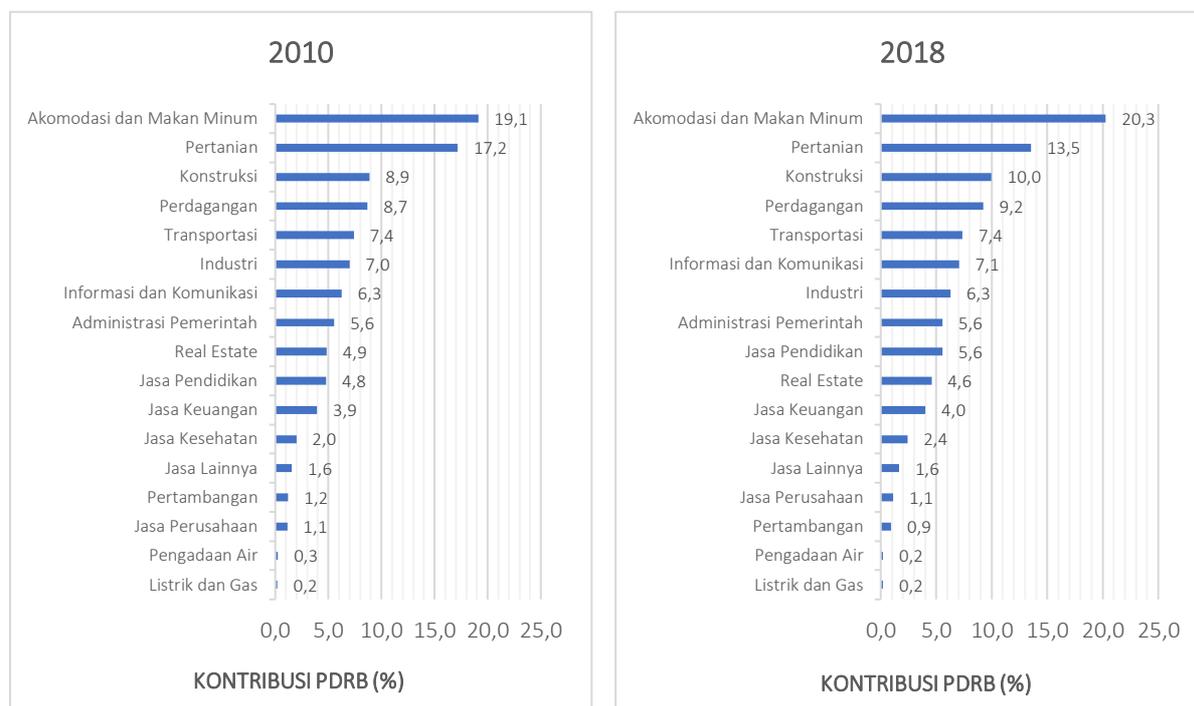


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Bali adalah sektor akomodasi dan makan minum, pertanian, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Jika dilihat dari perkembangannya, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 17,2 persen, dan turun menjadi 13,5 persen di Tahun 2018. Di sisi lain, perkembangan sektor konstruksi dan perdagangan kian meningkat, yang ditunjukkan sumbangan terhadap PDRB kedua sektor tersebut semakin besar.

Gambar 2.2.139

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2018 (%)

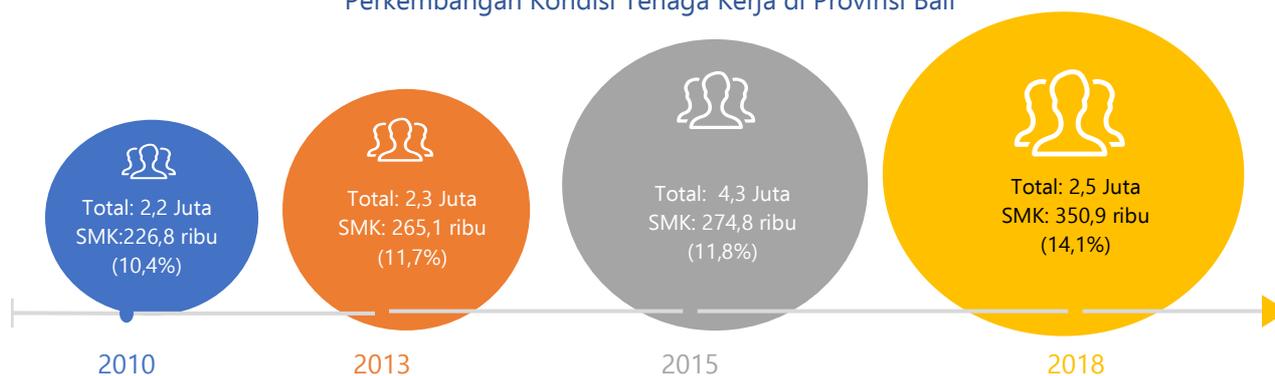


Sumber: BPS Provinsi Bali

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Bali pada Tahun 2010 adalah sebanyak 226.803 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 350.877 orang pada Tahun 2018. Share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di provinsi Bali juga mengalami peningkatan, di Tahun 2010, sebesar 10,4 persen dan meningkat menjadi 14,1 persen di Tahun 2018.

Gambar 2.2.140

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Bali



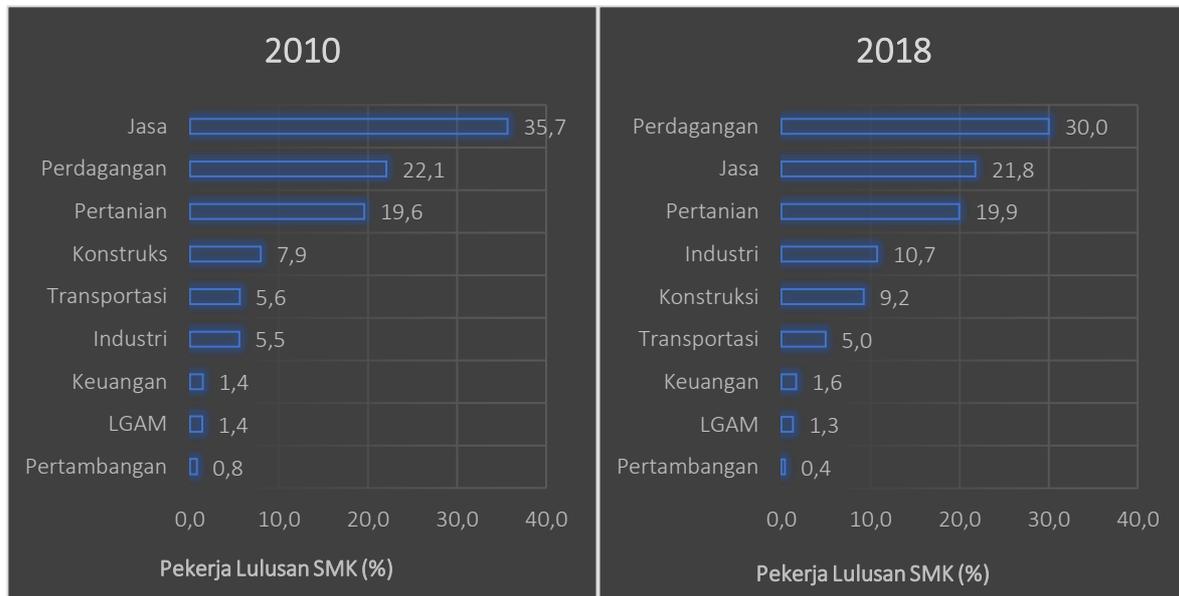
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (35,7 persen) lulusan SMK di Provinsi Bali terserap di sektor jasa, namun di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam (menjadi 21,8 persen). Adapun sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Bali pada Tahun 2018 adalah perdagangan. Di sisi lain, penyerapan lulusan SMK sektor pertanian di Tahun

2010 dan 2018 tergolong tiga tertinggi, dan persentasenya mengalami sedikit peningkatan, yakni dari 19,6 persen menjadi 19,9 persen.

Gambar 2.2.141

Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2018 (%)



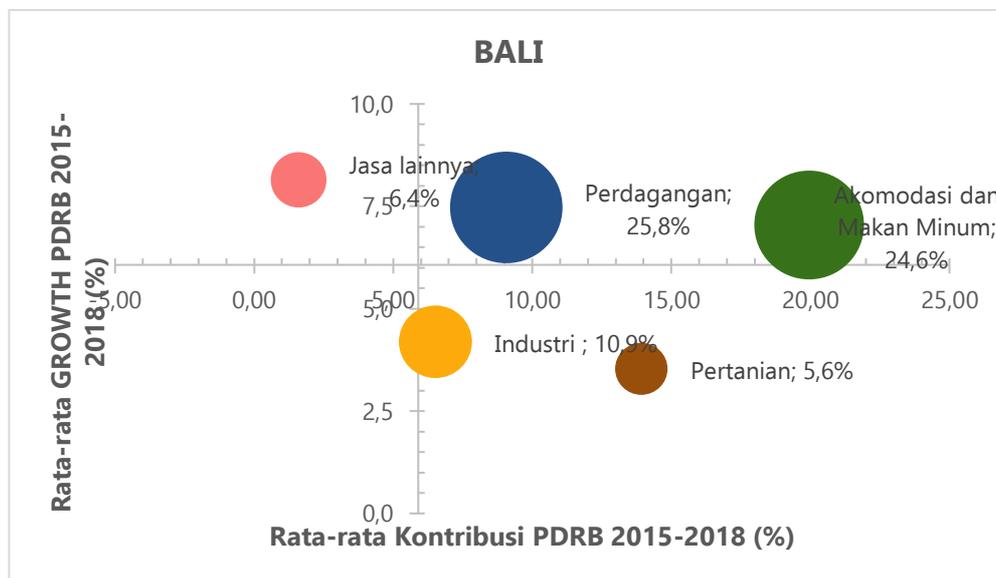
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Bali pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (25,8 persen), akomodasi, makan dan minum (24,6 persen), industri (10,9 persen), jasa lainnya (6,4 persen), dan pertanian (5,6 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang mampu menyerap banyak pekerja lulusan SMK, memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata sektor lainnya, kecuali sektor industri dan pertanian yang pertumbuhannya di bawah rata-rata 17 sektor.

Sektor akomodasi, makan dan minum serta perdagangan adalah sektor yang paling banyak menyerap pekerja lulusan SMK di Bali, kontribusi dalam perekonomian cukup tinggi dan pertumbuhannya di atas rata-rata. Di sisi lain, sektor jasa lainnya yang penyerapan pekerja lulusan SMK dan kontribusi PDRB lebih rendah dibandingkan sektor akomodasi, makan dan minum serta perdagangan namun pertumbuhannya relatif tinggi di atas 7 persen.

Gambar 2.2.142

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Bali

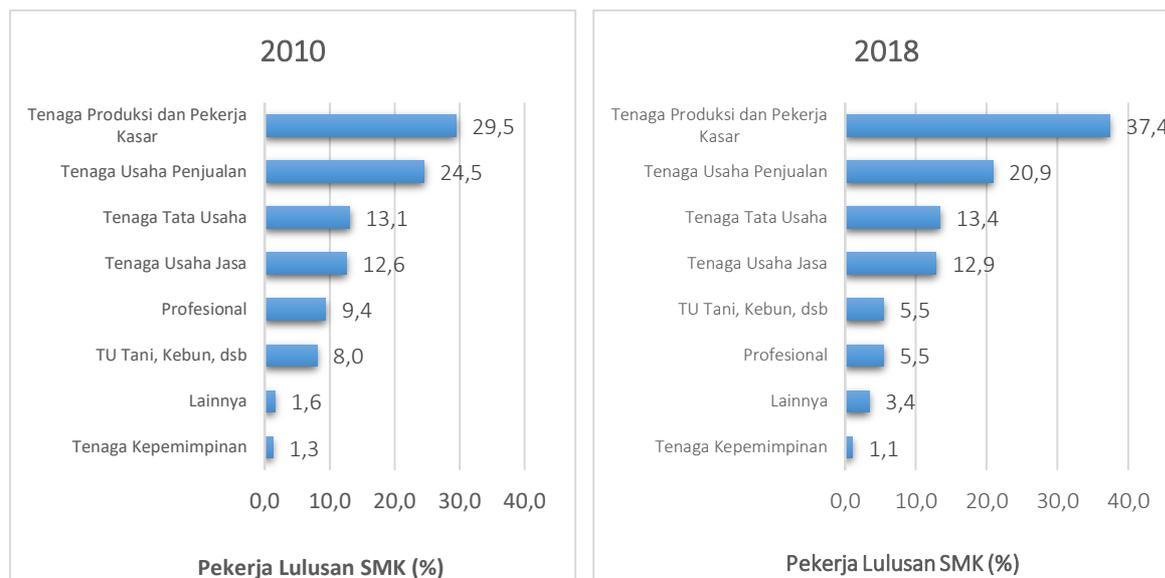


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Bali menurut jenis pekerjaan menunjukkan bahwa lebih dari separuh lulusan SMK di Provinsi Bali bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar; dan tenaga usaha penjualan.

Gambar 2.2.143

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2018 (%)

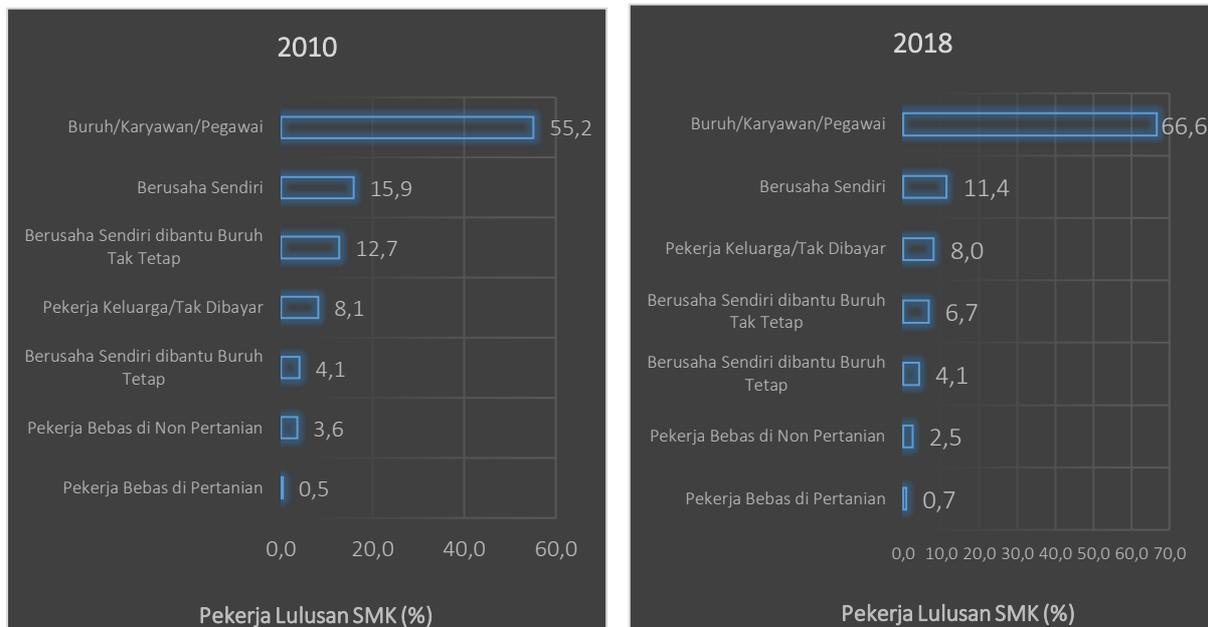


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dalam perkembangannya, lulusan SMK yang menjadi tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami peningkatan yang cukup besar, dari 29,5 persen di Tahun 2010, menjadi 37,4 persen pada Tahun 2018. Di sisi lain, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan, dan hanya sebagian kecil lulusan SMK yang memiliki jabatan tenaga kepemimpinan.

Gambar 2.2.144

Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Bali Tahun 2010 dan 2018 (%)

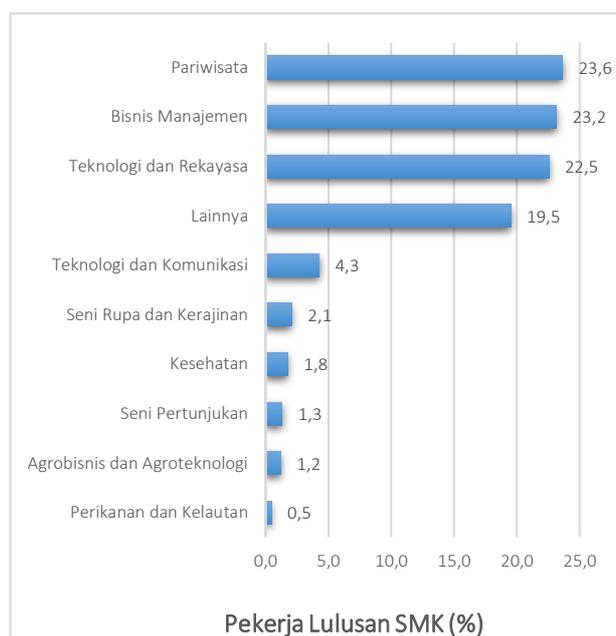


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Status pekerjaan lulusan SMK di Provinsi Bali mayoritas sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan persentasenya cenderung mengalami peningkatan yakni 55,2 persen di Tahun 2010 menjadi 66,6 persen di tahun 2018. Artinya, 7 dari 10 lulusan SMK di Provinsi Bali sebagai buruh/karyawan/pegawai. Di sisi lain, persentase lulusan SMK yang berusaha sendiri baik yang tidak dibantu maupun dibantu buruh tidak tetap mengalami penurunan.

Berbeda dengan provinsi lainnya, diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Bali, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Pariwisata paling besar proporsinya yakni 23,6 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 23,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja SMK di Provinsi Bali telah sesuai dengan potensi Provinsi Bali, yang mana sektor akomodasi, makan dan minum serta perdagangan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian. Akan tetapi, sektor pertanian juga mempunyai kontribusi terbesar kedua dalam perekonomian, namun hanya 1,2 persen pekerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi.

Gambar 2.2.145
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Bali
Tahun 2018 (%)

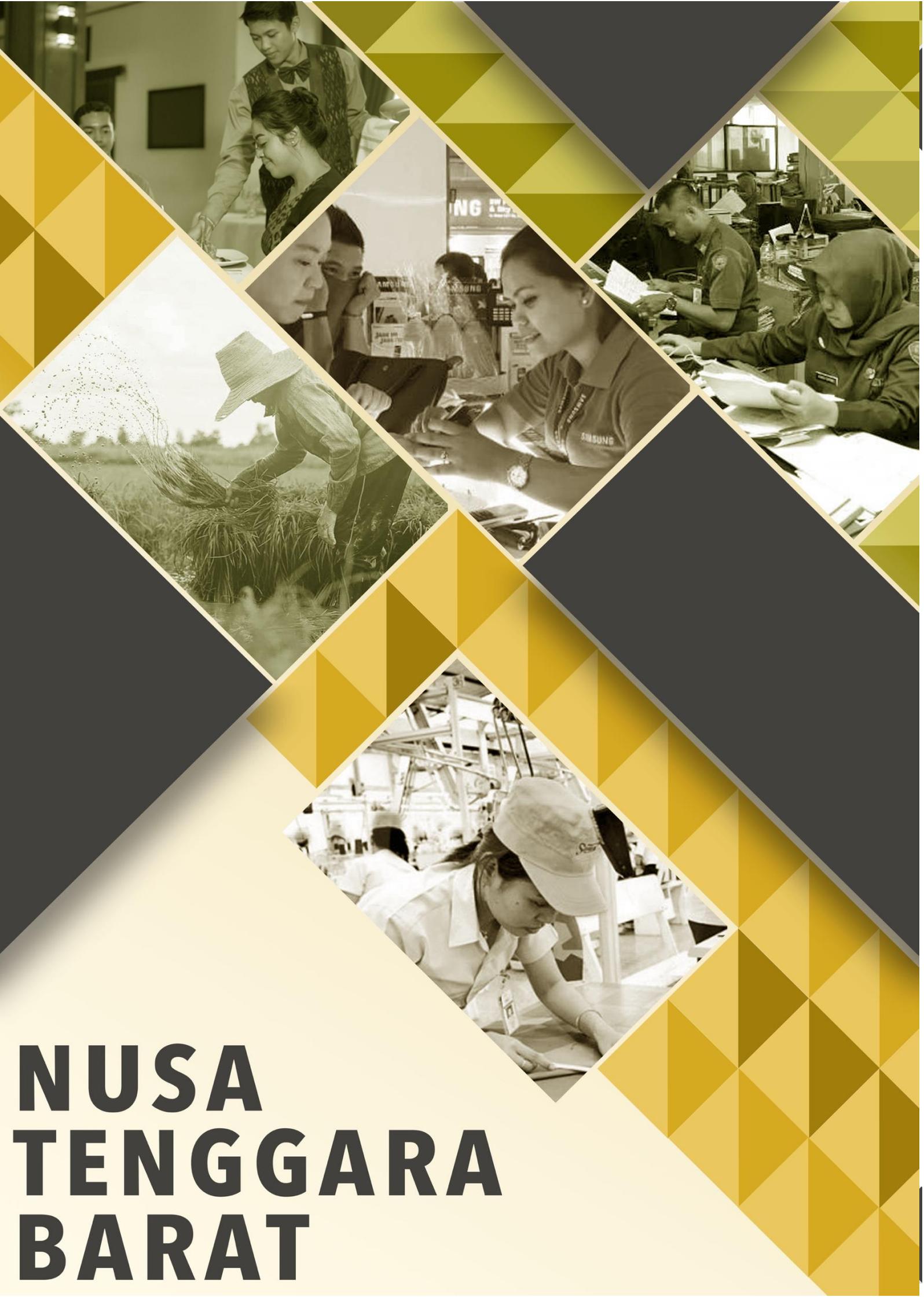


Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.17
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Bali Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	20,243	20,830	21,434	22,056	22,696	23,354
Pertambangan	873	887	901	916	931	946
Industri	39,988	41,760	43,610	45,542	47,560	49,667
LGAM	2,576	2,664	2,754	2,848	2,944	3,044
Konstruksi	19,794	21,058	22,403	23,834	25,356	26,976
Perdagangan, Hotel dan Restoran	189,611	203,285	217,945	233,662	250,513	268,578
Transportasi dan Komunikasi	18,962	20,113	21,335	22,631	24,005	25,463
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	24,751	26,361	28,076	29,903	31,849	33,921
Jasa Kemasyarakatan	55,117	57,336	59,644	62,045	64,542	67,140
Jumlah Tenaga Kerja SMK	371,915	394,295	418,103	443,437	470,396	499,090
Total Tenaga Kerja	2,528,602	2,574,228	2,622,129	2,671,570	2,722,012	2,773,067
Share Tenaga Kerja	14.7	15.3	15.9	16.6	17.3	18.0

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

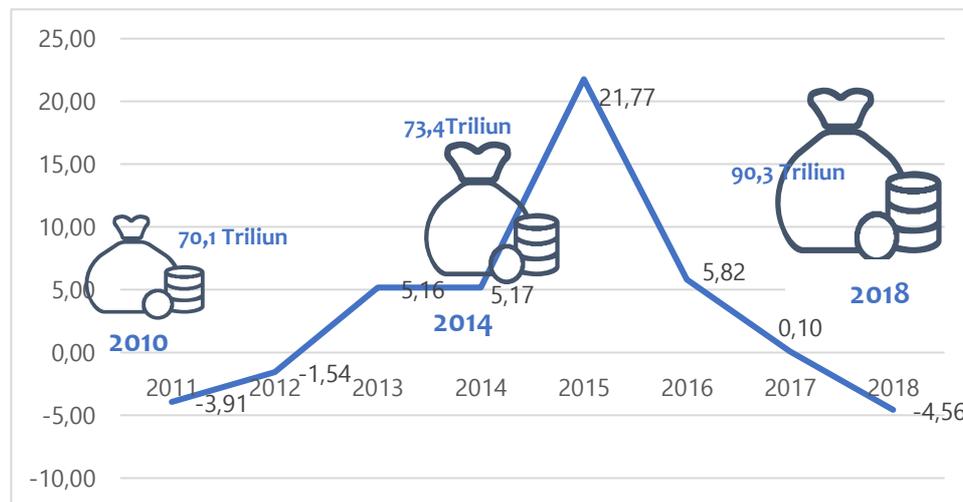


NUSA TENGGA BARAT

2.2.18. Provinsi NTB

Gambar 2.2.146

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB

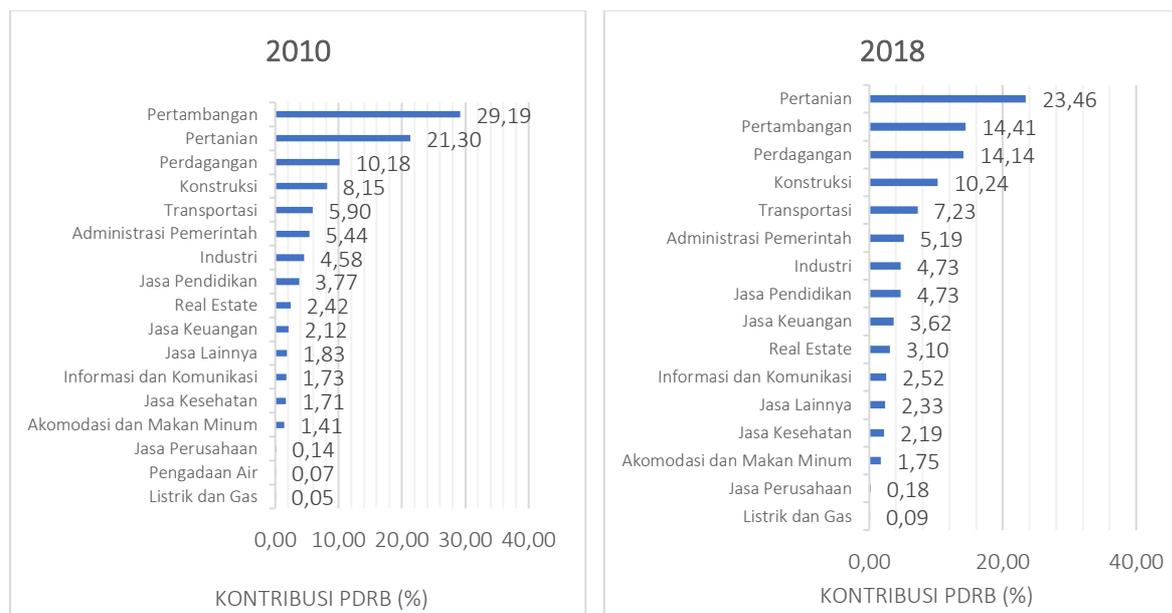


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 70,1 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 90,3 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Meskipun secara nilai mengalami peningkatan, di Tahun 2018, pertumbuhan PDRB Provinsi NTB bernilai negatif yakni -4,56 persen karena pertumbuhan di sektor pertambangan di tahun yang sama mengalami penurunan yang cukup tajam.

Gambar 2.2.147

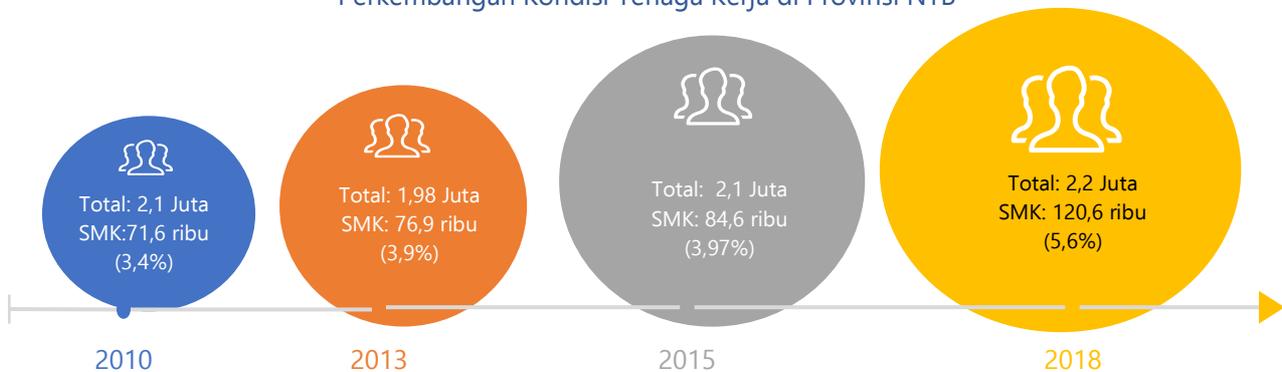
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Nusa Tenggara Barat di Tahun 2010 adalah sektor pertambangan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap sama, hanya urutan yang sedikit berubah yaitu urutan pertama yang pada tahun 2010 ditempati oleh sektor pertambangan, namun pada tahun 2018, sektor pertanian berhasil menggeser posisi sektor pertambangan menjadi di posisi teratas. Berbeda dengan perkembangan kontribusi PDRB di provinsi-provinsi di Jawa yang umumnya mengalami penurunan, kontribusi PDRB sektor pertanian di provinsi Nusa Tenggara Barat justru meningkat selama kurun waktu 2010-2018 yaitu dari 21,3 persen (2010) menjadi 23,46 persen (2018), menggeser posisi sektor pertambangan yang mengalami penurunan pada kurun waktu yang sama yaitu dari 19,19 persen (2010) menjadi 14,41 persen (2018). Selain itu, tiga sektor yang termasuk dalam lima besar kontribusi PDRB di provinsi Nusa Tenggara Barat semuanya mengalami peningkatan selama 2010-2018.

Gambar 2.2.148
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi NTB

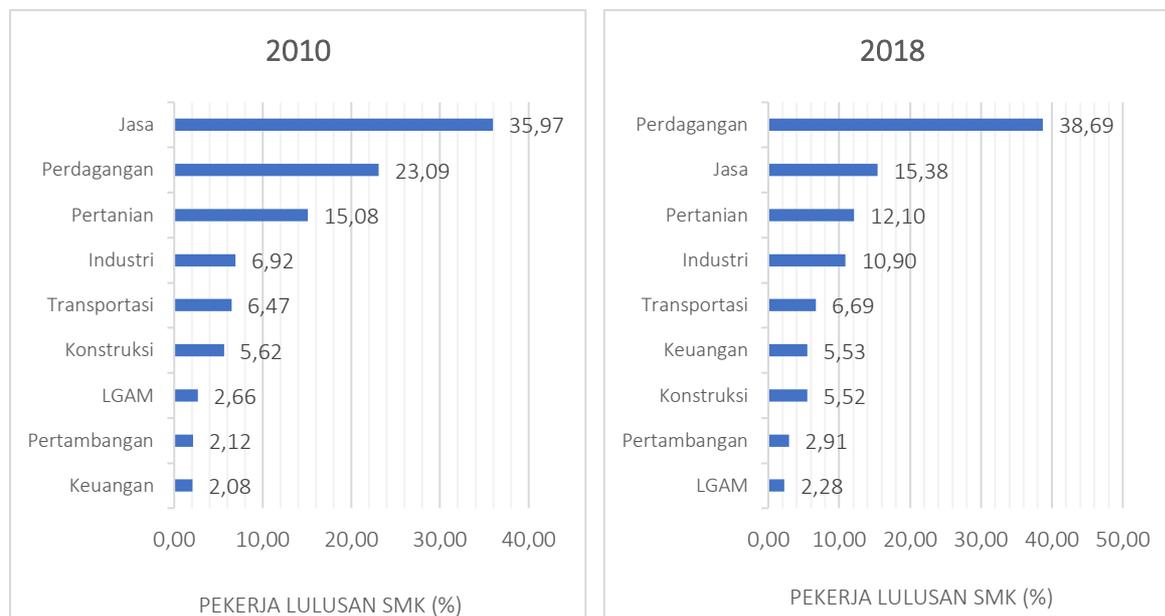


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2010 sebesar 71.631 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 120.616 orang pada Tahun 2018. Meskipun demikian share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di Provinsi NTB relatif rendah, hingga tahun 2018, hanya 5,6 persen.

Gambar 2.2.149

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



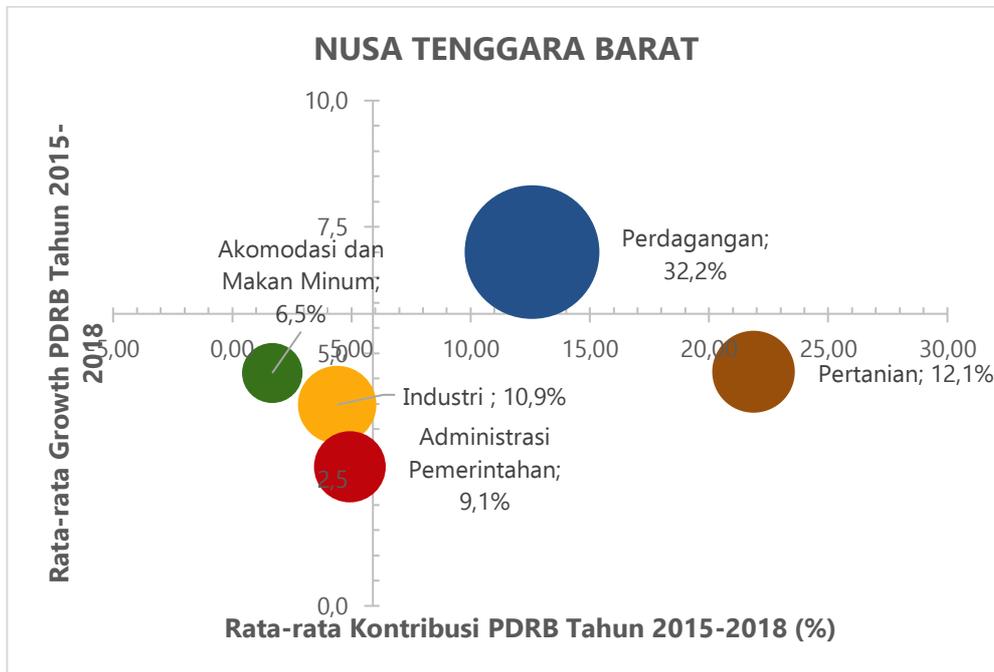
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari sepertiga (35,97 persen) lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat terserap di sektor jasa dan 23,09 persen di sektor perdagangan. Di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor jasa turun secara cepat yaitu lebih dari separuhnya dan hanya 15,38 persen yang masih terserap di sektor tersebut. Sebaliknya, terjadi peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang terserap di sektor perdagangan (38,69 persen). Peningkatan persentase pekerja lulusan SMK selama kurun waktu 2010-2018 di provinsi NTB, juga terjadi di sektor industri dan transportasi. Di sektor pertanian, yang mengalami peningkatan kontribusi PDRB namun penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor ini selama 2010-2018 turun hampir tiga poin persen yaitu dari 15,08 persen (2010) menjadi 12,10 persen (2018).

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (32,2 persen), pertanian (12,1 persen), industri (10,9 persen), administrasi pemerintah (9,1 persen), dan akomodasi dan makan minum (6,5 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang persentasenya tinggi tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi. Sektor pertanian, kontribusi dalam perekonomian tertinggi namun jika dilihat dari pertumbuhannya relatif rendah. Di sisi lain, sektor perdagangan memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan pertanian namun pertumbuhan PDRB sektor ini di NTB tertinggi dibandingkan dengan empat sektor lainnya.

Gambar 2.2.150

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebar di berbagai lapangan usaha dan menekuni berbagai jabatan. Pada tahun 2010, lebih dari seperempat (27,55 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Dan kurang dari seperempat pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai profesional sebesar 14,72 persen dan tenaga kepemimpinan 1,75 persen.

Gambar 2.2.151

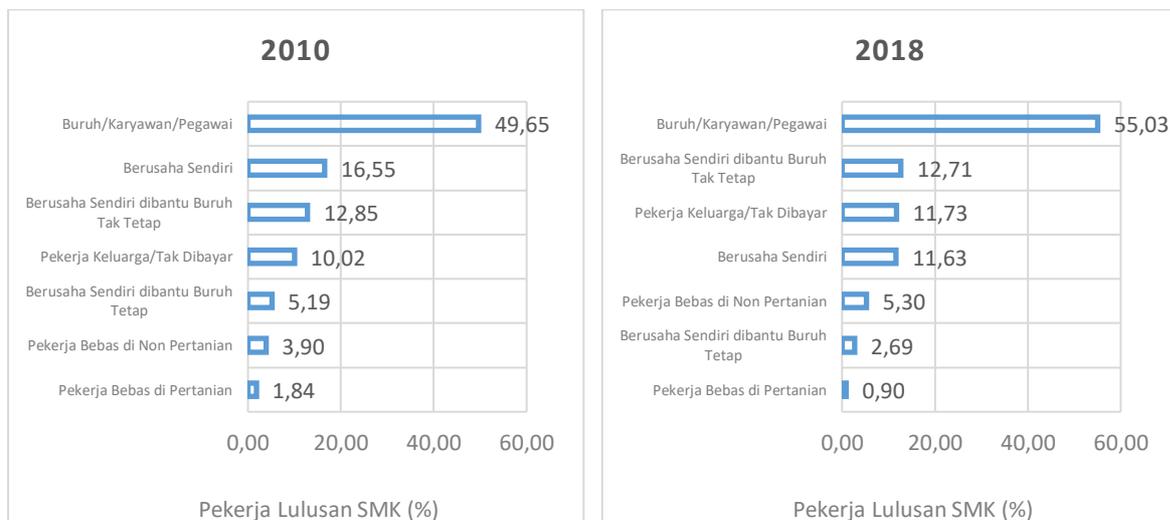
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada tahun 2018, tenaga produksi dan pekerja kasar tetap mendominasi sebagian besar pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan persentasenya sebesar 32,57 persen, cenderung meningkat dibandingkan tahun 2010. Sayangnya, jabatan tersebut bukan termasuk jenis jabatan tinggi. Di sisi lain, jenis jabatan yang mengalami penurunan cukup cepat yaitu jabatan profesional turun secara cepat, dari 14,72 persen (2010) menjadi 2,57 persen (2018). Sebaliknya, jabatan tenaga kepemimpinan sedikit meningkat namun peningkatannya sangat lambat dari 1,75 persen (2010) menjadi 1,79 persen (2018).

Gambar 2.2.152
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan
di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

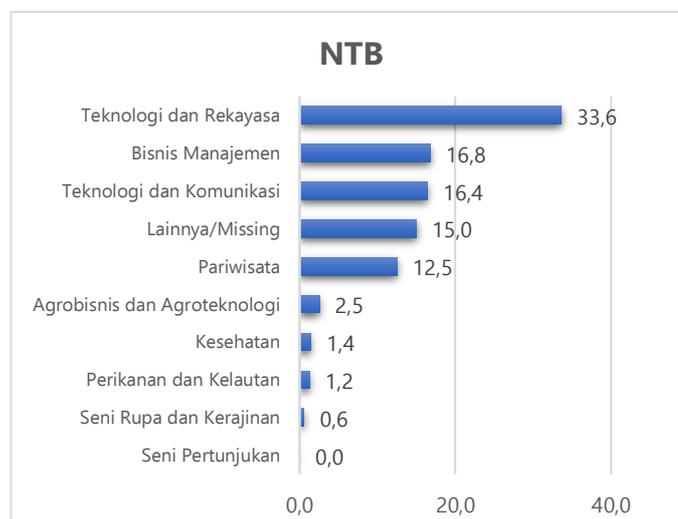
Pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 hampir separuhnya berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah tertinggi dibandingkan kategori status kerja lainnya, dan cenderung meningkat selama kurun waktu 2010-2018 yaitu dari 49,65 persen (2010) menjadi 55,03 persen (2018). Tingginya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai memengaruhi tingginya persentase pekerja formal di provinsi ini. Persentase pekerja lulusan SMK yang termasuk pekerja formal sebesar 54,84 persen pada tahun 2010, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 57,72 persen.

Peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja formal sebagian besar merupakan kontribusi pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, sedangkan yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap justru mengalami penurunan yaitu dari 5,19 persen (2010) menjadi 2,69 persen (2018). Tampaknya pekerja lulusan SMK di provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak yang memilih bekerja menjadi karyawan dibandingkan berusaha mandiri. Pekerja lulusan SMK yang berusaha sendiri, baik yang berusaha sendiri tanpa dibantu buruh maupun yang dibantu buruh tetap dan yang dibantu buruh tidak tetap, semuanya mengalami penurunan.

Di sisi lain, peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja formal memengaruhi penurunan persentase pekerja lulusan SMK di sektor informal, sayangnya, yang berstatus kerja sebagai

pekerja keluarga/ tak dibayar persentasenya relatif masih cukup besar yaitu 10,02 persen pada tahun 2010, dan justru meningkat di tahun 2018 yaitu menjadi 11,73 persen.

Gambar 2.2.153
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi NTB
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi NTB, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 33,6 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 16,8 persen, dan bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikai sebesar 16,4 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi NTB di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan maka ketiga bidang keahlian tersebut telah sesuai dengan potensi wilayah, meskipun masih dinilai kurang untuk lulusan pekerja bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi karena distribusinya hanya 2,5 persen.

Tabel 2.2.18
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	15,184	15,794	16,429	17,090	17,777	18,492
Pertambangan	3,524	3,541	3,558	3,576	3,593	3,611
Industri	13,565	13,998	14,445	14,906	15,382	15,873
LGAM	2,884	3,020	3,163	3,312	3,469	3,632
Konstruksi	6,984	7,326	7,685	8,061	8,456	8,870
Perdagangan, Hotel dan Restoran	50,136	53,863	57,868	62,169	66,791	71,756
Transportasi dan Komunikasi	8,509	8,975	9,466	9,984	10,531	11,108
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,254	7,893	8,589	9,345	10,168	11,064
Jasa Kemasyarakatan	19,019	19,497	19,986	20,487	21,001	21,528
Jumlah Tenaga Kerja SMK	127,059	133,908	141,188	148,931	157,168	165,934
Total Tenaga Kerja	2,291,844	2,333,600	2,377,858	2,424,686	2,473,714	2,524,844
Share Tenaga Kerja	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

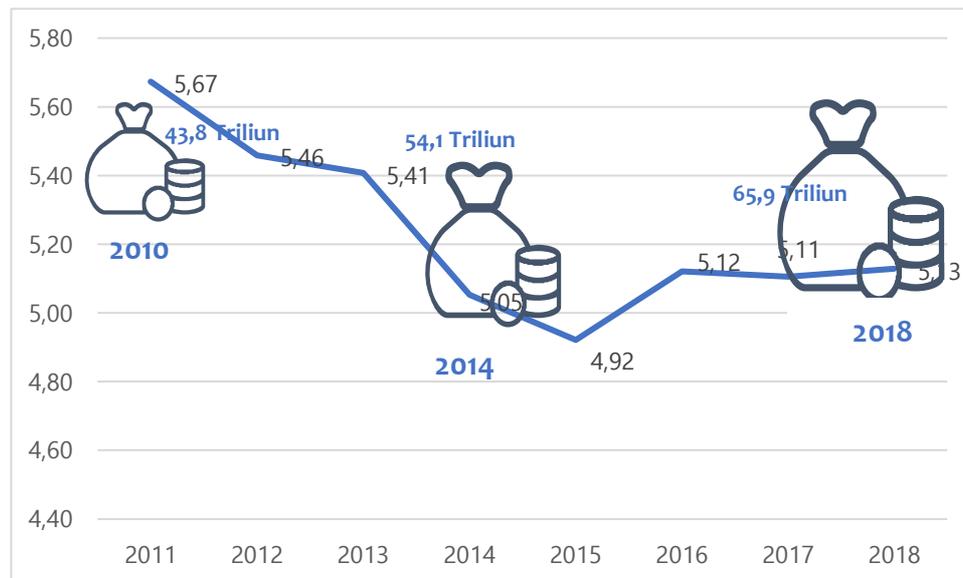


NUSA TENGGA TIMUR

2.2.19. Provinsi NTT

Total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 43,8 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 65,9 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Adapun jika dilihat tingkat pertumbuhannya, selama kurun waktu 2011-2010, pertumbuhan PDRB Provinsi NTT sekitar 5 persen.

Gambar 2.2.154
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT

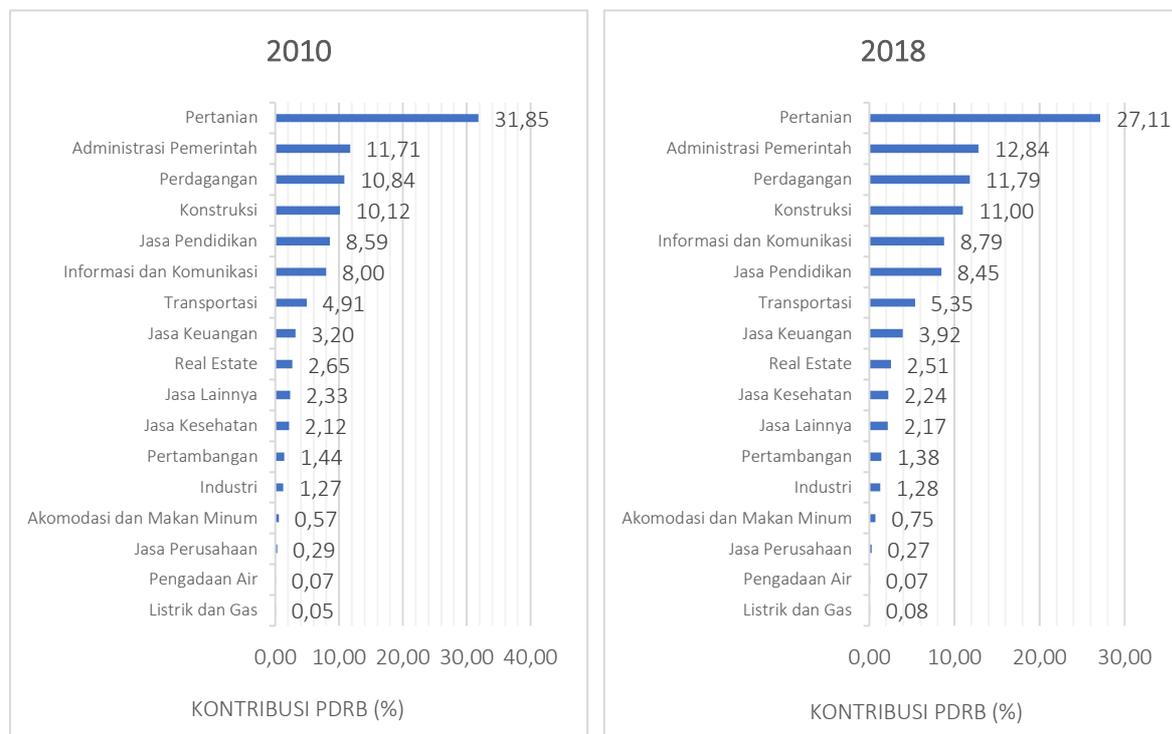


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2010 adalah sektor pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan, konstruksi dan jasa pendidikan. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar masih tetap sama dengan urutan yang tidak berubah, kecuali sektor jasa pendidikan yang pada tahun 2010 berada di urutan ke lima namun pada tahun 2018 posisinya digeser oleh sektor informasi dan komunikasi. Sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar namun persentasenya dari tahun ke tahun semakin berkurang yaitu dari 31,85 persen (2010) menjadi 27,11 persen (2018). Selain itu sektor jasa pendidikan yang posisinya digantikan oleh sektor informasi dan komunikasi, juga mengalami sedikit penurunan pada kurun waktu yang sama yaitu dari 8,59 persen (2010) menjadi 8,45 persen (2018). Sedangkan empat sektor lainnya termasuk informasi dan komunikasi, semuanya mengalami peningkatan persentase PDRB.

Gambar 2.2.155

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)

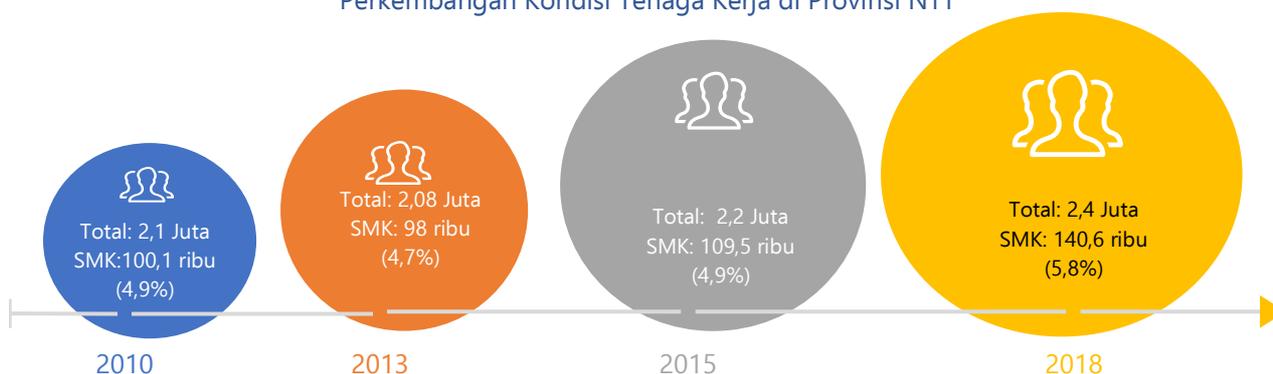


Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Tahun 2010 adalah 100.089 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 140.601 orang pada Tahun 2018. Meskipun demikian share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di Provinsi NTT relatif rendah, hingga tahun 2018, hanya 5,8 persen.

Gambar 2.2.156

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi NTT

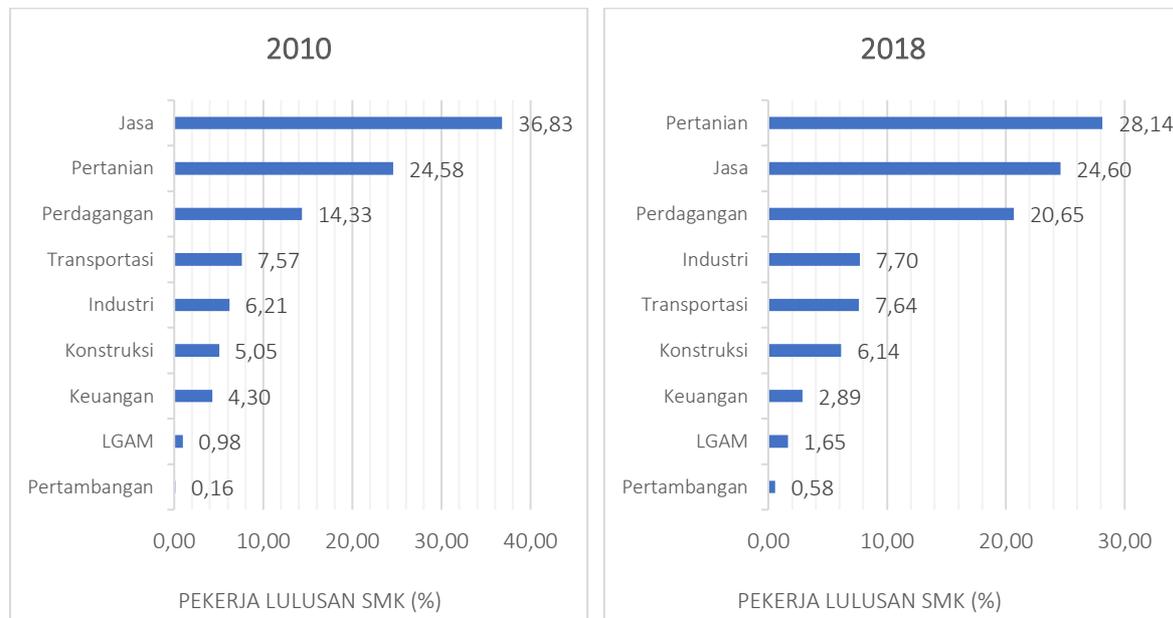


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari sepertiga (36,83 persen) lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur terserap di sektor jasa. Di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut turun mendekati sembilan poin persen menjadi 28,14 persen. Itulah sebabnya posisi sektor jasa sebagai sektor yang

paling banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMK di provinsi NTT, pada tahun 2018, posisinya telah digeser oleh sektor pertanian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMK dibandingkan sektor lain pada waktu yang sama.

Gambar 2.2.157
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)



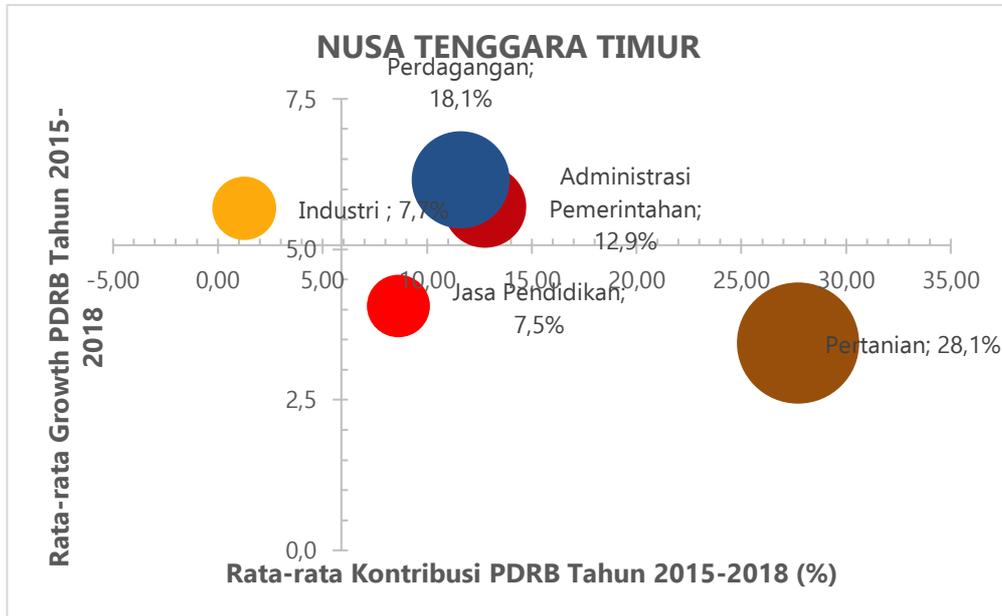
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Kontribusi sektor pertanian yang cenderung turun tidak memengaruhi tenaga kerja lulusan SMK di provinsi NTT untuk tetap menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor pertanian selama kurun waktu 2010-2018 meningkat dari 24,58 persen (2010) menjadi 28,14 persen (2018), sekaligus sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMK di provinsi ini.

Selanjutnya, disusun pemetaan lima sektor yang berpotensi dalam penyerapan pekerja lulusan SMK dilihat dari pertumbuhan dan kontribusi PDRB. Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah pertanian (28,1 persen), perdagangan (18,1 persen), administrasi pemerintahan (12,9 persen), industri (7,7 persen), dan jasa pendidikan (7,5 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang paling banyak menyerap pekerja lulusan SMK, tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi.

Gambar 2.2.158

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi NTT



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sektor pertanian yang paling tinggi persentase dan kontribusinya dalam perekonomian di NTT, namun jika dilihat dari pertumbuhannya relatif rendah. Di sisi lain, sektor perdagangan yang persentasenya tertinggi, pertumbuhan PDRB nya pun relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor industri, jasa pendidikan dan pertanian.

Gambar 2.2.159

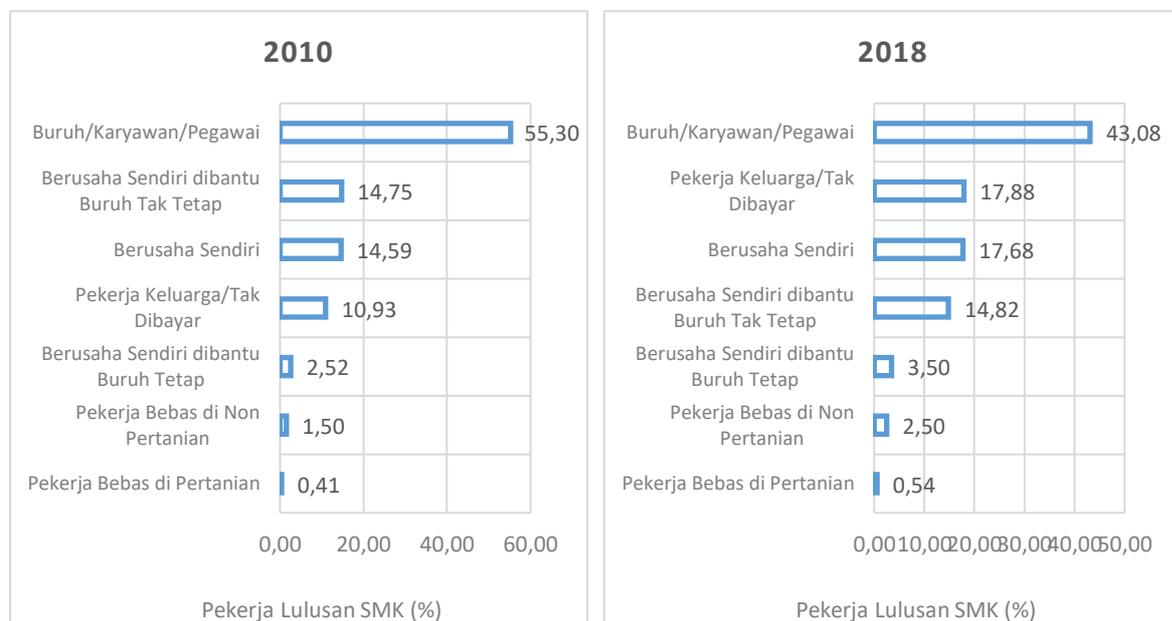
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi NTT pada tahun 2010, paling banyak berkarir sebagai profesional. Berbeda dengan Provinsi lain, yang sebagian besar pekerja lulusan SMK nya bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar, pekerja lulusan SMK di provinsi ini lebih dari seperempatnya menduduki jabatan sebagai professional, namun sayangnya, persentase yang cukup tinggi dan tertinggi dibandingkan jabatan lain yaitu sebesar 26,51 persen pada tahun 2010. Di tahun 2018, persentasenya turun drastis dan hanya tersisa 7,68 persen yang masih menjabat sebagai profesional. Jabatan professional telah digantikan posisinya dan telah digeser oleh jenis pekerjaan yang persentasenya tertinggi di tahun 2018 yaitu TU tani, kebun dsb sebesar 27,87 persen. Dan persentase tertinggi kedua adalah jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar sebesar 25,81 persen. Pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar meningkat sebesar 6,2 poin persen.

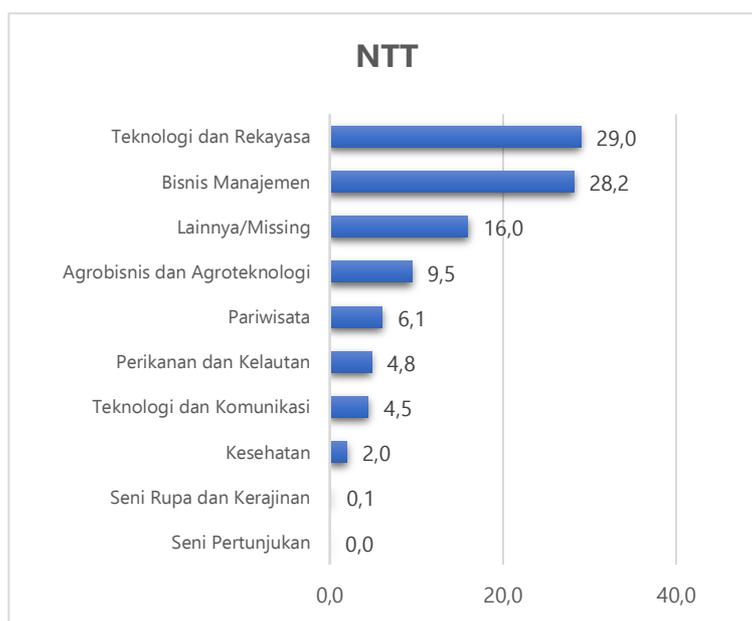
Gambar 2.2.160
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari separuh (55,30%) pekerja lulusan SMK di Provinsi NTT pada tahun 2010 berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, persentasenya jauh melebihi status kerja lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh (57,82 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini pada tahun 2010 berstatus kerja sebagai pekerja sektor formal. Walaupun persentasenya cenderung turun namun pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja formal pada tahun 2018 masih cukup besar yaitu 46,58 persen, dan tetap mendominasi sebagian besar pekerja lulusan SMK di provinsi ini.

Gambar 2.2.161
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi NTT
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi NTT, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 29,0 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 28,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi NTT di sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan perdagangan maka kedua bidang keahlian tersebut ada yang sesuai dengan potensi wilayah yakni bisnis manajemen. Di sisi lain, pekerja SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong potensi pertanian di Provinsi NTT juga cukup besar persentasenya yakni 9,5 persen.

Tabel 2.2.19
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi NTT Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	40,671	41,800	42,961	44,154	45,380	46,640
Pertambangan	835	854	874	894	915	936
Industri	11,328	11,858	12,413	12,994	13,602	14,239
LGAM	2,434	2,552	2,675	2,804	2,939	3,081
Konstruksi	9,067	9,519	9,994	10,492	11,015	11,565
Perdagangan, Hotel dan Restoran	30,929	32,943	35,087	37,371	39,804	42,395
Transportasi dan Komunikasi	11,334	11,955	12,611	13,302	14,031	14,800
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	4,343	4,636	4,949	5,283	5,639	6,020
Jasa Kemasyarakatan	35,616	36,680	37,776	38,905	40,068	41,266
Jumlah Tenaga Kerja SMK	146,556	152,797	159,339	166,200	173,395	180,942
Total Tenaga Kerja	2,456,573	2,515,486	2,576,499	2,638,465	2,702,245	2,768,932
Share Tenaga Kerja	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

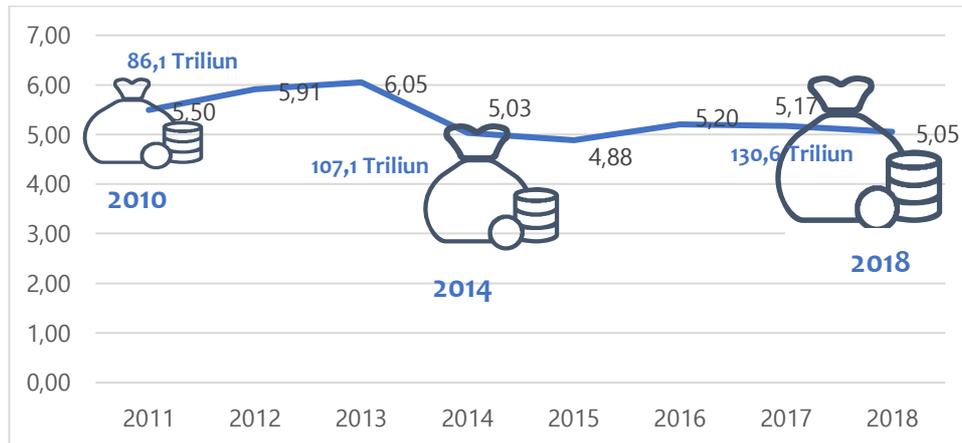


KALIMANTAN BARAT

2.2.20. Provinsi Kalimantan Barat

Total PDRB Provinsi Kalimantan Barat atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 86,1 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 130,6 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Adapun tingkat pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat relatif konstan di angka 5 persen.

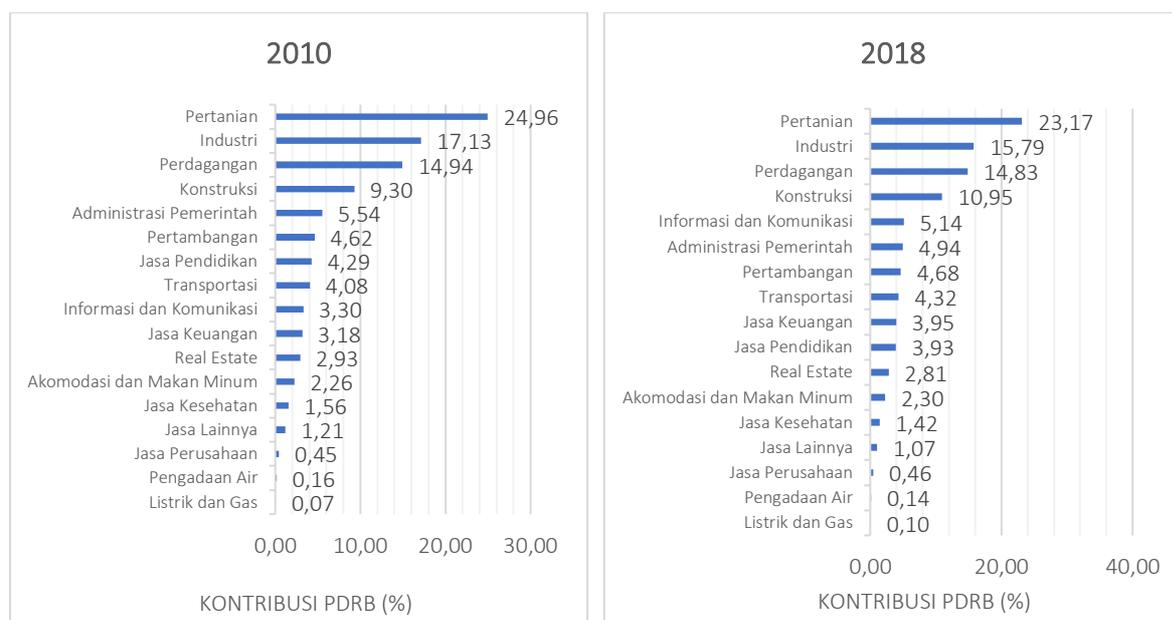
Gambar 2.2.162
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat di Tahun 2010 adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, kontribusi dan posisi lima sektor tersebut tidak berubah, kecuali sektor administrasi pemerintahan yang tergeser oleh sektor informasi dan komunikasi.

Gambar 2.2.163
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)

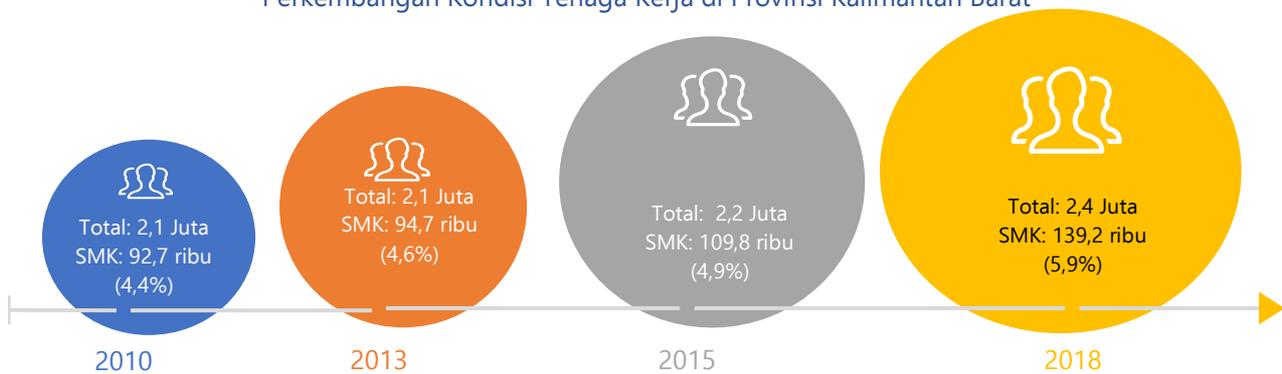


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2010 sebesar 92.733 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 139.196 orang pada Tahun 2018. Meskipun demikian share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat relatif rendah, hingga tahun 2018, hanya 5,9 persen.

Walaupun posisi tidak berubah namun tiga sektor yaitu pertanian, industri dan perdagangan mengalami penurunan, kecuali konstruksi yang meningkat dari 9,30 persen (2010) menjadi 10,95 persen (2018). Selain itu, sektor informasi dan komunikasi yang berhasil naik di posisi lima, juga mengalami peningkatan dari 3,30 persen (2010) menjadi 5,14 persen (2018).

Gambar 2.2.164
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, hampir sepertiga (31,68 persen) lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Barat terserap di sektor perdagangan. Di Tahun 2018, perdagangan tetap menempati urutan teratas untuk penyerapan lulusan SMK di Kalimantan Barat, sektor tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,04 poin persen menjadi 32,72 persen.

Gambar 2.2.165
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

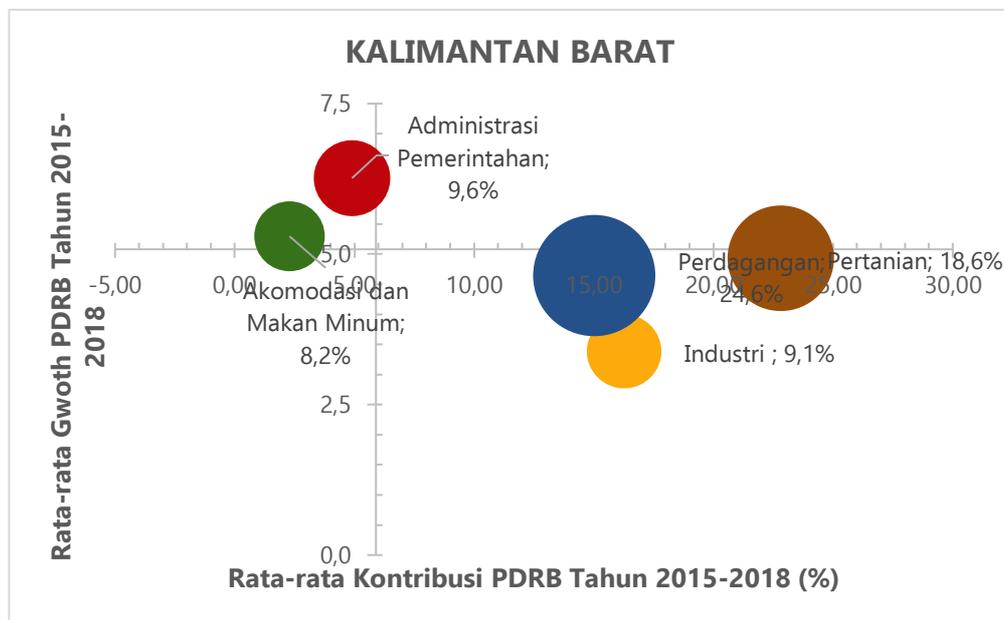


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi selain perdagangan (24,6 persen) adalah sektor, pertanian (18,6 persen), administrasi pemerintahan (9,6 persen), industri (9,1 persen), dan akomodasi dan makan minum (8,2 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang dapat menyerap pekerja lulusan SMK yang cukup tinggi tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi. Sektor perdagangan yang persentasenya tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya, namun kontribusi dan pertumbuhan PDRB lebih rendah dari sektor pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian yang persentasenya lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan, namun kontribusi dalam perekonomian dan pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan.

Gambar 2.2.166

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Barat yang bekerja, menekuni berbagai jenis pekerjaan atau jabatan. Pada tahun 2010, lebih dari seperempat (26,04 persen) lulusan SMK bekerja sebagai tenaga usaha penjualan. Jabatan ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan jabatan lain pada tahun yang sama, namun pada tahun 2018, persentasenya berkurang menjadi 14,64 persen, dan bukan lagi merupakan persentase tertinggi. Persentase tertinggi pekerja lulusan SMK berdasarkan jabatan pada tahun 2018 adalah TU Tani, kebun dsb sebesar 27,87 persen, dan persentase tertinggi kedua adalah tenaga produksi dan pekerja kasar sebesar 25,81 persen. Ini berarti lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di provinsi Kalimantan Barat bekerja pada jabatan tingkat menengah dan rendah. Sedangkan yang menduduki jabatan tinggi yaitu professional persentasenya turun relatif besar yaitu dari 13,48 persen (2010) menjadi 7,68 persen (2018), dan yang menjabat sebagai tenaga kepemimpinan sedikit meningkat dari 1,05 persen (2010) menjadi 3,64 persen (2018).

Gambar 2.2.167

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010, lebih dari separuh (57,95 persen) lulusan SMK yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan pada tahun 2018, pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai persentasenya meningkat menjadi 59,84 persen, dan tetap merupakan persentase tertinggi dibandingkan status kerja lainnya. Selain itu, peningkatan persentase pekerja lulusan SMK menurut status kerja juga terjadi pada lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap yaitu dari 4,08 persen (2010) menjadi 4,24 persen (2018). Ini berarti sebagian besar (64,08 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini pada tahun 2018 adalah pekerja di sektor formal, dan 35,92 persen adalah pekerja sektor informal.

Hampir semua pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor informal persentasenya menurun, namun di sisi lain, pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja bebas di pertanian, sedikit meningkat yaitu dari 0,63 persen (2010) menjadi 1,0 persen (2018). Demikian pula yang berstatus kerja sebagai pekerja bebas di non pertanian cenderung meningkat yaitu dari 1,05 persen (2010) menjadi 1,37 persen (2018).

Gambar 2.2.168

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

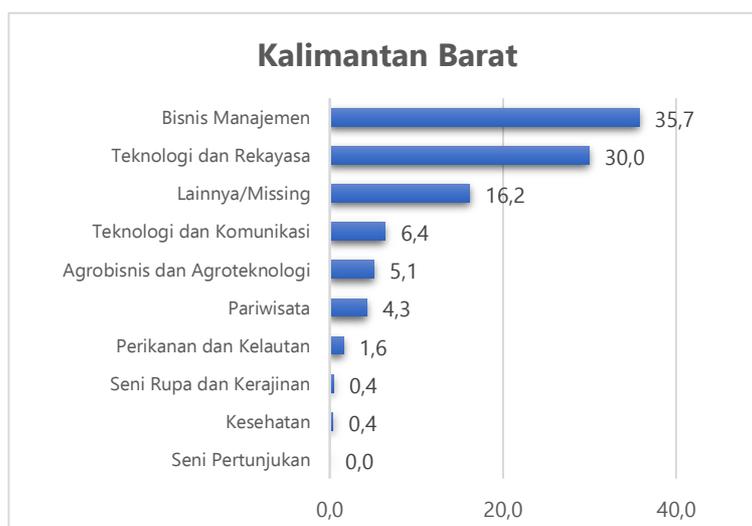


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Barat, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Bisnis Manajemen paling besar proporsinya yakni 35,7 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa yakni sebesar 30,0 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Barat di sektor pertanian, industri, dan perdagangan maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi wilayah. Di sisi lain, pekerja SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong potensi pertanian di Provinsi Kalimantan Barat dinilai masih perlu ditingkatkan karena persentasenya hanya 5,1 persen.

Gambar 2.2.169

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.20

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	26,939	27,991	29,084	30,220	31,401	32,628
Pertambangan	893	918	944	970	997	1,025
Industri	13,193	13,692	14,211	14,748	15,307	15,886
LGAM	2,639	2,736	2,837	2,941	3,050	3,162
Konstruksi	8,315	8,811	9,336	9,893	10,482	11,107
Perdagangan, Hotel dan Restoran	47,980	50,541	53,238	56,080	59,073	62,225
Transportasi dan Komunikasi	11,220	12,054	12,950	13,913	14,948	16,060
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,579	5,968	6,384	6,829	7,304	7,813
Jasa Kemasyarakatan	28,681	29,285	29,902	30,532	31,175	31,832
Jumlah Tenaga Kerja SMK	145,439	151,996	158,886	166,127	173,737	181,739
Total Tenaga Kerja	2,386,395	2,435,260	2,486,066	2,539,030	2,593,697	2,650,473
Share Tenaga Kerja	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



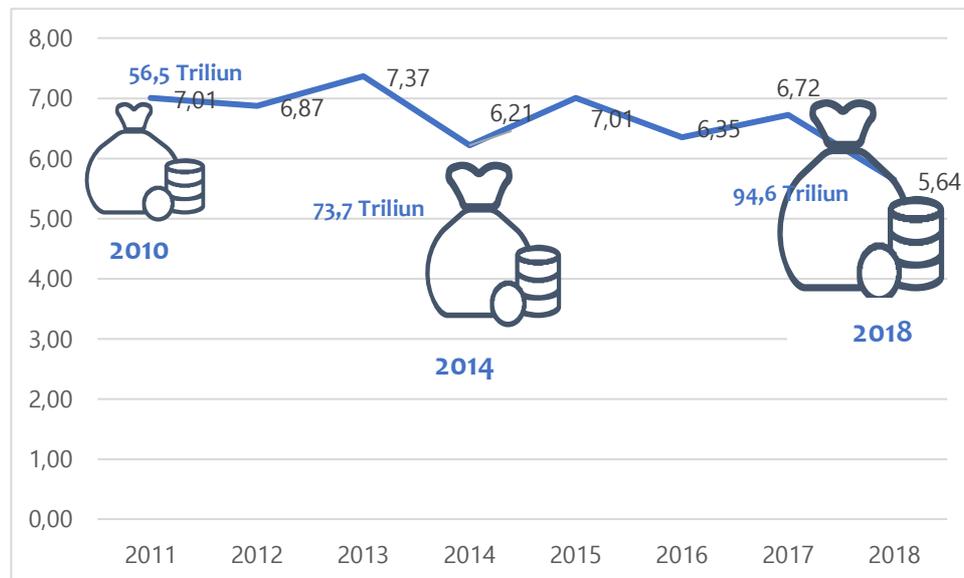
KALIMANTAN TENGAH

2.2.21. Provinsi Kalimantan Tengah

Total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 56,5 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 94,6 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Tingkat pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah relatif fluktuatif, sepanjang tahun 2011-2018 di angka 5-7 persen dan cenderung menurun.

Gambar 2.2.170

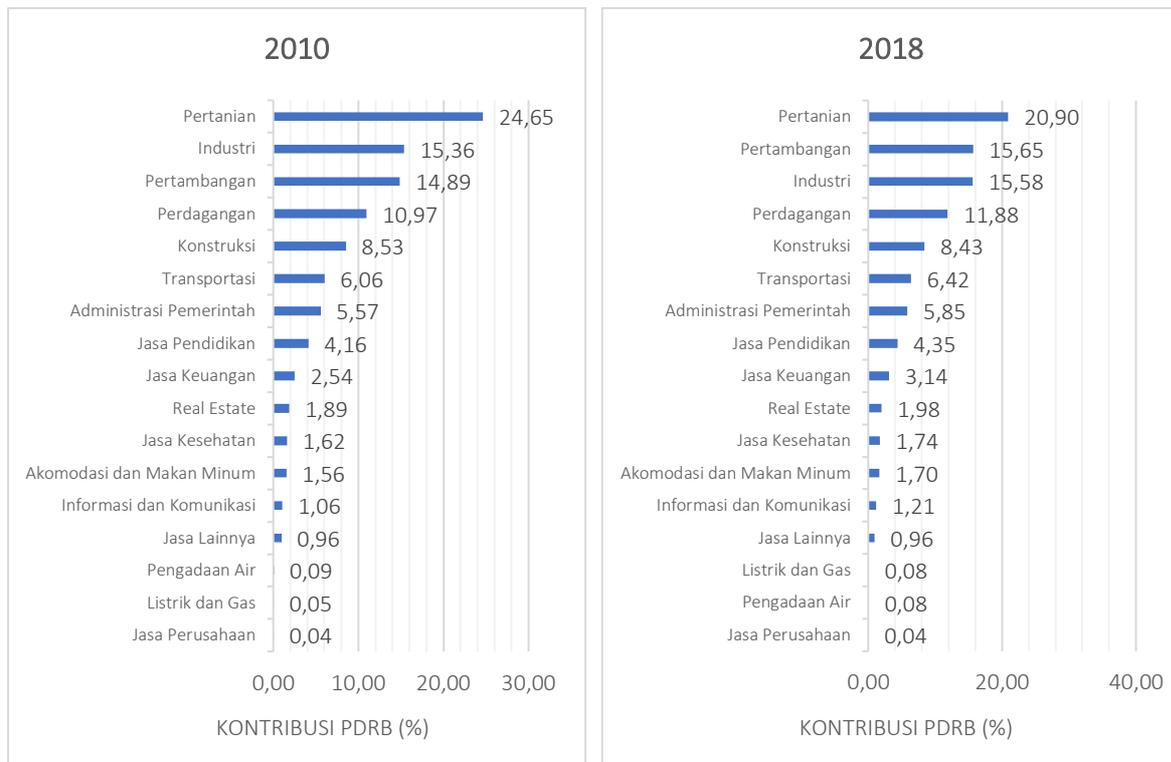
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2010 adalah sektor pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, dan konstruksi. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, kontribusi sektor pertanian dan konstruksi mengalami penurunan. Pada Tahun 2010, sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 24,65 persen, dan turun menjadi 20,90 persen di Tahun 2018, kondisi yang serupa terjadi di sektor konstruksi, di tahun 2010 menyumbang 8,53 persen, namun pada tahun 2018, kontribusinya sedikit turun menjadi 8,43 persen. Di sisi lain, perkembangan sektor industri, pertambangan dan perdagangan kian meningkat, yang ditunjukkan sumbangan terhadap PDRB kedua sektor tersebut semakin besar.

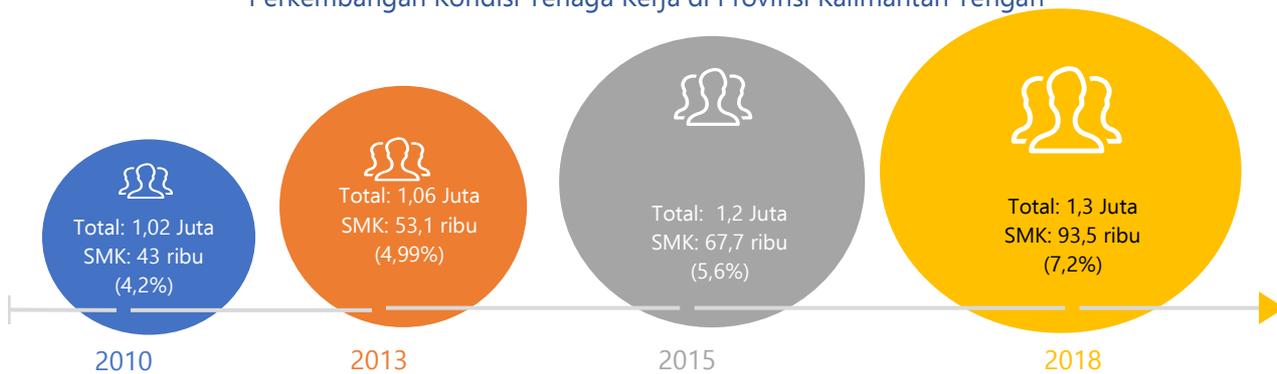
Gambar 2.2.171
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2010 adalah sebanyak 43.048 tenaga kerja dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 93.525 orang pada Tahun 2018. Di sisi lain, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja juga mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar 4,2 persen dan meningkat menjadi 7,2 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.172
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah

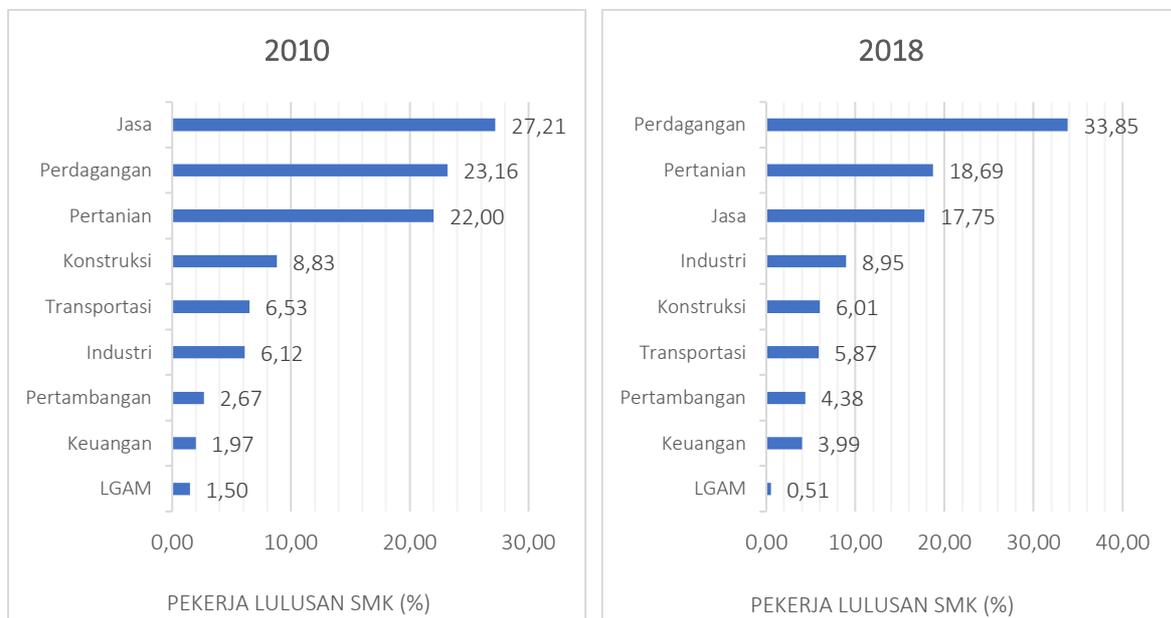


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari seperempat (27,21 persen) lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah terserap di sektor jasa, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan sektor lain. Di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam. Adapun sektor

yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 adalah perdagangan yaitu sebesar 31.656 tenaga kerja atau 33,85 persen. Di sisi lain, penyerapan lulusan SMK di sektor pertanian di Tahun 2018 tergolong tinggi, dan termasuk tiga besar penyerapan pekerja lulusan SMK yaitu 17.484 tenaga kerja dan sektor jasa sebesar 16.597 tenaga kerja. Walaupun secara absolut jumlah pekerja di kedua sektor relatif besar, namun kontribusinya terus turun selama kurun waktu 2010-2018. Persentase pekerja lulusan SMK di sektor pertanian turun tiga poin persen yaitu dari 22,0 persen (2010) menjadi 18,69 persen (2018). Pada kurun waktu yang sama, sektor jasa turun sembilan poin persen yaitu dari 27,21 persen (2010) menjadi 17,75 persen (2018). Di sisi lain, sektor industri semakin berkembang dan termasuk lima besar di tahun 2018, dengan penyerapan pekerja lulusan SMK yang semakin meningkat yaitu dari 6,12 persen (2010) menjadi 8,95 persen (2018).

Gambar 2.2.173
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)

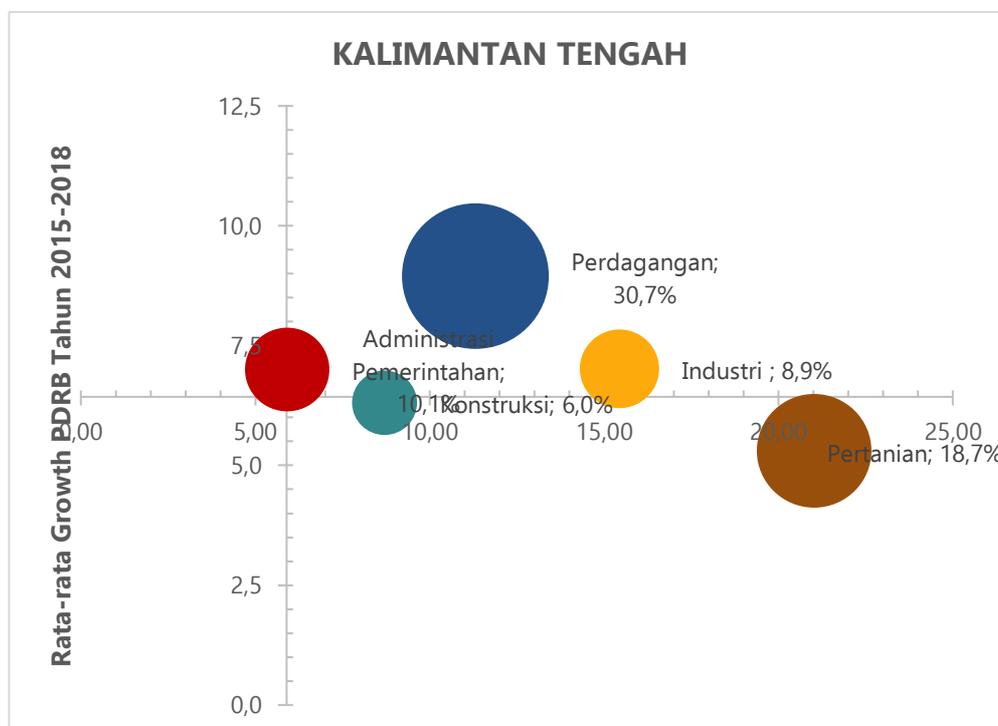


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (30,7 persen), pertanian (18,7 persen), administrasi pemerintahan (10,1 persen), industri (8,9 persen), dan konstruksi (6,0 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa tidak berarti bahwa sektor yang penyerapannya terhadap pekerja lulusan SMK cukup tinggi, memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi pula. Sektor perdagangan, sektor yang terbanyak menyerap pekerja lulusan SMK di Kalimantan Tengah pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB juga relatif tinggi, namun kontribusinya dalam perekonomian tidak sebesar sektor pertanian. Di sisi lain, sektor pertanian memiliki kontribusi PDRB yang cukup besar di Kalimantan Tengah, namun pertumbuhan PDRB sektor pertanian lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan.

Gambar 2.2.174

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah menekuni beberapa jenis jabatan, dan berdasarkan data tahun 2010 dan 2018, menunjukkan bahwa lebih dari seperempat (28,69 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2010 bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Ini adalah persentase tertinggi dibandingkan jabatan lain. Pada tahun 2018, persentase untuk jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami kenaikan dan tetap merupakan persentase tertinggi yaitu sebesar 29,96 persen. Sebaliknya pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan professional dan tenaga kepemimpinan cenderung menurun selama kurun waktu 2010-2018. Pekerja lulusan SMK di provinsi ini yang berprofesi sebagai professional menurun persentasenya dari 9,91 persen (2010) menjadi 6,04 persen (2018), demikian pula yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan, persentasenya semakin berkurang dari 3,08 persen (2010) menjadi 1,93 persen (2018).

Gambar 2.2.175

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)

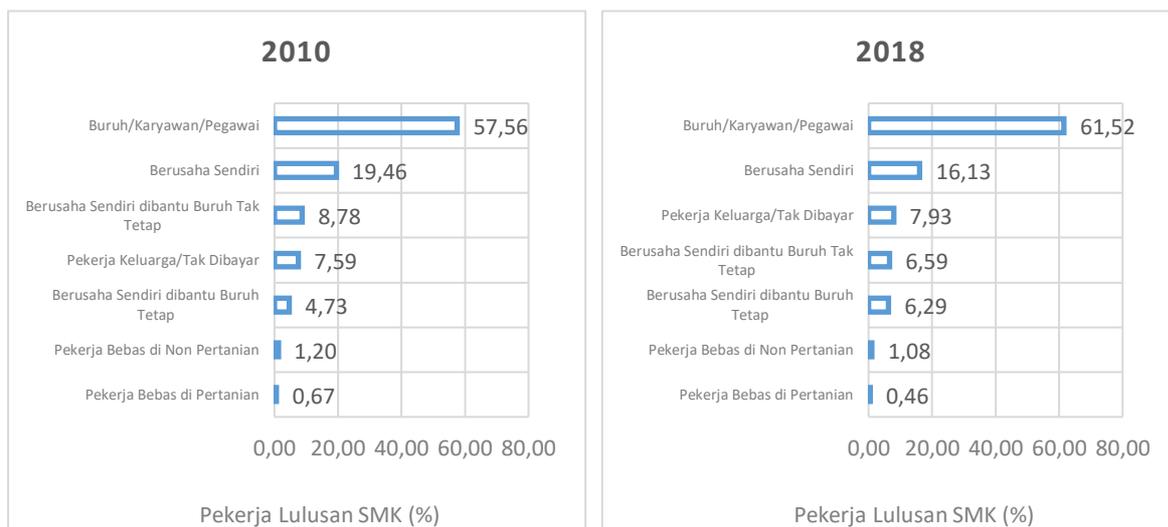


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sebaran pekerja lulusan SMK menurut status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah selama rentang waktu 2010-2018 menunjukkan bahwa lebih dari separuh (57,56 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini pada tahun 2010, berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan pada tahun 2018, posisi tetap tidak berubah, bahkan persentasenya semakin meningkat menjadi 61,52 persen.

Gambar 2.2.176

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

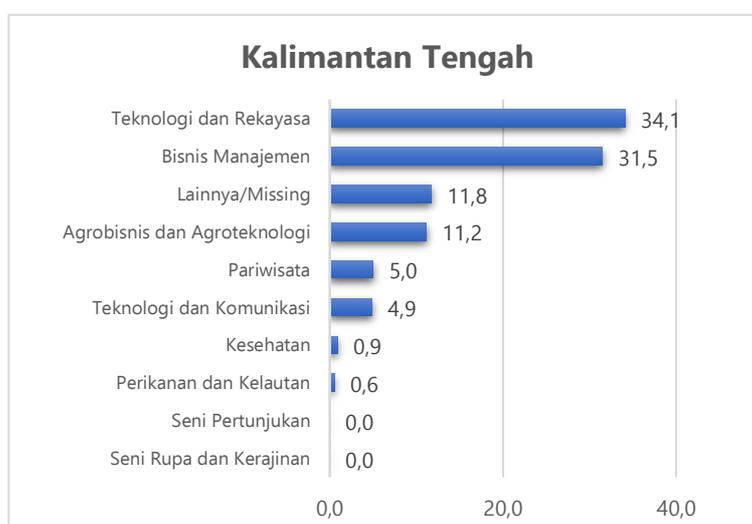
Hal ini memengaruhi semakin meningkatnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja di sektor formal. Ditambah dengan semakin meningkat pula pekerja lulusan SMK di provinsi ini yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap yaitu dari 4,73 persen (2010) naik menjadi 6,29

persen (2018). Ini berarti terdapat sekitar 67,81 persen atau sekitar dua pertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 berstatus kerja sebagai pekerja di sektor formal.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 34,1 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 31,5 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah di sektor pertanian, pertambangan, dan industri maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi wilayah. Di sisi lain, pekerja SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong potensi pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah juga cukup besar persentasenya yakni 11,8 persen.

Gambar 2.2.177

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.21

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	18,189	18,923	19,686	20,481	21,307	22,166
Pertambangan	4,247	4,403	4,565	4,732	4,906	5,086
Industri	8,870	9,403	9,967	10,566	11,200	11,872
LGAM	508	536	566	597	630	665
Konstruksi	5,909	6,213	6,533	6,869	7,222	7,594
Perdagangan, Hotel dan Restoran	34,097	36,726	39,557	42,607	45,892	49,431
Transportasi dan Komunikasi	5,848	6,228	6,633	7,065	7,524	8,013
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	4,074	4,448	4,857	5,303	5,791	6,323
Jasa Kemasyarakatan	17,231	17,889	18,572	19,281	20,017	20,782
Jumlah Tenaga Kerja SMK	98,973	104,769	110,936	117,500	124,489	131,931
Total Tenaga Kerja	1,335,216	1,374,586	1,415,190	1,456,992	1,500,231	1,544,563
Share Tenaga Kerja	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



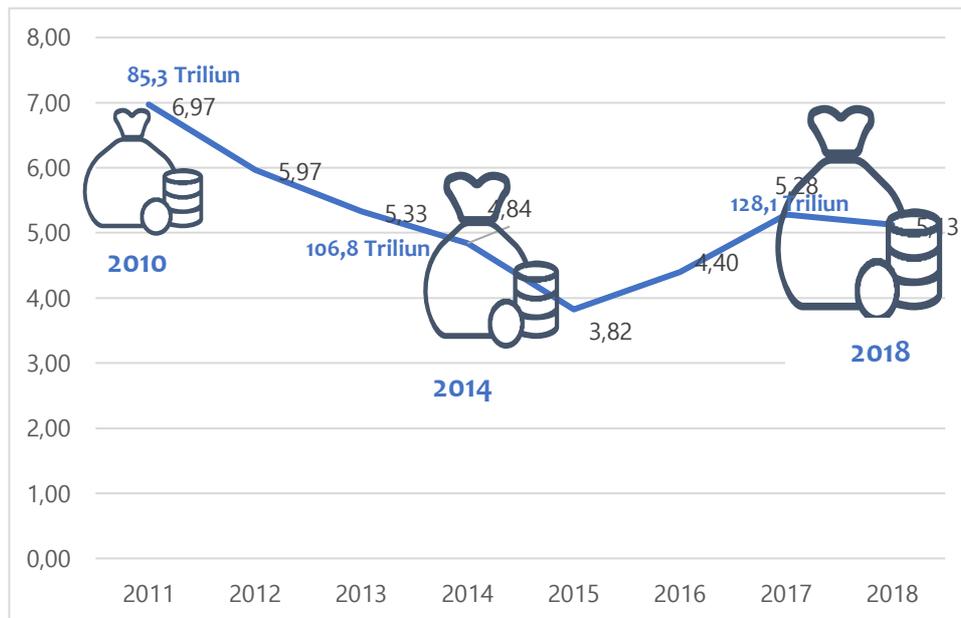
KALIMANTAN SELATAN

2.2.22. Provinsi Kalimantan Selatan

Total PDRB Provinsi Kalimantan Selatan atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 85,3 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan sebesar satu setengah kali lipat menjadi 128,1 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Tingkat pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan relatif fluktuatif, sepanjang tahun 2011-2018 di angka 5-8 persen dan cenderung menurun

Gambar 2.2.178

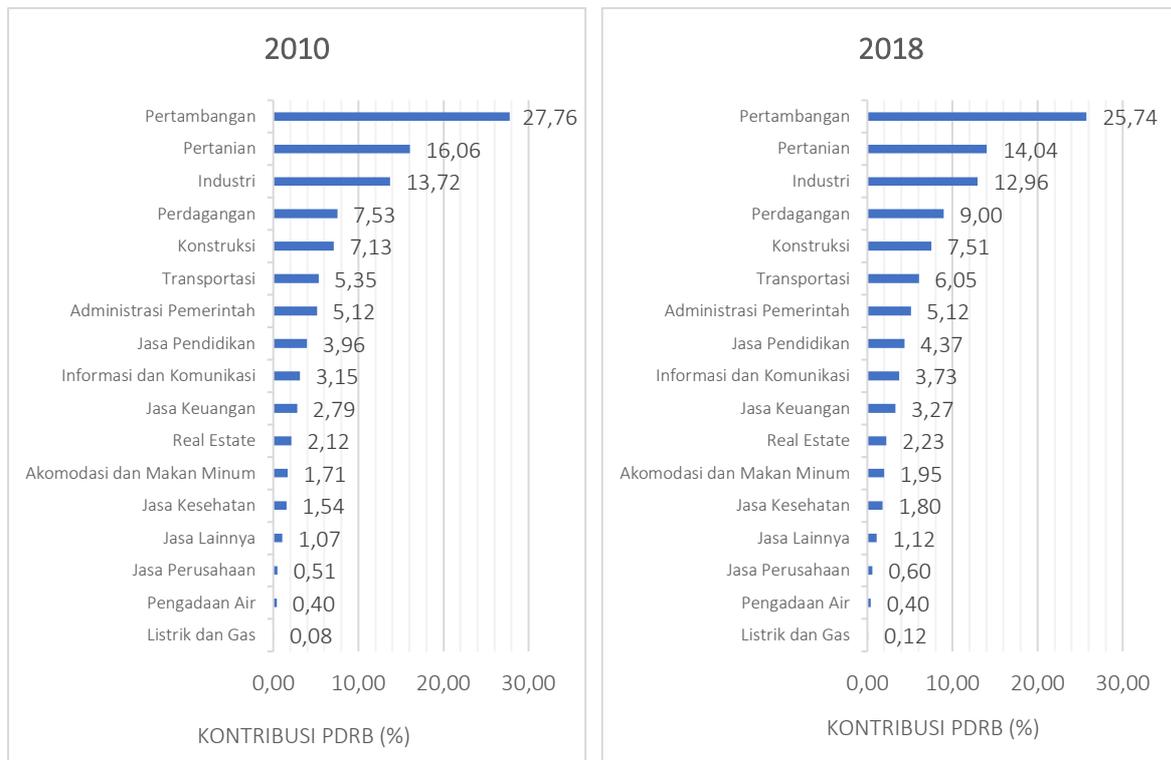
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2010 adalah sektor pertambangan, pertanian, industri, perdagangan, dan konstruksi. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, urutan lima besar kontribusi sektor terhadap PDRB Kalimantan Selatan, posisinya tetap atau tidak berubah, namun cenderung turun kecuali sektor konstruksi dan perdagangan. Sektor pertambangan menyumbang PDRB sebesar 27,76 persen pada tahun 2010, dan turun menjadi 25,74 persen di Tahun 2018, kondisi yang serupa terjadi di sektor pertanian, di tahun 2010 menyumbang 16,06 persen, namun pada tahun 2018, kontribusinya turun menjadi 14,04 persen. Di sisi lain sektor konstruksi, sedikit meningkat dari 7,13 persen (2010) menjadi 7,51 persen (2018). Demikian pula sektor perdagangan, sumbangannya terhadap PDRB di provinsi Kalimantan Selatan semakin besar yaitu meningkat sebesar 1,5 poin persen.

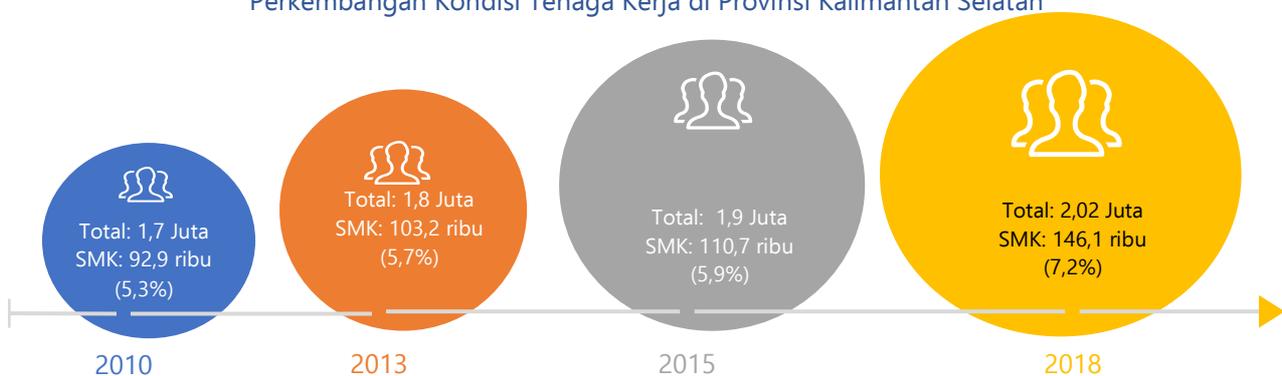
Gambar 2.2.179
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2010 sebesar 92.881 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 146.077 orang pada Tahun 2018. Di sisi lain, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar 5,3 persen dan meningkat menjadi 7,2 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.180
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan



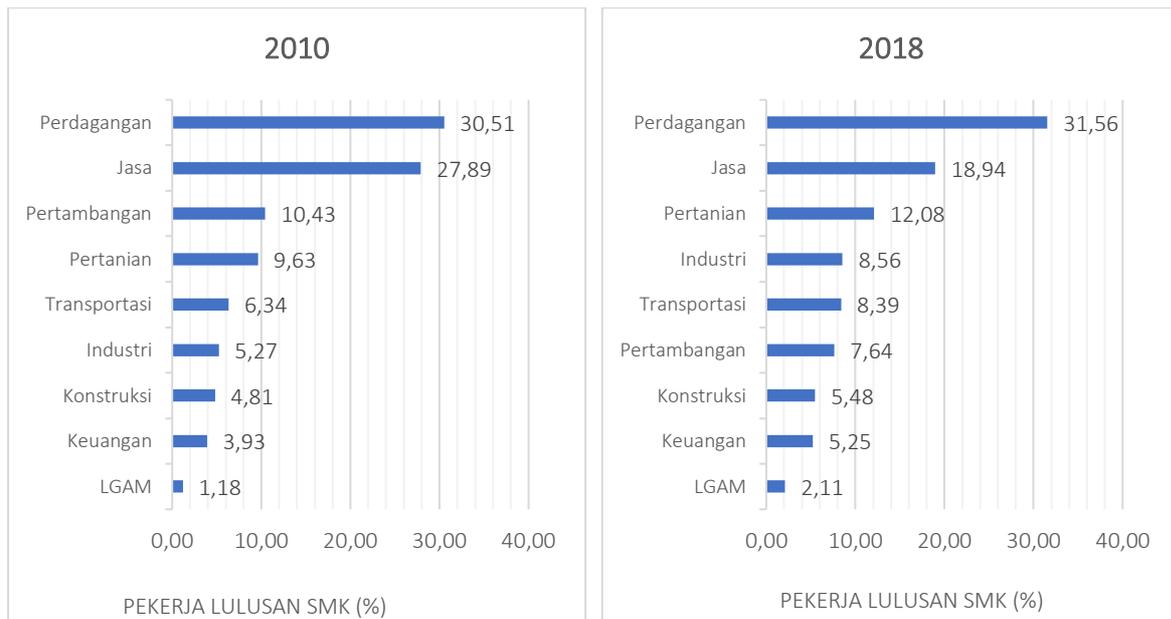
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari seperempat (27,76 persen) lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan terserap di sektor perdagangan, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan sektor lain. Di

Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut meningkat satu poin persen menjadi 31,56 persen. Sektor perdagangan adalah sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 46.099 orang. Selain itu, dalam perkembangannya selama 2010-2018, dua sektor yang termasuk lima besar dan cenderung meningkat penyerapannya adalah sektor pertanian dan transportasi. Sektor pertanian mengalami kenaikan persentase penyerapan pekerja lulusan SMK sebesar 2,5 poin persen dan sektor transportasi naik sebesar 2 poin persen.

Gambar 2.2.181

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)

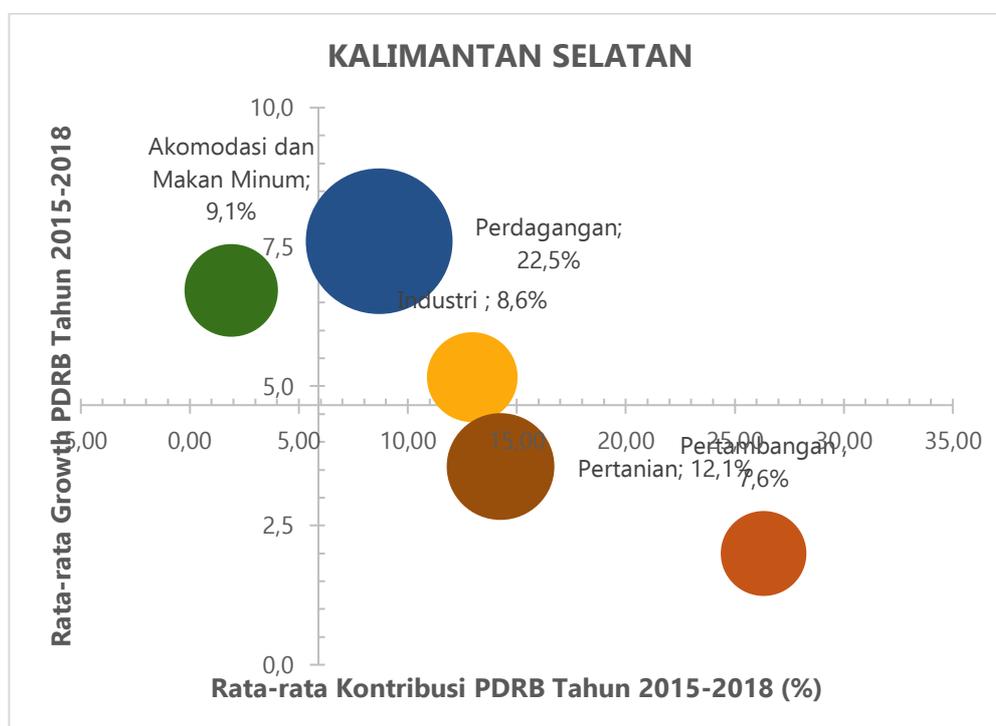


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan pekerja lulusan SMK tertinggi adalah sektor perdagangan (22,5 persen), pertanian (12,1 persen), akomodasi dan makan minum (9,1 persen), industri (8,6 persen), dan pertambangan (7,6 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa tidak berarti bahwa sektor yang penyerapannya tenaga kerjanya tinggi memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi pula. Sektor perdagangan, sektor yang terbanyak menyerap pekerja lulusan SMK di Kalimantan Selatan pada tahun 2018, dan pertumbuhan PDRB di sektor ini juga tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya. Namun kontribusinya dalam perekonomian lebih rendah dibandingkan sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Di sisi lain, sektor pertambangan memiliki kontribusi dalam PDRB Kalimantan Selatan adalah terbesar dibandingkan empat sektor lainnya, namun pertumbuhan PDRB dan penyerapannya terhadap pekerja lulusan SMK tidak sebesar sektor perdagangan.

Gambar 2.2.182

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Kalimantan Selatan



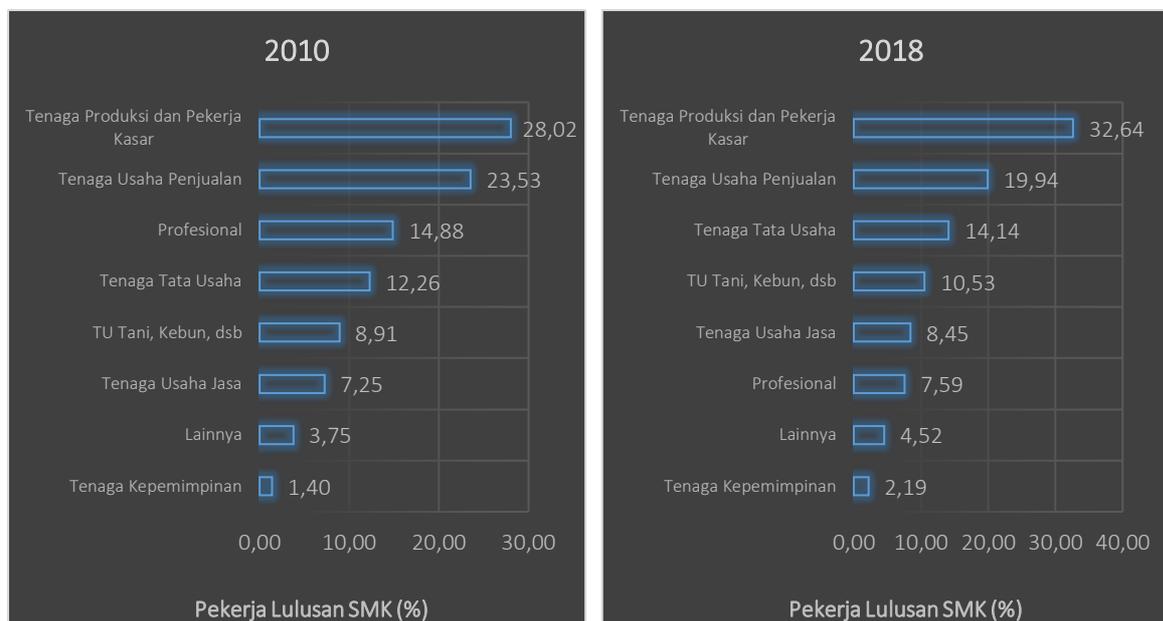
Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lulusan SMK di provinsi Kalimantan Selatan tersebar di berbagai jenis pekerjaan atau jabatan. Pada tahun 2010, lebih dari seperempat (28,02 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Pada tahun 2018, pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar tetap mendominasi dan merupakan persentase tertinggi dibandingkan jabatan lain yaitu sebesar 32,64 persen. Sayangnya jabatan tersebut tidak termasuk jabatan tinggi.

Pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan tinggi yaitu tenaga kepemimpinan hanya sebagian kecil dan merupakan persentase terendah namun memberikan prospek cukup baik dengan kecenderungan meningkat dari 1,40 persen (2010) menjadi 2,19 persen (2018). Di sisi lain, yang menduduki jabatan sebagai professional justru turun sangat cepat atau lebih dari separuhnya. Pencapaian persentase untuk jabatan professional yang cukup besar pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,88 persen, namun di tahun 2018 menjadi 7,59 persen atau turun sebesar 7,3 poin persen yaitu lebih dari separuhnya.

Gambar 2.2.183

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2010 dan 2018 (%)



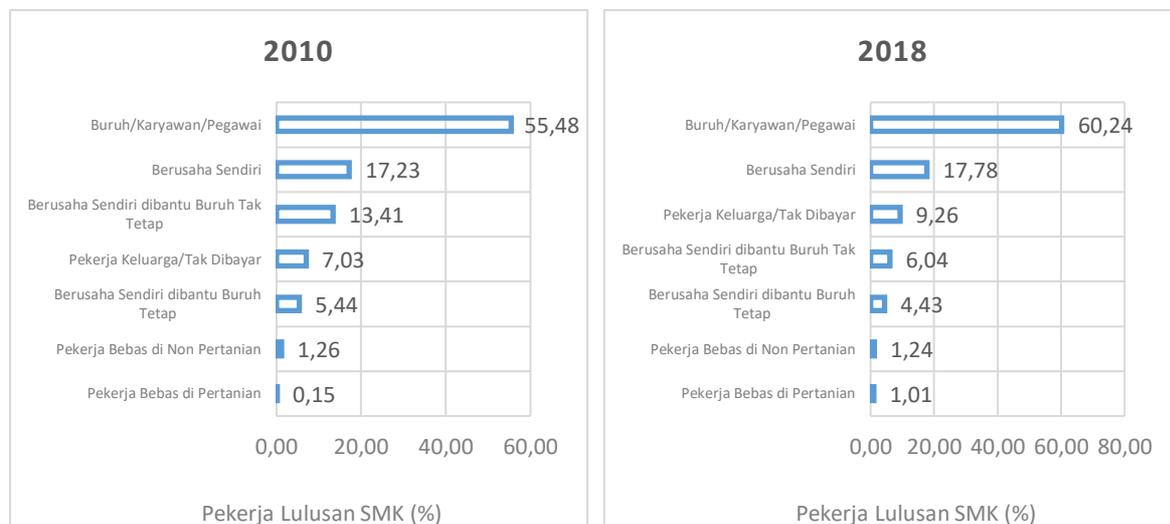
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada tahun 2010, lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan adalah buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2018, pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai persentasenya meningkat hampir lima poin persen yaitu sebesar 60,24 persen atau lebih dari separuhnya. Tingginya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018, persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja di sektor formal cukup tinggi yaitu lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di provinsi ini.

Pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja formal semakin bertambah persentasenya yaitu dengan adanya pekerja lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap yaitu sebesar 4,43 persen. Sayangnya pekerja lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap persentasenya tidak bertambah dan justru cenderung menurun yaitu dari 5,44 persen (2010) menjadi 4,43 persen (2018). Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja lulusan SMK di provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus kerja sebagai pekerja di sektor formal, lebih menyukai bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, bukan sebagai pengusaha yang berusaha mandiri.

Gambar 2.2.184

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)

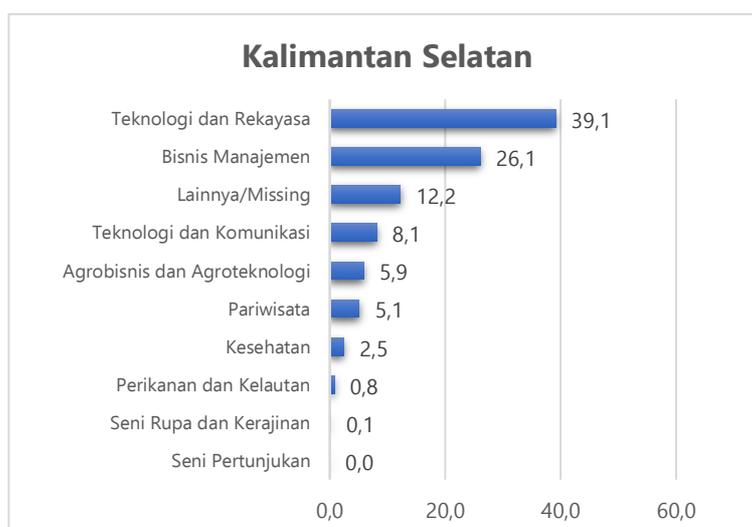


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 39,1 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 26,1 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan di sektor pertambangan, pertanian, dan industri maka kedua bidang keahlian tersebut ada yang sesuai dengan potensi wilayah yakni teknologi dan rekayasa.

Gambar 2.2.185

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.22
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	18,184	18,745	19,324	19,920	20,535	21,169
Pertambangan	11,398	11,637	11,880	12,129	12,383	12,642
Industri	12,999	13,509	14,039	14,590	15,163	15,758
LGAM	3,206	3,342	3,484	3,632	3,786	3,947
Konstruksi	8,381	8,770	9,178	9,605	10,052	10,520
Perdagangan, Hotel dan Restoran	49,540	53,239	57,213	61,484	66,074	71,007
Transportasi dan Komunikasi	12,995	13,775	14,603	15,479	16,409	17,394
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	8,207	8,791	9,416	10,086	10,803	11,571
Jasa Kemasyarakatan	28,530	29,425	30,348	31,300	32,282	33,295
Jumlah Tenaga Kerja SMK	153,440	161,233	169,486	178,226	187,488	197,303
Total Tenaga Kerja	2,057,569	2,102,505	2,149,987	2,199,571	2,251,004	2,304,916
Share Tenaga Kerja	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.6

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



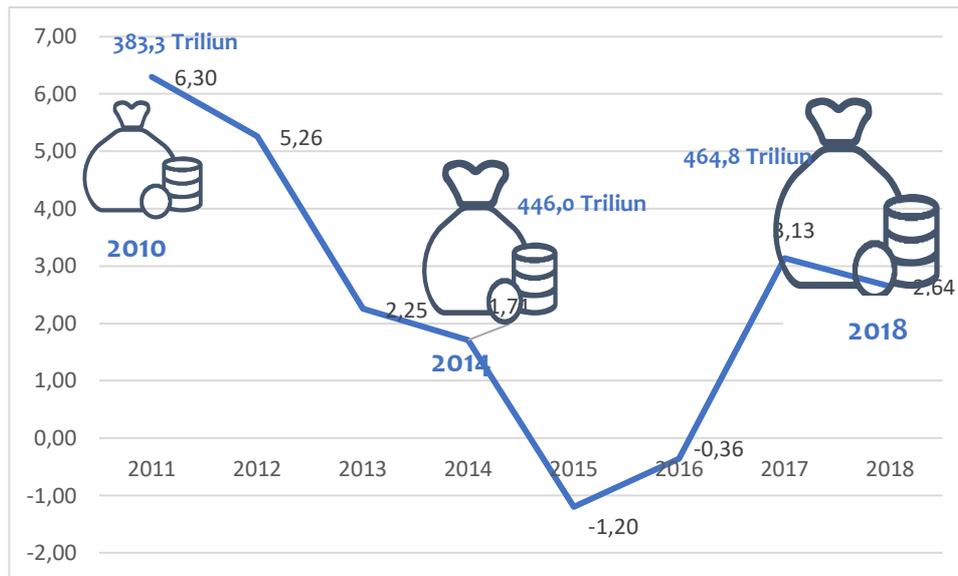
KALIMANTAN TIMUR

2.2.23. Provinsi Kalimantan Timur

Total PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 383,3 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan sebesar satu setengah kali lipat menjadi 464,8 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Dalam kurun waktu 2011-2018, pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif dan sempat mengalami pertumbuhan negatif karena merosotnya nilai PDRB sektor pertambangan.

Gambar 2.2.186

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

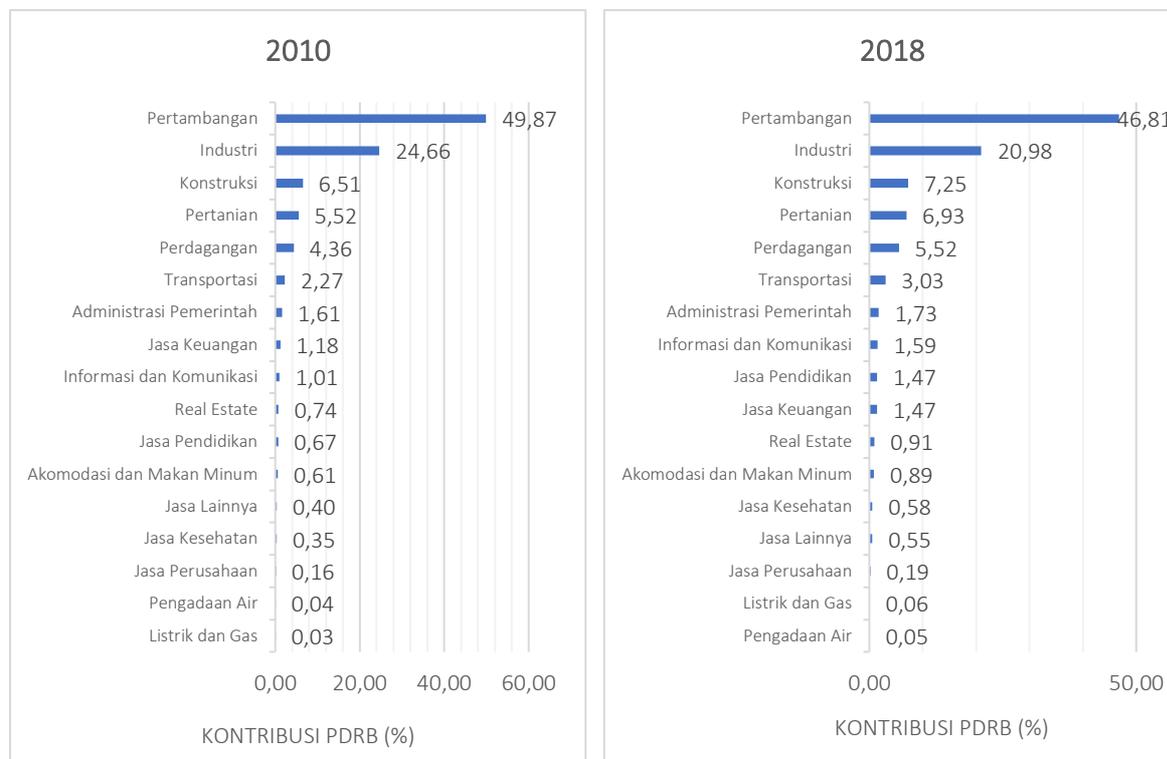


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Lima sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur di Tahun 2010 adalah sektor pertambangan, industri, konstruksi, pertanian, dan perdagangan. Jika dilihat dari perkembangannya di tahun 2018, urutan lima besar kontribusi sektor terhadap PDRB Kalimantan Timur, posisinya tetap atau tidak berubah, dan cenderung meningkat kecuali sektor pertambangan dan industri yang cenderung turun. Sektor pertambangan menyumbang PDRB sebesar 49,87 persen pada tahun 2010, dan turun menjadi 46,81 persen di Tahun 2018, kondisi yang serupa terjadi di sektor industri, di tahun 2010 menyumbang 24,66 persen, namun pada tahun 2018, kontribusinya turun menjadi 20,98 persen. Di sisi lain sektor konstruksi, sedikit meningkat dari 6,51 persen (2010) menjadi 7,25 persen (2018). Demikian pula sektor pertanian, sumbangannya terhadap PDRB di provinsi Kalimantan Timur semakin besar yaitu meningkat hampir 1,5 poin persen, dan juga sektor perdagangan yang meningkat sebesar 1,2 poin persen selama kurun waktu 2010-2018.

Gambar 2.2.187

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)

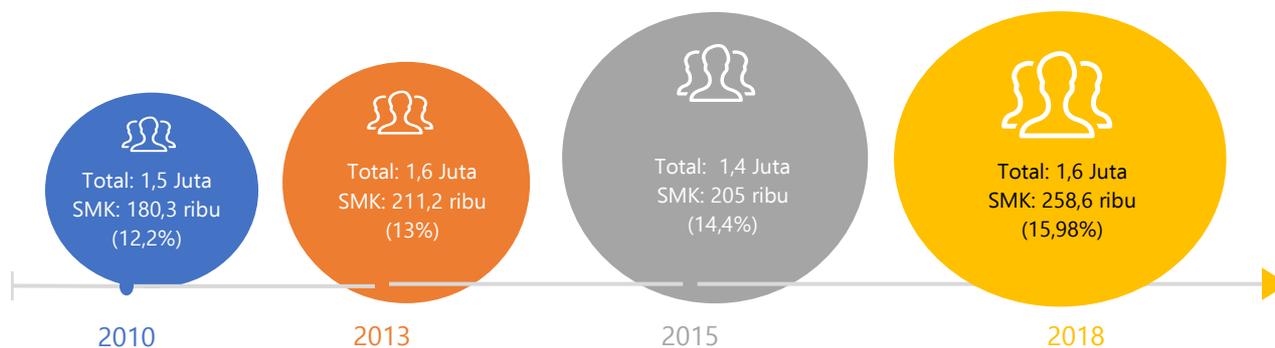


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2010 sebesar 180.311 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 258.621 orang pada Tahun 2018. Di sisi lain, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi yakni 15,98 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.188

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Timur



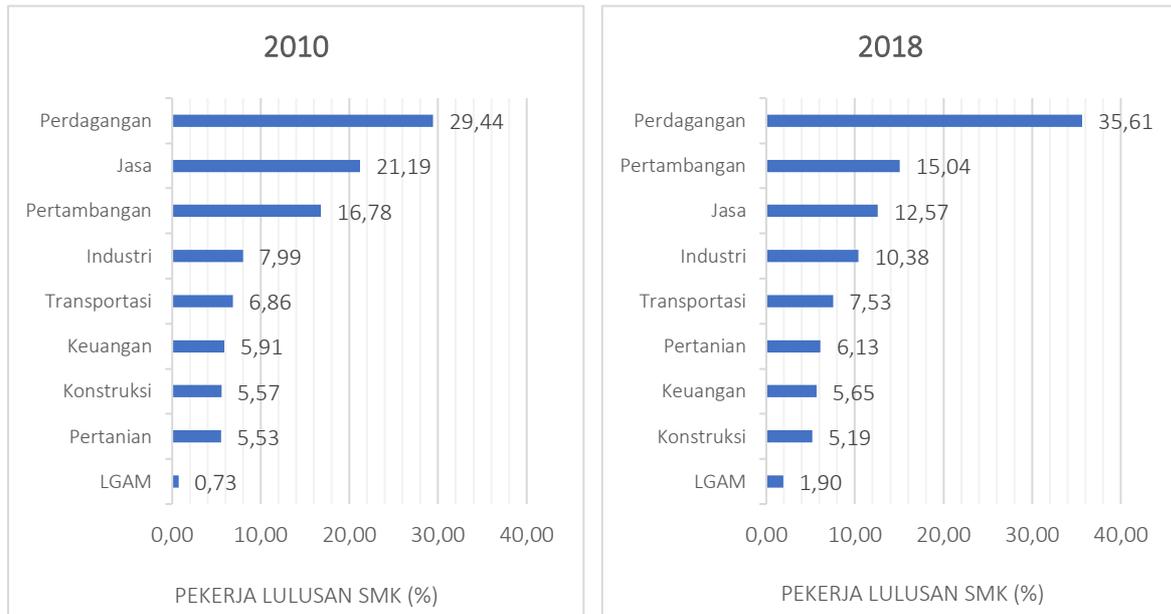
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, lebih dari seperempat (29,44 persen) lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Timur terserap di sektor perdagangan, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan sektor lain. Di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut meningkat menjadi 35,61 persen. Ini berarti

lebih dari sepertiga pekerja lulusan SMK di provinsi ini bekerja di sektor perdagangan. Sektor perdagangan adalah sektor yang paling banyak menyerap lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 92.106 orang pada tahun 2018. Dalam perkembangannya selama 2010-2018, sektor jasa dan pertambangan mengalami penurunan persentase penyerapan pekerja lulusan SMK di Kalimantan Timur. Sebaliknya persentase penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor perdagangan, industri dan transportasi semakin meningkat.

Gambar 2.2.189

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)

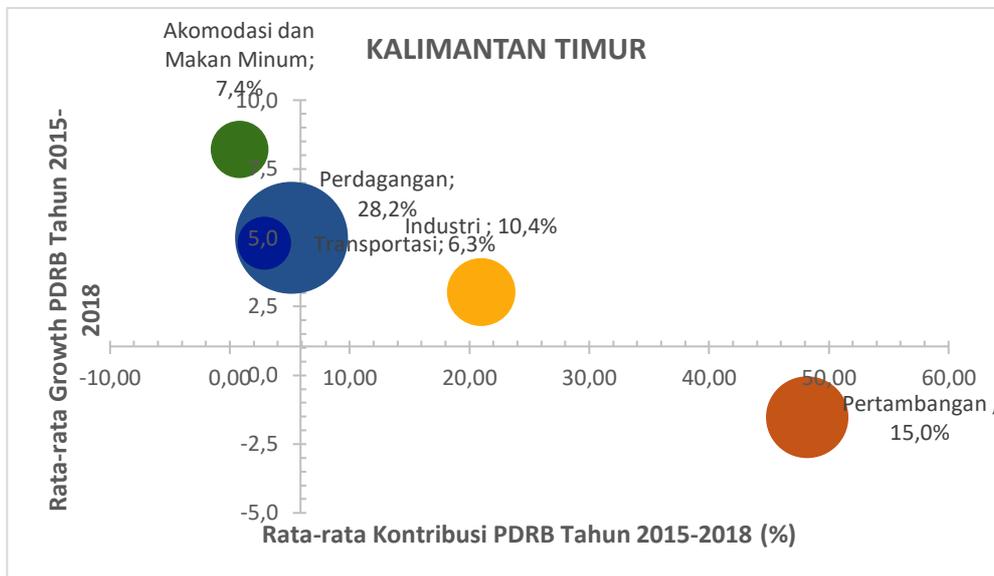


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Timur, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan pekerja lulusan SMK tertinggi adalah sektor perdagangan (28,2 persen), jasa, pertambangan (15,0 persen), industri (10,4 persen), akomodasi dan makan minum (7,4 persen) dan transportasi (6,3 persen). Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa tidak berarti bahwa sektor yang paling besar penyerapan tenaga kerjanya memiliki kontribusi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi pula. Sektor perdagangan, sektor yang terbanyak menyerap pekerja lulusan SMK di Kalimantan Timur pada tahun 2018, dan pertumbuhan PDRB sektor ini juga relatif tinggi, namun kontribusinya dalam perekonomian jauh lebih rendah dibandingkan sektor pertambangan dan industri. Sebaliknya, sektor pertambangan yang persentase penyerapan pekerja lulusan SMK tertinggi kedua setelah perdagangan, dan kontribusi PDRBnya relatif besar dibandingkan empat sektor lainnya, namun pertumbuhan PDRBnya sangat lambat, sebagaimana sektor industri yang dapat dikatakan seperti tidak ada pertumbuhan di sektor ini.

Gambar 2.2.190

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sebaran pekerja lulusan SMK menurut jabatan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010, lebih dari sepertiga (35,90 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Pada tahun 2018, pekerja lulusan SMK yang bekerja pada jenis pekerjaan tersebut, persentasenya semakin meningkat menjadi 44,65 persen.

Gambar 2.2.191

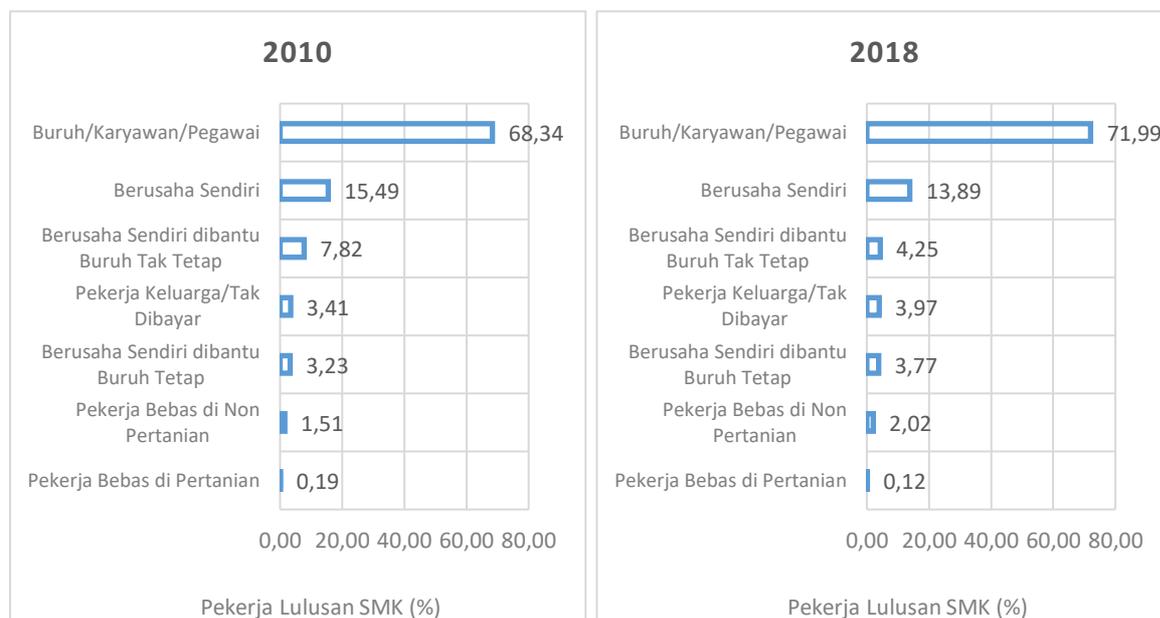
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Selama kurun waktu 2010 dan 2018, lima besar jabatan pekerja lulusan SMK di Kalimantan Timur, posisinya tetap atau tidak berubah dan persentasenya cenderung meningkat, kecuali jabatan professional dan tenaga usaha jasa. Sangat disayangkan, penurunan persentase justru terjadi pada jabatan yang termasuk jabatan tinggi yaitu professional, dan penurunan persentasenya cukup besar yaitu dari 15,80 persen (2010) menjadi 5,57 persen (2018), dengan kata lain berkurang sebesar dua pertiga dibandingkan tahun 2010. Selain itu, tenaga kepemimpinan yang juga termasuk sebagai jabatan tinggi pun persentasenya cenderung turun yaitu dari 2,50 persen (2010) menjadi 1,93 persen (2018), dan merupakan persentase terendah.

Gambar 2.2.192
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 dan 2018 (%)

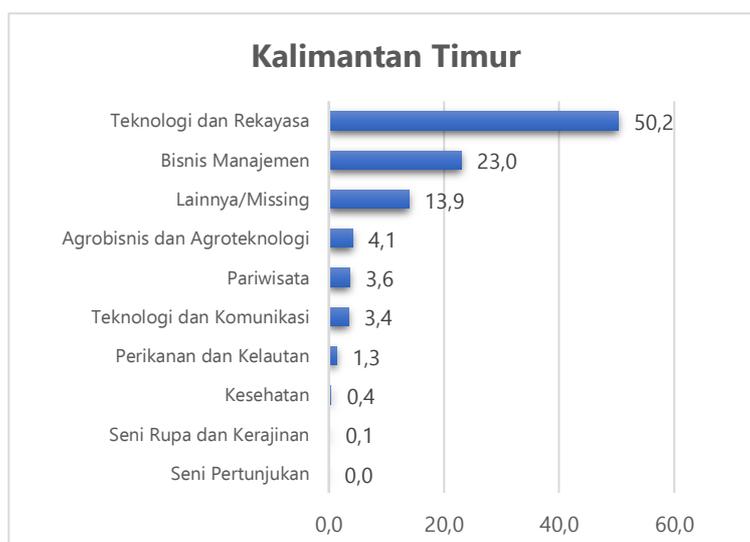


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sebaran pekerja lulusan SMK menurut status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010, menunjukkan bahwa dua pertiga (68,34 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pada tahun 2018, persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai cenderung meningkat menjadi 71,99 persen. Besarnya persentase pekerja lulusan yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai memengaruhi besarnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja formal. Bertambahnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja di sektor formal di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya persentase pekerja lulusan SMK di provinsi ini yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap, yaitu dari 3,23 persen (2010) menjadi 3,77 persen (2018). Sayangnya, seiring dengan meningkatnya pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja formal, di sisi lain, pekerja keluarga/tak dibayar, persentasenya juga cenderung meningkat yaitu dari 3,41 persen (2010) menjadi 3,97 persen (2018).

Gambar 2.2.193

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Timur, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 50,2 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 23,0 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur di sektor pertambangan, industri, dan konstruksi maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.2.23

Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	16,609	17,404	18,237	19,110	20,025	20,984
Pertambangan	39,241	39,583	39,927	40,274	40,624	40,978
Industri	26,944	27,048	27,152	27,257	27,362	27,467
LGAM	5,199	5,497	5,812	6,145	6,497	6,870
Konstruksi	13,827	14,249	14,684	15,132	15,593	16,069
Perdagangan, Hotel dan Restoran	97,481	103,170	109,190	115,562	122,306	129,443
Transportasi dan Komunikasi	20,622	21,838	23,126	24,490	25,934	27,463
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	15,400	16,238	17,122	18,054	19,037	20,073
Jasa Kemasyarakatan	33,723	34,984	36,292	37,649	39,056	40,517
Jumlah Tenaga Kerja SMK	269,047	280,010	291,542	303,673	316,435	329,864
Total Tenaga Kerja	1,664,319	1,717,791	1,773,259	1,830,475	1,889,281	1,950,037
Share Tenaga Kerja	16.2	16.3	16.4	16.6	16.7	16.9

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

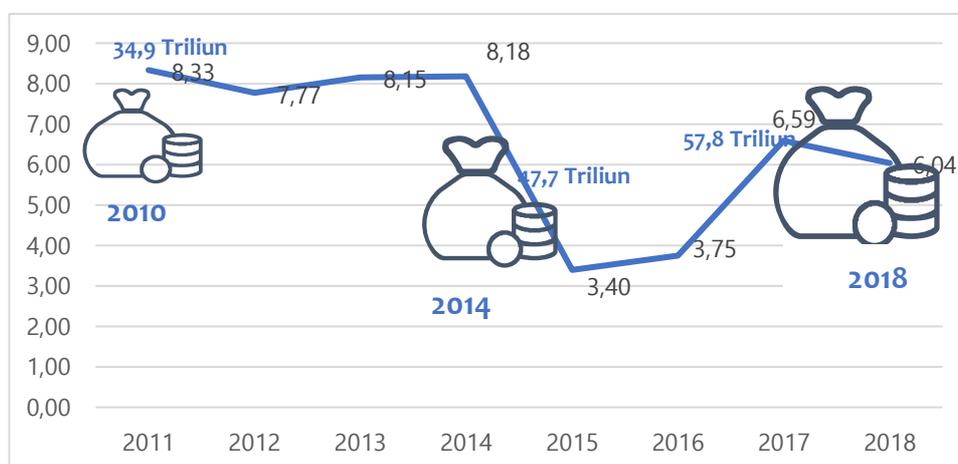


KALIMANTAN UTARA

2.2.24. Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 2.2.194

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Utara



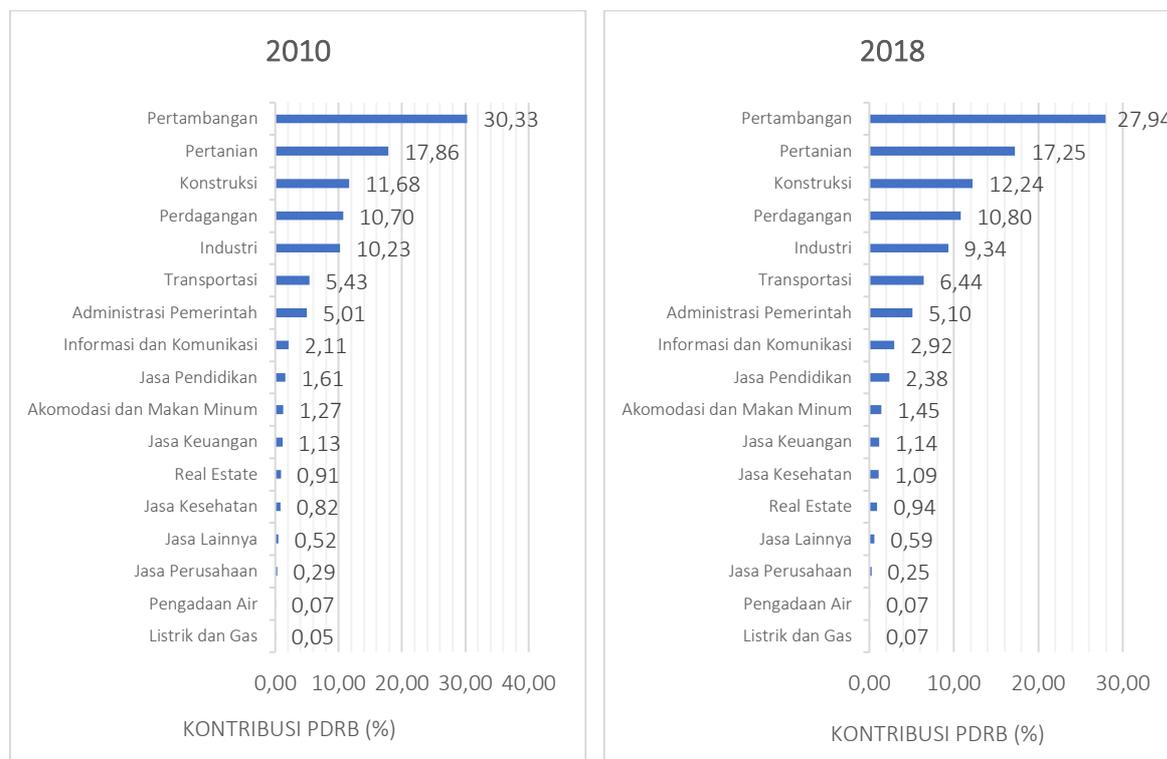
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda dari keempat provinsi lainnya di pulau Kalimantan. Total PDRB Provinsi Kalimantan Utara atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 34,9 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 57,8 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 6,5% per tahun. Dibandingkan dengan keempat provinsi lainnya di Kalimantan, provinsi Kalimantan Utara mempunyai PDRB paling rendah.

Struktur PDRB 17 sektor, provinsi Kalimantan Utara menyerupai struktur PDRB provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dimana sumbangan terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sumbangan sektor pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB di tahun 2018 adalah 27,94 persen, kemudian tiga sektor berikutnya sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (17,25 persen), sektor Konstruksi (12,24 persen), dan sektor Perdagangan (10,8 persen). Dilihat dari tren struktur PDRB dari tahun 2010, sektor Pertambangan dan penggalian menunjukkan penurunan yang cukup berarti yakni dari 30,33 persen menjadi 27,94 persen. Sementara itu share sektor Pertanian cenderung stabil, dan share sektor Konstruksi hanya menunjukkan sedikit sekali peningkatan dimana 11,68 persen di tahun 2010.

Gambar 2.2.195

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)

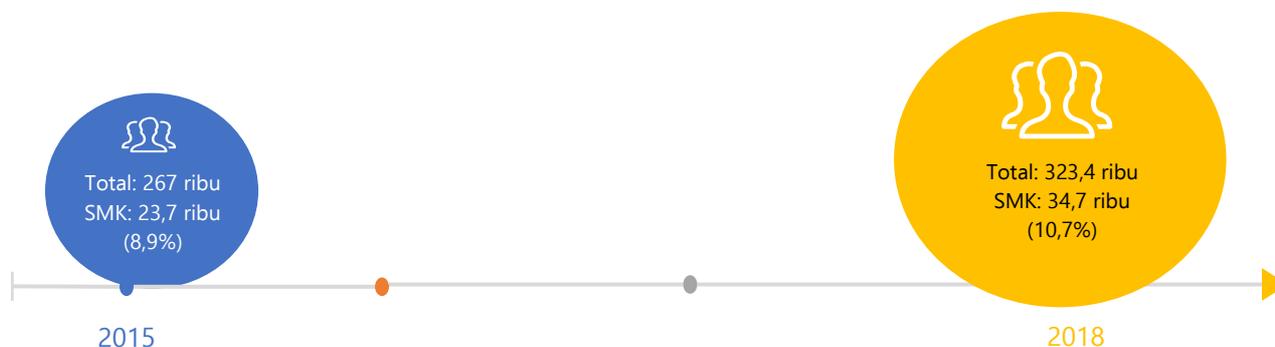


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Informasi ketenagakerjaan untuk provinsi Kalimantan Utara tersedia sejak tahun 2015 karena provinsi ini relatif muda dan baru berdiri tahun 2012. Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2015 adalah sebanyak 23.721 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 3.652 orang, sehingga hingga menjadi 34.678 orang pada Tahun 2018. Jumlah pekerja lulusan SMK di provinsi ini merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di pulau Kalimantan, namun share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja cukup besar yakni 10,7 persen di Tahun 2018.

Gambar 2.2.196

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2018, sebagian besar (26,73,4 persen) lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Utara terserap di sektor Perdagangan, kemudian sektor Jasa (22,9 persen) dan sektor Industri (13,71 persen). Sektor konstruksi, transportasi, dan Keuangan juga merupakan sektor yang potensial dalam penyerapan pekerja lulusan SMK di provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2.2.197

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 (%)



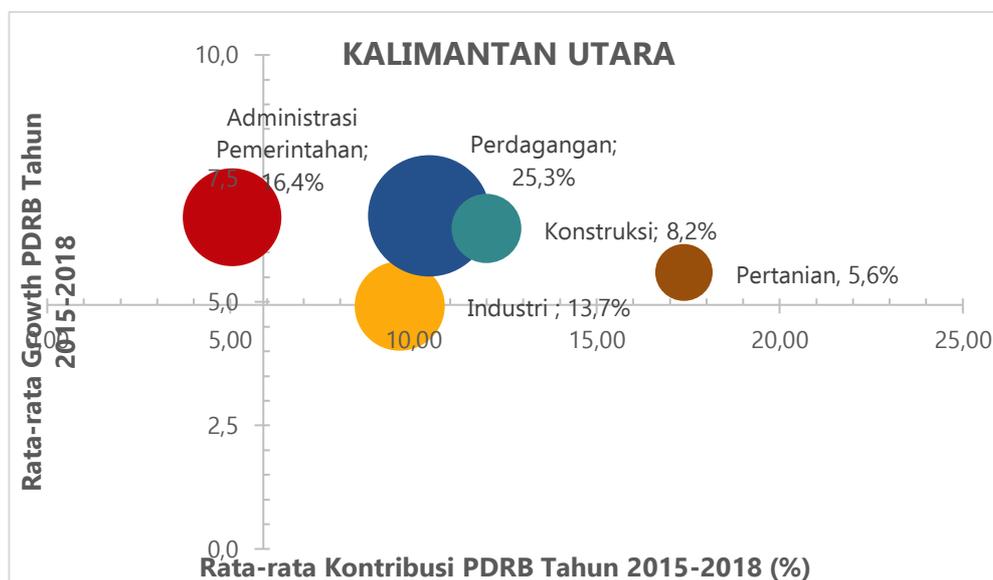
Sumber: Sakernas Agustus 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Utara, lima (5) sektor tertinggi dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi lulusan SMK adalah perdagangan (25,3 persen), administrasi pemerintahan (16,4 persen), industri (13,7 persen), konstruksi (8,2 persen) dan pertanian (5,6 persen). Dari ke lima sektor tersebut, pertumbuhan sektor yang tertinggi adalah sektor perdagangan, kemudian konstruksi dan yang terendah adalah sektor industri.

Kontribusi tertinggi terhadap PDRB adalah sektor sektor pertanian, dan kontribusi terendah adalah sektor administrasi pemerintahan. Sektor pertanian meskipun memberikan share PDRB tertinggi, namun bukan merupakan sektor yang menarik bagi lulusan SMK. Sektor perdagangan dan konstruksi di Kalimantan Utara memberikan peluang kesempatan kerja potensial bagi lulusan SMK karena pertumbuhannya yang tinggi dan nilai tambahnya juga cukup tinggi.

Gambar 2.2.198

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sebaran pekerja lulusan SMK menurut jabatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018, sepertiga (30,13 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Pada Tahun 2018, lima besar jabatan pekerja lulusan SMK di Kalimantan Utara selain tenaga produksi dan pekerja kasar adalah tenaga tata usaha, tenaga usaha penjualan, profesional, dan tenaga usaha jasa. Persentase tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki jabatan profesional di Kalimantan Utara cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yakni sebesar 7,68 persen.

Gambar 2.2.199

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Sebaran pekerja lulusan SMK menurut status pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018, menunjukkan bahwa 7 dari 10 (72,6 persen) pekerja lulusan SMK di provinsi ini berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Besarnya persentase pekerja lulusan yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai memengaruhi besarnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja formal.

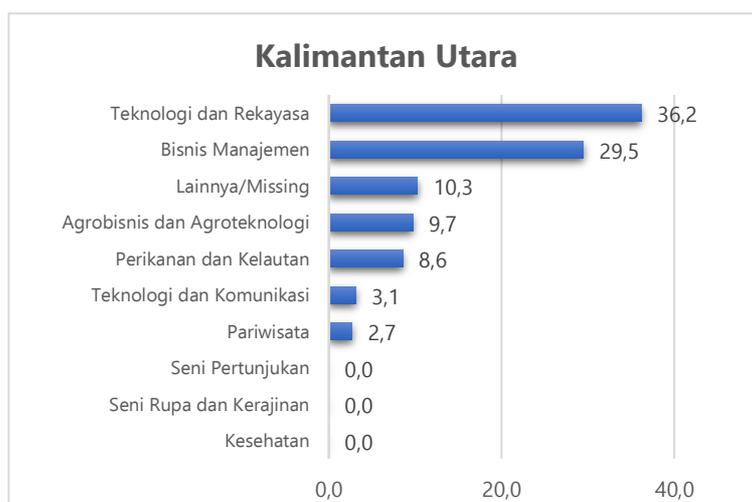
Gambar 2.2.200
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Utara, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 36,2 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 29,5 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara di sektor pertambangan, pertanian, dan industri maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, proporsi tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong sektor pertanian juga cukup besar persentasenya yakni sebesar 9,7 persen.

Gambar 2.2.201
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.24
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	2,031	2,140	2,255	2,376	2,504	2,638
Pertambangan	1,712	1,759	1,807	1,856	1,906	1,958
Industri	4,977	5,209	5,452	5,706	5,972	6,251
LGAM	1,401	1,474	1,551	1,632	1,717	1,806
Konstruksi	3,016	3,186	3,365	3,555	3,755	3,967
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,904	10,582	11,306	12,080	12,906	13,789
Transportasi dan Komunikasi	2,850	3,080	3,328	3,596	3,885	4,198
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,451	2,619	2,800	2,992	3,198	3,418
Jasa Kemasyarakatan	8,289	8,654	9,035	9,433	9,848	10,282
Jumlah Tenaga Kerja SMK	36,633	38,704	40,899	43,225	45,692	48,307
Total Tenaga Kerja	332,465	342,996	353,919	365,186	376,767	388,731
Share Tenaga Kerja	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

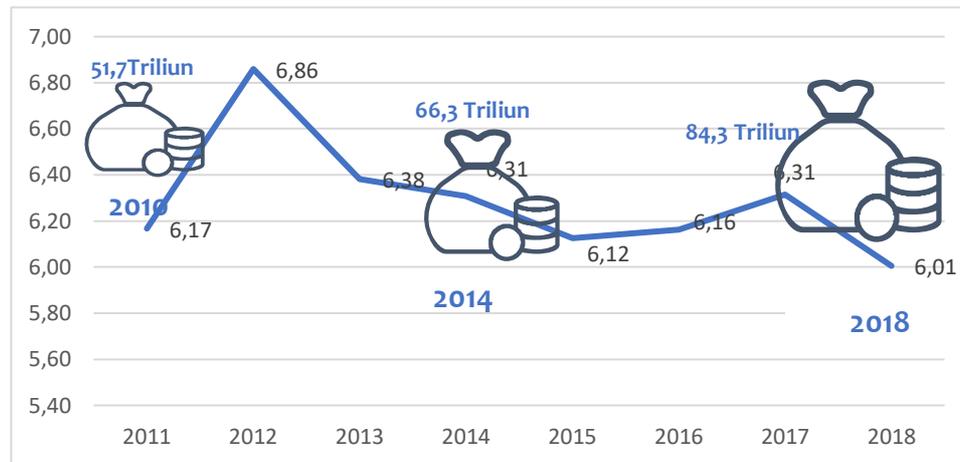


SULAWESI UTARA

2.2.25. Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 2.2.202

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara



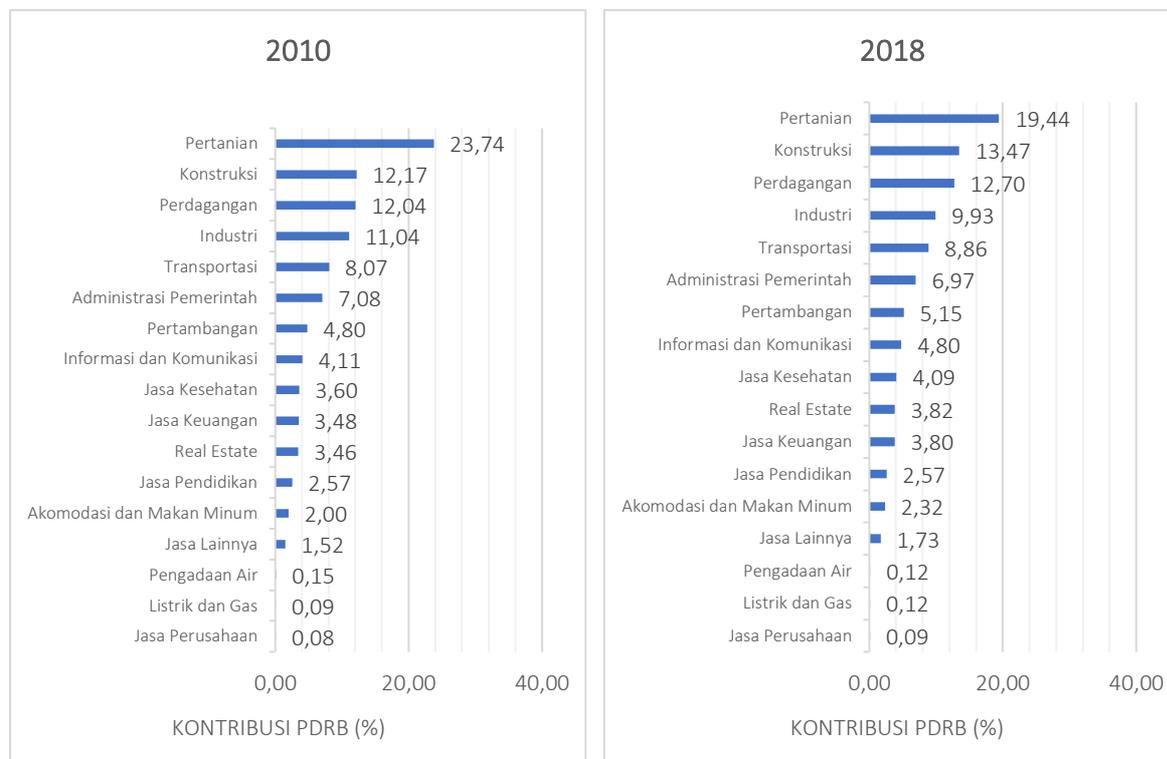
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Provinsi yang terletak di bagian Utara Sulawesi ini mempunyai total PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 51,7 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 84,3 Triliun Rupiah pada Tahun 2018 atau mengalami pertumbuhan sekitar 6,29 persen per tahun. Dalam pengelompokan 17 sektor, terdapat tiga sektor yang memberikan kontribusi masing-masing diatas sepuluh persen di tahun 2018 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Konstruksi, dan Sektor Perdagangan dan Reparasi Mobil/Motor. Kontribusinya terhadap PDB di di ketiga sektor tersebut masing-masing 19,44 persen, 13,47 persen dan 12,70 persen. Dilihat dari perkembangan share selama periode 2010-2018, share sektor pertanian menunjukkan share yang menurun dari 23,74 menjadi 19,44, sedangkan untuk sektor konstruksi menunjukkan peningkatan yang sangat lambat yakni dari 12,17 menjadi 13,47 persen.

Sementara itu sektor Perdagangan dan Reparasi tidak menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Sektor pertanian menunjukkan tren yang terus menurun disebabkan karena pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian merupakan yang paling rendah (3,69 persen) dibandingkan dengan rata-rata angka pertumbuhan ke-16 sektor lainnya yang berkisar antara 4,92 persen (Sektor Industri Pengolahan) hingga 10,91 persen (Sektor Pengadaan Listrik dan Gas).

Gambar 2.2.203

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2010 dan 2018 (%)

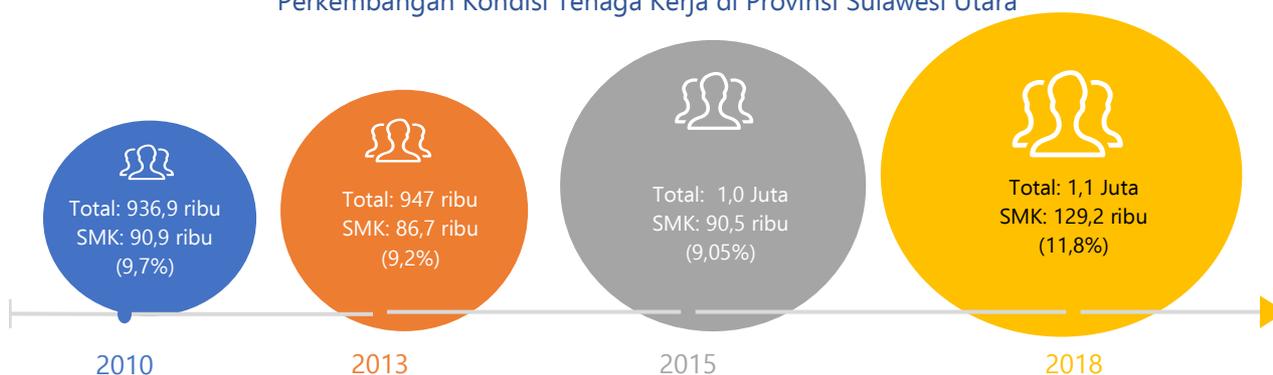


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2010 adalah sebanyak 90.947 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga menjadi 129.161 orang pada tahun 2018. Rata-rata pertambahan pekerja lulusan SMK selama periode 2010-2018 sebesar 4.777 orang per tahun.

Gambar 2.2.204

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (31,23 persen) lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara terserap di sektor Jasa, namun di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK di sektor tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam (menjadi 20,54 persen). Penurunan share pekerja di sektor Jasa diikuti dengan

peningkatan share pekerja lulusan SMK di sektot Perdagangan yakni dari 25,25 persen (tahun 2010) menjadi 31,23 persen (tahun 2018). Artinya telah terjadi perubahan struktur pekerja lulusan SMK dari yang semula lebih banyak bekerja di sektor Jasa, kemudian menjadi lebih banyak yang bekerja di sektor perdagangan.

Nampaknya pola tersebut merupakan pola yang umum terjadi di hampir semua provinsi di Sulawesi. Penurunan penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor Pertanian juga menunjukkan penurunan dan ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian bukan merupakan sektor yang menarik lulusan SMK. Selanjutnya, di tahun 2018, lulusan SMK yang bekerja di sektor Transportasi menempati urutan ke tiga. Peningkatan pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor Transportasi cukup besar yakni tahun 2010 hanya 7,15 persen kemudian meningkat menjadi 11,92 persen. Peningkatan pekerja yang cukup besar juga terjadi di sektor Industri Pengolahan dan sektor Keuangan. Ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, sektor Transportasi dan sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang banyak memberikan kesempatan kerja bagi lulusan SMK.

Gambar 2.2.205

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)

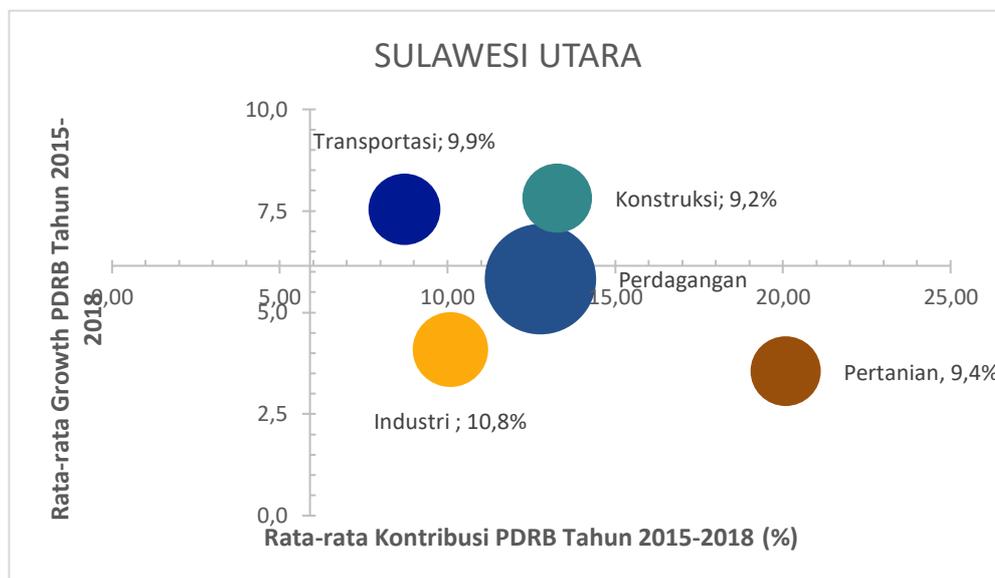


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara, terdapat lima (5) sektor terbesar dari 17 sektor yang menyerap cukup tinggi lulusan SMK yakni perdagangan (23,6 persen), industri (10,8 persen), transportasi (9,9 persen), pertanian (9,4 persen) dan konstruksi (9,2 persen)

Gambar 2.2.206

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari ke lima sektor tersebut, pertumbuhan nilai tambah sektor yang tertinggi adalah sektor transportasi, kemudian konstruksi dan yang terendah sektor pertanian. Sementara itu share nilai tambah sektor ekonomi merupakan yang terbesar, kemudian sektor konstruksi dan perdagangan. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi dan sektor konstruksi menunjukkan bahwa provinsi ini sedang tumbuh. Oleh sebab itu kedua sektor ini merupakan sektor yang potensial dalam penyerapan tenaga kerja lulusan SMK, setelah sektor perdagangan.

Gambar 2.2.207

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)

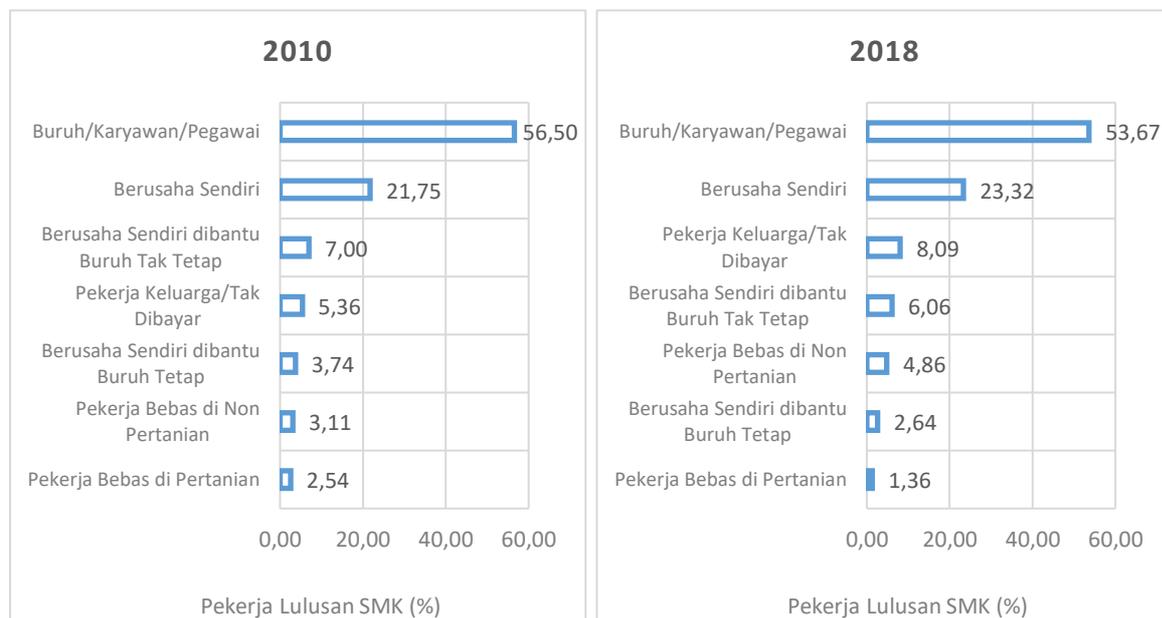


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, lebih dari seperempat pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar; dan hampir seperlimanya bekerja sebagai tenaga usaha penjualan. Dalam perkembangannya, lulusan SMK yang menjadi tenaga produksi dan pekerja kasar mengalami peningkatan, dari 26,16 persen di Tahun 2010, menjadi 37,90 persen pada Tahun 2018. Demikian pula yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan, meningkat dari 19,16 persen di Tahun 2010 menjadi 19,66 persen di Tahun 2018. Di sisi lain, lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional mengalami penurunan, yaitu dari 18,33 persen (2010) menjadi 6,22 persen (2018). Dan hanya sebagian kecil pekerja lulusan SMK di provinsi ini yang memiliki jabatan tenaga kepemimpinan. Walaupun demikian ada kecenderungan peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan yaitu dari 0,62 persen (2010) menjadi 2,15 persen.

Sebagian besar atau lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Walaupun ada kecenderungan mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tidak berubah selama hampir satu dasawarsa yaitu sejak tahun 2010 sampai 2018. Persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai di provinsi ini sedikit menurun dari 56,50 persen (2010) menjadi 53,67 persen (2018). Penurunan persentase juga terjadi pada pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap yaitu dari 3,74 persen (2010) menjadi 2,64 persen (2018).

Gambar 2.2.208
 Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Utara
 Tahun 2010 dan 2018 (%)

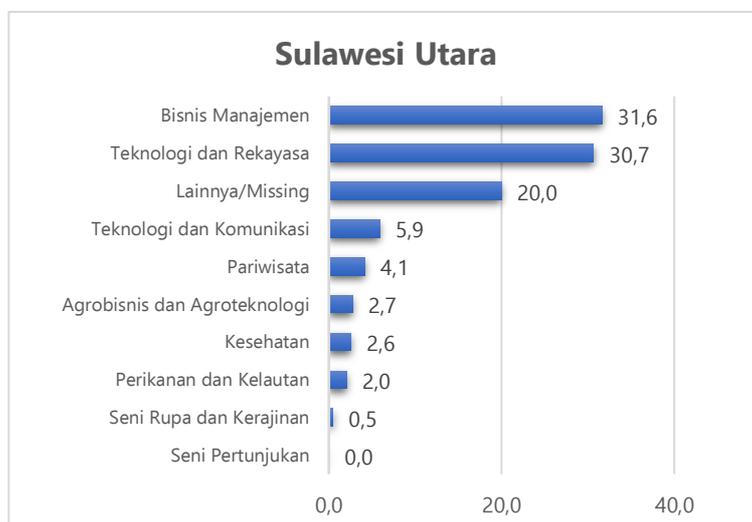


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Penurunan persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap, memengaruhi penurunan persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja formal. Sebaliknya, persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja sektor informal cenderung meningkat. Sebagaimana diketahui bahwa sektor informal sering disebut sebagai penyelamat ekonomi masyarakat, sebagai penunjang sektor formal. Sayangnya, peningkatan persentase pekerja lulusan SMK di sektor informal di provinsi ini, sebagian justru

disumbang oleh pekerja keluarga/ tak dibayar, yang cenderung meningkat yaitu dari 5,36 persen (2010) menjadi 8,09 persen (2018).

Gambar 2.2.209
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Bisnis Manajemen paling besar proporsinya yakni 31,6 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa yakni sebesar 30,7 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara di sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Sulawesi Utara. Namun, proporsi tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong sektor pertanian masih minim persentasenya yakni hanya sebesar 2,7 persen.

Tabel 4.2.25
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	12,559	12,971	13,396	13,834	14,287	14,755
Pertambangan	2,655	2,748	2,846	2,946	3,050	3,158
Industri	14,607	15,238	15,895	16,581	17,297	18,043
LGAM	1,057	1,106	1,158	1,212	1,268	1,328
Konstruksi	12,668	13,438	14,254	15,119	16,038	17,012
Perdagangan, Hotel dan Restoran	43,264	46,408	49,781	53,398	57,279	61,441
Transportasi dan Komunikasi	16,419	17,512	18,679	19,924	21,251	22,667
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	5,642	6,091	6,577	7,101	7,668	8,279
Jasa Kemasyarakatan	27,472	28,448	29,458	30,505	31,589	32,711
Jumlah Tenaga Kerja SMK	136,342	143,960	152,043	160,621	169,727	179,394
Total Tenaga Kerja	1,109,903	1,128,366	1,147,012	1,166,284	1,185,761	1,205,941
Share Tenaga Kerja	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.9

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

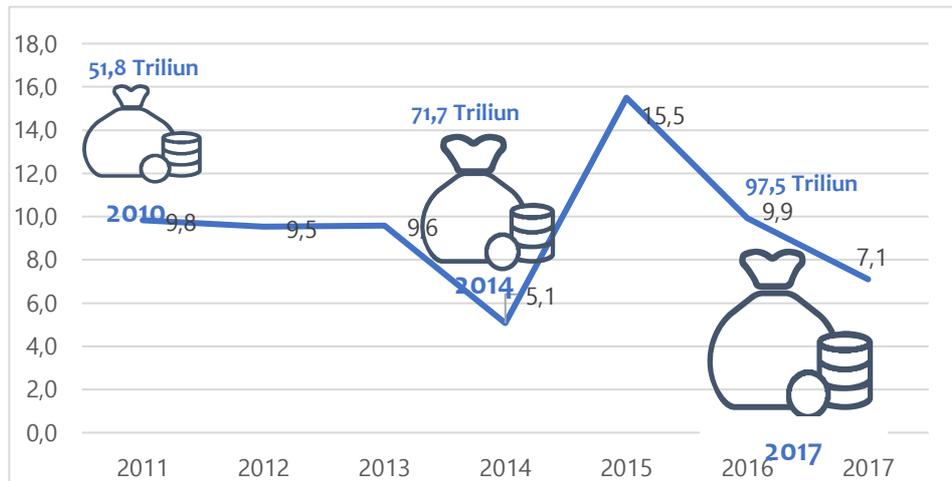


SULAWESI TENGAH

2.2.26. Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mempunyai PDRB menempati urutan kedua se pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan. Total PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 51,75 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 97,47 Triliun Rupiah pada Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan PDRB sangat tinggi yakni sekitar 9,5 persen per tahun.

Gambar 2.2.210
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah

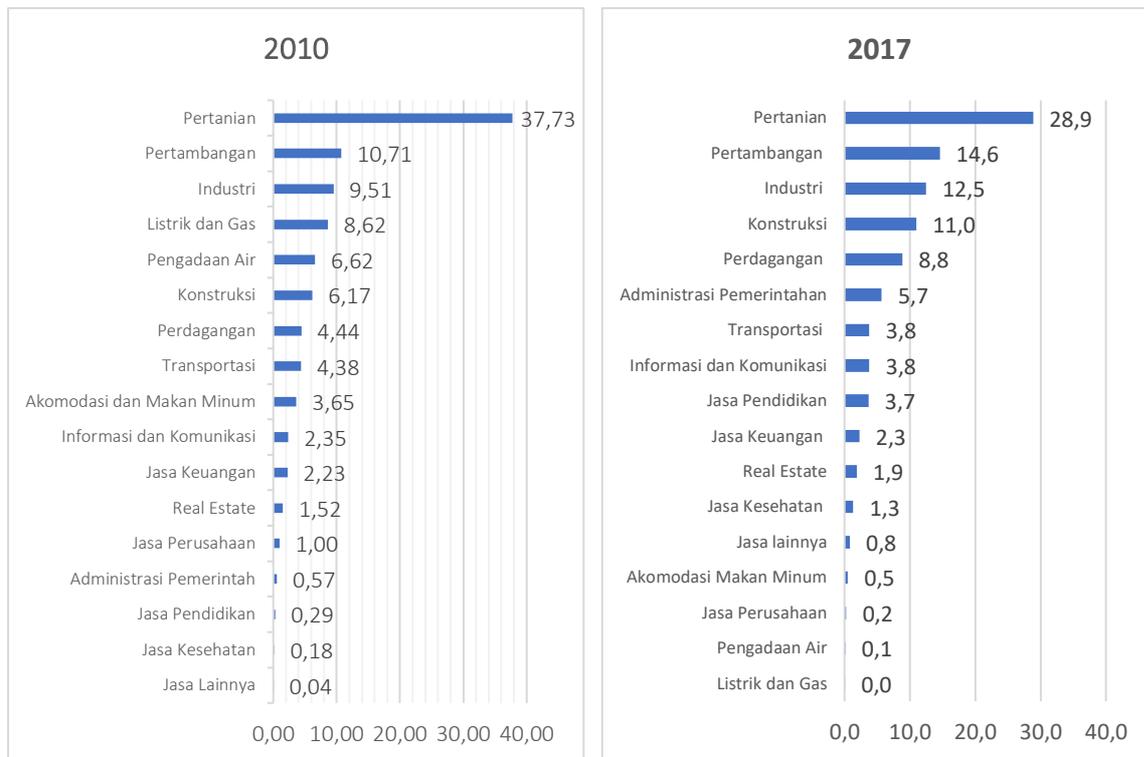


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Dalam pengelompokan 17 sektor, terdapat empat sektor yang memberikan kontribusi masing-masing diatas sepuluh persen di tahun 2017. Empat sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Konstruksi. Sama dengan pola semua provinsi di Sulawesi, share terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian. Di tahun 2017, sumbangan sektor pertanian sebesar 28,86 persen, kemudian sektor Pertambangan 14,64 persen, sektor Industri 12,50 persen dan sektor Konstryksi 11,1 persen.

Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian menyebabkan share sektor pertanian menunjukkan tren selama periode 2010-2017 menurun sangat tajam yakni dari 37,73 persen menjadi 28,86 persen. Rata-rata pertumbuhan sektor Pertanian sebesar 5,4 persen. Sementara itu dalam periode yang sama, share sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Konstruksi meningkat cukup tinggi. Hal ini terkait dengan angka pertumbuhan sektor tersebut yang cukup besar yakni berturut-turut sebesar 20,1 persen, 22,7 persen dan 12,7 persen. Tingginya angka pertumbuhan ketiga sektor tersebut akan berimplikasi pada peningkatan penyerapan pekerja yang cukup besar pula.

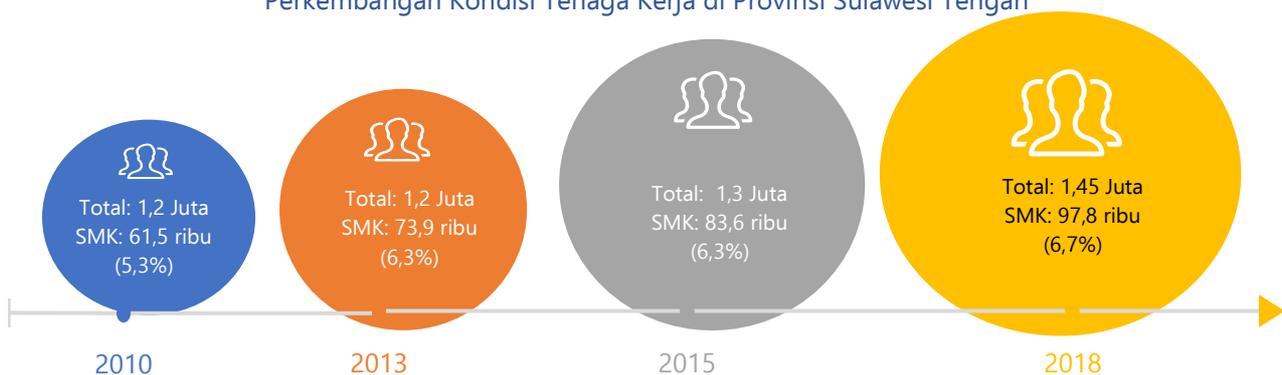
Gambar 2.2.211
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2010 dan 2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2010 adalah sebanyak 61.459 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 4.543 orang sehingga menjadi 97.801 orang pada tahun 2018.

Gambar 2.2.212
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

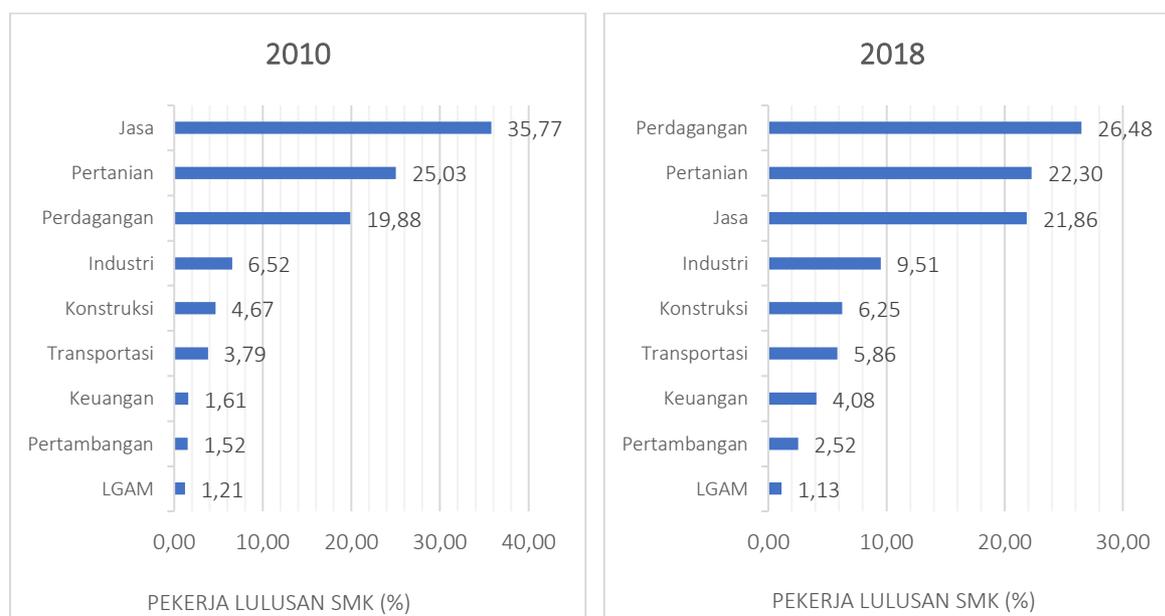
Pada Tahun 2010, sebagian besar (35,77 persen) lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah terserap di sektor Jasa, namun penyerapannya melambat sehingga di Tahun 2018, penyerapan lulusan SMK menjadi 21,86 persen. Penurunan share pekerja lulusan SMK di sektor Jasa diikuti dengan peningkatan share pekerja lulusan SMK di sektot Perdagangan yakni dari 19,88 persen (tahun 2010) menjadi 26,48 persen (tahun 2018).

Struktur pekerja lulusan SMK yang bekerja menurut sektor mengalami perubahan yakni dari yang semula lebih banyak bekerja di sektor Jasa, kemudian menjadi lebih banyak yang bekerja di sektor perdagangan. Pola ini juga umum terjadi di hampir semua provinsi di Sulawesi. Penurunan penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor Pertanian juga menunjukkan penurunan yakni dari 25,03 persen menjadi 22,30 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian sudah bukan merupakan sektor yang menarik bagi lulusan SMK.

Sektor Industri merupakan lapangan pekerjaan yang cukup diminati oleh lulusan SMK. Hal ini terlihat dari peningkatan pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor Industri dari 6,99 persen menjadi hampir mencapai angka dua digit yakni 9,51 persen. Sementara itu telah terjadi peningkatan share pekerja di sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan sektor Keuangan dan ini mengindikasikan bahwa ketiga sektor tersebut cukup potensial memberikan peluang kesempatan kerja bagi lulusan SMK, setelah sektor Perdagangan dan sektor Industri di Sulawesi Tengah.

Gambar 2.2.213

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)



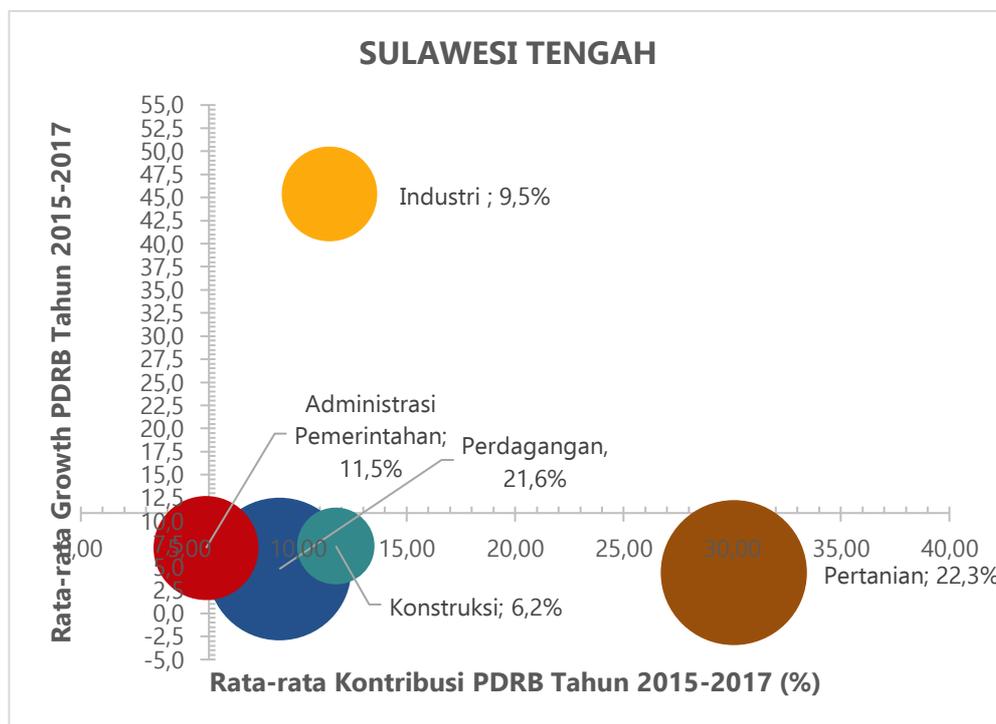
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat lima (5) sektor terbesar dari 17 sektor yang menyerap cukup tinggi lulusan SMK yakni pertanian (22,3 persen), perdagangan (21,6 persen), administrasi pemerintahan (11,5 persen), industri (9,5 persen), dan konstruksi (6,2 persen). Struktur pekerja sektoral lulusan SMK berbeda dengan struktur perekonomian Sulawesi Utara. Struktur perekonomian dilihat dari pertumbuhan nilai tambah sektor dan share nilai tambah dari lima sektor terhadap PDRB. Pertumbuhan nilai tambah ke lima sektor mulai dari yang tertinggi adalah industri kemudian administrasi pemerintahan serta ketiga sektor lainnya yang mempunyai pertumbuhan relatif sama. Sektor yang memberikan nilai tambah terbesar adalah sektor pertanian, kemudian industri, konstruksi, perdagangan, serta administrasi pemerintahan.

Lulusan SMK paling banyak berada di sektor pertanian dimana merupakan sektor yang share dalam perekonomian termasuk tinggi dan pertumbuhan yang rendah. Sektor pertanian merupakan sektor yang produktivitasnya rendah dan prospek pertumbuhannya juga lambat. Pengalaman di beberapa provinsi jumlah tenaga kerja menunjukkan penurunan, dan hal ini juga bisa terjadi di provinsi Sulawesi Tengah. Sebaliknya sektor industri merupakan sektor yang mempunyai produktivitas yang relatif tinggi dan pertumbuhan historis yang cukup tinggi. Oleh sebab itu maka sektor industri dapat menjadi sektor yang potensial bagi lulusan SMK untuk masuk ke pasar kerja.

Gambar 2.2.214

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sulawesi Tengah



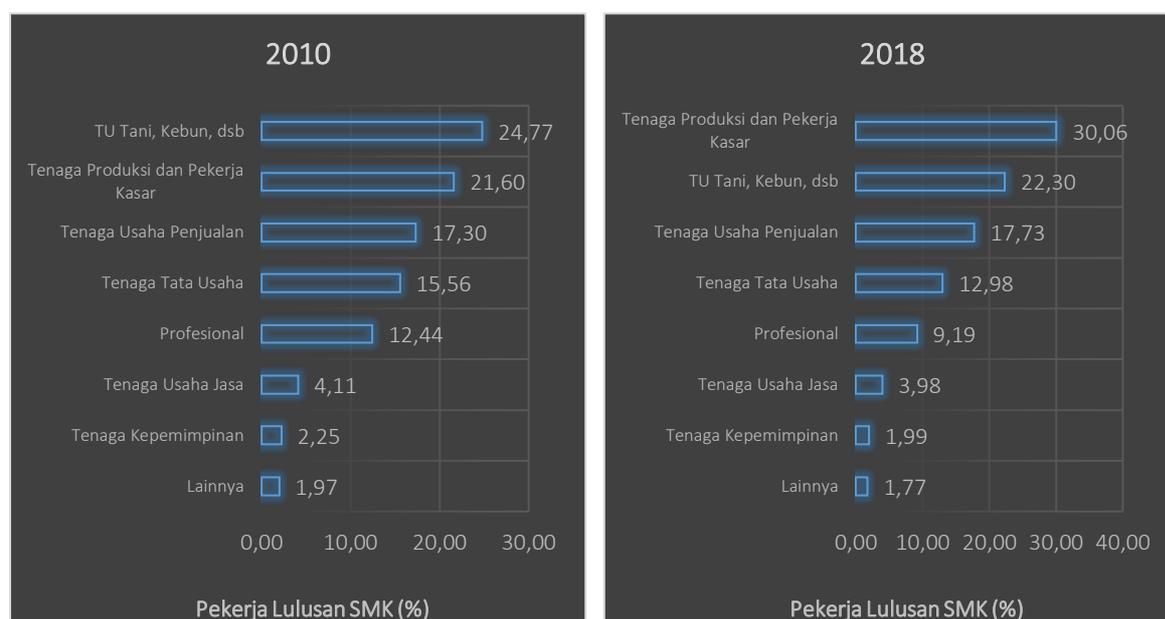
Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari seperempat pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah menekuni jenis pekerjaan Tenaga Produksi dan Pekerja Kasar, yang cenderung meningkat sejak tahun 2010 dan 2018, dengan peningkatan persentase hampir sembilan poin persen yaitu dari 21,60 persen pada tahun 2010 menjadi 30,06 persen di tahun 2018. Sayangnya, sebagian peningkatan persentase adalah jenis pekerjaan sebagai pekerja kasar yaitu bukan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan.

Peningkatan persentase juga disumbang dari jenis pekerjaan tenaga usaha penjualan, yang sedikit meningkat yaitu dari 17,30 persen (2010) menjadi 17,73 persen (2018). Sebaliknya, pekerja lulusan SMK di provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki jabatan sebagai profesional dan tenaga kepemimpinan cenderung menurun selama 2010 dan 2018. Pekerja lulusan SMK yang menjabat sebagai tenaga kepemimpinan, persentasenya menurun dari 2,25 persen (2010) menjadi 1,99 persen (2018). Demikian pula, yang berprofesi sebagai profesional, persentasenya menurun dari 12,44 persen (2010) menjadi 9,19 persen (2018).

Gambar 2.2.215

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)



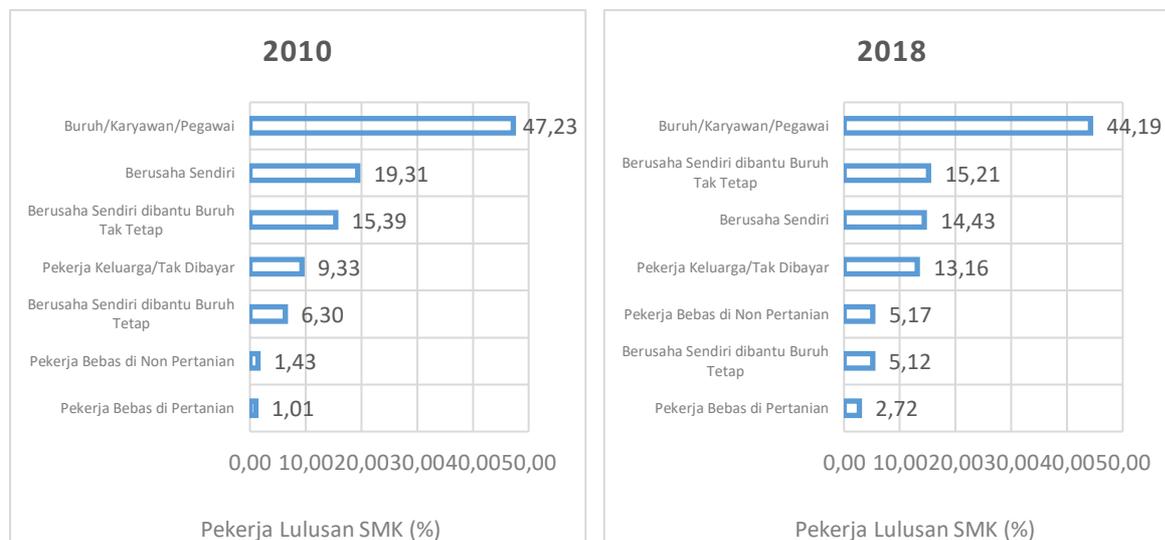
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Kurang dari separuh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dalam perkembangannya selama Tahun 2010 dan 2018, cenderung turun yaitu dari 47,23 persen (2010) menjadi 44,19 persen (2018). Kecenderungan penurunan persentase juga terjadi pada pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap, yaitu dari 6,30 persen (2010) menjadi 5,12 persen (2018). Hal ini mengindikasikan kecenderungan penurunan pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah yang berstatus kerja sebagai pekerja formal. Sebaliknya yang berstatus kerja sebagai pekerja di sektor informal cenderung meningkat.

Peran sektor informal sebagai penyelamat ekonomi rakyat memang tidak dapat dipungkiri, sayangnya kecenderungan meningkatnya pekerja lulusan SMK di sektor informal di provinsi ini, sebagian justru disumbang oleh pekerja keluarga/ tak dibayar, yang persentasenya cenderung meningkat selama 2010 dan 2018, yaitu dari 9,33 persen (2010) menjadi 13,18 persen (2018). Di sisi lain, pekerja lulusan SMK di provinsi ini semakin tidak berminat untuk berusaha sendiri, sebagaimana persentasenya yang terus menurun sejak 2010 dan 2018, yaitu dari 19,31 persen (2010) menjadi 14,43 persen (2018).

Gambar 2.2.216

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 dan 2018 (%)

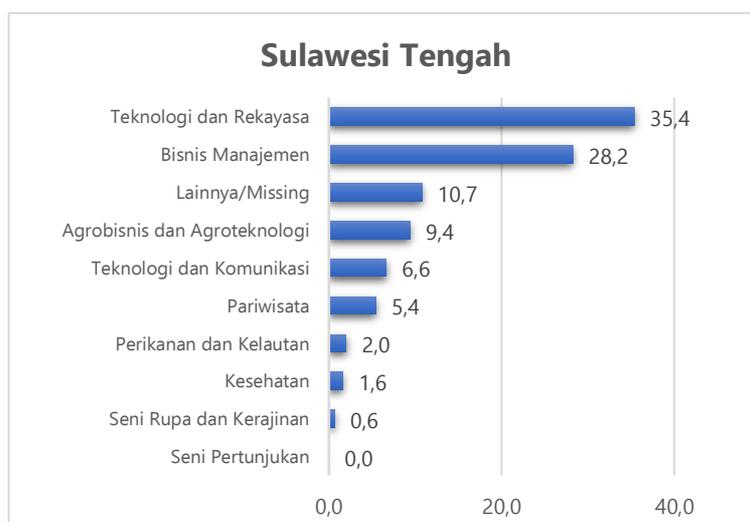


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 35,4 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 28,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah di sektor pertanian, pertambangan, dan industri maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Sulawesi Tengah. Di sisi lain, proporsi tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong sektor pertanian juga cukup besar persentasenya yakni 9,4 persen.

Gambar 2.2.217

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.26
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	22,845	23,936	25,078	26,274	27,528	28,842
Pertambangan	2,708	2,973	3,265	3,585	3,936	4,322
Industri	11,163	13,393	16,067	19,276	23,125	27,743
LGAM	1,154	1,202	1,252	1,305	1,359	1,416
Konstruksi	6,693	7,330	8,027	8,791	9,628	10,545
Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,613	29,437	31,382	33,456	35,667	38,023
Transportasi dan Komunikasi	6,148	6,595	7,074	7,589	8,141	8,733
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	4,320	4,674	5,058	5,474	5,923	6,409
Jasa Kemasyarakatan	22,217	23,084	23,985	24,921	25,893	26,904
Jumlah Tenaga Kerja SMK	104,860	112,623	121,189	130,670	141,200	152,937
Total Tenaga Kerja	1,475,908	1,505,632	1,536,631	1,568,779	1,601,784	1,636,076
Share Tenaga Kerja	7.1	7.5	7.9	8.3	8.8	9.3

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

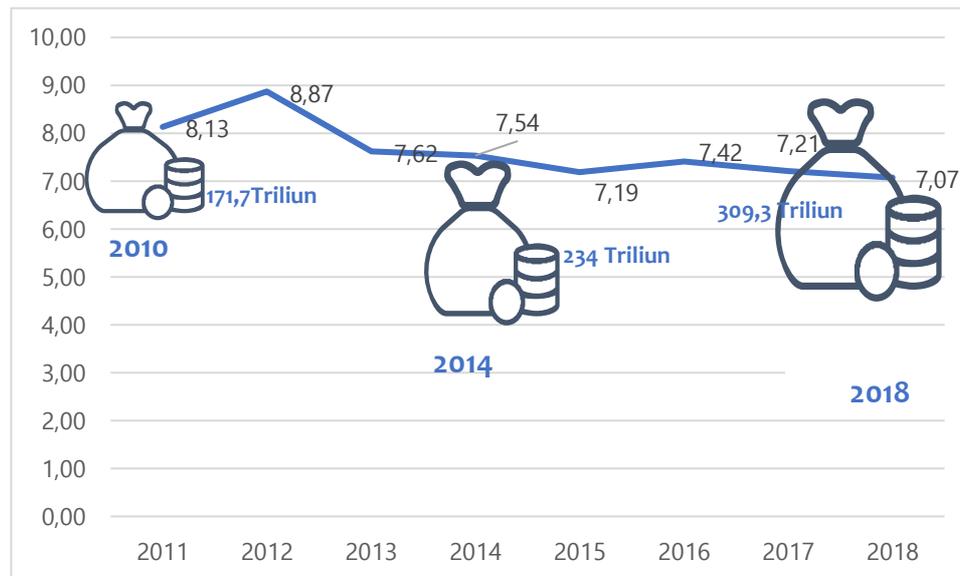


SULAWESI SELATAN

2.2.27. Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terbesar dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 171,7 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 309,2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB relatif tinggi yakni sebesar 7,63 persen per tahun.

Gambar 2.2.218
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan



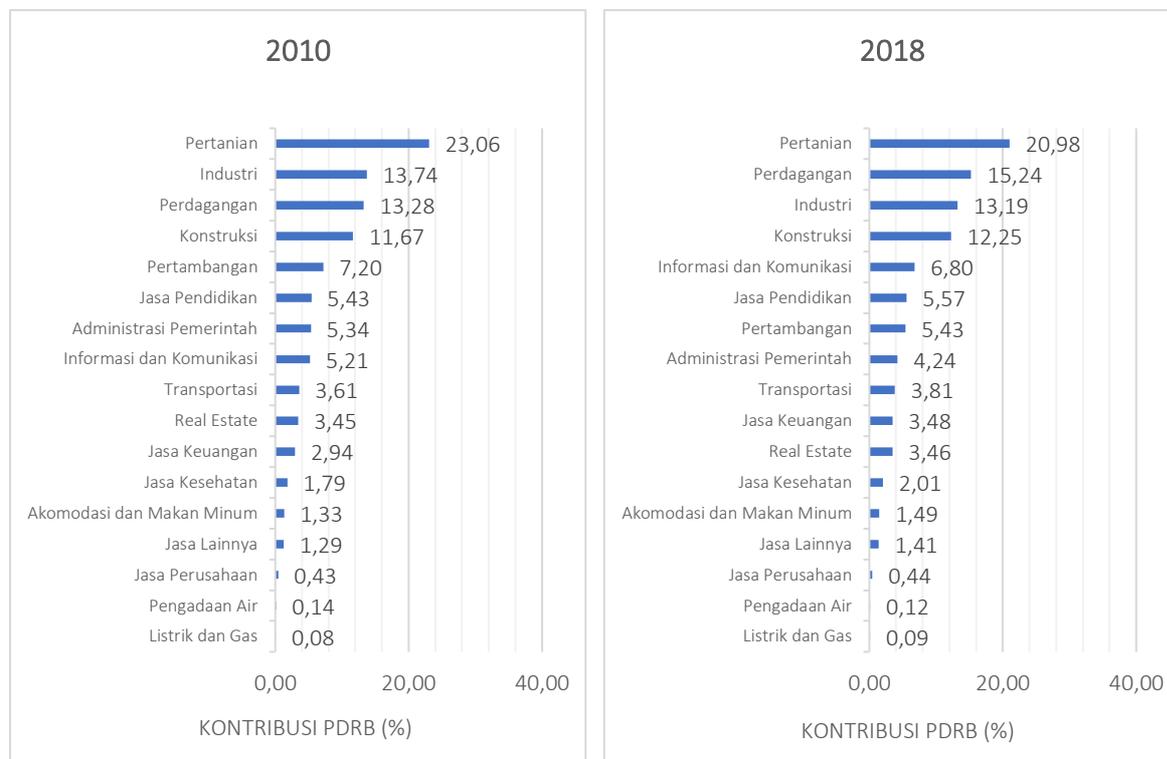
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Struktur PDRB terbesar sama dengan pola provinsi-provinsi di Sulawesi yakni share terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Besaran share sektor pertanian di tahun 2018 sebesar 20,98 persen. Setelah sektor Pertanian, kemudian terdapat tiga sektor yang mempunyai share PDRB lebih dari 10 persen yakni sektor Perdagangan dan Reparasi (15,24 persen); sektor Industri Pengolahan (13,19 persen) dan sektor Konstruksi (12,25 persen). Sama dengan tren share sektor Pertanian secara umum, tren share sektor pertanian juga menunjukkan penurunan yakni dari 23,06 persen di tahun 2010 menjadi 20,98 persen. Sementara itu dalam periode yang sama, share sektor Perdagangan meningkat cukup berarti yakni dari 13,28 persen menjadi 15,24 persen.

Sektor Konstruksi menunjukkan tren yang meningkat, namun tidak relatif lambat yakni dari 13,28 dari 11,67 menjadi 12,25 persen. Sektor lain yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Kedua sektor tersebut mempunyai rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,35 persen dan 10,05 persen. Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut membuat share sektor Informasi dan Komunikasi meningkat dari 5,21 persen menjadi 6,80 persen; dan sektor Jasa Keuangan meningkat dari 2,94 persen menjadi 3,48 persen.

Gambar 2.2.219

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 dan 2018 (%)

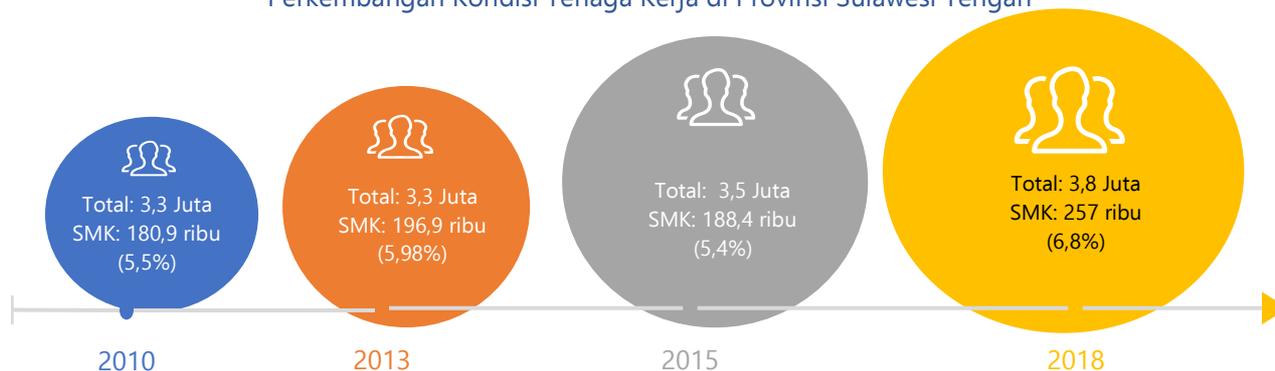


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2010 adalah sebanyak 180.891 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 9.515 orang sehingga menjadi 257.012 orang pada tahun 2018. Adapun share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja relatif rendah yakni 5,5 persen di tahun 2010 dan menjadi 6,8 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.220

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah



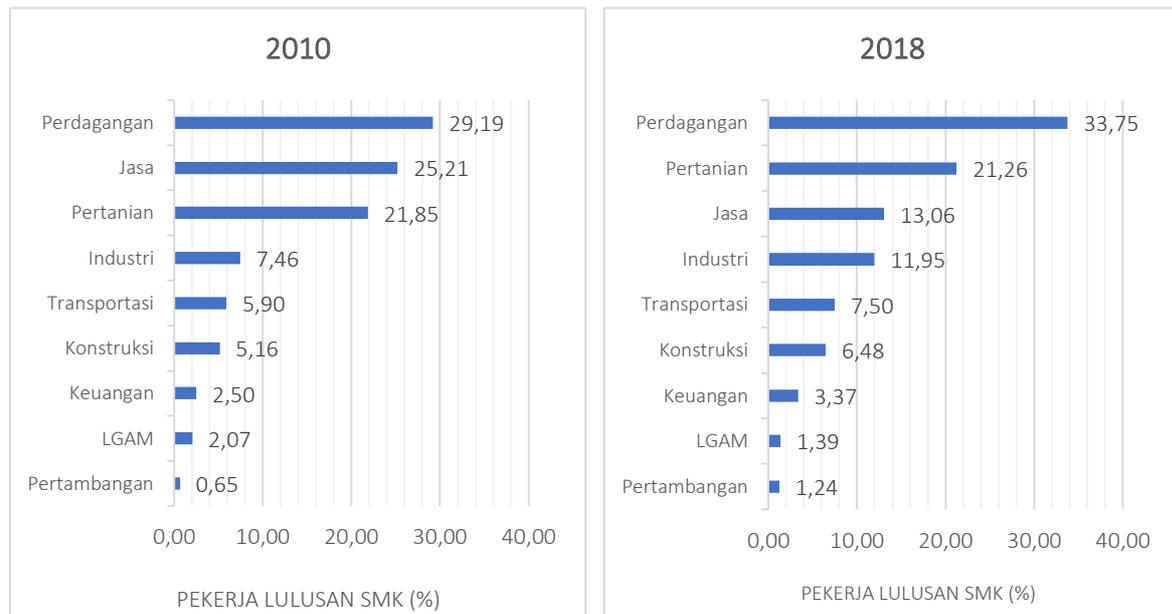
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Jumlah pekerja lulusan SMK di Sulawesi Selatan merupakan yang terbesar diantara provinsi-provinsi di pulau Sulawesi. Pada Tahun 2010, sebagian besar (29,19 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan bekerja di sektor Perdagangan, kemudian 25,21 persen di sektor Jasa, dan 21,85 persen di sektor Pertanian. Di tahun 2018, ketiga sektor tersebut tetap menempati tiga besar, dengan urutan

pertama tetap sektor Perdagangan dan kedua sektor pertanian dan sektor jasa. Namun kecenderungannya semakin meningkat untuk sektor Perdagangan dan semakin menurun untuk sektor Jasa dan Pertanian. Seperti pola pada umumnya bahwa sektor Pertanian bukan merupakan sektor yang menarik bagi lulusan SMK. Sementara itu sektor yang menarik bagi pekerja lulusan SMK adalah selain sektor Perdagangan adalah sektor Industri, sektor Transportasi, sektor Konstruksi, dan sektor Keuangan. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase pekerja lulusan SMK di ke lima sektor tersebut.

Gambar 2.2.221

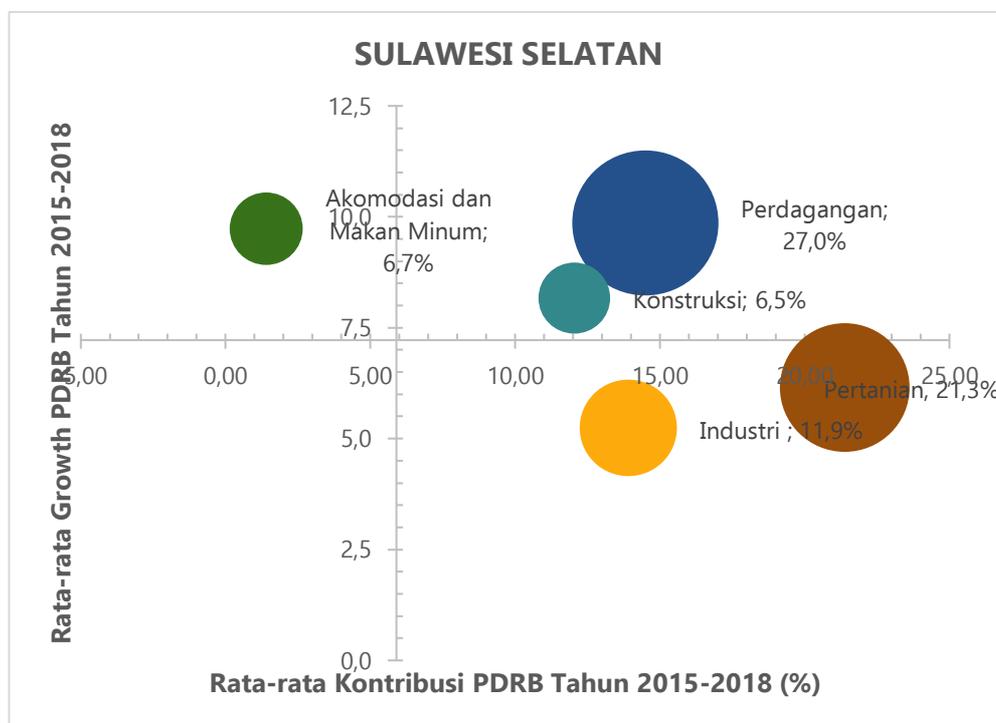
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)



Pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan terdistribusi ke 17 sektor dan lima (5) sektor terbesar yang menyerap cukup tinggi lulusan SMK yakni perdagangan (27,0 persen), pertanian (21,3 persen), industri (11,9 persen), dan akomodasi dan makan minum (6,7 persen) dan konstruksi (6,5 persen). Struktur pekerja sektoral lulusan SMK berbeda dengan struktur perekonomian Sulawesi Selatan. Pertumbuhan nilai tambah ke lima sektor mulai dari yang tertinggi adalah sektor akomodasi dan makan minum, kemudian perdagangan dan konstruksi. Sektor yang memberikan nilai tambah terbesar adalah sektor pertanian dan yang terendah adalah sektor Akomodasi makan minum, dan ketiga sektor lainnya mempunyai share yang menyerupai dan termasuk kategori sedang. Penyerapan SMK yang cukup dominan di sektor perdagangan dan pertanian. Dengan angka pertumbuhan sektor perdagangan yang termasuk tinggi maka pekerja lulusan SMK mempunyai banyak peluang untuk bekerja disektor ini. Sektor Akomodasi dan Makan minum mempunyai pertumbuhan yang tertinggi, namun relatif sulit sedikit yang terserap di sektor ini. Ini mengindikasikan bahwa lulus SMK di Sulawesi Selatan masih relatif sulit untuk memasuki sektor Akomodasi makan minum. Sementara itu sektor industri mempunyai angka pertumbuhan yang rendah, sehingga kesempatan baru yang tercipta juga menjadi rendah. Implikasinya lulusan SMK harus mampu bersaing dengan jenjang pendidikan lainnya agar bisa mengisi kesempatan kerja sektor industri.

Gambar 2.2.222

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan, hampir sepertiga persen bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Dalam perkembangannya, persentase pekerja lulusan SMK di provinsi ini yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung meningkat dari 24,61 persen pada tahun 2010 menjadi 32,83 persen pada Tahun 2018. Peningkatan persentase juga terjadi pada pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga tata usaha. Selain itu, jenis pekerjaan pekerja lulusan SMK di provinsi ini juga cenderung semakin beragam jenisnya, hal ini tampak dari persentase yang termasuk pada kelompok jenis pekerjaan lainnya, yang relatif semakin meningkat yaitu dari 1,67 persen pada Tahun 2010 menjadi 2,60 persen pada Tahun 2018. Sebaliknya, yang bekerja sebagai profesional, persentasenya turun secara cepat. Hampir separuh pekerja lulusan SMK di provinsi ini yang pada Tahun 2010 bekerja sebagai profesional, maka pada Tahun 2018, tidak lagi bekerja sebagai profesional.

Gambar 2.2.223

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)

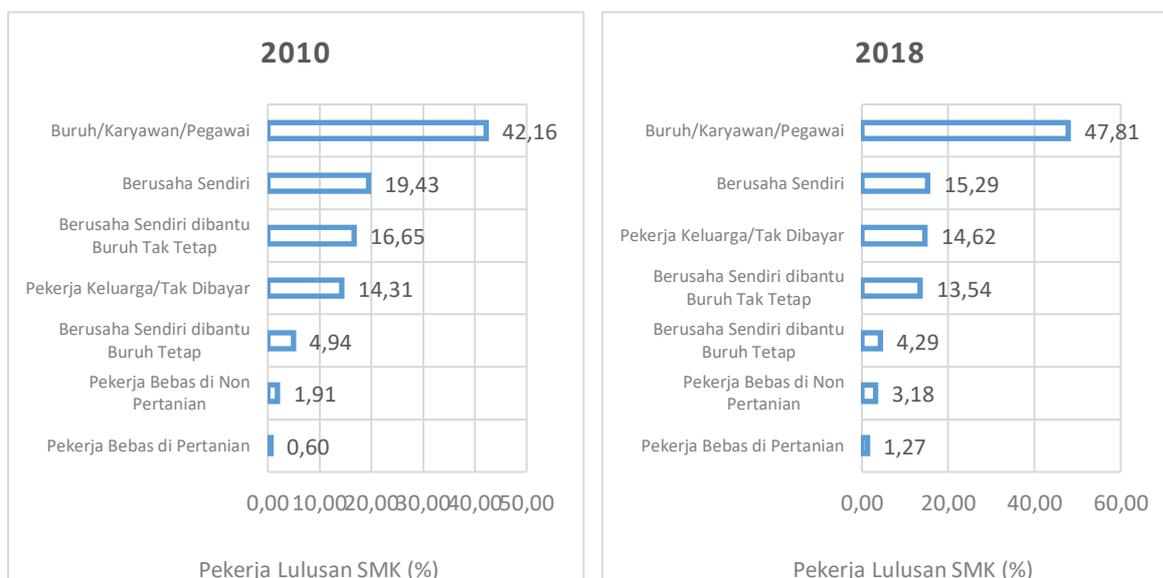


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan cenderung meningkat persentasenya sejak Tahun 2010 dan 2018, yaitu dari 42,16 persen menjadi 47,81 persen

Gambar 2.2.224

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dan 2018 (%)



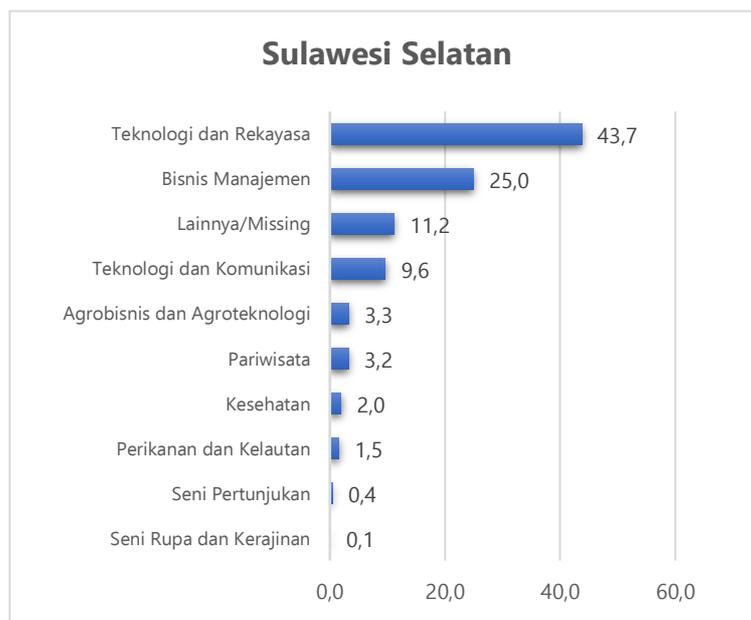
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Meningkatnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, memengaruhi peningkatan pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja sektor formal, walaupun di satu sisi, lulusan SMK yang bekerja berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap,

persentasenya sedikit menurun sejak 2010 dan 2018 yaitu dari 4,84 persen menjadi 4,29 persen. Pekerja lulusan SMK di provinsi Sulawesi Selatan tampaknya memang kurang berminat untuk menggeluti usaha mandiri, baik yang berusaha sendiri maupun berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap, yang persentasenya cenderung turun sejak Tahun 2010 dan 2018. Di sisi lain, lulusan SMK yang bekerja sebagai pekerja keluarga/ tak dibayar, persentasenya semakin meningkat yaitu dari 14,31 persen pada Tahun 2010, menjadi 14,62 persen pada Tahun 2018.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 43,7 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 25,0 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pertanian, perdagangan, dan industri maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain, proporsi tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong sektor pertanian masih minim persentasenya yakni hanya 3,3 persen.

Gambar 2.2.225
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.27
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	57,728	61,005	64,467	68,126	71,992	76,078
Pertambangan	3,258	3,320	3,384	3,450	3,516	3,584
Industri	32,624	34,660	36,824	39,122	41,564	44,158
LGAM	3,749	3,922	4,102	4,291	4,489	4,696
Konstruksi	17,751	18,916	20,157	21,479	22,889	24,390
Perdagangan, Hotel dan Restoran	94,966	103,973	113,836	124,634	136,456	149,399
Transportasi dan Komunikasi	20,953	22,782	24,771	26,934	29,285	31,841
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	9,465	10,336	11,287	12,325	13,459	14,697
Jasa Kemasyarakatan	34,794	36,070	37,394	38,766	40,189	41,663
Jumlah Tenaga Kerja SMK	275,287	294,985	316,222	339,126	363,838	390,507
Total Tenaga Kerja	3,823,885	3,883,446	3,946,003	4,011,029	4,077,938	4,147,124
Share Tenaga Kerja	7.2	7.6	8.0	8.5	8.9	9.4

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



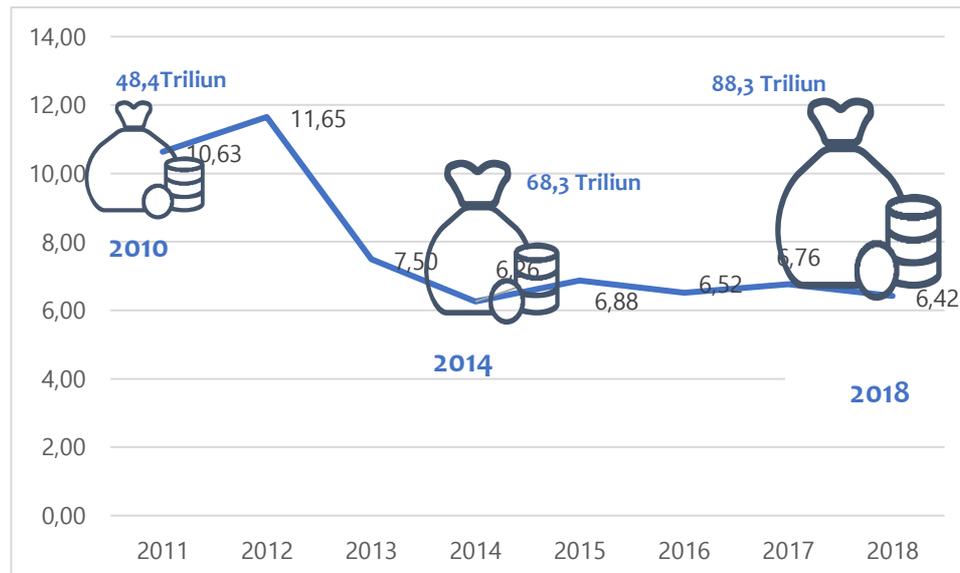
SULAWESI TENGGAH

2.2.28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terbesar ketiga di Sulawesi, setelah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Total PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 48,4 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 88,3 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB relatif agak tinggi yakni sebesar 7,83 persen per tahun.

Gambar 2.2.226

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara



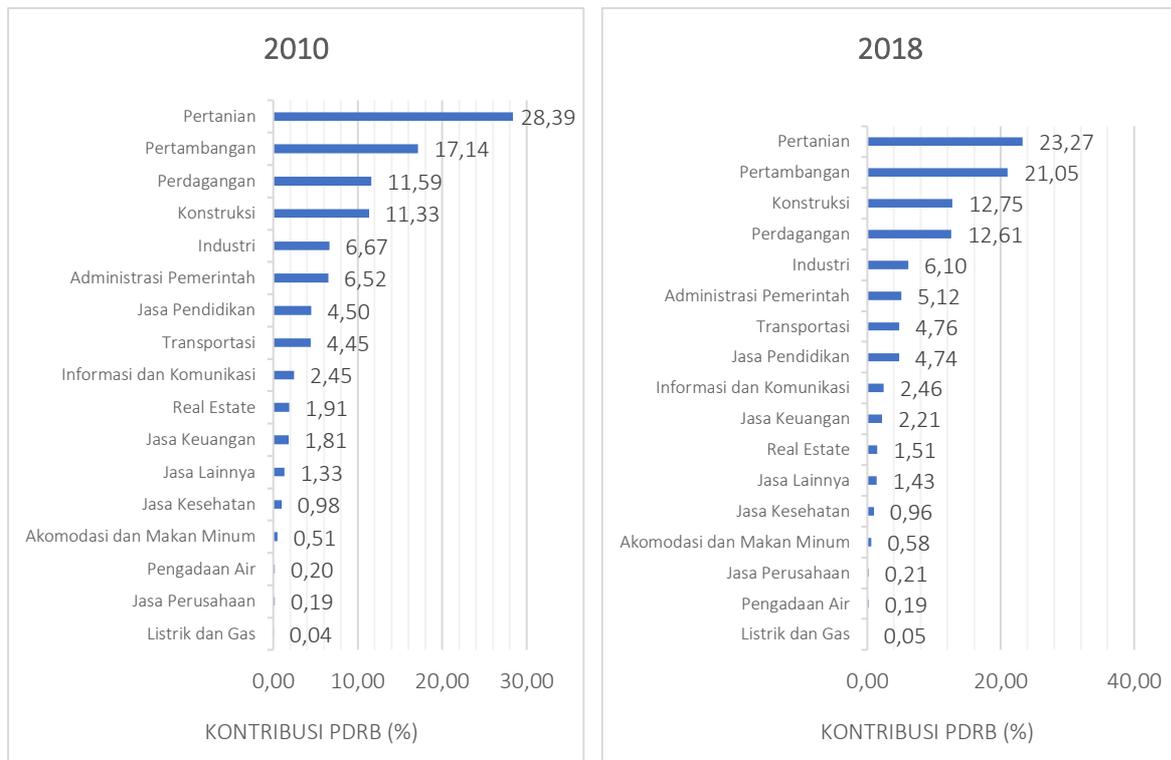
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Struktur PDRB terbesar sama dengan pola provinsi-provinsi di Sulawesi yakni share terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Besaran share sektor pertanian di tahun 2018 sebesar 23,27 persen. Setelah sektor Pertanian, kemudian terdapat tiga sektor berikutnya yang mempunyai share PDRB lebih dari 10 persen yakni sektor Pertambangan dan penggalian (21,05 persen); sektor Konstruksi (12,75 persen) dan sektor Perdagangan dan Reparaasi (12,61 persen). Tren share sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara menyerupai pola tren sektor Pertanian secara umum.

Tren share sektor pertanian menunjukkan penurunan yakni dari 28,39 persen di tahun 2010 menjadi 23,27 persen. Sebaliknya dalam periode yang sama, share sektor Pertambangan meningkat cukup besar yakni dari 17,14 persen menjadi 21,05 persen. Peningkatan tersebut berkaitan dengan rata-rata pertumbuhan sektor Pertambangan yang meningkat hingga mencapai 11,23 persen. Sektor lain yang juga menunjukkan pertumbuhan rata-rata sampai dua digit adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (11,09 persen), dan sektor Jasa Keuangan dan asuransi (10,61 persen). Peningkatan yang cukup tinggi kedua sektor tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh pada struktur PDRB karena perannya yang relatif kecil dalam perekonomian Sulawesi Tenggara yakni masing-masing sebesar 0,05 persen dan 1,51 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.227

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 dan 2018 (%)

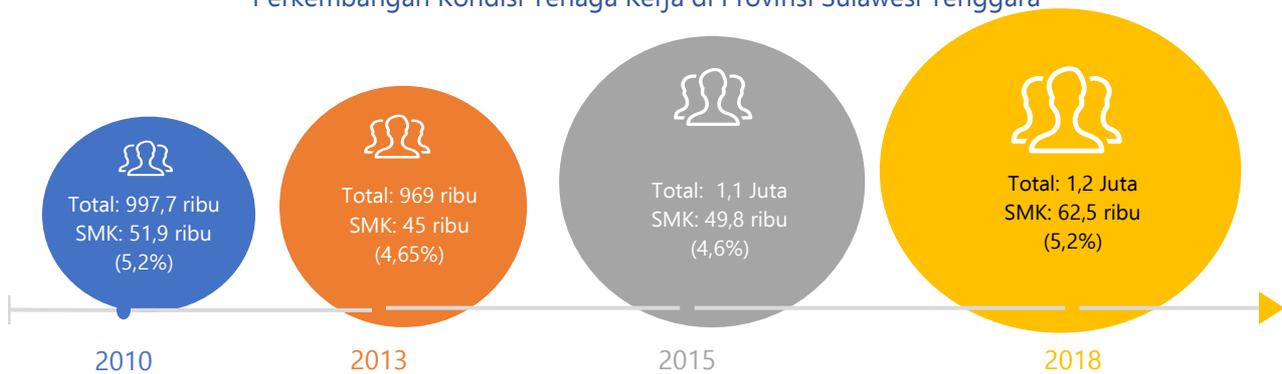


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2010 adalah sebanyak 51.852 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1.325 orang sehingga menjadi 62.450 orang pada tahun 2018. Di sisi lain, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja relatif kecil yakni 5,2 persen di tahun 2010 dan tidak mengalami perubahan besarnya di tahun 2018.

Gambar 2.2.228

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara



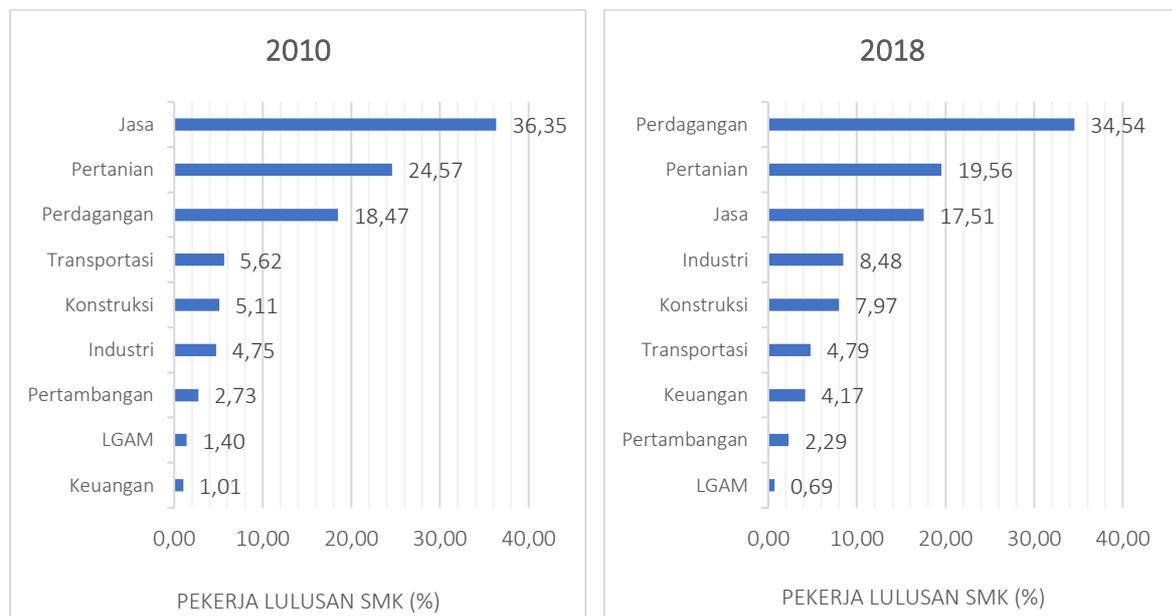
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (36,35 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja di sektor Jasa, kemudian 24,57 persen di sektor Pertanian, dan 18,47 persen di sektor Perdagangan. Di tahun 2018, ketiga sektor tersebut tetap menempati tiga besar, dengan urutannya

berubah menjadi tertinggi sektor Perdagangan, kemudian sektor Pertanian dan sektor Jasa. Penurunan lulusan SMK yang bekerja di sektor jasa menurun sangat tajam yakni dari 36,35 persen (tahun 2010) menjadi 17,51 persen (tahun 2018). Ini mengindikasikan bahwa sektor Jasa kurang memberikan kesempatan kerja bagi lulusan SMK. Sementara itu kondisi di sektor Pertanian agak berbeda dengan sektor Jasa. Upah di sektor Pertanian yang rendah menjadi salah satu penyebab bahwa lulusan SMK kurang tertarik untuk bekerja di sektor tersebut. Selain sektor Perdagangan, sektor yang juga memberikan peluang kesempatan kerja yang potensial bagi lulusan SMK di Sulawesi Tenggara adalah sektor Transportasi dan sektor Konstruksi.

Gambar 2.2.229

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 dan 2018 (%)



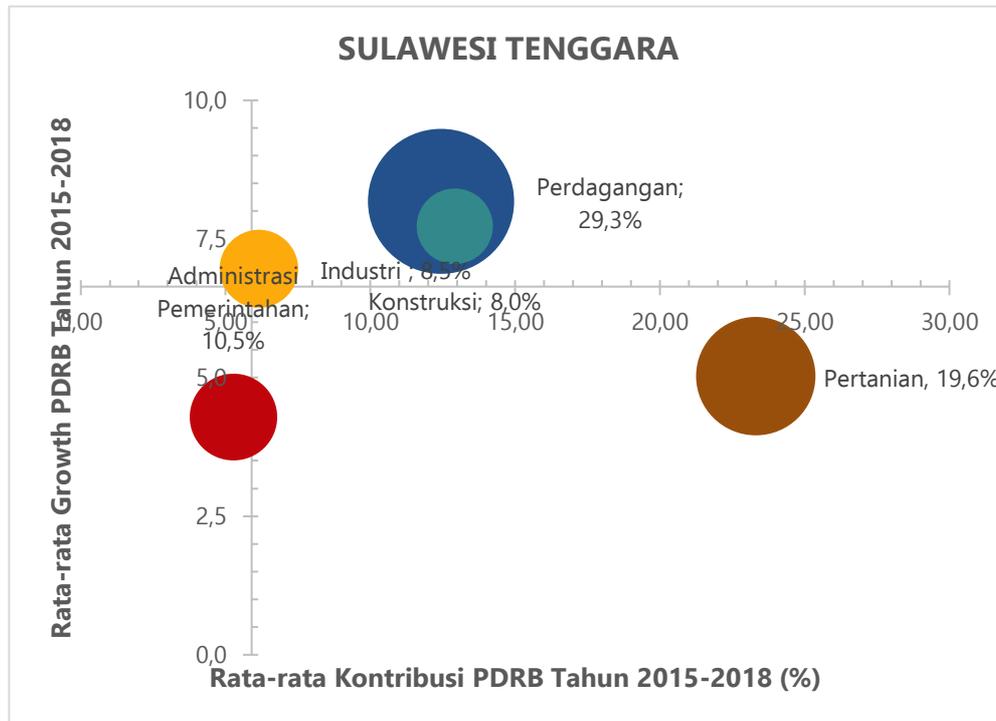
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara terdistribusi ke 17 sektor dan lima (5) sektor terbesar yang menyerap cukup tinggi lulusan SMK yakni perdagangan (29,3 persen), pertanian (19,6 persen), administrasi pemerintahan (10,5 persen) dan dua sektor lainnya masing-masing menyerap sekitar 8 persen. Struktur pekerja sektoral lulusan SMK juga berbeda dengan struktur perekonomian Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan nilai tambah empat sektor hampir sama yakni sekitar enam persen, dan sektor industri sekitar lima persen. Sektor yang memberikan nilai tambah terbesar adalah sektor pertanian, kemudian perdagangan dan konstruksi mempunyai angka yang sama, dan yang mempunyai share yang terendah adalah administrasi pemerintahan dan industri. Penyerapan lulusan SMK yang cukup dominan di sektor perdagangan dan pertanian. Dengan angka pertumbuhan nilai tambah sektor yang hampir sama maka pekerja lulusan SMK mempunyai banyak peluang untuk tetap bekerja di kedua sektor tersebut. Sementara itu untuk sektor konstruksi, industri dan administrasi pemerintahan mempunyai angka pertumbuhan yang tidak cukup besar maka tambahan kesempatan kerja dari ketiga sektor tersebut tidak begitu tinggi. Dengan keterbatasan kesempatan kerja maka tidak mudah bagi lulusan SMK untuk masuk ke tiga sektor tersebut karena harus bersaing dengan jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu sektor industri mempunyai angka pertumbuhan yang rendah, sehingga kesempatan baru yang tercipta juga menjadi rendah. Implikasinya

lulusan SMK harus mampu bersaing dengan jenjang pendidikan lainnya agar bisa mengisi kesempatan kerja sektor industri.

Gambar 2.2.230

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari seperempat pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar cenderung meningkat selama kurun waktu Tahun 2010 dan 2018. Persentasenya mengalami peningkatan yaitu dari 20,69 persen (2010) menjadi 27,51 persen (2018), dan merupakan persentase tertinggi dibandingkan jabatan lain pada waktu yang sama. Pekerja lulusan SMK di provinsi ini juga banyak yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan, dan persentasenya sedikit di bawah tenaga produksi dan pekerja kasar. Selain itu, pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan persentasenya cenderung meningkat dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2010 dan 2018, dari 18,39 persen menjadi 27,40 persen. Sebaliknya, pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai profesional semakin berkurang persentasenya yaitu dari 12,38 persen pada Tahun 2010, menurun secara cepat hampir dua pertiga, menjadi 4,89 persen pada Tahun 2018.

Gambar 2.2.231

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 dan 2018 (%)

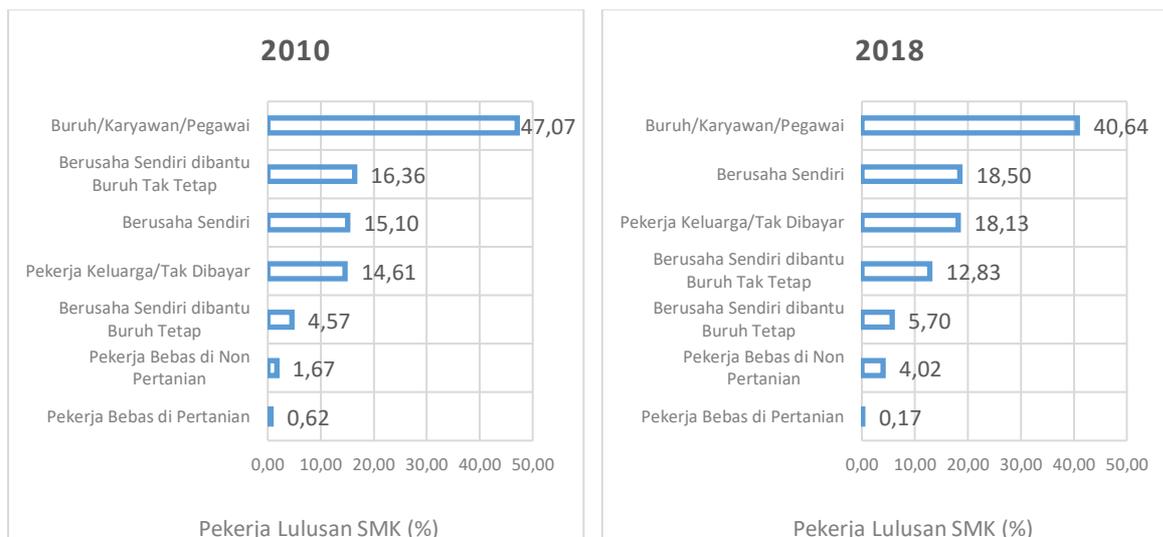


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Namun demikian, selama kurun waktu Tahun 2010 dan 2018, persentasenya cenderung menurun yaitu dari 47,07 persen (2010) menjadi 40,04 persen (2018). Di sisi lain, yang berstatus kerja berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap, persentasenya mengalami peningkatan yaitu dari 4,57 persen pada Tahun 2010 menjadi 5,70 persen pada Tahun 2018.

Gambar 2.2.232

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010 dan 2018 (%)

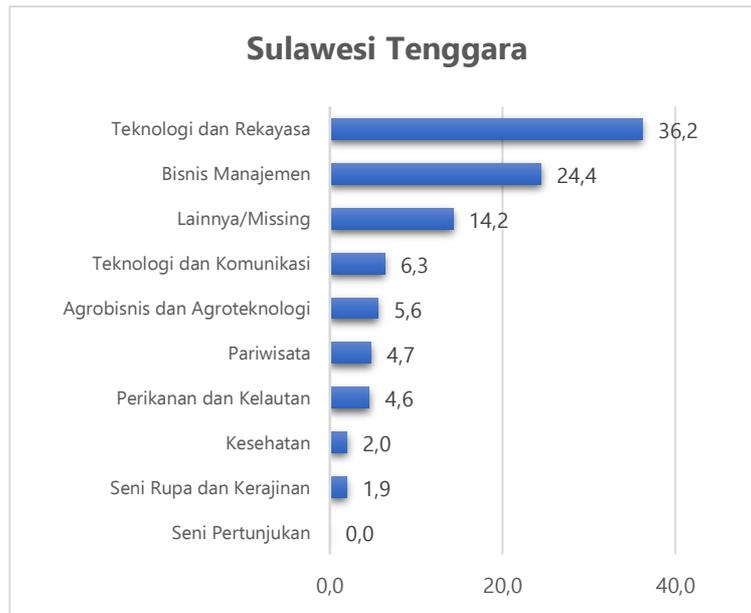


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 36,2 persen, diikuti dengan lulusan

SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 24,4 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara di sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan, dan industri maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, proporsi tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong sektor pertanian masih minim persentasenya yakni hanya 5,6 persen.

Gambar 2.2.233
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 4.2.28
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	12,791	13,397	14,031	14,696	15,391	16,120
Pertambangan	1,509	1,591	1,678	1,770	1,866	1,968
Industri	5,606	5,935	6,284	6,653	7,044	7,457
LGAM	454	477	501	525	551	579
Konstruksi	5,349	5,752	6,185	6,650	7,151	7,689
Perdagangan, Hotel dan Restoran	23,543	25,698	28,051	30,619	33,422	36,482
Transportasi dan Komunikasi	3,211	3,445	3,697	3,966	4,256	4,566
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,826	3,063	3,320	3,598	3,900	4,228
Jasa Kemasyarakatan	11,319	11,717	12,128	12,554	12,995	13,452
Jumlah Tenaga Kerja SMK	66,609	71,075	75,874	81,031	86,576	92,540
Total Tenaga Kerja	1,235,326	1,269,458	1,305,363	1,343,653	1,383,843	1,425,811
Share Tenaga Kerja	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

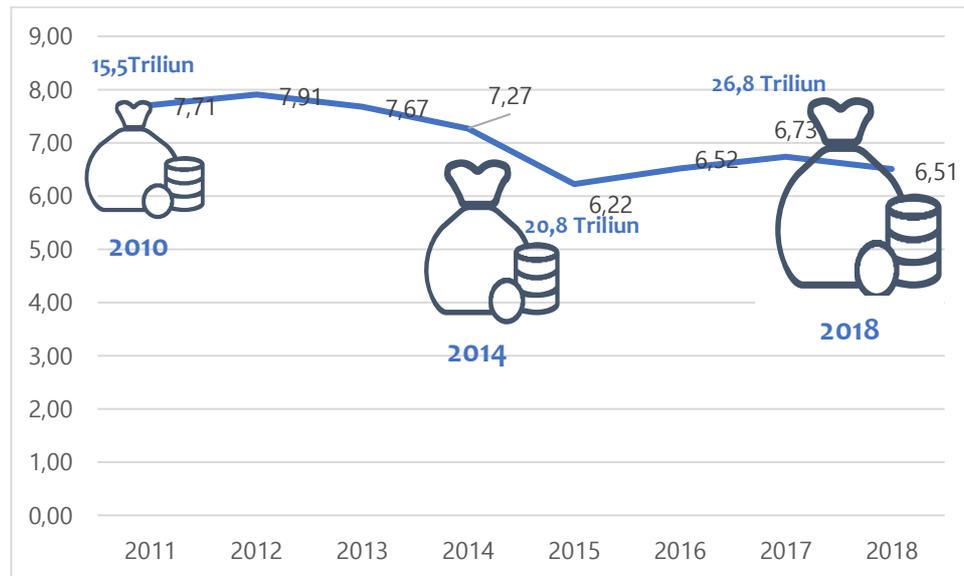


GORONTALO

2.2.29. Provinsi Gorontalo

Gorontalo merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terendah di antara provinsi-provinsi di Sulawesi. Total PDRB Provinsi Gorontalo atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 15,5 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 26,7 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB relatif agak tinggi yakni sebesar 7,07 persen per tahun.

Gambar 2.2.234
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo

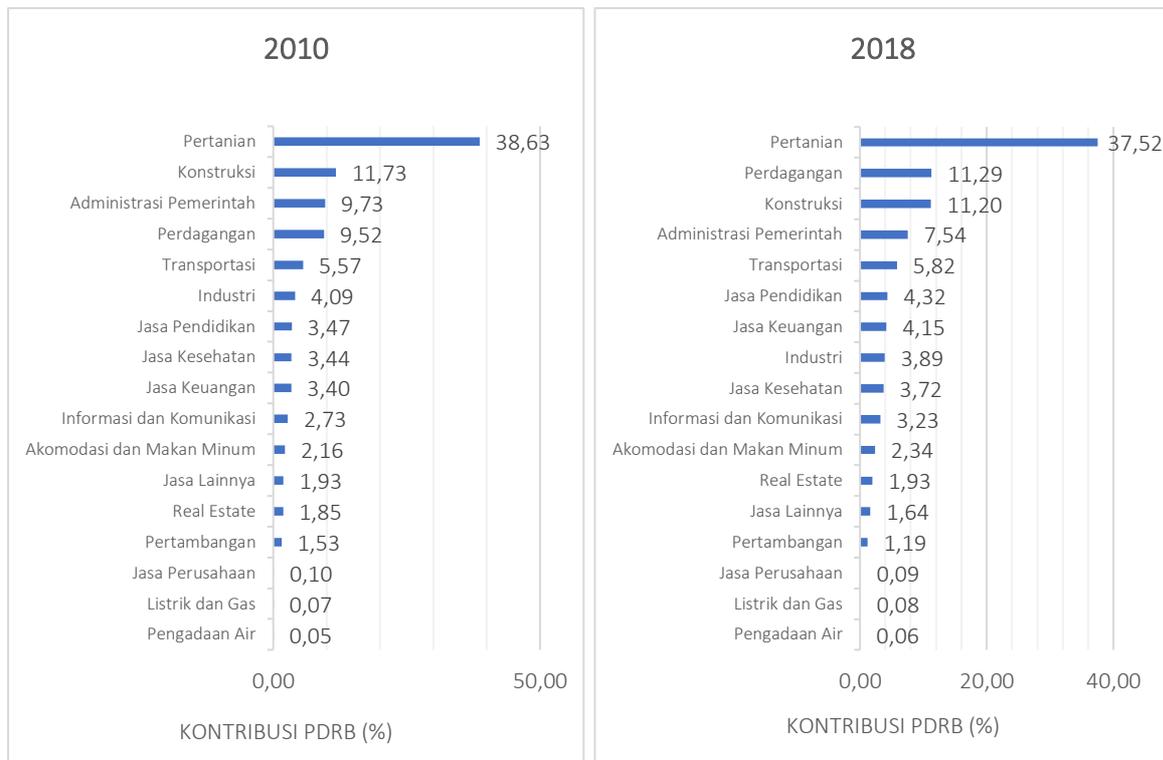


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Struktur PDRB terbesar sama dengan pola provinsi-provinsi di Sulawesi yakni share terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Share sektor pertanian provinsi Gorontalo merupakan yang kedua terbesar setelah provinsi Sulawesi Barat di pulau Sulawesi. Share sektor Pertanian Gorontalo sebesar 37,52 persen di tahun 2018. Setelah sektor Pertanian, kemudian terdapat tiga sektor berikutnya yang mempunyai share PDRB lebih dari 10 persen yakni sektor Perdagangan dan Reparaasi (11,29 persen); dan sektor Konstruksi (12,20 persen).

Tren share sektor Pertanian di Gorontalo berbeda dengan penurunan share sektor pertanian di provinsi-provinsi lain di Sulawesi yang menurun drastis. Pertumbuhan sektor Pertanian yang menyamai angka pertumbuhan PDRB Gorontalo yakni sekitar 6,7 persen, sehingga dapat penurunan share sektor Pertanian provinsi Gorontalo relatif kecil yakni dari 38,63 persen di tahun 2010 menjadi 37,52 persen di tahun 2018. Sebaliknya dalam periode yang sama, share sektor Perdagangan meningkat cukup besar yakni dari 9,52 persen menjadi 11,29 persen. Peningkatan tersebut berkaitan dengan rata-rata pertumbuhan sektor Perdagangan yang cukup tinggi yakni 9,38 persen. Sementara itu tren share sektor Konstruksi relatif konstan sekitar 11,20 persen. Peningkatan share sektor Perdagangan yang cukup besar akan memerlukan penyerapan kesempatan kerja yang tinggi pula.

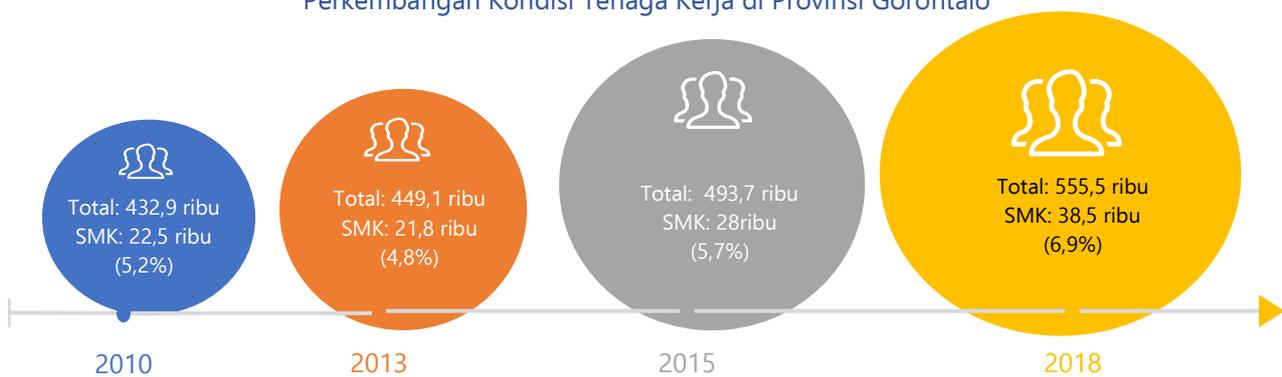
Gambar 2.2.235
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Gorontalo
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2010 adalah sebanyak 22.489 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1.998 orang sehingga menjadi 38.474 orang pada tahun 2018. Di sisi lain, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja tidak terlalu besar namun kian meningkat, di tahun 2010 sebesar 5,2 persen dan menjadi 6,9 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.236
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Gorontalo



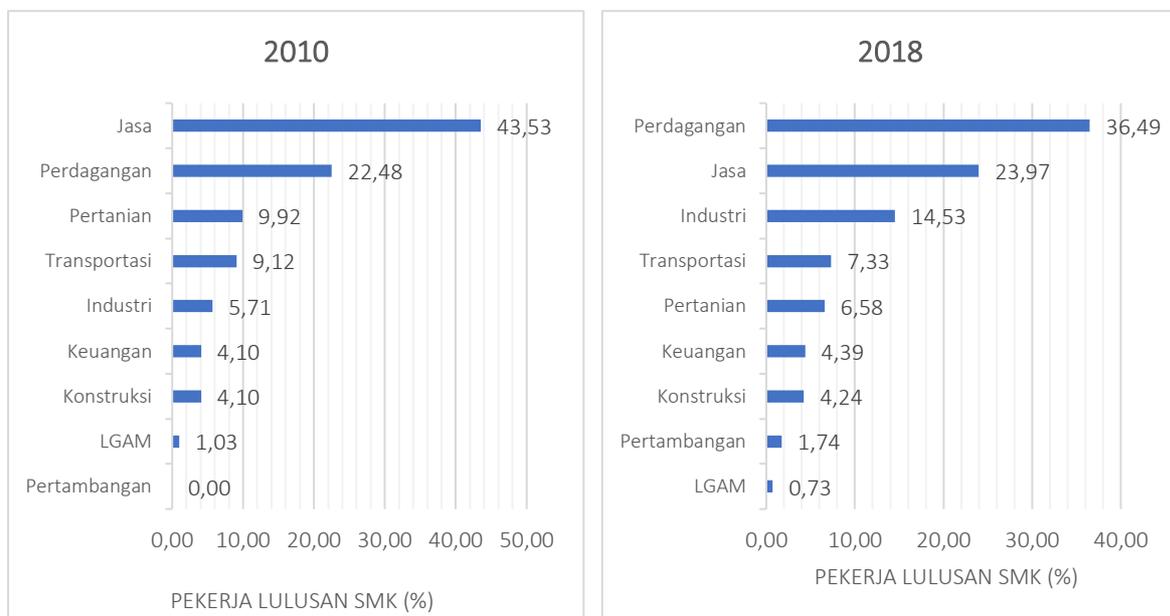
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (43,53 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Gorontalo bekerja di sektor Jasa, kemudian 22,48 persen di sektor Perdagangan, dan 9,92 persen di sektor Pertanian. Di

tahun 2018, struktur yang mendominasi berubah menjadi yang terbesar sektor Perdagangan (37,49 persen) kemudian diikuti dengan sektor Jasa 23,97 persen dan sektor Industri 14,53 persen.

Penurunan lulusan SMK yang bekerja di sektor jasa menurun sangat tajam yakni dari 43,53 persen (tahun 2010) menjadi 36,49 persen (tahun 2018). Ini mengindikasikan bahwa sektor Jasa kurang memberikan kesempatan kerja bagi lulusan SMK. Sektor Pertanian juga menurun tajam dari 9,92 persen menjadi 6,58 persen dalam periode waktu yang sama. Penurunan share pekerja lulusan SMK di sektor Jasa dan sektor Pertanian diikuti dengan peningkatan yang cukup signifikan share pekerja di sektor Perdagangan yakni dari 22,48 persen menjadi 36,49 persen; dan sektor Industri yakni dari 5,71 persen menjadi 14,53 persen. Ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang banyak terbuka luas bagi lulusan SMK adalah di sektor Perdagangan dan sektor Industri, sementara sektor-sektor lain tidak terlalu banyak menjanjikan kesempatan kerja yang besar bagi lulusan SMK di provinsi Gorontalo.

Gambar 2.2.237
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Gorontalo
Tahun 2010 dan 2018 (%)



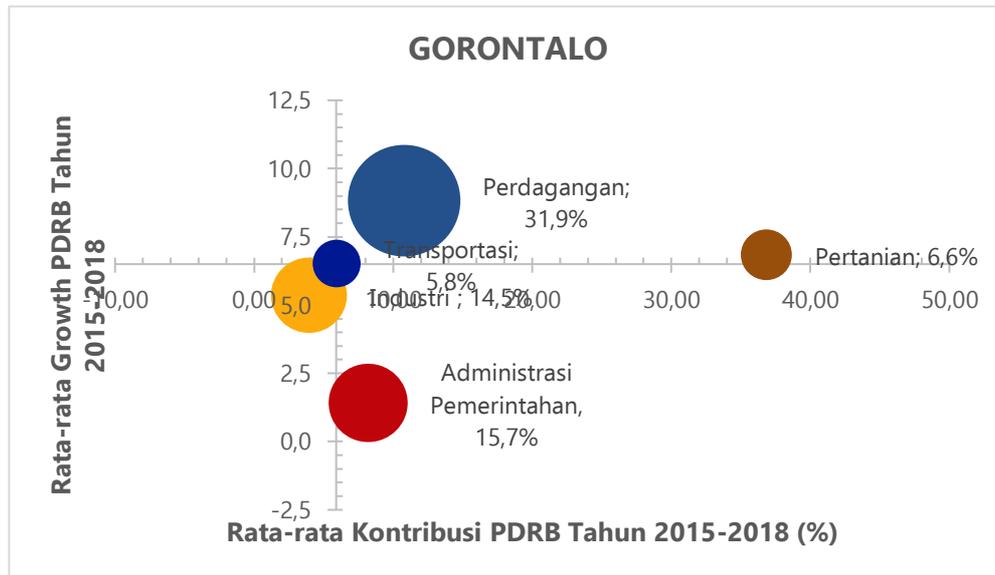
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Gorontalo, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (31,9 persen), administrasi pemerintahan (15,7 persen), industri pengolahan (14,5 persen), pertanian (6,6 persen), dan Transportasi (5,8 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut tertinggi adalah sektor perdagangan, dan terendah adalah sektor administrasi pemerintahan. Sedangkan kontribusi terhadap perekonomian Gorontalo relatif sama, kecuali sektor pertanian yang memiliki kontribusi PDRB relatif lebih besar dibandingkan empat sektor lainnya. Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang penyerapan pekerjanya terbesar, tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Untuk sektor perdagangan, kontribusi dalam perekonomian relatif sama dengan tiga sektor selain pertanian, namun jika dilihat dari pertumbuhannya memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya. Sebaliknya, sektor administrasi pemerintahan memiliki kontribusi dalam PDRB Gorontalo

relatif sama dengan tiga sektor lainnya selain pertanian, namun pertumbuhannya terendah jika dibandingkan dengan empat sektor lainnya.

Gambar 2.2.238

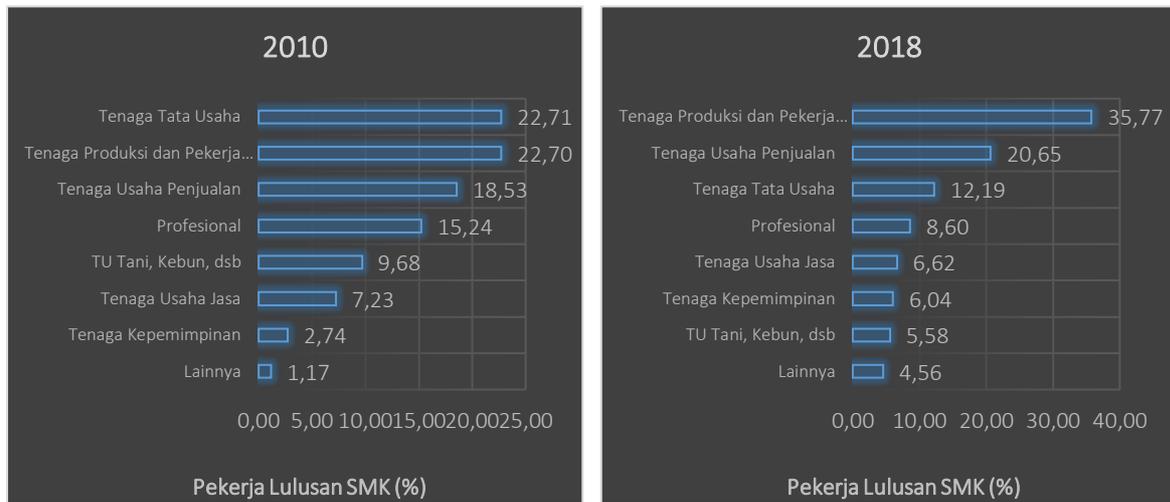
Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Gorontalo



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari sepertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Gorontalo bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Pekerja lulusan SMK yang bekerja pada jenis pekerjaan tersebut pada kurun waktu Tahun 2010 dan 2018, persentasenya meningkat, yaitu dari 22,70 persen (2010) menjadi 35,77 persen (2018). Selain itu, pekerja lulusan SMK di provinsi ini juga banyak yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan, dan cenderung meningkat persentasenya yaitu dari 18,53 persen pada Tahun 2010, menjadi 20,65 persen pada Tahun 2018.

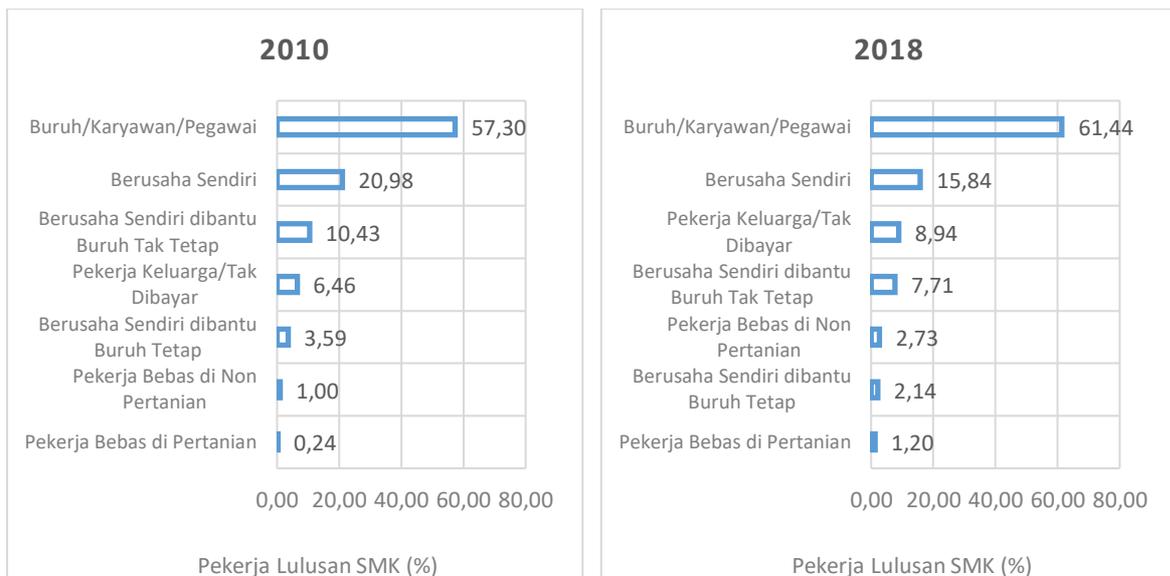
Gambar 2.2.239
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Gorontalo
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di Provinsi Gorontalo berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan persentasenya cenderung meningkat pada kurun waktu 2010 dan 2018 yaitu dari 57,30 persen menjadi 61,44 persen. Tingginya persentase yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mengindikasikan sebagian besar pekerja lulusan SMK di provinsi ini adalah pekerja formal.

Gambar 2.2.240
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Gorontalo
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

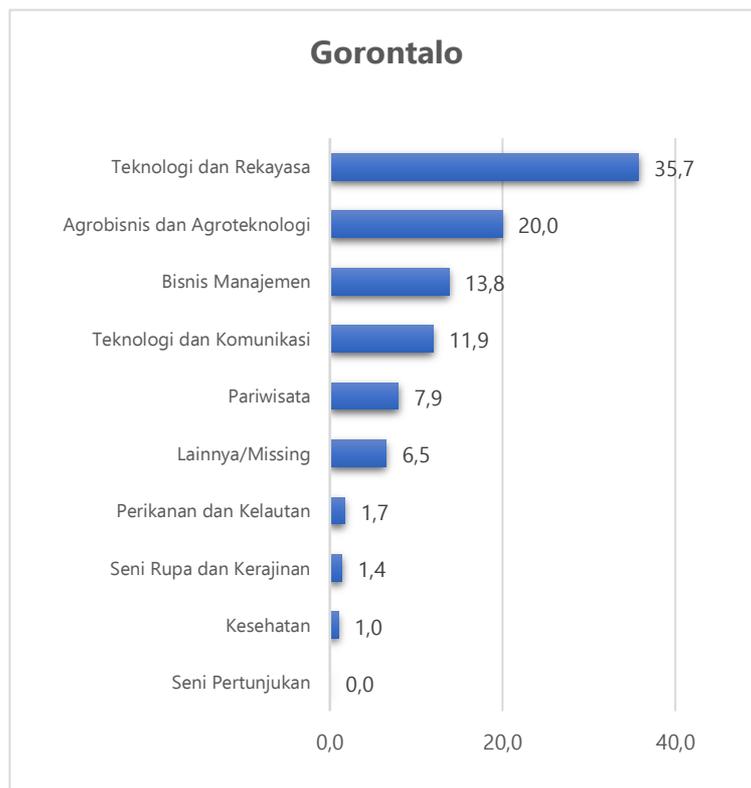
Walaupun sebagian pekerja lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap cenderung menurun persentasenya, yaitu dari 3,59 persen (2010) menjadi 2,14 persen (2018). Namun hanya sedikit

memengaruhi terhadap besarnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja formal. Hal ini disebabkan lebih dari separuh yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Di sisi lain, peningkatan persentase lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja formal memengaruhi turunnya persentase lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja informal. Sayangnya, pekerja keluarga/ tak dibayar persentasenya cenderung meningkat yaitu dari 6,46 persen pada Tahun 2010 menjadi 8,94 persen pada Tahun 2018.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Gorontalo, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 35,7 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi yakni sebesar 20,0 persen, serta Bisnis Manajemen sebesar 13,8 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo di sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi maka ketiga bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Gorontalo. Share tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi relatif besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Gambar 2.2.241
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Gorontalo
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.29
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	2,682	2,841	3,010	3,190	3,379	3,581
Pertambangan	680	693	706	719	732	746
Industri	5,912	6,249	6,606	6,984	7,383	7,805
LGAM	298	317	336	357	378	402
Konstruksi	1,717	1,805	1,898	1,996	2,098	2,206
Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,340	16,764	18,319	20,018	21,875	23,905
Transportasi dan Komunikasi	3,022	3,238	3,469	3,717	3,983	4,268
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,852	2,031	2,228	2,443	2,680	2,940
Jasa Kemasyarakatan	9,520	9,828	10,145	10,472	10,809	11,158
Jumlah Tenaga Kerja SMK	41,023	43,765	46,717	49,895	53,319	57,009
Total Tenaga Kerja	566,453	578,299	590,361	603,021	615,887	629,195
Share Tenaga Kerja	7.2	7.6	7.9	8.3	8.7	9.1

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



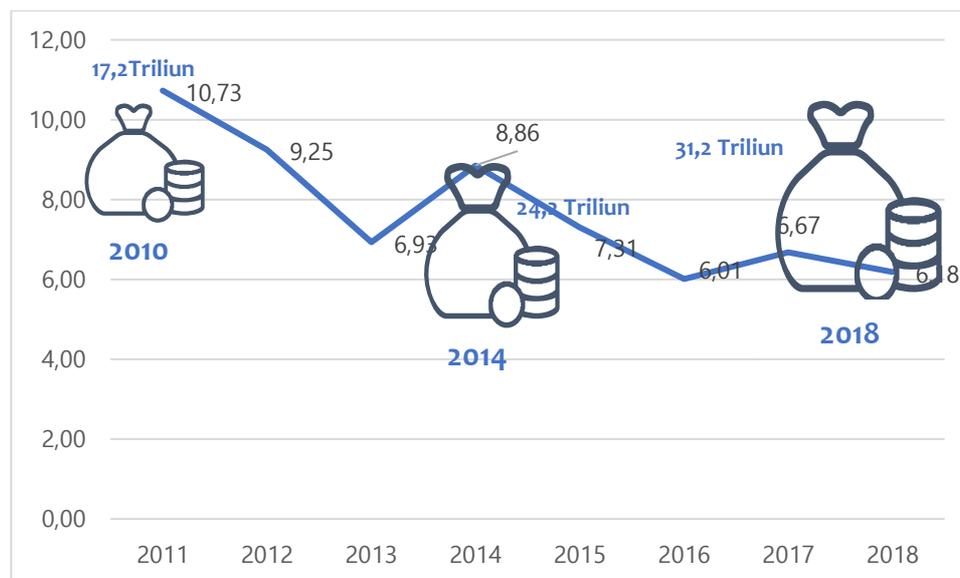
SULAWESI BARAT

2.2.30. Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat merupakan provinsi yang termuda dibandingkan dengan kelima provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Meskipun provinsi termuda, Sulawesi Barat mempunyai PDRB menempati kedua terendah setelah provinsi Gorontalo di Sulawesi. Total PDRB Provinsi Sulawesi Barat atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 17,2 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 31,2 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB relatif agak tinggi yakni sebesar 7,74 persen per tahun.

Gambar 2.2.242

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat



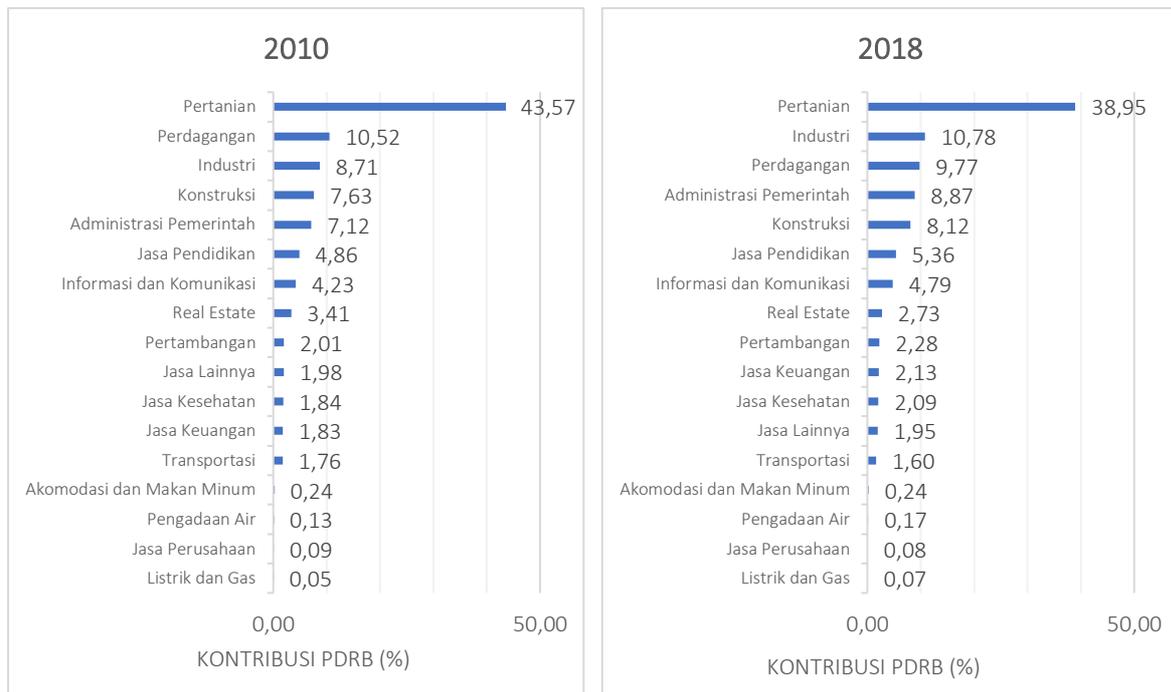
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Struktur PDRB terbesar sama dengan pola provinsi-provinsi di Sulawesi yakni share terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Share sektor pertanian provinsi Sulawesi Barat merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain yang ada di pulau Sulawesi yakni 38,95 persen di tahun 2018. Setelah sektor Pertanian, hanya sektor Industri Pengolahan yang mempunyai share PDRB yang mencapai dua digit, yakni sebesar 10,78 persen.

Tren share sektor Pertanian di Sulawesi Barat, meskipun memberikan kontribusi yang sangat tinggi, namun trennya menunjukkan penurunan. Penurunan sharenya cukup drastis, yakni dari 43,57 persen di tahun 2010 menjadi 38,95 persen di tahun 2018. Hal ini disebabkan angka pertumbuhan sektor pertanian yang berada dibawah angka pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat yakni 6,24 persen. Sebaliknya dalam periode yang sama, share sektor Industri meningkat cukup besar yakni dari 8,71 persen menjadi 10,78 persen. Peningkatan tersebut berkaitan dengan rata-rata pertumbuhan sektor Industri yang cukup tinggi mencapai dua digit yakni 11,1 persen.

Gambar 2.2.243

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)

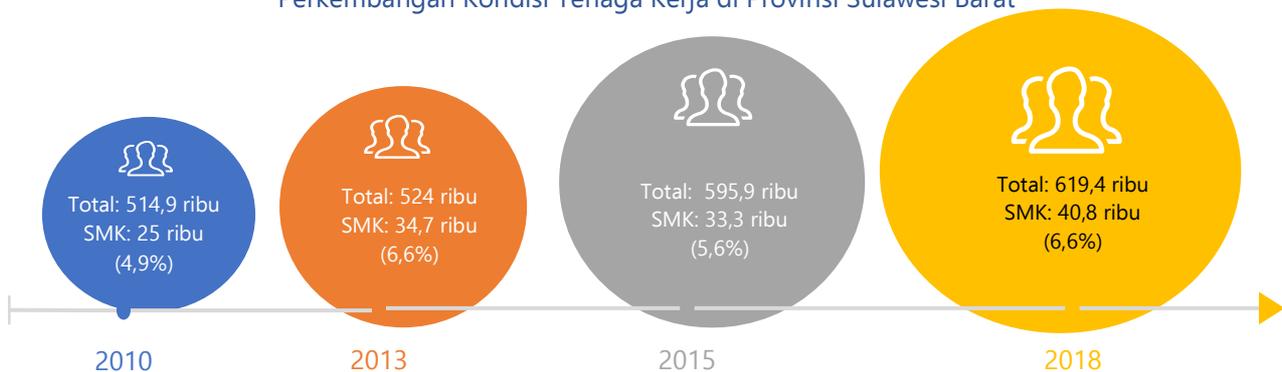


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Sektor lain yang mempunyai angka pertumbuhan sektor mencapai dua digit adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (12,65 persen, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampak/Limbah (11,62 persen) dan sektor Administrasi Pemerintahan (10,87 persen). Namun karena share ketiga sektor tersebut relatif kecil maka tidak terlalu berpengaruh pada perubahan struktur PDRB sektor provinsi Kalimantan Barat. Sektor-sektor yang potensial menyerap tenaga kerja adalah sektor Industri karena sharenya relatif besar dan semakin membesar.

Gambar 2.2.244

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

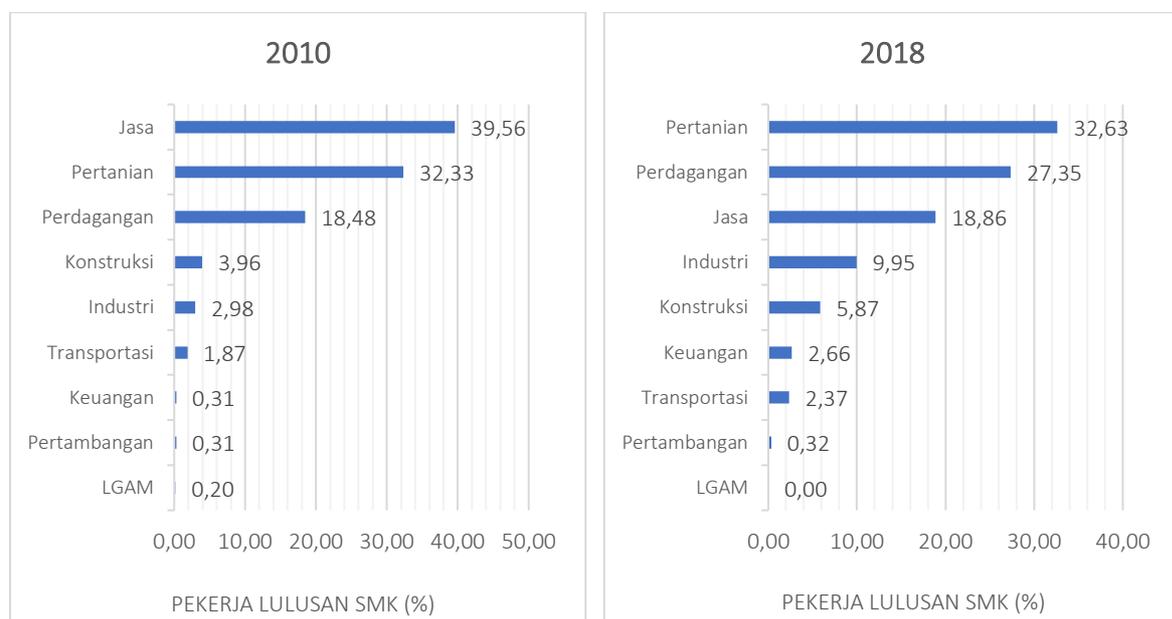
Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat merupakan terkecil kedua setelah provinsi Gorontalo, diantara provinsi-provinsi di Sulawesi. Pada Tahun 2010 jumlah pekerja lulusan SMK

sebanyak 25.026 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1.969 orang sehingga menjadi 40.775 orang pada tahun 2018.

Pada Tahun 2010, sebagian besar (39,56 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat bekerja di sektor Jasa, kemudian 32,33 persen di sektor Pertanian, dan 18,48 persen di sektor Perdagangan. Di tahun 2018, struktur tenaga kerja lulusan SMK di sembilan sektor mengalami perubahan menjadi sektor Pertanian (32,63 persen) yang terbesar, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan (27,35 persen) dan sektor Jasa (18,86 persen). Kondisi pekerja di sektor Pertanian di Sulawesi Barat berbeda dengan pola pada umumnya dimana pesentase lulusan SMK yang bekerja di sektor Pertanian stagnan pada angka 32,63 persen, sementara yang bekerja di sektor Jasa menurun tajam. Akibatnya, pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor Pertanian menjadi dominan.

Secara absolut, jumlah pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor Pertanian juga masih meningkat. Ini menunjukkan bahwa lulusan SMK masih tertarik untuk bekerja di sektor Pertanian. Sektor Perdagangan juga merupakan sektor yang membuka kesempatan kerja lebar lulusan SMK dan lulusan SMK menerima tawaran tersebut. Ini terlihat dari persentase lulusan SMK yang bekerja di sektor Perdagangan yang meningkat pesat selama periode 2010-2018 dari 18,48 persen menjadi 27,35 persen. Terdapat 2 sektor yang juga potensial memberikan kesempatan kerja lulusan SMK adalah sektor Industri dan sektor Konstruksi .

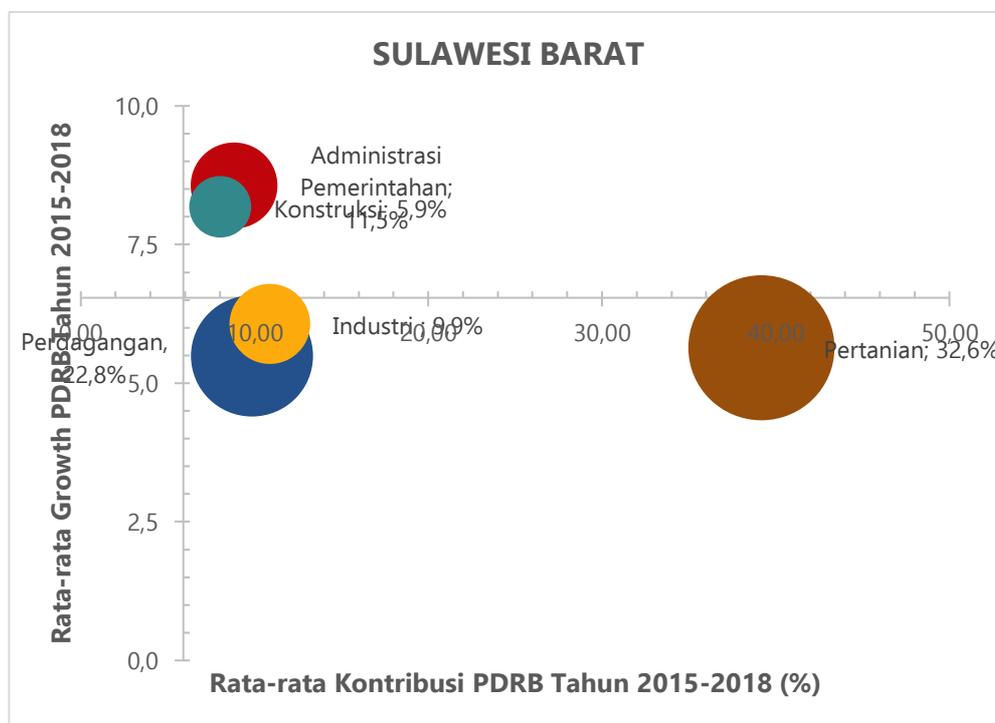
Gambar 2.2.245
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Gambar 2.2.246

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Sulawesi Barat

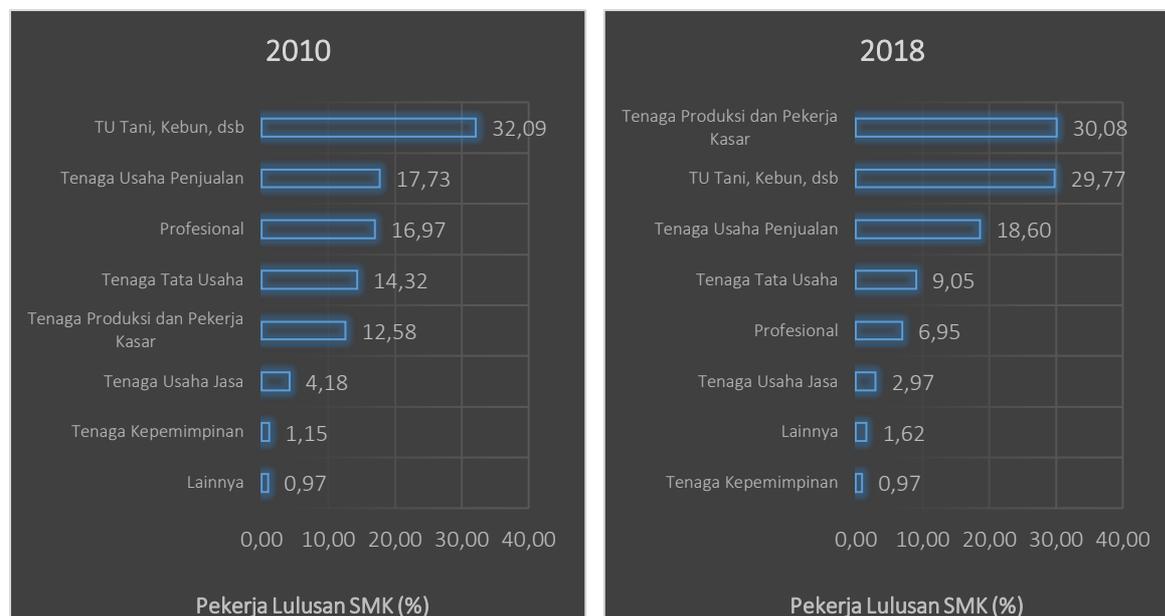


Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah pertanian (32,6 persen), perdagangan (22,8 persen), administrasi pemerintahan 11,5 persen, industri (9,9 persen), dan konstruksi 5,9 persen. Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut relatif sama, kecuali sektor administrasi pemerintahan yang memiliki kontribusi PDRB tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya. Namun jika dilihat dari kontribusinya, sektor pertanian yang memiliki kontribusi paling besar, sedangkan empat sektor lainnya, relatif sama.

Jika dibandingkan kontribusi dan pertumbuhan kelima sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor yang penyerapan pekerjaanya terbesar, tidak berarti memiliki kontribusi dan pertumbuhan yang tinggi. Untuk sektor pertanian, kontribusi dalam perekonomian cukup tinggi, namun jika dilihat dari pertumbuhannya relatif sama bahkan lebih rendah dibandingkan sektor administrasi pemerintahan. Sebaliknya, sektor administrasi pemerintahan memiliki kontribusi dalam PDRB Sulawesi Barat relatif sama dengan tiga sektor lainnya selain pertanian, namun pertumbuhannya tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya.

Gambar 2.2.247
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

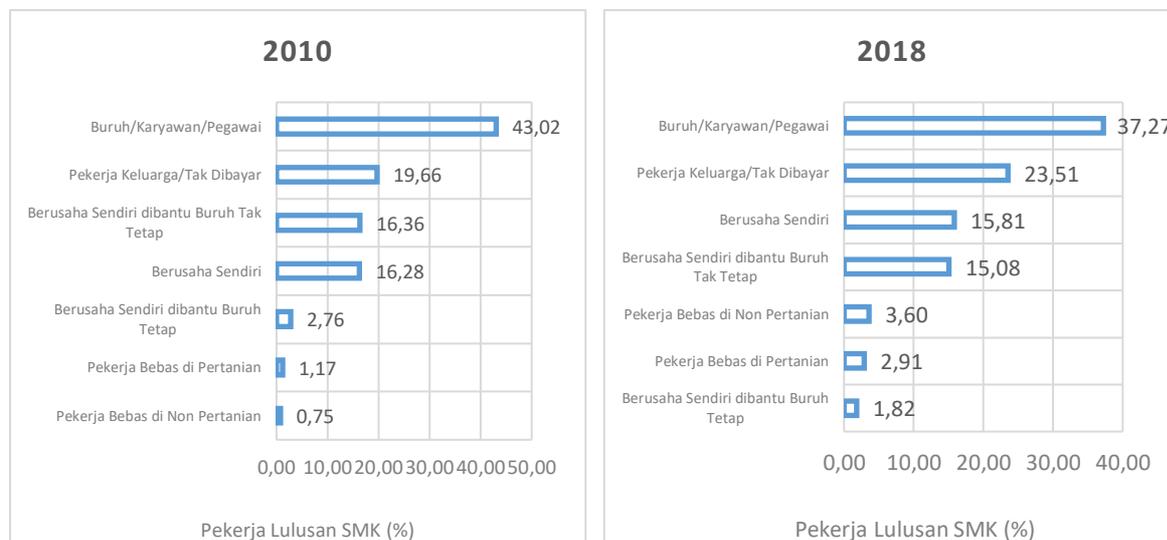
Sepertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Dalam perkembangannya, persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja pada jenis pekerjaan tersebut meningkat pesat dalam kurun waktu Tahun 2010 dan 2018, yaitu dari 12,58 persen (2010) menjadi 30,08 persen (2018). Sebaliknya, yang bekerja pada bidang Tata Usaha Tani, kebun dan sebagainya, dalam kurun waktu yang sama, persentasenya semakin menurun yaitu dari 32,09 persen (2010) menjadi 29,77 persen (2018).

Selain itu, pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai tenaga usaha penjualan juga cenderung meningkat yaitu dari 17,73 persen (2010) menjadi 18,60 persen (2018). Sayangnya, yang berkakrir sebagai profesional dan tenaga kepemimpinan cenderung semakin menurun persentasenya. Persentase pekerja lulusan SMK yang memiliki jabatan sebagai profesional menurun cukup cepat yaitu dari 16,97 persen (2010) menjadi 6,95 persen (2018).

Lebih lanjut, lebih dari sepertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan dalam kurun waktu Tahun 2010 dan 2018, persentasenya cenderung menurun. Demikian pula yang berstatus kerja berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap, persentasenya juga cenderung menurun. Kondisi ini memengaruhi semakin turunnya persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus kerja sebagai pekerja formal. Sebaliknya, sektor informal yang seringkali disebut sebagai penyelamat ekonomi rakyat, menjadi pilihan bagi sebagian besar pekerja lulusan SMK di provinsi ini, yang persentasenya cenderung meningkat dalam kurun waktu Tahun 2010 dan 2018. Peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja informal, banyak disumbang oleh pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai pekerja keluarga/ tak dibayar yang persentasenya cukup besar dan cenderung meningkat yaitu dari 19,66 persen (2010) menjadi 23,51 persen (2018).

Gambar 2.2.248

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

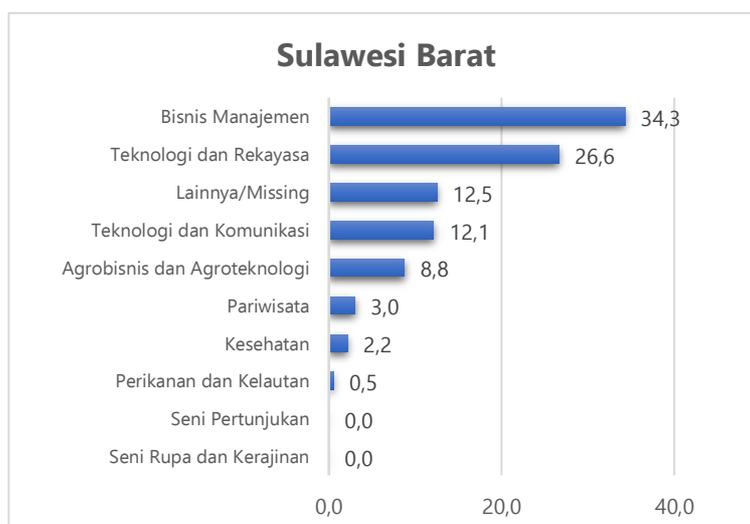


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Bisnis Manajemen paling besar proporsinya yakni 34,3 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa yakni sebesar 26,6 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat di sektor pertanian, industri, perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut sesuai dengan potensi Provinsi Sulawesi Barat. Share tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi juga cukup besar (8,8 persen) yang dapat menyokong sektor pertanian.

Gambar 2.2.249

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.30
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	14,036	14,808	15,622	16,482	17,388	18,345
Pertambangan	136	142	149	156	163	171
Industri	4,449	4,881	5,354	5,873	6,443	7,068
LGAM	-	-	-	-	-	-
Konstruksi	2,554	2,727	2,911	3,108	3,318	3,543
Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,910	12,716	13,578	14,497	15,479	16,528
Transportasi dan Komunikasi	1,037	1,112	1,194	1,281	1,375	1,475
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,161	1,243	1,331	1,426	1,527	1,635
Jasa Kemasyarakatan	8,083	8,496	8,931	9,388	9,869	10,374
Jumlah Tenaga Kerja SMK	43,365	46,126	49,071	52,212	55,563	59,139
Total Tenaga Kerja	633,841	649,129	665,121	681,862	699,464	717,609
Share Tenaga Kerja	6.8	7.1	7.4	7.7	7.9	8.2

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

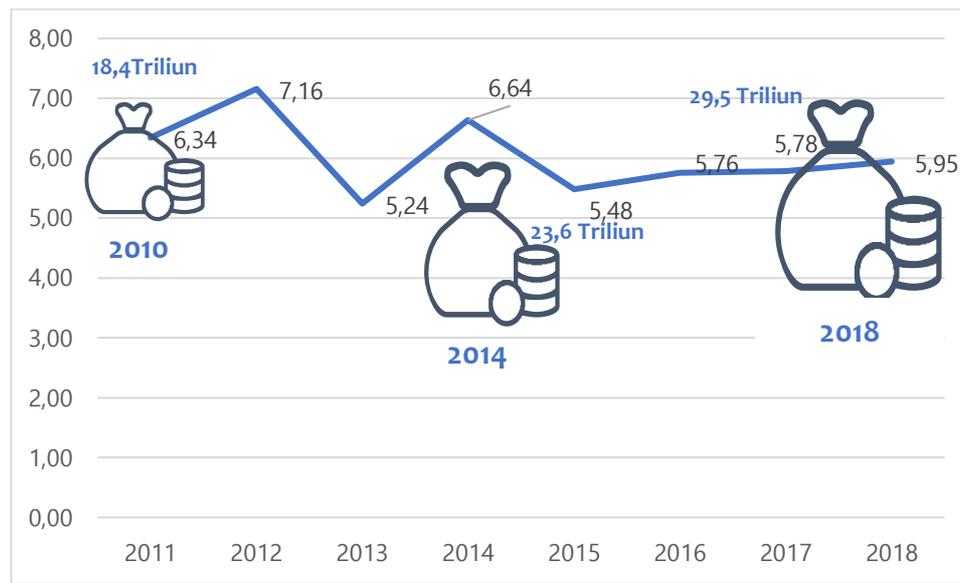


MALUKU

2.2.31. Provinsi Maluku

Provinsi Maluku dengan karakteristik pulau-pulau kecil mempunyai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 18,4 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 29,6 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB tidak terlampau tinggi yakni 6,04 persen per tahun.

Gambar 2.2.250
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku



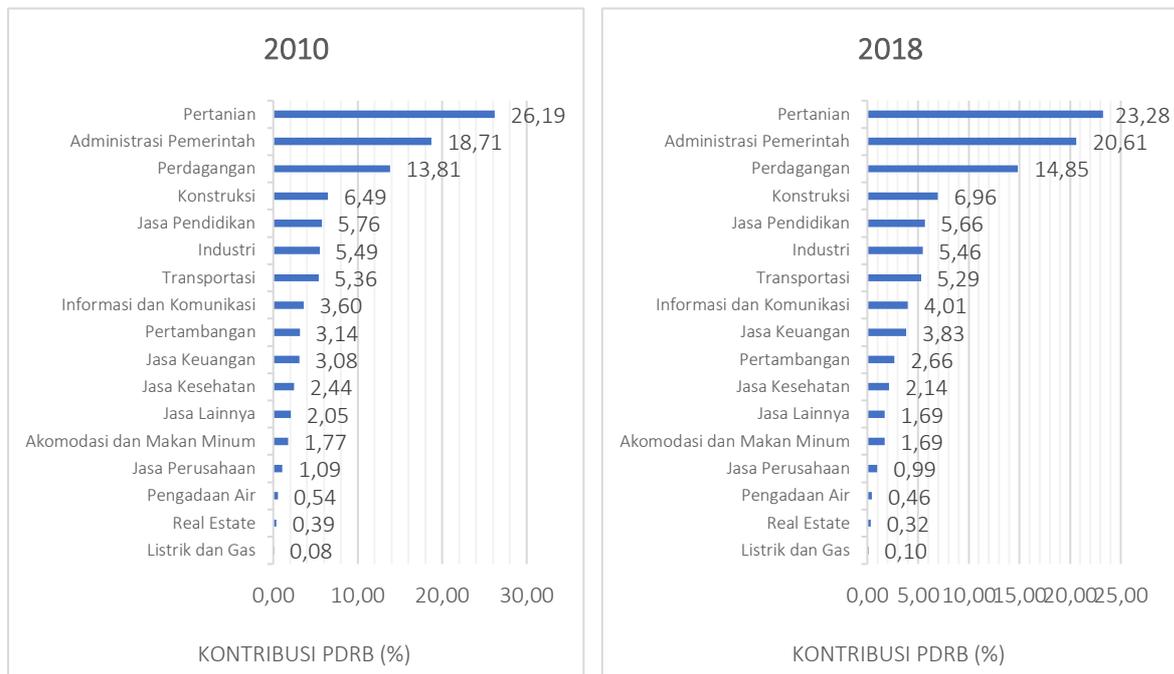
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Struktur PDRB terbesar sama dengan pola provinsi-provinsi di Indonesia Timur pada umumnya yakni share terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Share sektor pertanian provinsi Maluku sebesar 23,28 persen di tahun 2018. Dengan kondisi daerah yang lebih banyak laut, maka potensi sektor Perikanan tangkap sangat berperan dalam Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Setelah sektor Pertanian, terdapat dua sektor yang mempunyai share pada level dua digit, yakni sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (20,61 persen) dan sektor perdagangan dan Reparasi (14,85 persen) di tahun 2018.

Tingginya share sektor Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa peran swasta dalam kegiatan perekonomian masih kurang begitu berkembang. Ini juga mengindikasikan bahwa kesempatan kerja dari sektor swasta juga kurang berkembang. Tren share sektor Pertanian di Maluku, juga menurun drastis yakni dari 26,19 persen di tahun 2010 menjadi 23,28 persen. Sementara itu peningkatan share sektor Perdagangan dan Reparasi relatif kecil yakni dari 13,81 persen menjadi 14,85 persen.

Dilihat dari pertumbuhannya, angka pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa juga tidak terlalu tinggi (7,02 persen). Sektor lain yang mempunyai angka pertumbuhan cukup besar walaupun tidak mencapai dua digit adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (12,65 persen), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (9,04 persen).. Namun karena share kedua sektor tersebut relatif kecil maka tidak mampu mendorong perubahan struktur PDRB provinsi Maluku. Dengan demikian sektor yang potensial dalam memberikan kesempatan kerja adalah sektor Perdagangan dan Reparasi.

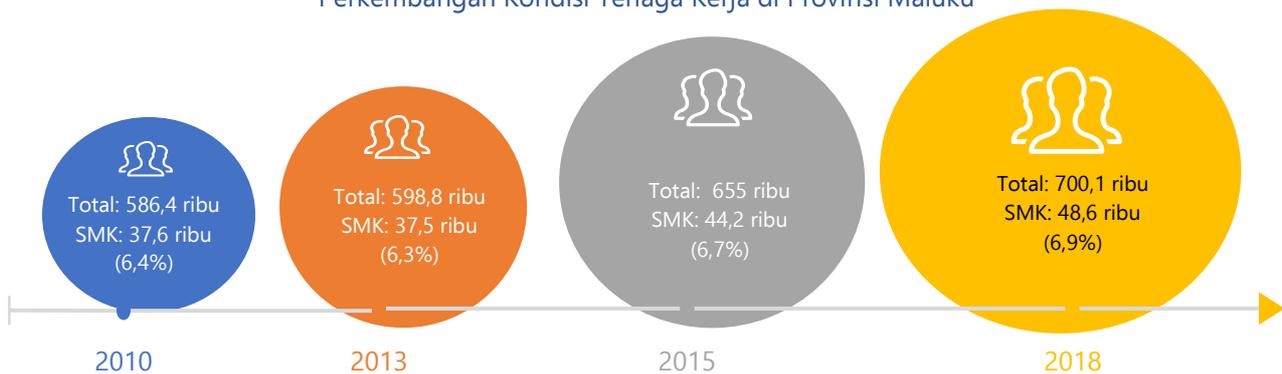
Gambar 2.2.251
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Maluku

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku pada Tahun 2010 sebanyak 37.606 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1.374 orang sehingga menjadi 48.594 orang pada tahun 2018. Di sisi lain, share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja relatif konstan sekitar 6-7 persen.

Gambar 2.2.252
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Maluku

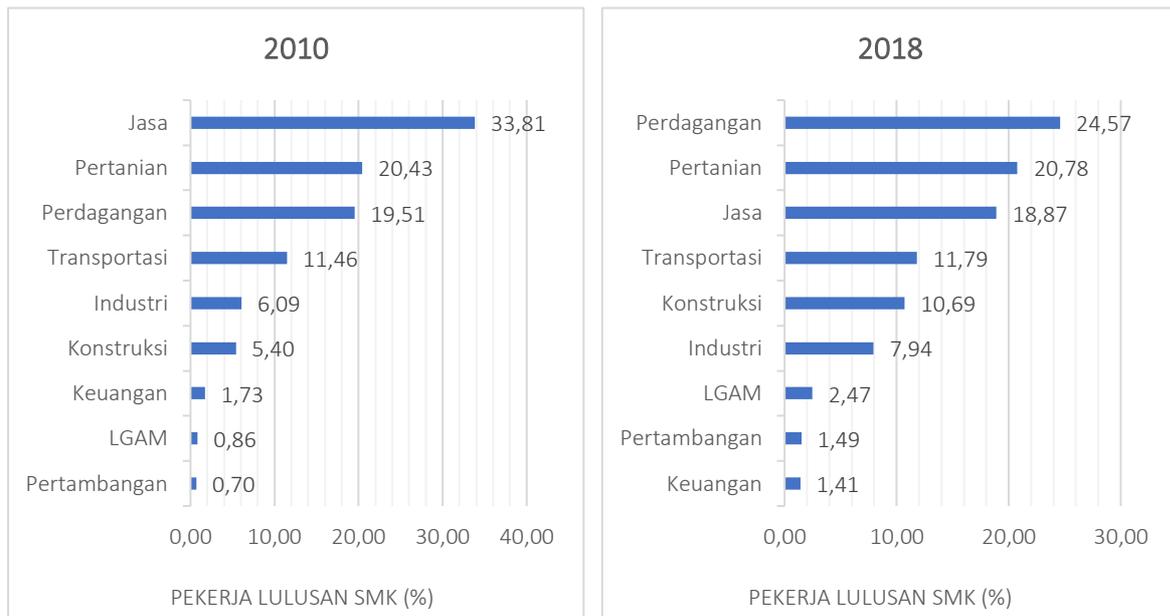


Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (26,19 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku bekerja di sektor Pertanian, kemudian 18,71 persen di sektor Administrasi Pemerintahan, dan 13,81 persen di sektor Perdagangan. Di tahun 2018, struktur tenaga kerja lulusan SMK yang bekerja menurut sektor tidak berbeda dengan struktur tahun 2010. Nampaknya kegiatan ekonomi sektor swasta kurang berkembang di provinsi Maluku sehingga variasi kesempatan kerja bagi lulusan SMK masih terbatas.

Berbeda sekali dengan pola-pola provinsi di Indonesia Timur yang umumnya sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup tajam dan kemudian sektor-sektor lainnya meningkat dengan pesat. Persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor Pertanian menurun hanya tiga poin persen, sementara sektor-sektor lainnya tidak cukup berkembang untuk menyerap pekerja lulusan SMK. Kegiatan pemerintahan yang masih mendominasi membutuhkan pekerja lulusan SMK, kemudian diikuti sektor Perdagangan.

Gambar 2.2.253
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku
Tahun 2010 dan 2018 (%)

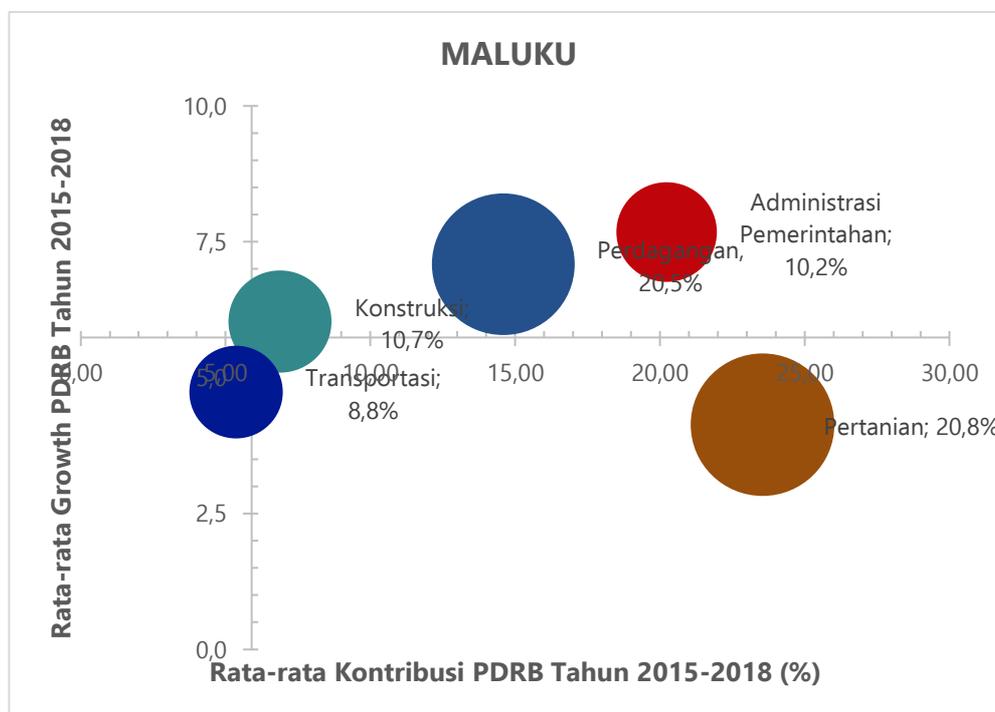


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah pertanian (20,8 persen), perdagangan (20,5 persen), konstruksi (10,7 persen), administrasi pemerintahan (10,2 persen), industri (9,9 persen), dan transportasi (8,8 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut relatif sama, kecuali sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan PDRB terendah dibandingkan empat sektor lainnya. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku, sektor pertanian dan administrasi pemerintahan memiliki kontribusi PDRB yang relatif sama dan cukup tinggi kontribusinya. Sedangkan sektor yang kontribusinya relatif sama dan terendah dibandingkan tiga sektor lainnya adalah sektor konstruksi dan transportasi.

Gambar 2.2.254

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Maluku



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari sepertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar, yang persentasenya cenderung meningkat dalam kurun waktu Tahun 2010 dan 2018 yaitu dari 26,43 persen menjadi 33,48 persen. Pekerja lulusan SMK di provinsi ini sebagian besar menekuni pekerjaan sejenis tenaga usaha seperti Tenaga Usaha Tani, kebun dan sebagainya, Tenaga Usaha Penjualan, Tenaga Tata Usaha, Tenaga Usaha Jasa, yang persentasenya cenderung meningkat pada kurun waktu Tahun 2010 dan 2018.

Sebaliknya penurunan persentase cukup tajam terjadi pada pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai profesional yaitu dari 23,98 persen (2010) menjadi 7,0 persen (2018). Pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepeimimpinan persentasenya relatif sangat kecil dan merupakan persentase terendah dibandingkan jabatan lainnya, namun cenderung ada peningkatan dalam kurun waktu 2010 dan 2018 yaitu dari 0,87 persen menjadi 1,67 persen.

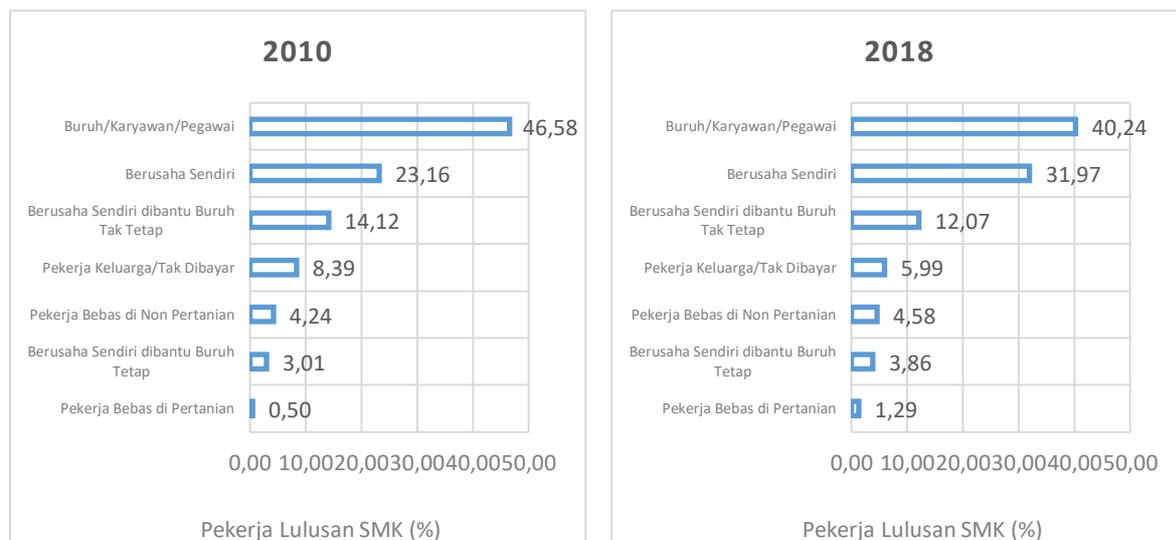
Gambar 2.2.255
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Maluku
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, lebih dari sepertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai cenderung turun pada kurun waktu 2010 dan 2018 yaitu dari 46,58 persen menjadi 40,24 persen. Selain itu, walaupun ada peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap yaitu dari 3,01 persen (2010) menjadi 3,86 persen (2018).

Gambar 2.2.256
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Maluku
Tahun 2010 dan 2018 (%)



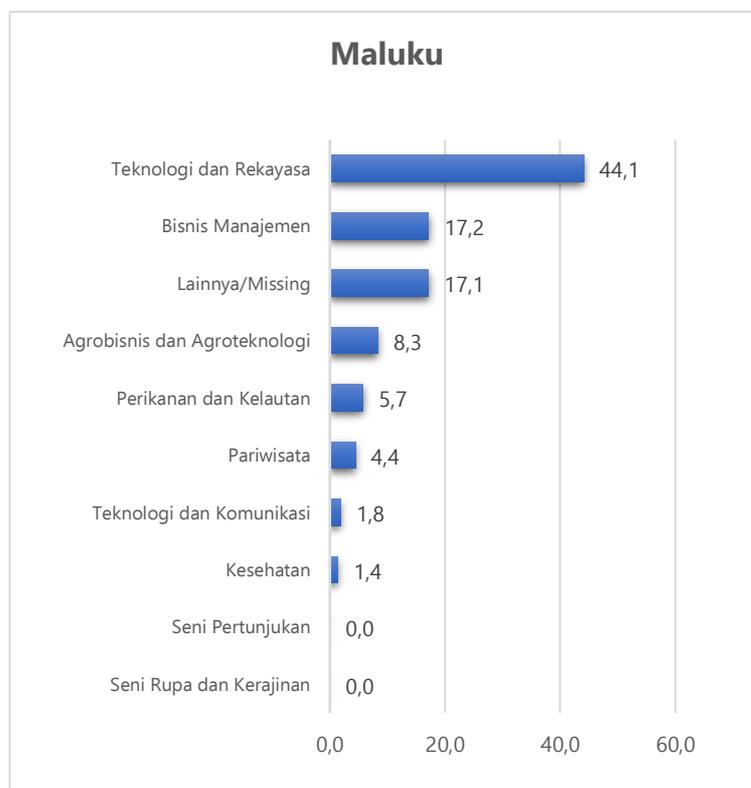
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Ini berarti, persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor formal masih di bawah lima puluh persen atau belum mencapai separuh dari seluruh pekerja lulusan SMK di provinsi ini. Turunnya

persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor formal memengaruhi peningkatan persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor informal yang sebagian disumbang oleh semakin banyaknya lulusan SMK yang berusaha sendiri. Selain itu, semakin sedikit lulusan SMK yang bekerja ak dibayar atau sebagai pekerja keluarga.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Maluku, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 44,1 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 17,2 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Maluku di sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan perdagangan, maka kedua bidang keahlian tersebut ada yang sesuai dengan potensi Provinsi Maluku, yakni bisnis manajemen. Share tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi juga cukup besar (8,3 persen) yang dapat menyokong sektor pertanian.

Gambar 2.2.257
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Maluku
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.31
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	10,502	10,921	11,358	11,812	12,284	12,775
Pertambangan	739	754	769	785	801	817
Industri	4,060	4,274	4,500	4,737	4,987	5,249
LGAM	1,235	1,274	1,313	1,354	1,396	1,439
Konstruksi	5,479	5,778	6,093	6,426	6,777	7,147
Perdagangan, Hotel dan Restoran	12,759	13,634	14,569	15,568	16,636	17,777
Transportasi dan Komunikasi	6,047	6,384	6,741	7,117	7,514	7,933
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	739	798	862	931	1,006	1,086
Jasa Kemasyarakatan	9,486	9,811	10,148	10,496	10,856	11,228
Jumlah Tenaga Kerja SMK	51,045	53,628	56,353	59,226	62,256	65,453
Total Tenaga Kerja	712,762	729,415	747,242	764,987	783,669	803,333
Share Tenaga Kerja	7.2	7.4	7.5	7.7	7.9	8.1

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



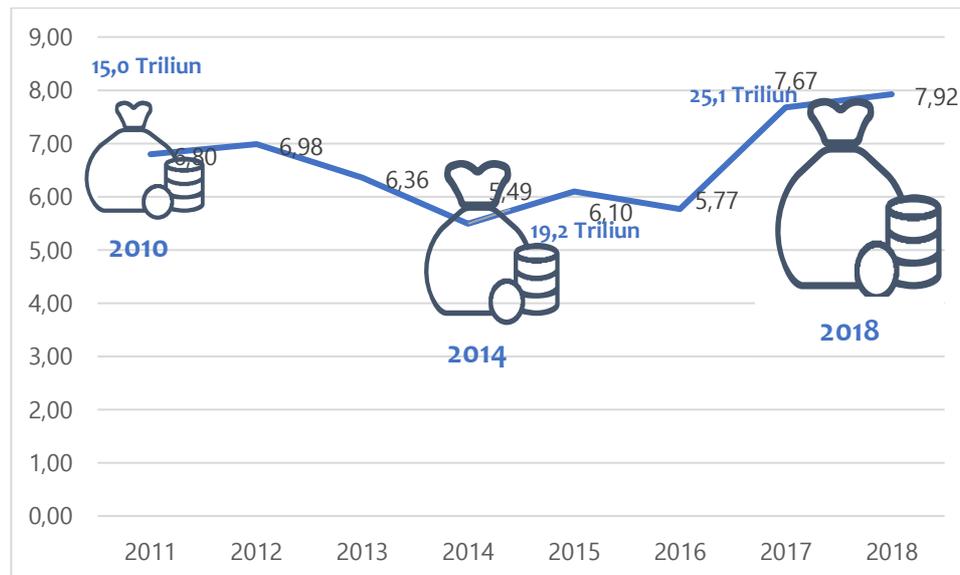
MALUKU UTARA

2.2.32. Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku Utara merupakan pemekaran provinsi Maluku. PDRB Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan Maluku. PDRB Maluku Utara atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 14,98 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 25,05 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB relatif rendah yakni 6,64 persen per tahun.

Gambar 2.2.258

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara



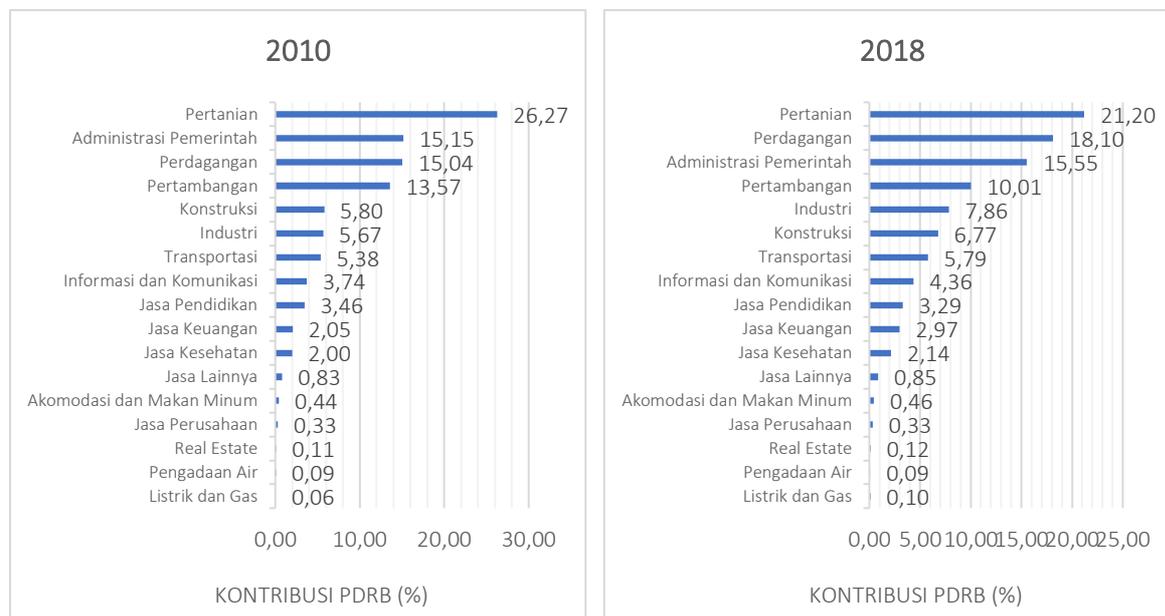
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Struktur PDRB terbesar sama dengan pola provinsi-provinsi di Indonesia Timur pada umumnya yakni share terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Share sektor pertanian provinsi Maluku Utara 21,20 persen di tahun 2018. Setelah sektor Pertanian, terdapat tiga sektor yang mempunyai share pada level dua digit, yakni sektor Perdagangan dan Reparasi (18,10 persen), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15,55 persen) dan sektor Pertambangan dan Penggalan (10,01 persen) di tahun 2018.

Share sektor Administrasi Pemerintahan menempati urutan ketiga menunjukkan bahwa peran swasta dalam kegiatan perekonomian juga masih belum cukup dominan. Sementara itu, tren sektor Pertanian di Maluku Utara, juga menurun drastis yakni dari 26,27 persen di tahun 2010 menjadi 21,20 persen. Penurunan share sektor Pertanian dibarengi dengan peningkatan share di sektor jasa, seperti sektor Perdagangan dan Reparasi, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan komunikasi. Peningkatan share juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan.

Sektor jasa yang menunjukkan peningkatan yang cukup besar terjadi pada sektor Perdagangan dan Reparasi, yakni meningkat dari 15,04 persen menjadi 18,10 persen. Sementara itu share sektor Pertambangan dan Penggalan menunjukkan share yang terus menurun yakni dari 13,57 persen menjadi 10,01 persen; dan share sektor Administrasi Pemerintahan relatif stagnan. Dengan demikian peluang kesempatan kerja terbuka luas untuk sektor Perdagangan, kemudian sektor Industri manufaktur dan sektor Konstruksi.

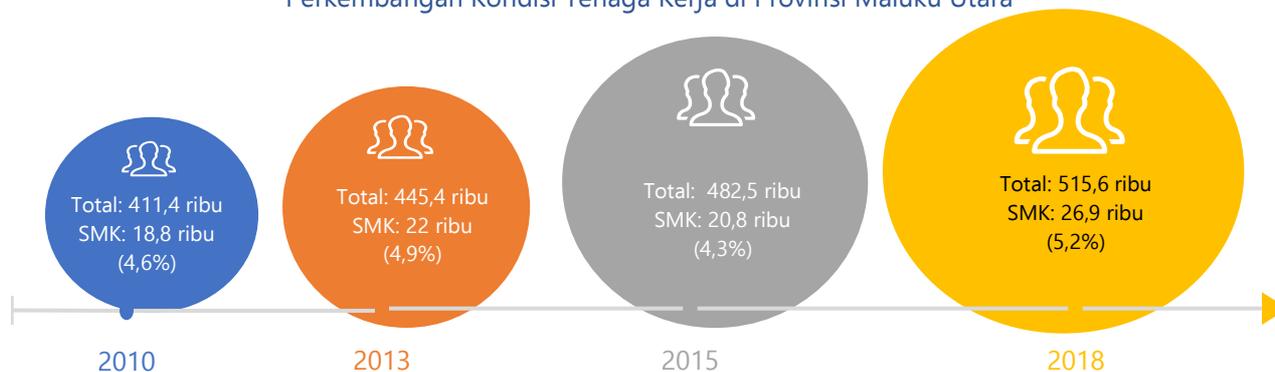
Gambar 2.2.259
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara hanya setengahnya pekerja lulusan SMK provinsi Maluku. Pada Tahun 2010 jumlah pekerja lulusan SMK di Maluku Utara sebanyak 18.829 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1.015 orang sehingga menjadi 26.945 orang pada tahun 2018.

Gambar 2.2.260
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Maluku Utara



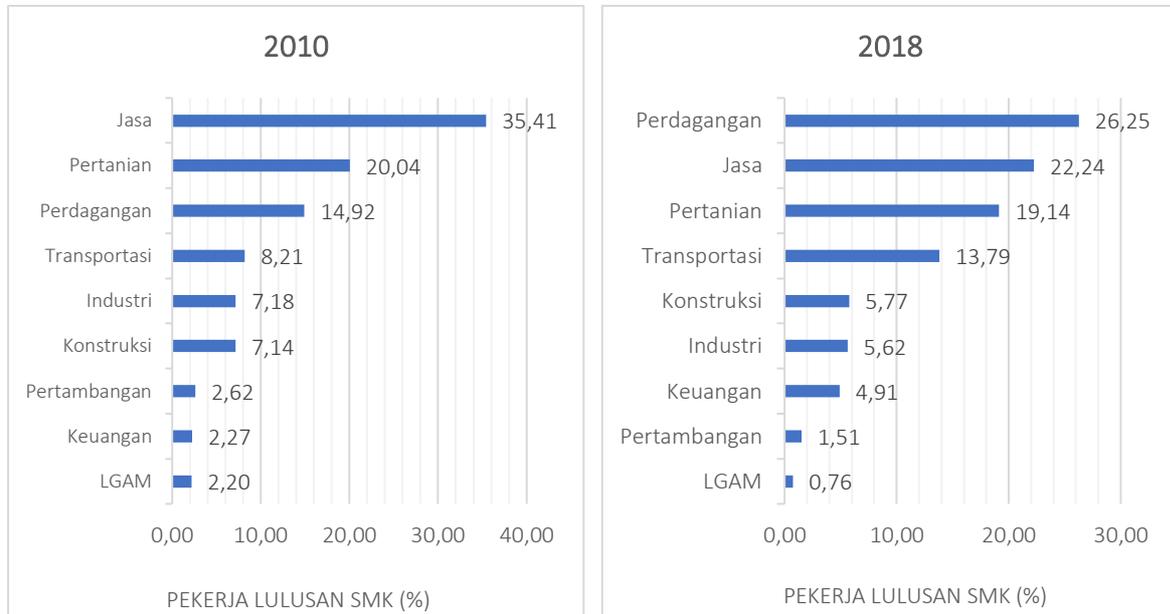
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (35,41 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara bekerja di sektor Jasa, kemudian 20,04 persen di sektor Pertanian, dan 14,92 persen di sektor Perdagangan. Di tahun 2018, struktur tenaga kerja lulusan SMK yang bekerja menurut sektor berbeda dengan struktur tahun 2010, yakni terbesar di sektor Perdagangan (26,25 persen), kemudian sektor Jasa (22,24 persen) dan sektor Pertanian (19,14 persen). Dengan struktur sebagaimana tersebut di atas, maka sektor yang memberikan kesempatan kerja yang cukup luas adalah di sektor Perdagangan. Sektor transportasi dan sektor Konstruksi juga merupakan sektor yang potensial dalam menyerap pekerja lulusan SMK di

povinsi Maluku Utara. Sementara itu sektor Jasa, dan sektor Pertanian bukan merupakan sektor andalan dalam penyerapan pekerja lulusan SMK.

Gambar 2.2.261

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)



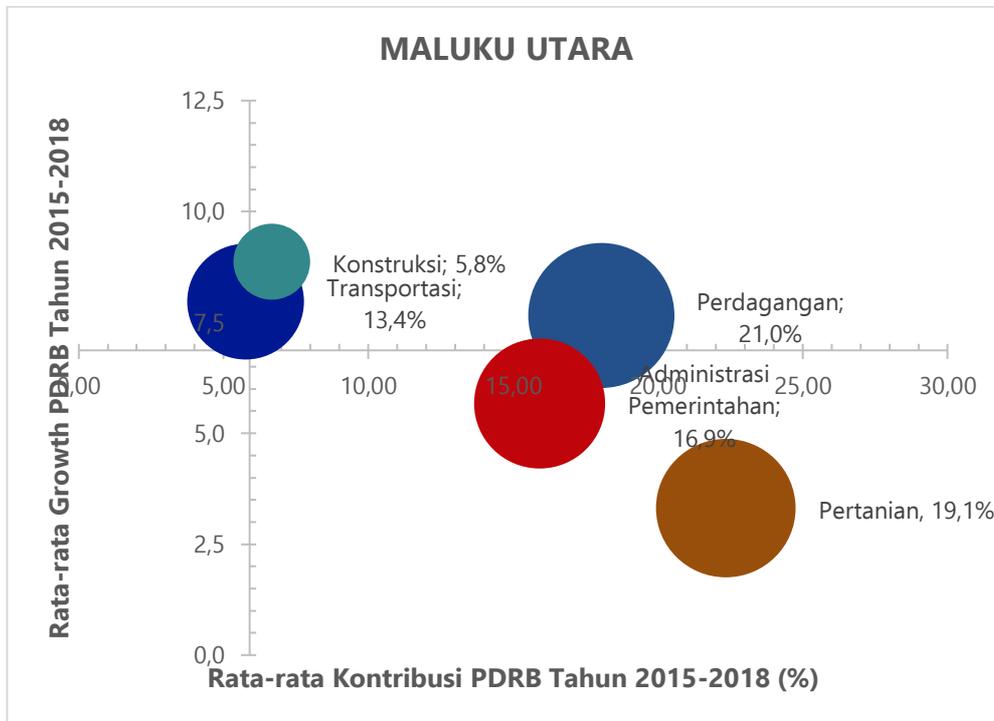
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (21,0 persen), pertanian (19,1 persen), administrasi pemerintahan (16,9 persen), transportasi (13,4 persen), dan konstruksi (5,8 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut relatif sama, kecuali sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan PDRB terendah dibandingkan empat sektor lainnya. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara, sektor pertanian dan perdagangan memiliki kontribusi PDRB yang relatif sama dan cukup besar.

Sektor perdagangan cenderung memiliki keunggulan dibandingkan empat sektor lainnya. Penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor perdagangan adalah tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya, dan sektor ini juga memiliki pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang relatif tinggi dibandingkan empat sektor lainnya.

Gambar 2.2.262

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Maluku Utara



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Seperempat dari jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar, yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan jabatan lainnya, dan cenderung meningkat dalam rentang waktu Tahun 2010 dan 2018. Beberapa jenis jabatan pekerja lulusan SMK di provinsi ini, yang persentasenya cenderung meningkat antara lain Tenaga Usaha Penjualan, Tata Usaha Tani, kebun dan sebagainya, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga Usaha Jasa. Sebaliknya jenis jabatan pekerja lulusan SMK di provinsi ini, yang persentasenya mengalami penurunan adalah jabatan professional dan tenaga kepemimpinan, bahkan untuk jabatan professional, persentasenya menurun secara cepat yaitu dari 15,40 persen (2010) menjadi 2,59 persen (2018).

Gambar 2.2.263

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)

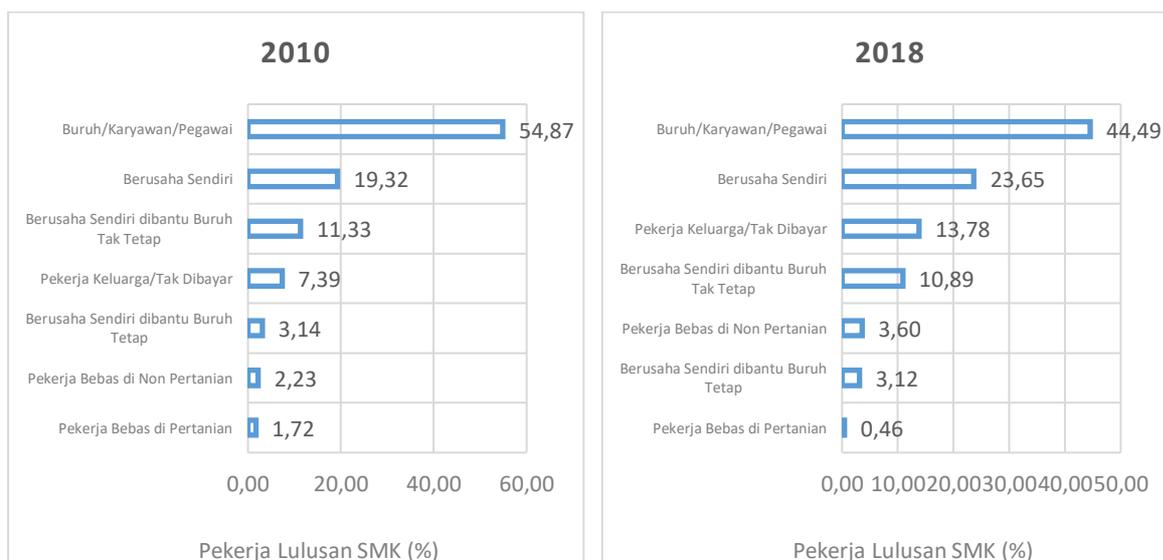


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pekerja lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pekerja lulusan SMK yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, persentasenya cenderung turun dalam rentang waktu Tahun 2010 dan 2018 yaitu dari 54,87 persen menjadi 44,49 persen. Demikian pula, yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap persentasenya relatif kecil dan sedikit menurun pada kurun waktu yang sama.

Gambar 2.2.264

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 dan 2018 (%)



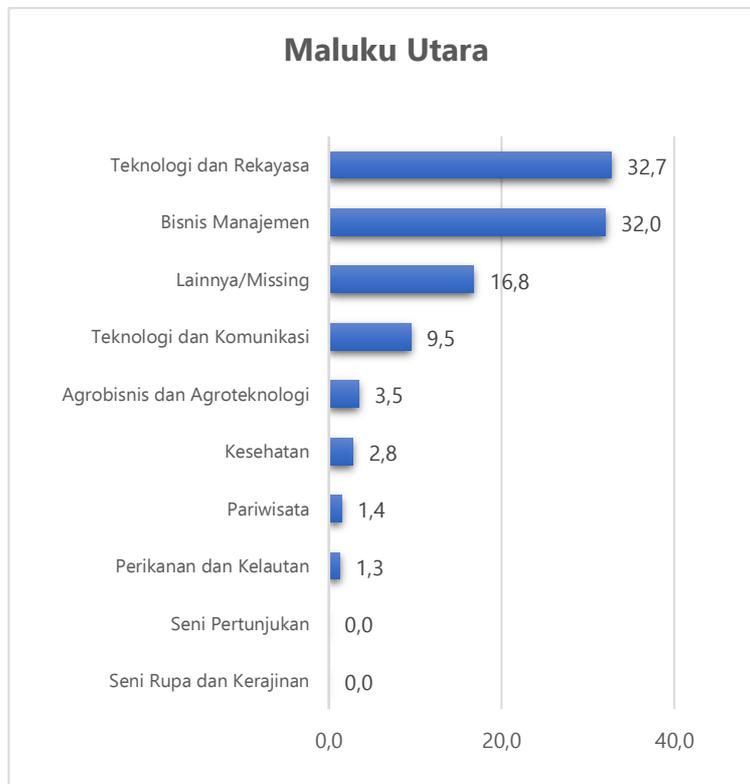
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Penurunan persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap, memengaruhi penurunan persentase pekerja lulusan

SMK yang bekerja di sektor formal. Sebaliknya persentase pekerja lulusan SMK yang bekerja di sektor informal semakin meningkat atau lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di provinsi Maluku Utara adalah pekerja informal.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 32,7 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 32,0 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Maluku di sektor pertanian, perdagangan, dan administrasi pemerintahan maka kedua bidang keahlian tersebut ada yang sesuai dengan potensi Provinsi Maluku Utara, yakni bisnis manajemen. Share tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian agrobisnis dan agroteknologi yang dapat menyokong sektor pertanian relatif minim yakni hanya sebesar 3,5persen.

Gambar 2.2.265
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.32
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	5,333	5,513	5,700	5,893	6,092	6,298
Pertambangan	413	419	425	431	437	444
Industri	1,667	1,835	2,020	2,223	2,447	2,693
LGAM	219	233	249	266	283	302
Konstruksi	1,662	1,777	1,900	2,031	2,172	2,323
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,717	8,420	9,188	10,026	10,940	11,938
Transportasi dan Komunikasi	3,971	4,243	4,533	4,843	5,175	5,529
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,480	1,654	1,849	2,066	2,309	2,581
Jasa Kemasyarakatan	6,209	6,434	6,666	6,906	7,156	7,414
Jumlah Tenaga Kerja SMK	28,671	30,528	32,529	34,686	37,012	39,521
Total Tenaga Kerja	528,914	543,922	559,824	576,327	593,061	610,195
Share Tenaga Kerja	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI



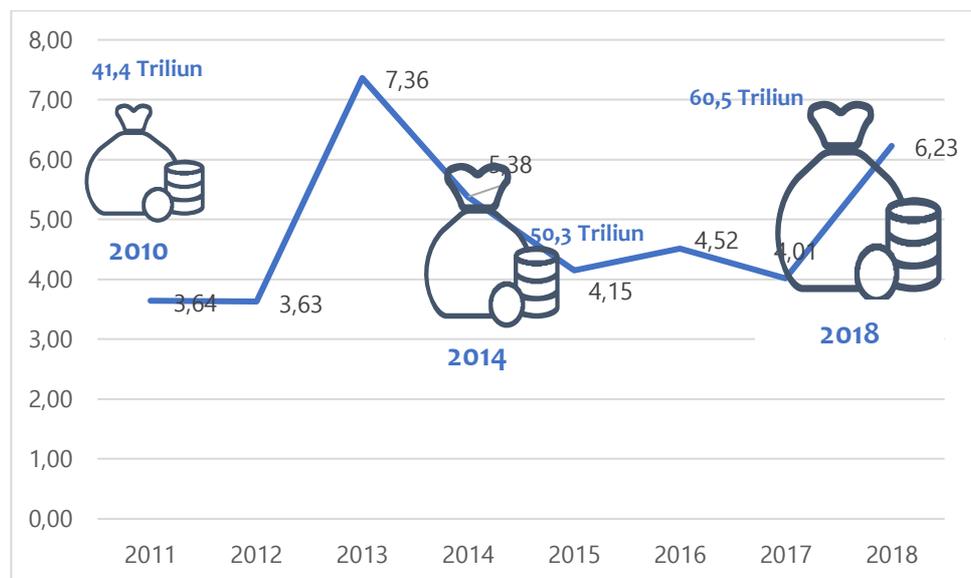
PAPUA BARAT

2.2.33. Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat merupakan provinsi di paling Barat Indonesia dan merupakan pemekaran dari provinsi Papua. Kegiatan ekonomi Papua Barat yang dicerminkan dari nilai PDRB jauh lebih kecil dibandingkan dengan provinsi Papua sebagai provinsi induknya. PDRB Papua Barat atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 41,36 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 60,45 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB sangat rendah yakni 4,87 persen per tahun.

Gambar 2.2.266

Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Barat



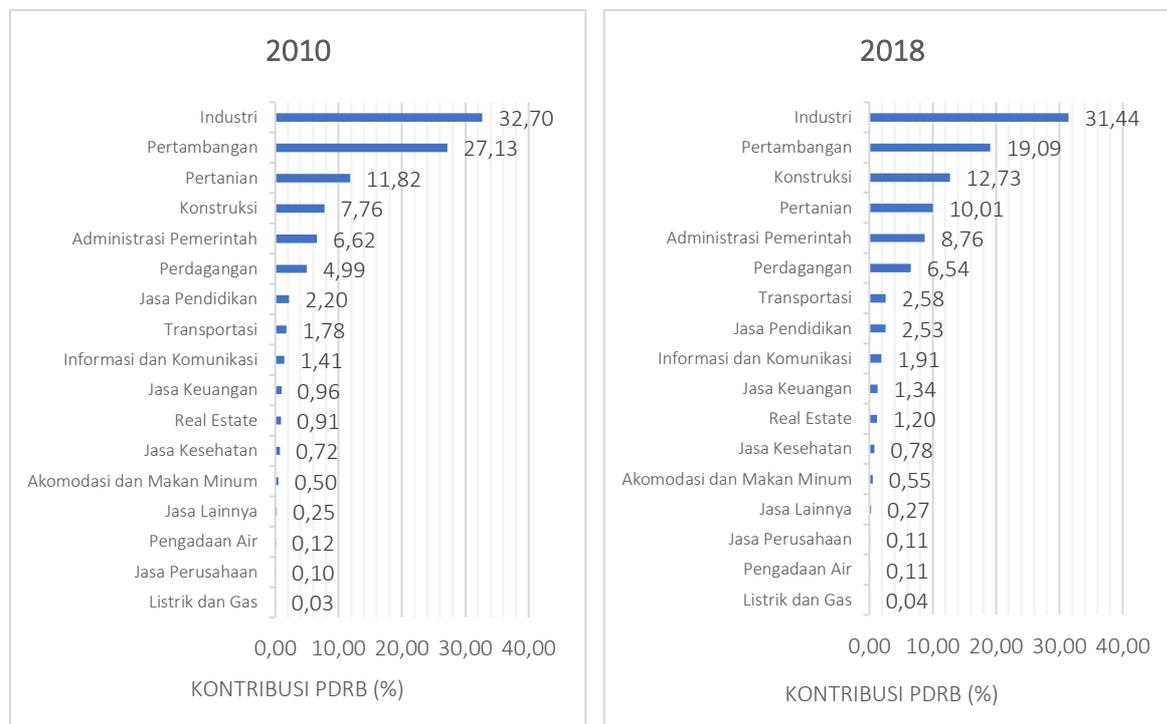
Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Berbeda dengan Struktur PDRB di wilayah Indonesia Timur yang kontribusi terbesarnya di sektor pertanian, struktur PDRB Papua Barat mempunyai kontribusi terbesar di sektor Industri Pengolahan, kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Konstruksi. Share sektor industri sebesar 31,44 persen, kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian 10,09 persen dan sektor Konstruksi 12,73 persen. Selama periode 2010-2018 tren share sektor industri dan sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan penurunan.

Penurunan share yang cukup drastis terjadi pada sektor Pertambangan yakni dari 27,13 persen menjadi 10,09 persen, sementara itu untuk industri Pengolahan hanya menurun sedikit. Kegiatan pembangunan sarana, parasaran dan infrastruktur di Papua Barat cukup berkembang dengan pesat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya sektor Konstruksi dari 7,76 persen menjadi 12,73 persen. Sektor lainnya yang memberikan sumbangan pada PDRB provinsi hanya satu digit dan tren share menunjukkan peningkatan yang cukup berarti adalah sektor Perdagangan dan Reparasi, dan sektor Administrasi Pemerintah, serta sektor Transportasi dan Pergudangan. Sektor yang potensial dalam membuka kesempatan kerja yang cukup besar adalah sektor Konstruksi, kemudian diikuti dengan sektor Perdagangan dan Reparasi.

Gambar 2.2.267

Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

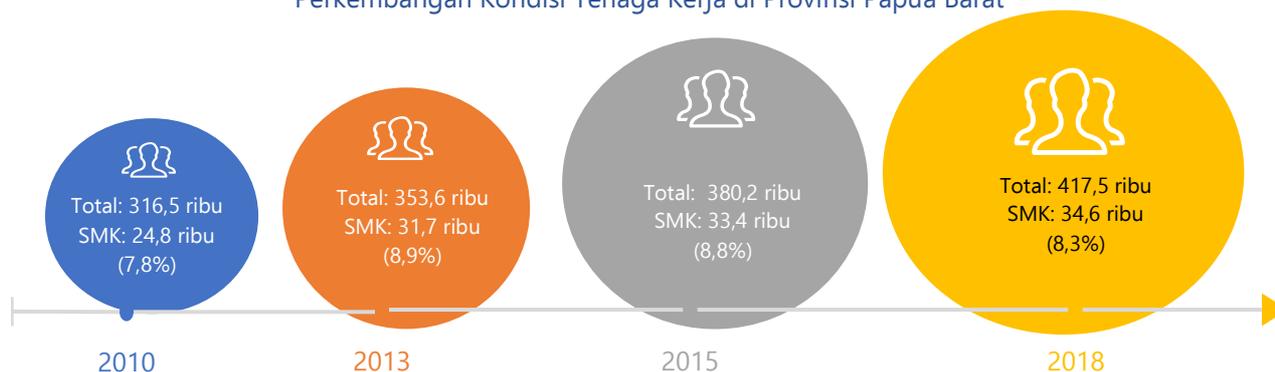


Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2010 sebanyak 24.758 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 1.233 orang sehingga menjadi 34.622 orang pada tahun 2018.

Gambar 4.2.268

Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Papua Barat



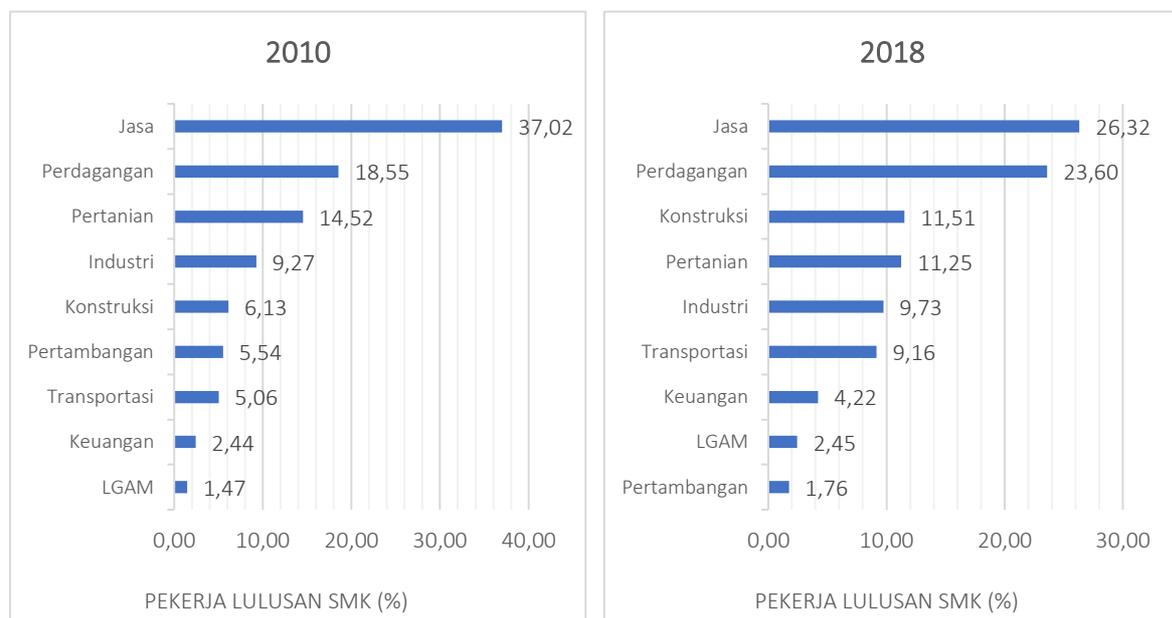
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010, sebagian besar (37,02 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua Barat bekerja di sektor Jasa, kemudian 18,55 persen di sektor Perdagangan, dan 14,52 persen di sektor Pertanian. Di tahun 2018, struktur tenaga kerja lulusan SMK menurut sektor mengalami perubahan mulai dari sektor urutan ketiga terbesar yang semula sektor Pertanian menjadi sektor Konstruksi, urutan keempat dari yang sebelumnya sektor Industri menjadi sektor Pertanian.

Selama periode 2010-2018 terjadi penurunan persentase lulusan SMK yang bekerja di sektor Jasa yang cukup tajam, kemudian juga di sektor Pertanian; dibarengi dengan peningkatan persentase lulusan SMK yang bekerja di sektor Perdagangan yang cukup tinggi, kemudian peningkatan juga terjadi pada sektor Konstruksi dan sektor Transportasi. Dari perubahan struktur ketenagakerjaan pekerjaan menurut sektor menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan yang cukup terbuka lebar adalah di sektor Perdagangan, kemudian sektor Konstruksi dan Transportasi. Sebaliknya agak sulit lulusan SMK untuk masuk sektor Jasa, dana tidak menarik bagi lulusan SMK untuk bekerja di sektor Pertanian. Sementara itu sektor industri Pengolahan kurang memberikan kesempatan kerja bagi lulusan SMK di provinsi Papua Barat.

Gambar 2.2.269

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

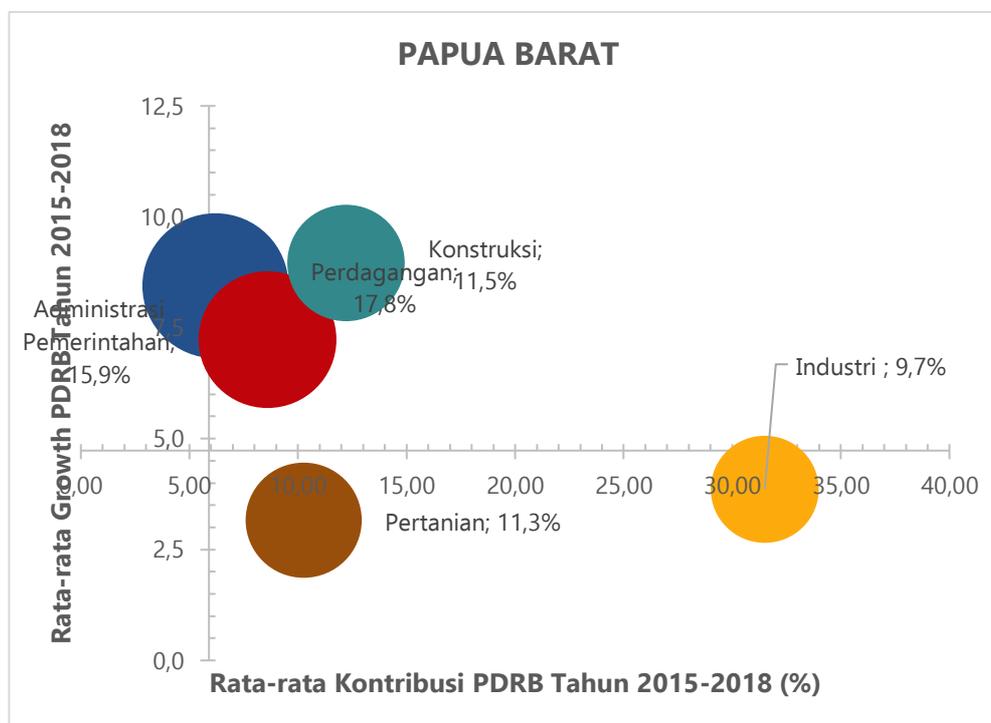


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua Barat, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah perdagangan (17,8 persen), administrasi pemerintahan (15,9 persen), konstruksi (11,5 persen), pertanian (11,3 persen), dan industri (9,7 persen). Pertumbuhan PDRB kelima sektor tersebut relatif sama, kecuali sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan PDRB terendah dibandingkan empat sektor lainnya. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua Barat, sektor pertanian dan perdagangan memiliki kontribusi PDRB yang relatif sama dan cukup besar. Sektor perdagangan cenderung memiliki keunggulan dibandingkan empat sektor lainnya. Penyerapan pekerja lulusan SMK di sektor perdagangan adalah tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya, dan sektor ini juga memiliki pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang relatif tinggi dibandingkan empat sektor lainnya.

Gambar 2.2.270

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua Barat



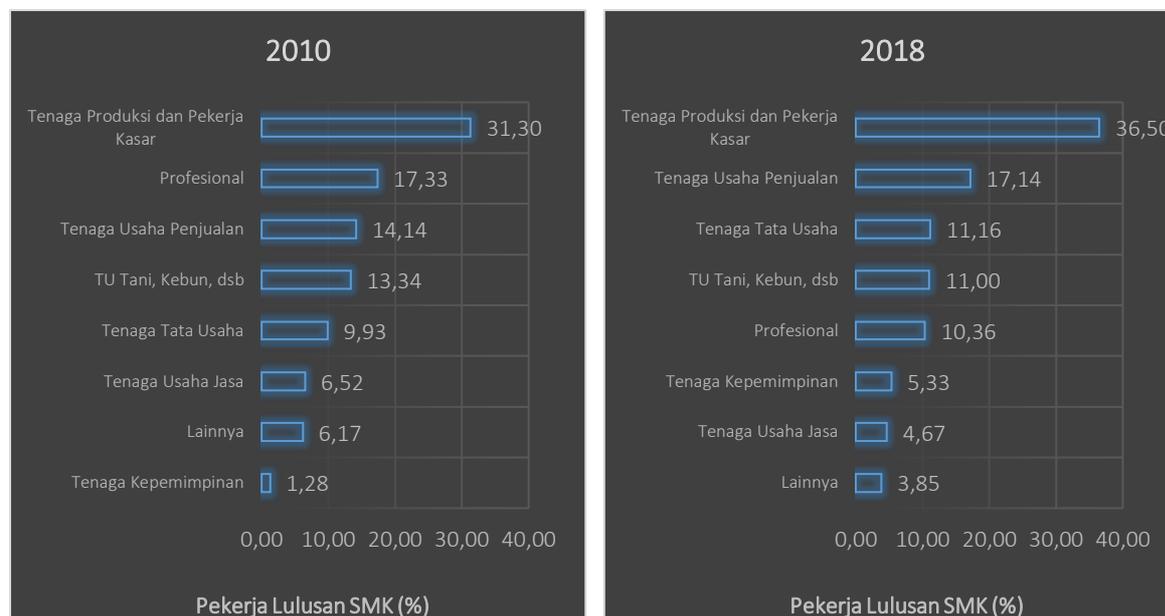
Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih lanjut, lebih dari sepertiga pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua Barat bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar. Pekerja lulusan SMK yang bekerja di jenis pekerjaan tersebut, persentasenya cenderung meningkat pada kurun waktu Tahun 2010 dan 2018 yaitu dari 21,30 persen menjadi 36,50 persen. Pekerja lulusan SMK sebagian besar bekerja sebagai tenaga Usaha antara lain Tenaga Usaha Penjualan, Tenaga Tata Usaha, Tata Usaha Tani kebun dan sebagainya, Tenaga Usaha Jasa.

Pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai professional, persentasenya cenderung turun yaitu dari 17,33 persen (2010) menjadi 10,38 persen (2018). Peluang kerja bagi lulusan SMK untuk menduduki posisi jabatan tinggi di provinsi ini cukup menjanjikan, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan yaitu dari 1,28 persen (2010) menjadi 5,33 persen (2018).

Gambar 2.2.271

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)

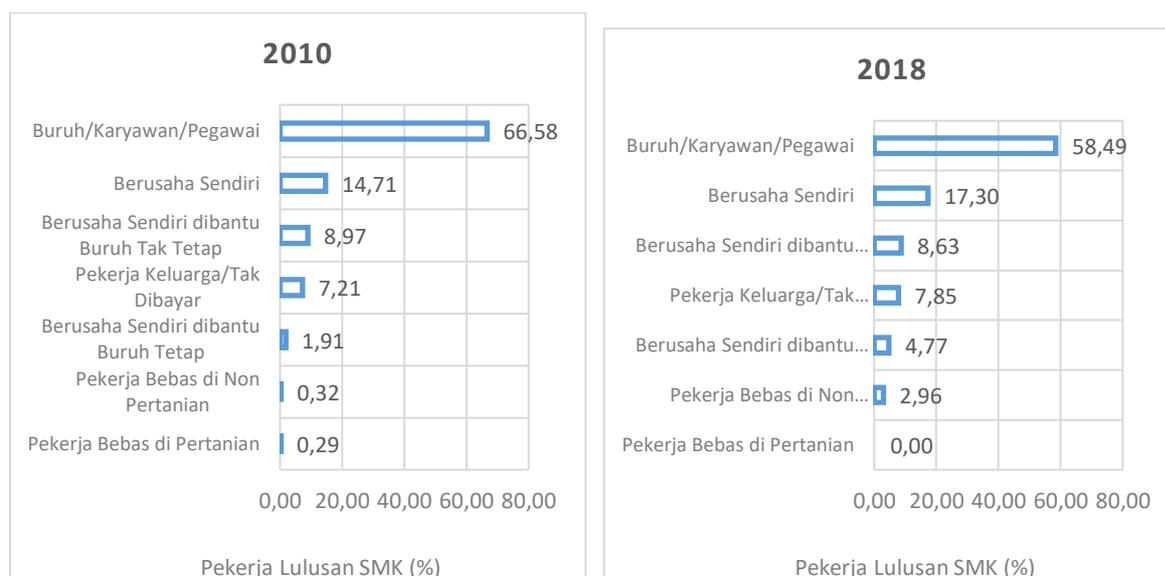


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua Barat berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, namun persentasenya cenderung semakin menurun yaitu dari 66,58 persen (2010) menjadi 58,49 persen (2018). Lulusan SMK di provinsi ini tampaknya semakin menyukai untuk berusaha mandiri, bukan lagi sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Gambar 2.2.272

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Barat Tahun 2010 dan 2018 (%)



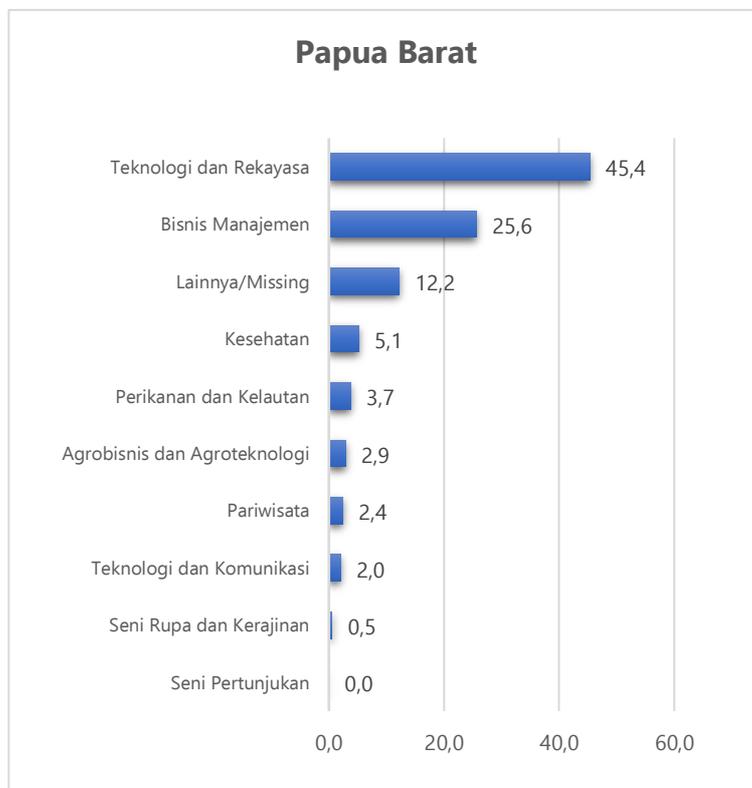
Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lulusan SMK yang memilih untuk berusaha sendiri, persentasenya cenderung meningkat, demikian pula yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap. Pekerja lulusan SMK sebagian besar atau lebih dari separuh,

adalah pekerja formal. Hal ini ditunjukkan oleh persentase yang berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan yang berusaha sendiri dibantu buruh tetap, lebih besar dibandingkan yang berstatus kerja informal.

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Papua Barat, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 45,4 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 25,6 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Maluku di sektor industri, pertambangan, dan konstruksi maka kedua bidang keahlian tersebut ada yang sesuai dengan potensi Provinsi Papua Barat, yakni teknologi dan rekayasa.

Gambar 2.2.273
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Papua Barat Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.33
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Papua Barat
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	3,992	4,090	4,190	4,293	4,399	4,507
Pertambangan	611	612	613	614	615	616
Industri	3,499	3,633	3,773	3,918	4,069	4,225
LGAM	874	902	931	961	992	1,023
Konstruksi	4,348	4,744	5,177	5,650	6,165	6,728
Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,851	9,587	10,384	11,247	12,183	13,196
Transportasi dan Komunikasi	3,429	3,705	4,003	4,326	4,674	5,051
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,597	1,746	1,908	2,086	2,280	2,493
Jasa Kemasyarakatan	9,490	9,885	10,297	10,725	11,172	11,637
Jumlah Tenaga Kerja SMK	36,689	38,904	41,277	43,821	46,549	49,476
Total Tenaga Kerja	430,774	445,272	460,327	475,557	491,347	507,734
Share Tenaga Kerja	8.5	8.7	9.0	9.2	9.5	9.7

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

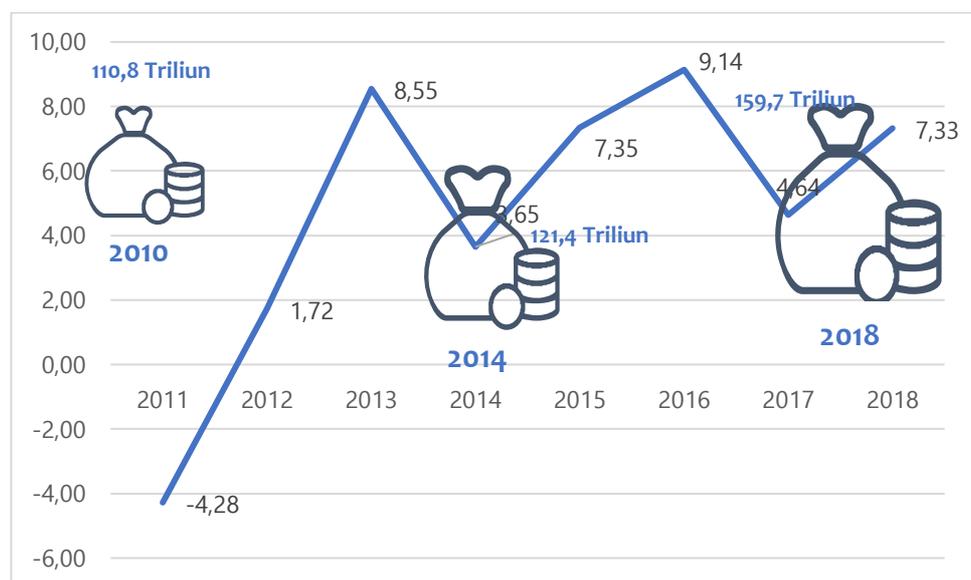


PAPUA

2.2.34. Provinsi Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang mempunyai perekonomian ditopang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian. Ketiga provinsi yang mempunyai share terbesar PDRB dari sektor Pertambangan dan penggalian adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Papua mempunyai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebesar 110 Triliun Rupiah di Tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 159.7 Triliun Rupiah pada Tahun 2018. PDRB Papua cukup besar namun masih kalah besar dengan Kalimantan Timur yakni 464,8 Trilyun di tahun 2018. Selama periode 2010-2018, rata-rata pertumbuhan PDRB Papua termasuk kategori rendah yakni 4,76 persen per tahun.

Gambar 2.2.274
Perkembangan Nilai PDRB dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua

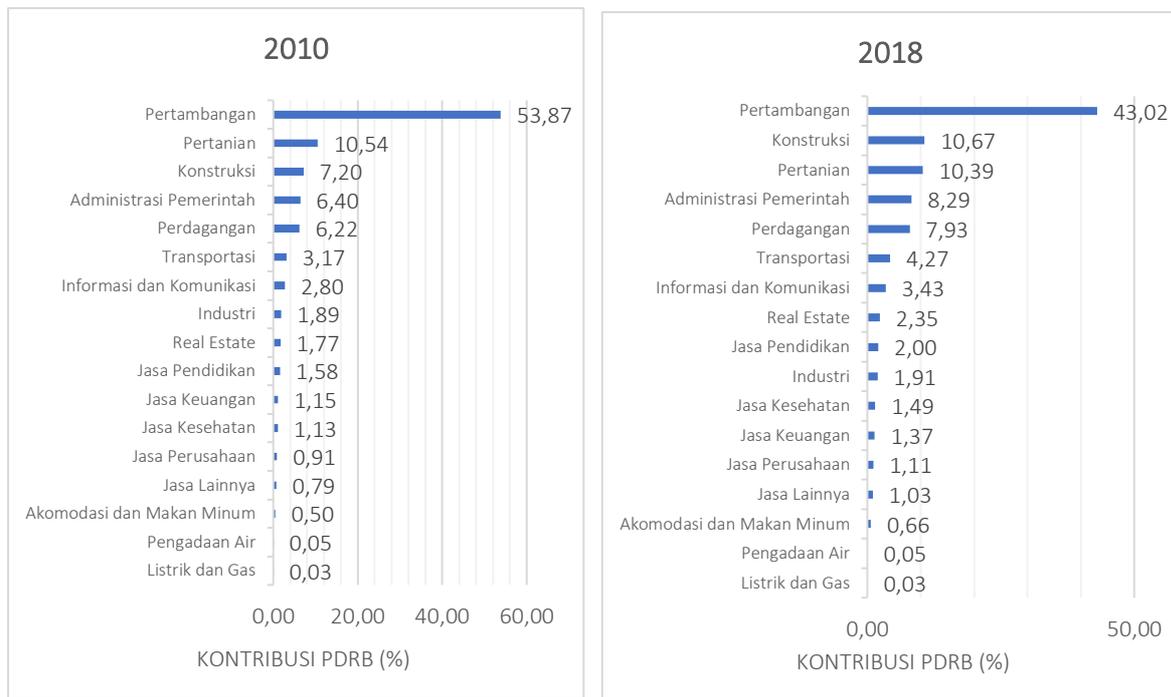


Sumber: BPS 2010-2018, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI

Share sektor Pertambangan dan Penggalian sangat besar yakni 43,02 persen, namun bila dibandingkan dengan Kalimantan Timur masih kalah besar yakni 46,81 persen. Sektor Pertanian di Papua memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 10,39 persen, sedangkan sektor Konstruksi sebesar 10,67 persen. Sektor-sektor lainnya hanya memberikan share pada PDRB tidak mencapai 2 digit. Selama periode 2010-2018 tren share sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan penurunan yang cukup tajam yakni dari 53,87 persen menjadi 43,02 persen. Penurunan share yang cukup drastis terjadi pada sektor Pertambangan yakni dari 27,13 persen menjadi 10,09 persen.

Sebaliknya tren share sektor Konstruksi menunjukkan peningkatan yang cukup besar yakni dari 7,20 persen menjadi 10,67 persen, dan relatif stabil share sektor Pertanian. Kegiatan pembangunan sarana, parasaran dan infrastruktur di Papua yang membuat sektor Konstruksi semakin meningkat sharenya. Sektor Perdagangan dan Reparasi juga menunjukkan tren share yang meningkat yakni dari 6,22 persen menjadi 7,93 persen, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Sektor yang potensial di Papua dalam membuka kesempatan kerja yang cukup besar adalah sektor Konstruksi, kemudian diikuti dengan sektor Perdagangan dan Reparasi.

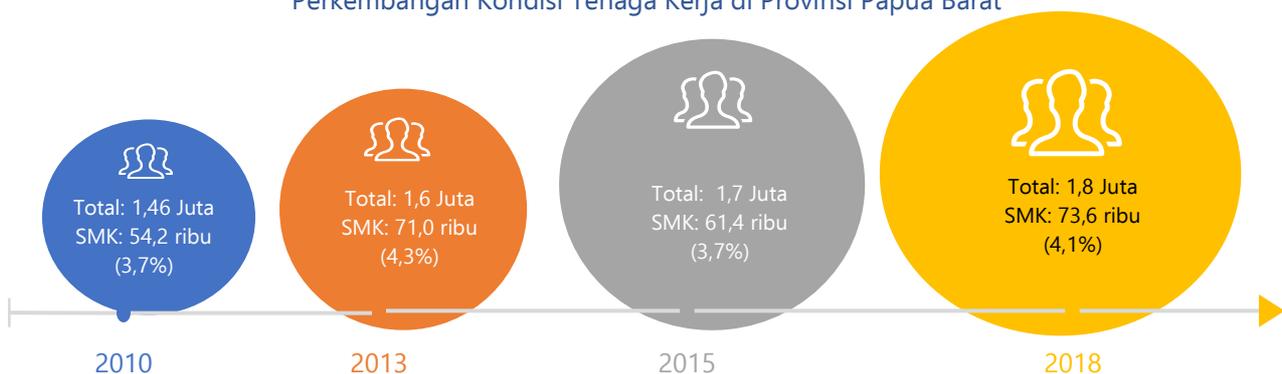
Gambar 2.2.275
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua
Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: BPS Provinsi Papua

Jumlah pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua sebanyak duakali lipat jumlahnya yang ada di Provinsi Papua Barat Barat. Pada Tahun 2010 jumlah pekerja lulusan SMK di Papua sebanyak 54.232 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 2.415 orang sehingga menjadi 73.548 orang pada tahun 2018. Namun, jika dilihat dari share tenaga kerja lulusan SMK terhadap total tenaga kerja, masih relatif rendah yakni 3,7 persen di tahun 2010 dan menjadi 4,1 persen di tahun 2018.

Gambar 2.2.276
Perkembangan Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Papua Barat



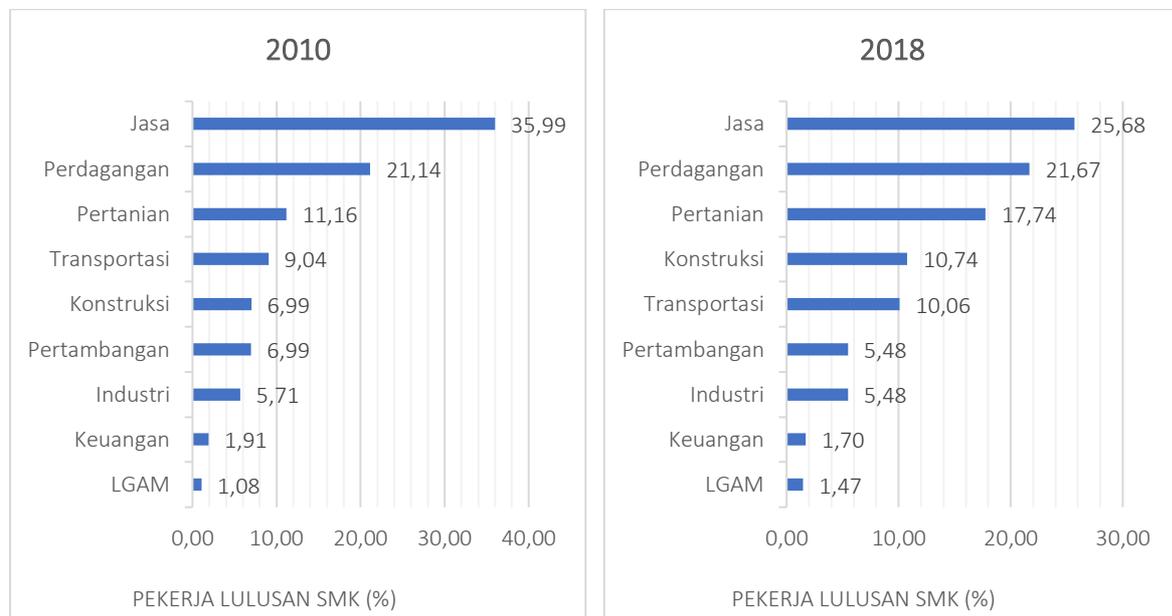
Sumber: Sakernas 2010-2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Pada Tahun 2010 struktur pekerja luluasan SMK di Papua menyerupai struktur yang ada di Papua Barat. Strukturnya untuk Papua, sebagian besar (35.99 persen) pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua bekerja di sektor Jasa, kemudian 21,14 persen di sektor Perdagangan, dan 14,52 persen di sektor Pertanian. Di tahun 2018, struktur tenaga kerja lulusan SMK di tiga sektor terbesar tidak mengalami perubahan.

Hanya besarnya saja yang mengalami penurunan untuk sektor Jasa dan mengalami peningkatan untuk sektor Pertanian bila dibandingkan dengan struktur tahun 2010. Pola ini agak berbeda dengan provinsi lain secara umum yang menempatkan lulusan SMK di sektor Pertanian dan sektor Perdagangan pada posisi kelompok tiga besar.

Tren persentase lulusan SMK di Papua untuk sektor Perdagangan tidak berubah, sementara untuk mereka yang di sektor Pertanian meningkat cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang menarik bagi lulusan SMK. Kemungkinannya disebabkan karena kegiatan sektor non pertanian kurang begitu berkembang di Papua sehingga tidak banyak pilihan pekerjaan untuk sektor non pertanian. Sektor-sektor lain yang potensi memberikan kesempatan kerja untuk lulusan SMK adalah sektor Konstruksi.

Gambar 2.2.277
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua
Tahun 2010 dan 2018 (%)

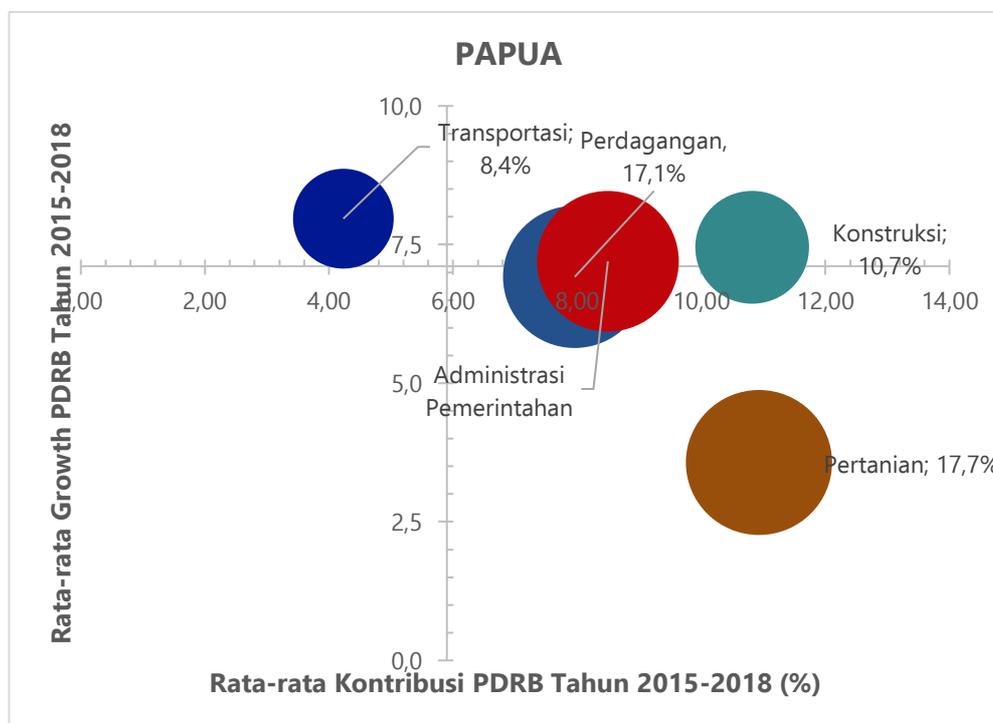


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua, lima (5) dari 17 sektor yang memiliki penyerapan tertinggi adalah pertanian, perdagangan, administrasi pemerintahan, konstruksi, dan transportasi. Pertumbuhan PDRB keempat sektor relatif sama, kecuali sektor transportasi yang memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi dibandingkan empat sektor lainnya. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Papua, keempat sektor relatif sama kecuali sektor transportasi yang memiliki kontribusi PDRB terendah dibandingkan empat sektor lainnya.

Gambar 2.2.278

Pemetaan Lima Sektor (dari 17 Sektor) Terbesar Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMK Tahun 2018 dengan Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi PDB Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua



Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Hampir sepertiga dari seluruh pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua bekerja sebagai tenaga produksi dan pekerja kasar, yang persentasenya sedikit meningkat pada kurun waktu Tahun 2010 dan 2018, yaitu dari 29,05 persen (2010) menjadi 32,32 persen (2018). Pekerja lulusan SMK di provinsi ini, yang persentasenya meningkat cukup cepat adalah yang bekerja pada jabatan Tata Usaha Tani, kebun dan sebagainya yaitu dari 10,52 persen (2010) menjadi 17,62 persen (2018).

Sebaliknya, yang persentasenya mengalami penurunan adalah jabatan professional yaitu dari 18,33 persen (2010) menjadi 8,91 persen (2018). Selain itu, pekerja lulusan SMK di Provinsi Papua punya peluang yang cukup baik untuk menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase pekerja lulusan SMK yang menduduki jabatan sebagai tenaga kepemimpinan yaitu dari 3,63 persen (2010) menjadi 4,47 persen (2018).

Gambar 2.2.279

Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Jabatan di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2018 (%)

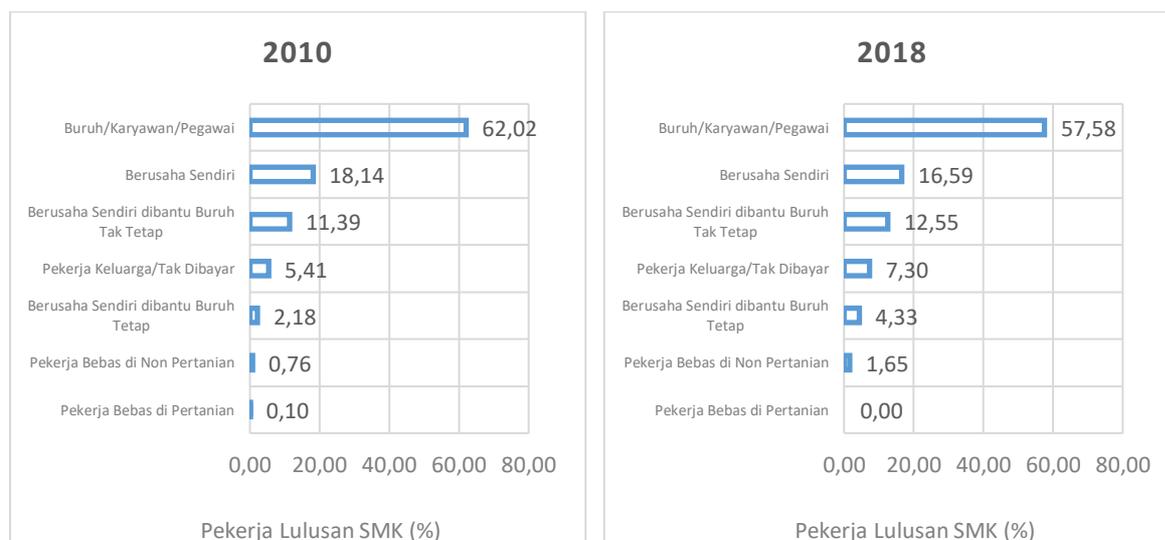


Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di provinsi Papua berstatus kerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Walaupun persentasenya cenderung menurun pada kurun waktu Tahun 2010 dan 2018, yaitu dari 62,02 persen (2010) menjadi 57,58 persen (2018), namun masih cukup tinggi dan merupakan persentase tertinggi dibandingkan status kerja lainnya. Di sisi lain, pekerja lulusan SMK yang berusaha sendiri dibantu dengan buruh tetap, persentasenya cenderung meningkat yaitu dari 2,18 persen (2010) menjadi 4,33 persen (2018). Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar atau lebih dari separuh pekerja lulusan SMK di provinsi Papua adalah pekerja formal.

Gambar 2.2.280

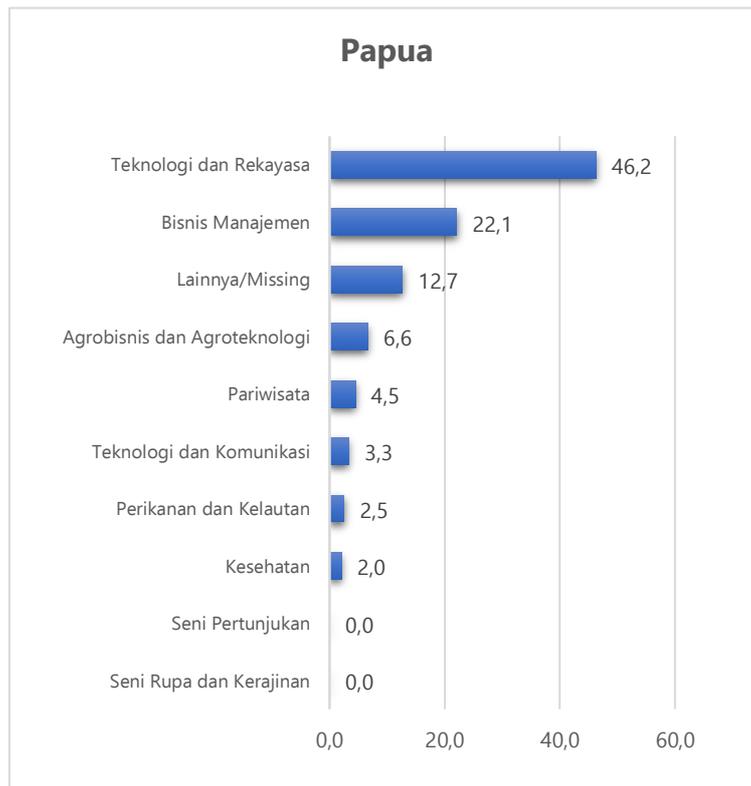
Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2018 (%)



Sumber: Sakernas Agustus 2010 dan 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Diantara tenaga kerja lulusan SMK di Provinsi Papua, lulusan SMK yang memiliki bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa paling besar proporsinya yakni 46,2 persen, diikuti dengan lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian Bisnis Manajemen yakni sebesar 22,1 persen. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Maluku di sektor pertambangan, konstruksi, dan pertanian maka kedua bidang keahlian tersebut ada yang sesuai dengan potensi Provinsi Papua, yakni teknologi dan rekayasa. Di sisi lain, tenaga kerja lulusan SMK yang memiliki bidang keahlian pertanian relatif masih sedikit yakni 6,6 persen.

Gambar 2.2.280
 Distribusi Pekerja Lulusan SMK Menurut Bidang Keahlian di Provinsi Papua
 Tahun 2018 (%)



Sumber: Sakernas 2018, diolah Lembaga Demografi FEB UI

Tabel 2.2.34
Proyeksi Permintaan Tenaga Kerja Lulusan SMK di Provinsi Papua
Tahun 2019-2024

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	13,566	14,106	14,668	15,252	15,860	16,492
Pertambangan	4,072	4,115	4,160	4,205	4,250	4,296
Industri	4,196	4,373	4,557	4,749	4,948	5,157
LGAM	1,119	1,161	1,205	1,250	1,297	1,346
Konstruksi	8,520	9,191	9,915	10,696	11,538	12,446
Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,200	18,565	20,038	21,629	23,345	25,198
Transportasi dan Komunikasi	7,910	8,453	9,034	9,655	10,318	11,027
Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	1,350	1,461	1,581	1,711	1,851	2,003
Jasa Kemasyarakatan	19,690	20,527	21,400	22,310	23,259	24,247
Jumlah Tenaga Kerja SMK	77,622	81,953	86,558	91,456	96,668	102,214
Total Tenaga Kerja	1,846,101	1,894,063	1,943,106	1,993,690	2,045,430	2,098,516
Share Tenaga Kerja	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.9

Sumber: BPS, diolah Lembaga Demografi FEB UI